Islam merupakan salah satu agama yang memiliki penganut besar di dunia, yang meliputi benua Amerika, Afrika, Asia, Australia, dan Eropa. Eksistensi dan ketangguhan Islam terbukti sejak awal hadirnya agama ini di bumi jazirah Arab. Arab yang awalnya hanya menjadi daerah yang diabaikan dan tidak begitu diperhatikan oleh dua penguasa dunia kala itu yakni; Romawi, dan Persia. berubah drastis sejak datangnya Islam dan memberikan kemajuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga daerah itu menjadi diperhatikan. Islam juga masuk ke bumi Nusantara melalui berbagai jalur dan media menurut pakar sejarah, Islam hadir di bumi Nusantara ada yang menyatakan pada abad ke 7 dan adapula yang menyatakan pada abad ke 13. Tentunya masing-masing dari mereka memiliki klaim yang kuat baik dari segi sumber literatur-literatur buku maupun bukti artefak yang nyata.

Semakin hari isu-isu mengenai kajian keislaman semakin banyak dan kompleks mulai dari aspek identitas politik, pendidikan, sosial, ekonomi, teknologi, dan berbagai masalah-masalah yang muncul seiring dengan kemajuan zaman yang menggelobal. Akan tetapi Islam menawarkan juga berbagai solusinya dalam al-Qur'an dan Hadist. Tinggal bagaimana manusia memecahkan dan menjawab tantangan tersebut sesuai dengan aturan Qur'an dan Hadist serta hukum yang ada di Indonesia, sebab kita hidup di Indonesia tentunya juga tidak boleh mengabaikan hukum dan aturan yang berkembang dan menjadi warga negara yang baik. Dalam buku kecil ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari buku kami yang terdahulu yang berjudul Islam Dimensional.

Akan tetapi dalam pembahasan kali ini lebih kami bagi dan fokuskan pada 3 aspek besar yakni; politik Islam, Pendidikan, dan Islam Sosial, yang terdiri dari 12 bab dan setiap diakhir kajian kami berikan artikel pendek (short article). Sebagai refleksi singkat sebelum memasuki kajian yang baru. Sehingga dengan artikel pendek itu pembaca diharapkan dapat memahami tulisan-tulisan yang sebelumnya.

IDEA press yogyakarta
Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN:978-623-7085-78-2
Luqman Al Hakim Isu Isu Islam Kontemporer (Politik Islam, Pendidikan, dan Islam Sosial) IDEA press yogyakarta

Luqman Al Hakim

IDEA press yogyakarta

Isu Isu Islam Kontemporer

(Politik Islam, Pendidikan, dan Islam Sosial)

Luqman Al Hakim

ISU-ISU ISLAM KONTEMPORER

Politik Islam, Pendidikan, dan Islam Sosial

PENGANTAR PENULIS

Islam merupakan salah satu agama yang memiliki penganut besar di dunia, yang meliputi benua Amerika, Afrika, Asia, Australia, dan Eropa. Eksistensi dan ketangguhan Islam terbukti sejak awal hadirnya agama ini di bumi jazirah Arab. Arab yang awalnya hanya menjadi daerah yang diabaikan dan tidak begitu diperhatikan oleh dua penguasa dunia kala itu yakni; Romawi, dan Persia. berubah drastis sejak datangnya Islam dan memberikan kemajuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga daerah itu menjadi diperhatikan. Islam juga masuk ke bumi Nusantara melalui berbagai jalur dan media menurut pakar sejarah, Islam hadir di bumi Nusantara ada yang menyatakan pada abad ke 7 dan adapula yang menyatakan pada abad ke 13. Tentunya masing-masing dari mereka memiliki klaim yang kuat baik dari segi sumber literatur-literatur buku maupun bukti artefak yang nyata.

Semakin hari isu-isu mengenai kajian keislaman semakin banyak dan kompleks mulai dari aspek identitas politik, pendidikan, sosial, ekonomi, teknologi, dan berbagai masalah-masalah yang muncul seiring dengan kemajuan zaman yang menggelobal. Akan tetapi Islam menawarkan juga berbagai solusinya dalam al-Qur'an dan Hadist. Tinggal bagaimana manusia memecahkan dan menjawab tantangan tersebut sesuai dengan aturan Qur'an dan Hadist serta hukum yang ada di Indonesia, sebab kita hidup di Indonesia tentunya juga tidak boleh mengabaikan hukum dan aturan yang berkembang dan menjadi warga negara yang baik. Dalam buku kecil ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari buku kami yang terdahulu yang berjudul Islam Dimensional.

Akan tetapi dalam pembahasan kali ini lebih kami bagi dan fokuskan pada 3 aspek besar yakni; politik Islam, Pendidikan, dan Islam Sosial, yang terdiri dari 12 bab dan setiap diakhir kajian kami berikan artikel pendek (*short article*). Sebagai refleksi singkat sebelum memasuki kajian yang baru. Sehingga dengan artikel pendek itu pembaca diharapkan dapat memahami tulisan-tulisan yang sebelumnya. Tidak lupa kami juga berterima kasih pertama kepada Allah SWT yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tulisan-tulisan kecil ini, dan memberikan kesempatan untuk menuntaskannya meskipun masih banyak kekurangannya, kepada orang tua kami yang selalu mendukung dan mendoakan agar tulisan kecil ini dapat terselesaikan, penerbit yang telah menerbitkan tulisan kecil kami, dan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah berkenan memberikan kata sambutan dalam tulisan kecil ini. Akhirul kalam, semoga tulisan kecil ini dapat memberikan kemanfaatan dan hal-hal yang baik.

Jember, 31 Agustus 2020

Luqman Al Hakim

PENGANTAR DEKAN

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora (FUAH) menyambut dengan gembira atas penerbitan buku yang dilakukan oleh saudara Luqman Al Hakim, yang berjudul *Isu-Isu Islam Kontemporer (Politik, Pendidikan, dan Sosial)*. Kehadiran buku ini sangat tepat waktu dan pada momen yang sangat strategis, yakni dikala yang bersangkutan menuntaskan studi sarjana strata 1 di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember, selain itu momennya juga tepat sebab semua kewajiban akademik yang ditempuh yang bersangkutan mulai dari semester 1 sampai 8 telah dilaksanakan dengan baik, yang bersangkutan juga telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang akademisi seperti mempublikasi; artikel, buku, makalah-makalah, mengikuti seminar ilmiah, dan *chapter book* yang sudah diselesaikannya selama menempuh pembelajaran di fakultas ini.

Karena alasan yang demikian saya selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora menyambut positif atas langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan, untuk menerbitkan hasil tulisan yang diijtihadkan sebagai langkah kemajuan dalam dunia akademisi. Diharapkan selanjutnya akan ada terobosan tulisan-tulisan dan riset baru yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Akhir kata, saya mengapresiasi penerbitan buku ini dan merekomendasikan untuk membacanya Semoga buku ini memberikan sumbangsih baik bagi yang bersangkutan dan yang membacanya.

Jember, 02 September 2020

Dekan FUAH IAIN Jember

Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.

DAFTAR ISI

KAJIAN ISLAM SOSIAL

kajian politik islam

BAB 1

ISLAM DAN POLITIK KEKUASAAN

Politik merupakan sebuah sistem dalam suatu organisasi dan pemerintahan, pada akhirnya dengan adanya politik dapat memberikan menejemen dalam ritme organisasi dan suatu pemerintahan. Politik yang baik akan memberikan nuansa yang baik sehingga akan terjadi kritik dalam pemerintahan atau organisasi (*Self Critical*) serta menjadikan kemajuan dalam organisasi dan pemerintahan. Politik yang baik akan melahirkan gagasan kebebasan menyuarakan pendapat dan menghindari mabuk kemenangan dalam demokrasi, dalam sistem demokrasi ada kemenangan dan kekalahan sistem demokrasi dapat digambarkan sebagai pendulum biner yang bekerja di atas prinsip *stick-and-carrots* (hukuman dan ganjaran). Kemenangan sebuah parpol dalam pemilu, dengan begitu bukanlah sebuah kebetulan atau kecelakaan. Terdapat rasionalitas publik yang memungkinkan terjadinya kemengan pihak parpol tertentu atas dasar pilihan-pilihan yang rasional, setidaknya "kuasi" rasional.[1]

Islam memaknai politik sebagai ujung tombak peradaban yang dalam sejarahnya menjadi patron bagi ulama dalam mengambangkan ilmu pengetahuan sehingga menjadi peradaban ilmu. Maka dari itu kondisi dan kualitas politik Islamlah yang juga melemahkan ilmu pengetahuan dan berbagai bidang kehidupan umat Islam.

[1] Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik* (Malang: Intrans Publishing, 2017), 10.

Bagaimanakah kondisi politik yang ada? Kondisi yang ada memiliki aneka warna yang beragam dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.[2]

Sebaliknya sistem perpolitikan yang buruk akan melahirkan otoritarianisme dan keresahan dari segala aspek seperti ekonomi, keamanan, agama, sosial, dan kesehatan. Selain itu dengan rusaknya sistem perpolitikan suatu organisasi dan pemerintahan akan melahirkan mental (KKN) korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengapa muncul KKN karena rusaknya sistem politik? Jawabannya hanya satu yakni rusaknya moralitas sebab moral yang mereka miliki sudah tidak produktif demi kemajuan bersama hanya mementingkan kantong dan kesenangan individual saja sehingga menjadi lunturnya kesalehan dan kepercayaan publik yang ada. Bahkan kini selain rusaknya moralitas yang disebabkan rusaknya sistem politik masyarakat Indonesia khususnya yang muslim juga mengalami kesenjangan sosial bahkan saat ini banyak sekali kita jumpai fakta-fakta perilaku kebringasan sosial. Bahkan sudah dianggap biasa di negara yang Pancasilais ini, di negara yang masyarakatnya terkenal agamis ini.

Munculnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara *aghniya* (kaya) dan *fuqara'* (fakir), antara yang pintar dan yang lemah yang kini kian menganga jurang kesenjangannya. Bahkan gara-gara menginjak pohon singkong orang menjadi gelap mata, dan mati nuraninya, gawat melebihi harimau *gendeng.* Itu menjadi bukti bahwa orang-orang dilapisan tertentu mengalami frustasi yang membakar emosi. Maka marilah kita berbenah agar menjadi bangsa yang santun, arif, dan bijaksana dalam menyikapi problem yang marak kini.[3]

A. Politik Barat VS Politik ala Islam

Dalam sejarahnya gagasan politik Barat memiliki masa yang panjang. Seperti halnya Plato dan Aristoteles, negara menurut Plato didasarkan pada prinsip larangan atau kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk uang atau harta, dan keluarga. Sedangkan negara

[2] Hamid Fahmy Zarkasyi, *Minhaj Berislam, dari Ritual hingga Intelektual* (Jakarta: INSIST, 2020), 275.

[3] Mohammad Amien Rais, *Demi Kepentingan Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 76.

menurut Aristoteles ibarat tubuh manusia yang lahir dalam bentuk sederhana kemudian berkembang menjadi kuat dan sederhana, setelah itu hancur dan tenggelam dalam sejarah. Negara terbentuk karena manusia yang membentuknya, sebab manusia ialah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, hubungan ketergantungan antara individu dan masyarakat. Sedangkan penggerak dari maju dan mundurnya suatu negara ialah sistem politik. di zaman ini sendiri Barat menganut sistem politik yang berorientasi kapitalisme yang mula awalnya di zaman pertengahan menganut sistem teokrasi[4].[5]

Di zaman pertengahan Barat memiliki tokoh politik seperti Machiaveli, Jhon Locke, Montesquieu, JJ Rosseau, Thomas Hobbes, Fredrich Hegel, dan lain lain. Akan tetapi dalam tulisan ini penulis tidak membahas semua sebab cakupannya begitu luas, penulis hanya membahas sedikit saja oleh sebab itu penulis menyadari kurangnya dimensi aspek politik dalam tulisan ini. Jika kita mendengar nama Machiaveli, kebanyakan orang yang awam dalam masalah politik menyimpulkan bahwa nama itu setara dengan berandal atau belis. Lord Macaulay (1800-1859) misalnya, seorang sejarawan, politisi, dan penyair Inggris pernah mengatakan dalam tulisannya, *Essays Contributed to the Edinburgh Review* (1843); "*Out of his surname they have coined an ephitet for a kneave, and out of his Christianname a synonym for a devil*". Kalaupun bukan hinaan bagi Machiaveli, Victor Hugo (1802-1885), seorang penyair asal Prancis, pernah mengatakan secara datar tanpa apreasiasi apapun mengenai dirinya. Demikian kata Hugo dalam karyanya, *Les Misreables;*

> *Machiaveli is not an evil genius, nor a cowardly and miserable writer. He is nothing but the fact. And he is not merely the Italian*

---

[4] Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama, hal ini banyak terjadi di Eropa di masa abad pertengahan atau *dark age* greja memegang legitimasi penuh di mana yang bertentangan dengan aturan greja akan disalahkan dan bisa-bisa akan dihukum mati. Di zaman kini juga ada yang demikian seperti Republik Islam Iran, Vatikan dan negara-negara yang masih menerapkan di mana legitimasi agama di atas segala-galanya akan tetapi teokrasi zaman kini lebih manusuawi dibanding dengan teokrasi di zaman dahulu.

[5] Yudi Widagdo, Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno (*Jurnal Diversi,* Vol. 1, No. 1, 2015), 55.

fact, he is European fact, the fact of the sixteenth century. He seems hideous and is so. In presence of the moral idea of the nineteenth.

Dibalik sikap yang demikian atas Machiaveli ada juga sifat simpatik yang dialamatkan padanya salah satunya berasal dari Farancis Bacon (1516-1626) yang secara positif menyatakan Machiaveli dalam bukunya *The Advancement of Learning* (1605); *We are much beholden to Machiaveli and others, that write what men do, and not what they out to do*". Pemikiran Machiaveli ialah pentingnya menekankan unsur kekuasaan dalam negara. Pemerintah tidak lebih dari upaya untuk memperoleh kekuasaan dan melaksanakan kekuasaan tersebut intinya bahwa untuk mencapai tujuan negara, negara tidak usaha memperhatikan moral, boleh tidak jujur, boleh ingkar janji, dan mendustai ajaran agama asal semua itu digunakan untuk mempertahankan dan memperoleh kekuasaan.[6]

Kini selepas masa *dark age* Eropa lebih menggunakan politik sekular demokrasi. Di mana nilai aspek-aspek agama dikesampingkan dalam nuansa perpolitikan sehingga apa yang dianggap oleh mayoritas benar maka benar meskipun hal itu menyalahi kaidah dalam agama itu sendiri, mereka juga menyebarkan gagasan politik mereka salah satunya dengan penjajahan sehingga ide politik mereka menyebar di bumi ini. Mereka juga menyerukan yang namanya pemilu (Pemilihan Umum), akan tetapi tidak semua masyarakat dunia sama kapasitasnya dalam memaknai pemilu dalam realitasnya banyak terjadi kemiskinan pemahaman apakah itu Pemilihan Umum sehingga efeknya cukup besar bagi kemajuan bangsa dan negara tersebut.

Sebab yang namanya pemilu mencerminkan kualitas pemilihnya juga apabila disana banyak orang yang peka dan cerdas maka selamatlah bangsa dan negara tersebut akan tetapi apabila pemilihnya kurang pemahaman dan kurang peka akan keadaan bangsa itu maka raiblah masa depan bangsa itu. Pilihan politik bukan karena dorongan sesaat pragmatisme, hedonisme, dan narasisme sempit. Sebab terlalu berisiko untuk menyandarkan kualitas

---

[6] E Fernando M. Manulang, Nicollo Machiavelli: Sang Belis Politik?Suatu Refleksi dan Kritik Filosofis terhadap Gagasan Politik Machiaveli Dalam *Il Principe* (*Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Tahun ke- 40, No. 4, 2010), 517.

demokrasi hanya kepada segelintir elit politik yang belum tentu memiliki integritas serta kapasitas menyelesaikan persoalan bangsa.[7] Secara tidak langsung penulis juga mengkritisi akan prosesi pemilu ini secara tidak langsung dalam penilaian suara antara orang pintar dan bodoh sama 1 dihitung 1 dan antara orang alim dan bejad sama 1 dihitung 1 oleh sebab itu penulis menyatalan bahwa yang demikian tidak adil sebab seharusnya mereka memiliki aspek yang lebih tinggi dibanding orang bodoh dan bejad.

Akan tetapi apabila diseret dalam ranah Islam tentu ada nilai dan aspek yang berbeda di mana antara orang alim dan bejad beda, antara orang pintar dan bodoh beda. Karena adil menurut Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya bukan sama rata sama rasa. Sebab sama rasa sama rata belum tentu menjadi cerminan kebutuhan yang memang dibutuhkan secara *universal*. Politik dalam Islam menggunakan *Syura'* (seperangkat dewan yang dipilih dan ditugasi untuk memilih pemimpin). Tentunya mereka orang yang ahli, pintar, dan alim sehingga apa yang mereka usahakan akan berefek bagi negara suara mereka berbeda dengan suara masyarakat pada umumnya di mana mereka merupakan perangkat kepercayaan negara.

Apabila ditinjau di zaman ini sendiri potret kebobrokan perpolitikan semakin jelas apalagi dengan maraknya sistem *money politic, black campaign,* serta aneka-aneka perkara politik yang tidak jelas serta tidak kunjung usai. Umat Islam sendiri dapat terkoyak-koyak oleh berbagai perilaku kolektif yang cenderung mengarah pada konflik yang disebabkan politik hitam ini. Beberapa dekade yang lalu umat Islam berada dalam kubu yang berlawanan, sebab mereka tidak ada persamaan pandangan dengan kata lain mereka telah kehilangan identitas politik. akan tetapi apabila mereka mau berkaca pada Al-Qur'an, hadist, dan sejarah Islam sebenarnya sudah memiliki tatanan politik yang baku mulai dari Rasulullah hingga era dinasti-dinasti besar Islam.

Jadi seharusnya mereka tidak hingar bingar ikut arus politik Barat dan menciderai nuansa politik ala Islam itu sendiri. Dalam

---

[7] Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik* (Malang: Intrans Publishing, 2017, 27.

politik Islam sendiri juga mengajarkan bagaimana adanya solidaritas politik maksudnya adanya tahapan yang menunjukkan kemajuan dalam hubungan antar agama, sehingga menciptakan kerukunan bahu membahu saling membangun demi kemajuan bangsa bukannya saling jegal dan saling menghujat demi jabatan dan harta.[8] Dalam aspek politik Islam sendiri ada juga nilai politik *amar ma'ruf nahi munkar*. Di mana politik dijadikan alat untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemunkaran. Aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar* kata al Ghazali, adalah kutub besar dalam urusan agama. Sehingga apabila penting dalam urusan agama tentu akan merembet kepada urusan yang lain tidak terkecuali urusan politik. ia merupakan sesuatu yang berharga, dan misi itulah maka Allah mengutus para Nabi. Jika aktivitas ini hilang maka syiar kenabian akan hilang dan menjadi rusak, kesesatan tersebar, dan merebaknya berbagai kejahatan yang berkedok aneka wajah.

Kini nabi telah wafat lantas siapa penerus dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*? Jawabannya ialah kita semua sebagai umat Islam sebab kita adalah penerus misi nabi tiap-tiap individu dibebani tanggung jawab untuk berbuat baik dan mencegah kemunkaran. Jika kita mengambil peran dan melaksanakan perjuangan, maka sudah saatnya kita introspeksi untuk melangkah dan membenahi politik yang carut marut ini. Dengan mereformasi pemikiran (*mindset*), dan internal bangsa. Politik Islam kritis akan pemikiran dan kebijakan asing yang merusak kebutuhan bangsa, semua ini membutuhkan kerja yang berkualitas, kerja keras, kesabaran, kerjasama dan mensumberdayakan segenap kekuatan umat dan waktu yang panjang.[9]

Jhon Rawls dalam bukunya yang terkenal *Political Liberalism,* dia memperhatikan bagaimana masyarakat plural yang mana dalam hal ini ialah sebuah bangsa dari variasi tingkatan sosial mereka memiliki alasan untuk menempel dan mendalami bentuk perlawanan doktrin komprehensif yang datang dengan meliputi sebuah konsensus (kesepakatan). Rawls mengargumenkan bahwa agama dalam aspek menjadi sebuah perselisihan dan menghambat dalam agenda politik.

---

[8] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 139.

[9] Adian Husain, *10 Kuliah Agama Islam* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), 228.

Hal ini nampak bahwa esensi agama dalam norma politik Barat diabaikan sehingga terjadi kepincangan dalam tatacaranya.[10]

B. Kolonialisme dan Kekhalifahan

Kolonialisme dapat dikatakan merupakan usaha untuk merampas kemerdekaan suatu bangsa dan negara. Banyak bangsa dan negara, di dunia ini yang terjajah seperti yang terjadi di benua Afrika, mayoritas negara Asia, Australia, Amerika, Amerika Latin, Ocenia, dan sebagian kecil yang ada di benua Eropa. Praktik kolonialisme ini berlangsung mulai dari lahirnya perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis pada 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan Portugal sepanjang suatu meredian 1550 km sebelah Barat kepulauan Tanjung Verde (lepas pantai Barat Afrika), sekitar 39 drajat 53 Bujur Barat. Wilayah Timur dimiliki Portugis dan Barat dimiliki Spanyol.[11]

Gambar Perjanjian Tordesillas

[10] Nader Hashemi, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy* (New York: Oxford University Press, 2009), 25.

[11] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Tordesillas diakses pada 27 Mei 2020.

Dengan hadirnya kolonialisme maka hadirlah paham nasionalisme, nasionalisme adalah satu paham yang mempertahankan kedaulatan sebuah negara (*nation*) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme pada abad ke 20 dianggap sebagai senjata terkuat dalam politik internasional akan tetapi kini definisi nasionalisme itu sendiri sering dihadapkan pada perdebatan mengenai apa arti sebenarnya dari nasionalisme. Menurut Anderson nasionalisme berasal dari kata *nation* yakni komunitas orang-orang yang terikat oleh rasa kebersamaan dan percaya baik warisan masa lalu atau takdir masa depan.

Dari sudut pandang lain istilah nasionalisme seringkali digunakan untuk menggambarkan dua fenomena yang pertama adalah sikap kepedulian suatu bangsa terhadap identitas nasionalnya, dan yang kedua sebagai tindakan suatu bangsa mencari cara untuk mencapai atau mempertahankan nasibnya sendiri, Jhon Plamenatz memberikan pemaknaan nasionalisme yang berbeda, Plamenatz mengatakan *"nationalism is the desire to preserve or enhance a people's national or cultural identity when that identity is threatened, or desire to transform or even create it where it is felt to be inadequate or lacking"*. Dengan demikian menurutnya nasionalisme cenderung muncul ketika warga bangsa sadar dan kritis akan perubahan dan keragaman budaya.[12]

Kolonialisme juga memberikan dampak yang besar dalam psikologi bangsa. Di dunia ini awal mula kolonialisme datang berbeda-beda disetiap negara ada yang langsung di serang seperti penaklukan Italia di Libya, ada yang lewat jalur politik seperti Palestina, dan sekitarnya. di Indonesia sendiri kolonialisme pertama kali hadir dengan menetap dan beraktivitasnya perdagangan komoditi komunitas asing. Mereka bertujuan untuk berdagang padamulanya akan tetapi tujuan itu berubah menjadi ingin menguasai sehingga mereka melakukan penjajahan. Hal ini salah satunya disebabkan Indonesia dahulu kala merupakan penghasil rempah-rempah dan hasil bumi lainnya.

---

[12] Heri Susanto, Kolonialisme dan Identitas Kebangsaan Negara-Negara Asia Tenggara (*Jurnal Sejarah dan Budaya,* Tahun Kesepuluh, No.2 Desember 2016), 144.

Jadi bila ditelaah kembali bahwa hadirnya kolonialisme tidak lepas dari motif ekonomi, politik, dan kekuasaan. Di masa kolonialisme seluruh kebijakan baik moneter, fiskal, dan kebijakan yang lain dibuat oleh penjajah, sedangkan yang terjajah hanya ada 2 pilihan ikut atau melawan. Di Indonesia sendiri kaum kolonial menyebut warga Indonesia dengan berbagai nama seperti *Inlander*, *Jongos*, *Babu*, dan aneka nama-nama yang tidak pantas. Kolonialisme juga meninggalkan budaya-budaya yang mereka lakukan di Indonesia sendiri banyak budaya yang jelak ditinggalkan mereka seperti; korupsi, kolusi, nepotisme, sogok menyogok, dan masih banyak lagi budaya yang tidak patut dilihat.[13]

Kolonialisme juga dapat dimaknai dengan konflik antara Islam Vs Kristen. Di mana Barat dalam hal ini beragama Kristen sedangkan Timur Islam akan tetapi tidak semua yang di Timur Islam ada juga Hindu, Budha, Sinto, dan kepercayaan-kepercayaan leluhur. Akan tetapi di negara yang mayoritas Muslim nuansa penindasan kolonialisme semakin besar tak hanya itu saja mereka juga memaksa Islam untuk masuk ke dalam Kristen hal itu tidak dapat dibantah sebab mereka (kaum Penjajah) mengirimkan Misionaris dan *Zending* untuk menuntaskan misi Gospel mereka. Sehingga tak ayal apabila umat Muslim bangkit dan menggelorakan jihad.

Di berbagai wilayah Islam Jihad sangat masif digelorakan di era-era pasca jatuhnya Andalusia dan kolonialisme yang membentang dari tahun 1492 penaklukkan Andalusia hingga kemerdekaan bangsa-bangsa dan negara-negara yang beragama Islam 1960-an di benua Afrika. Jihad juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi tidak langsung saja mengambil kebijakan untuk jihad frontal, syarat tersebut ialah; 1. Adanya tenaga roh, 2. Adanya tenaga ilmu, 3. Dan adanya tenaga benda. Ketiga-tiganya harus ada, apabila kurang salah satu maka jihad tidak akan lancar dan maksimal jalannya. Ada tenaga tapi tidak ada ilmu maka akan pincang jihad itu, ada tenaga dan ilmu

[13] Naniek Harkantiningsih, Pengaruh Kolonial di Nusantara (*Jurnal Kalpatru, Majalah Arkeologi,* Vol. 23, No.1, 2014), 68.

akan tetapi tidak ada senjata maka jihad tidak aka maksimal dan malah akan merugikan sendiri.[14]

Dengan hadirnya penjajahan dan kolonialisasi yang masal di dunia melahirkan adidaya Zionisme. Di mana Yahudi memiliki kekuasaan baik dari segi politik, ekonomi, dan kebijakan-kebijakan yang memaksa negara-negara di dunia untuk tunduk padanya. Dapat dikatakan bahwa ideologi Zionisme yang kini diketahui bersama lahir di masa kolonialisme tepatnya pada tahun 1904. Dan secara dramatis kini di abad 21 ideologi ini telah sukses mencapai tujuannya. Berangkat dari rumusan sederhana terhadap kondisi riil fenomena "anti Semitism" lebih tepatnya anti Yahudi di Eropa. Ideologi disusun dengan sasaran yang jelas: membentuk negara Yahudi. Dalam tempo 50 tahun sejak konfrensi pertama tahun 1897 (sebelum lahirnya gerakan Zionisme internasional), dengan nama Israel pada 14 Mei 1948.

Akan tetapi Yahudi dalam perjuangannya untuk mendirikan negeri itu mereka mengalami penindasan sehingga menjadikan mereka terbelah menjadi 2 kubu, kubu 1. Zionisme Non-Politik (maksudnya baha mereka menekankan asimilasi kepada bangsa Eropa dan Amerika ialah solusi dalam menghadapi problema itu), kubu 2. Zionisme Politik (merekalah yang memaksa untuk mendirikan negara Yahudi yakni Israel. Sebab menurut mereka cara untuk menuntaskan masalah Yahudi ialah dengan mendirikan negara yang khusus untuk Yahudi). Singkat cerita mereka meminjam tangan Inggris untuk menduduki bumi Palestina kala itu. Palestina jatuh dalam jajahan Inggris sebab Turki Utsmani kala itu kalah dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, bersama Jerman, Austro Hungaria, dan Bulgaria. Sehingga dengan jatuhnya mereka muncullah negara-negara baru.[15]

Dalam dunia Islam, juga terdapat ekspansi wilayah atau penaklukan yang terjadi di masa Rasulullah hingga khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Islam juga meluaskan daerah mereka hingga ke Eropa, Afrika, dan Asia. Akan tetapi ada perbedaan dalam menaklukan wilayah yang dilakukan oleh Islam, dalam sistem

---

[14] H.A.R. Sutan Mansur, *Jihad* (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), 12.

[15] Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 58.

Kekhilafahan pemimpin mereka diberikan gelar khalifah pemberian gelar ini dilakukan pasca wafatnya Rasulullah. Dalam perjalanan Kekhalifahan dan Kekhilafahan dalam dunia Islam terbagi dalam beberapa periode: periode awal di masa Khulafa al-rasyidin, periode pertengahan masa Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, dan periode akhir Turki Utsmani, masa kekhalifahan Islam yang panjang ini memberikan sumbangsih yang tidak ternilai bagi umat manusia, kemajuan pemerintahan sistem-sistem.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa khilafah luput dari dunia pada 13 Maret 1924 aktor utamanya ialah Kemal Ataturk, akan tetapi dibalik semua itu ada banyak aktornya sebut saja seperti Zionisme Internasional, kaum-kaum liberalis Turki Utsmani (*The Young Turks*), dan negara-negara Barat yang phobia akan Islam.[16] Dalam misi ekspansinya Islam tidak langsung menyerang akan tetapi ada 3 tahapan 1. Mereka ditawari masuk Islam apabila menolak maka, 2. Mereka wajib membayar *Jizyah* (pajak) kepada negara Islam sebagai jaminan keamanan atas mereka, bila semua itu ditolak maka, 3. Melakukan ekspansi (jihad), akan tetapi semua itu ada aturannya dalam berperang (*art of war*). Mereka dilarang membunuh dan merusak beberapa hal:

1. Ketentuan dilarang membunuh wanita.
2. Dilarang membunuh tuna netra, rahib, hamba sahaya, petani dan orang yang bekerja sebagai tukang.
3. Dilarang membunuh masyarakat sipil yang tidak terlibat peperangan.
4. Dilarang membunuh musuh secara keji (disiksa terlebih dahulu).
5. Dilarang menghancurkan rumah-rumah musuh, dilarang membakar hasil bumi, merusak tanaman, dilarang membunuh hewan ternak musuh tanpa ada maslahat yang hendak diwujudkan.
6. Berwelas asih terhadap anak-anak dan balita.

---

[16] Farid Wajdi Ibrahim, *Khilafah Sorotan dan Dukungan Kajian dan Pandangan Ali Abdul Raziq* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 3-40.

7. Dilarang membunuh ayah dan kerabat.
8. Dilarang membunuh utusan para (delegasi) musuh.
9. Dilarang memerangi orang-orang kafir dan musyrik sebelum terlebih dahulu menyeru mereka kepada Islam.
10. Dilarang melanggar perjanjian dengan pihak musuh.

Begitu adilnya umat Islam dalam berperang apabila musuh mereka tiba-tiba masuk ke dalam Islam maka tidak jadi diperangi, al-Qur'an juga menjelaskan bahwa dalam berperang Islam tidak boleh melampaui batas yang tertera dalam Q.S. al-Baqarah ayat 190.[17]

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang – orang yang memerangi kamu (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Islam bukanlah agama kekerasan yang menyebarkannya harus dengan pedang. Alasan mengapa Islam itu harus disebarkan ialah karena Islam Rahmatan lil 'alamin (Rahmat untuk semesta alam). Begitu pula salah satu misi kenabian yakni menebar rahmat dan memperbaiki akhlak, akan tetapi perlu juga diketahui bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam La ikraha fi al-din. Tafsri Ibnu Katsir menjelaskan: "Tidak perlu memaksa mereka. Barang siapa dibukakan pintu hatinya oleh Allah, maka mereka akan memeluk Islam. Barang siapa dikunci hati, pendengaran, dan penglihatannya, maka mereka tidak akan mendapat manfaat jikalau dipaksa masuk Islam". Tafsir Fi Zhilail Qur'an menginformasikan bahwa "manusia telah diberi tanggung jawab untuk memilih jalannya sendiri, dan mereka pulalah yang akan bertanggungjawab atas pilihannya tersebut.[18]

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam sistem kekhalifahan Islam juga sering terjadi pertumpahan darah, yang terjadi sesama kaum muslim Nadirsyah Hosen menjelaskan dalam bukunya

---

[17] Amanullah Halim, *Buku Putih Kaum Jihadis Menangkal Fenomena Ekstremesme dan Fenomena Pengkafiran* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 290.

[18] Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah Jilid 1* (Yogyakarta: SUKA Press, 2018), 6.

yang berjudul Islam Yes, Khilafah No Jilid 2. Beliau menuturkan bahwa pada masa zaman Kekhilafahan Islam dahulu terdapat sejumlah perang saudara sesama umat Islam. daftarnya bisa sangat panjang. Korbannya juga mengucapkan kalimat syahadat, umumnya perang saudara terjadi karena memperebutkan kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sebelum banyak yang tergiur dengan propaganda HTI (*Hizbut Tahrir* Indonesia) yang mengatakan bahwa khilafah adalah satu-satunya solusi umat atau tanpa khilafah syariat Islam tidak akan tegak secara kaffah, atau jalan lainnya "*Islam rahmatan lil 'alamin* tidak akan terwujud di masa khilafah "

Fakta sejarah menunjukan bahwa terjadi 4 kali fitnah besar yang melanda umat fitnah di sini yang dimaksud ialah ujian perang saudara, **fitnah pertama kali** yaitu pada saat pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, saat membaca al-Qur'an di rumahnya. Madinah dikuasai pemberontak beberapa hari sehingga jenazah Khalifah Utsman bin Affan dikubur berjauhan dari makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab, selain itu di masa pertama juga terjadi perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah (Perang Jamal). Saat Perang Jamal di Bashrah kurang dari 18.000 sahabat gugur. Perang antara istri nabi dan menantu nabi ini baru berakhir setelah kaki-kaki unta itu ditebas dengan pedang kemudian Siti Aisyah dipulangkan ke Madinah.

Selanjutnya Khalifah Ali berperang dengan Mu'awiyah, perang tersebut dinamai dengan perang Shiffin. Perang ini diakhiri dengan pasukan Mu'awiyah yang mengangkat mushaf al-Qur'an diujung pedang mereka sehingga terjadilah perundingan dan akhirnya kedua belah pihak dapat menghentikan perang. Periode **fitnah pertama** di atas berakhir dengan perdamaian Hasan bin Ali dengan Mu'awiyah. **Fitnah kedua** berlangsung pada pembantaian Husen bin Ali di Karbala dan berlanjut dengan perlawanan Abullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair dibunh oleh pasukan al Hajjaj dengan cara kepalanya dipengal dan tubuhnya disalib. Dan lantas pasukan al-Hajjaj berteriak mengumandangkan takbir,

Fitnah ketiga ditandai dengan periode peperangan antara al-Walid II dan Yazid III. Yang berakhir dengan naiknya Marwan

II sebagai khalifah terakhir Umayyah, kepala al-Walid II dipenggal oleh pasukan Yazid, yang kemudian mengambil alih posisi khalifah, setelah dipenggal atas perintah Yazid kepala al-Walid ditusuk dengan tombak dan diedarkan di jalan raya dan pasar Damaskus, bahkan sengaja di bawa ke rumah bekas ayahnya. Tindakan ini memicu kegeraman keluarga al-Walid II. Dinasti Umayyah terpecah belah akibat pertikaian internal mereka sendiri yang dipicu oleh kelakuan buruk al-Walid II.

Yang paling mengkhawatirkan untuk Marwan II, adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Abbasiyah. Kelompok ini dipimpin oleh Abul Abbas bin Abdullah as-Saffah. Pemberontakan mereka dimulai dari Khurasan dipimpin oleh Abu Muslim al Khursani, jenderal pengikut setia as-Saffah. Penduduk Khurasan mulai membaiat as-Saffah sebagai khalifah. Kubu Abbasiyah mengambil legitimasi dari jalur keluarga Nabi Muhammad, yaitu keturunan Abbas, paman beliau SAW. Keluarga nabi yang di masa Umayyah tersingkirkan menemukan momentum yang tepat untuk masuk kekuasaan.

Dalam pertempuran di daerah Zab, pasukan Marwan bertemu dengan pasukan gabungan Abbasiyah, Syiah, penduduk Persia yang dipimpin oleh Abdullah Ali (paman dari as-Saffah) Marwan II berhasil dikalahkan Marwan sempat melarikan diri ke Syiria dan kemudian kabarnya ke Mesir. Pasukan Abbasiyah di bawah kontrol Shaleh, saudara Abdullah bin Ali, kemudian berhasil menemukan dan membunuhnya. Transisi kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah terjadi lewat pertumpahan darah, salah satu bentuk kekejaman as-Saffah adalah dengan mengundang jamuan makan kepada keluarga bani Umayyah yang tersisa as-Saffah membunuh Sulaiman bin Hisyam anak Abdul Malik dengan tangannya sendiri dengan cara menarik keluar dari meja makan. Ini juga dilakukan terhadap 90 bani Umayyah lainnya; dijamu makan, lantas dibantai habis. Bahkan tubuh mereka yang masih menggelepar dituTuo dengan permadani dan as-Saffah beserta keluarganya melanjutkan makan malam di atas permadani. Begitu Ibn al-Atsir dalam *al-Kamil it Tarikh* menceritakan kejadian ini.

Pada masa Abbasiyah pula terjadi perang saudara periode pertempuran antara kedua putra Harun ar-Rasyid di masa Dinasti Abbasiyah, antara al-Amin dan al- Ma'mun disebut-sebut sebagai **fitnah keempat.** Peperangan ini berlangsung pada tahun 811-813 M. Perang saudara juga terjadi pada masa selanjutnya, yaitu selama satu tahun antara al-Mu'tazz dengan pamannya, Khalifah Al-Musta'in, membawa al-Mu'tazz ke takhta kekuasaan. Al-Musta'in yang dipaksa mengundurkan diri tidaklama kemudian kepalanya dipenggal. Kurang lebih demikian kisah kelam dalam sistem khilafah Islam antara satu saudara dengan saudara yang lain saling menjegal. Akan tetapi dalam hal ini penulis menghimbau kepada pembaca untuk tidak membenci khilafah Islam sebab khilafah Islam telah banyak memberikan berbagai sumbangsih untuk dunia dan umat manusia.[19]

Lalu ada pertanyaan bukan demokrasi juga demikian? Ya memang demokrasi juga demikian semua itu tergantung dengan orangnya. Demokrasi juga ada yang menjegal dan saling menyerobot bahkan mereka ada yang menggunakan atas nama agama. Oleh sebab itu kita harus peka sebab apabila sudah terjun dalam dunia politik harus bermental kuat teman tidak ada teman yang abadi, teman hanya berdasarkan kebutuhan. Hari ini berteman belum tentu besok berteman, hari ini bermusuhan belum tentu besok bermusuhan. Karena inilah seni berpolitik, yang tidak kuat akan tergerus oleh politik. Akan tetapi hal yang demikian dapat dicegah apabila terdapat elemen yang dapat merubah mekanisme konflik menuju integrasi. Ada tiga macam konflik yang memiliki potensi menenggelamkan suatu kepentingan nasional, yakni; 1. Konflik Rasial, 2. Konflik kepentingan vertikal atau perjuanagan kelas, 3. Dan konflik kepentinan horizontal.

Dalam percaturan dunia politik partisipasi elit agama bersifat pragmatis, kaum elit agama dapat juga dikategorikan sebagai *high politics*. Tidak praktis, rumusan itu berlaku bagi peran elit agama baik secara pasif maupun aktif. Karena berpolitik adalah hak setiap warga negara, maka bisa saja secara individual elit agama juga terjun dalam

---

[19] Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No! Dinasti Abbasiyah, Tragedi, dan munculnya Khawarij Zaman Now Jilid II* (Yogyakarta: Suka Press, 2018), 6.

dunia politik, akan tetapi jangan secara kolektif. Misalnya seorang Kyai bersama dengan pesantrennya atau tokoh tarekat (*mursyid*) bersama para anggotanya (*murid*). Dengan kata lain elit agama harus melepas patron *klien* dengan massa. Apabila elit agama tidak dapat melepas massa, maka sebuah tujuan jangka panjang dan besar, yaitu pembentukan sistem politik nasional yang rasional akan dikorbankan untuk kepentingan jangka pendek dan kecil, yakni kemenangan OPP. Komitmen elit lain, khususnya politisi, akan memberikan pembentukan sistem politik rasional yang sangat diperlukan.[20]

C. Antara Negara Islam dan Negara Sekular

Islam secara historis, hubungan agama dengan negara dalam sistem politik menunjukkan fakta yang sangat beragam. Banyak ulama tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan di mana agama memiliki hubungan yang erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. dan dari sudut pandang ini maka pada dasarnya di dalam Islam tidak ada pemisahan agama (*din*) dan politik atau negara (*dawlah*). Argumentasi ini dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad SAW, ketika di Madinah membangun sebuah sistem pemerintahan dalam sebuah negara kota (*city state*).

Akar persoalan berdirinya negara Islam adalah perbedaan penafsiran ayat al-Qur’an yang menjelaskan mengenai ketaatan dalam menjalankan syari’at Islam yang kaffah, diantaranya otoritas negara menentukan norma keberagamaan dalam wilayah tertentu. Diantara ayat-ayat yang secara implisit menjelaskan adanya formalisasi syari’at Islam dalam sebuah negara pada surat al-Baqarah ayat 208.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ
ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, masuklahkamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah Syaitan. Sesungguhnya Syaitan itu musuh yang nyata (Q.S. al-Baqarah: 208).

[20] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 145.

Pemaknaan yang tekstualis ini yang menjadi salah satu dasar untuk mendirikan negara Islam. sehingga ada negara-negara yang melandaskan dasar hukum, dan undang-undang mereka yang berdasarkan al-Qur'an.[21] Sebut saja salah satunya Arab Saudi, Arab Saudi merupakan negara monarki murni bagi Kerajaan Arab Saudi al-Qur'an merupakan Undang-Undang Dasar negara dan Syari'ah sebagai hukum dasar, yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syari'ah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasihat-penasihat hukumnya. Kepala negaranya adalah seorang raja yang dpilih oleh keluarga besar Saudi, raja juga sebagai kepala keluargayang terdiri dari 4000 pangeran , yang paling dituakan dari seluruh suku atau *qabilah* yang terdapat dalam wilayah kerajaan. Di sana tidak terdapat dewan yang perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kekuasaan raja mutlak tanpa batas akan tetapi wajib tunduk kepada syariah, pelanggaran terhadap hukum Allah akan berimbas pada penurunan raja seperti yang dialami oleh Raja Saud bin Abdul Aziz (1953-1964 M).[22]

Selain itu ada juga tipe negara Islam berdasarkan aliran seperti Iran yang beraliran Syi'ah. Bahwa sesuai dengan ajaran Imamiyah *Itsna Asyariyah*, selama imam-imam yang maksum hadir maka hukum yang berlaku ialah hukum yang diberikan oleh imam-imam itu. Apa yang mereka perintahkan berarti perintah Allah, apa yang mereka larang berarti larangan Allah, taat kepada mereka berarti taat kepada Allah, dalam kehadiran imam-imam yang maksum itu tidak ada ruang untuk berijtihad rasional. Tentang bidang-bidang tertentu yang ditangani oleh wilayah *al-Faqih* dan yang bukan wewenang khusus Imam yang ditunggu, semula terdapat semacam konsensus diantara para ulama Imamiyah bahwa bidang-bidang itu antara lain meliputi soal penanganan kepentingan anak yatim piatu, benda-benda temuan, para janda dan fakir miskin. Pengelolaan urusan perwakafan, lembaga-lembaga pendidikan agama seperti madrasah, tempat-tempat suci, penanganan kepentingan umum, pengawasan atas penguasan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* pelajaran kepada

[21] A Miftahul Amin, Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama (*Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia In Right,* Vol. 7, No. 1, 2017), 67.

[22] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negara ajaran, sejarah, dan pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), 221.

pelanggar asusila, dan nasihat kepada penguasa. Akan tetapi kemudian terjadi pengembangan akan batas-batas bidang yang demikian itu.[23]

Akan tetapi timbulah sekelompok ulama Imamiyah yang berpendapat bahwa seorang ilmuwan agama yang sudah mencapai tingkat *mujtahid* dan memenuhi semua persyaratan untuk dibenarkan berfatwa dapat atau bahkan harus melaksanakan hukuman sesuai dengan syariat apabila terdapat segala wahana untuk itu. Kiranya yang termasuk golongan ulama ini adalah ulama-ulama yang di bawah komando Khumaini, oleh sebab itu dalam pasal 5 dari undang-undang dasar Iran antara lain dinyatakan bahwa kekuasaan atas negara dan umat dalam bentuk Republik Islam Iran, selama Imam Mahdi masih *ghaib* (menghilang), ada ditangan ilmuwan yang *faqih*, adil, dan taqwa atau sejumlah para *fuqaha.* Nampak bahwa Iran merupakan negara yang menganut sistem Imamiyah dalam aspek politiknya.[24]

Dalam perjalanannya baik negara Islam dan sekular muncul beragam halangan dan hambatan. Tidak ada proyek politik yang dapat dipahami tanpa menjelaskan konteks sosial dan sejarah yang membuatnya menjadi mungkin, dan akhirnya munculah Islamisme dan populisme Islam. Sebab baik disadari ataupun tanpa disadari Islam telah berkembang dan berdinamika, Populisme Islam bukanlah sebuah pengecualian. Sejauh ini telah dikemukakan argumen bahwa perubahan-perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat yang mayoritas Muslim telah membuka kemungkinan melebarnya arus populisme Islam yang menerpa baik di negeri Muslim dan sekular.

Selain itu dapat dilihat bahwa pasca berakhirnya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet ditahun 1990. Memungkinkan agama menjadi pokok acuan budaya utama bagi ekspresi penentangan terhadap pemerintah yang korup dan tidak transparan dibanyak negara-negara yang ada bahkan terjadi marginalisasi sosial di masa lalu dengan lahirnya harapan akan aspirasi baru untuk membangun masyarakat yang adil seiringan dengan jalannya

[23] Ibid., 215.
[24] Ibid., 216.

proyek yang berkemajuan.[25] Negara Islam juga dapat menjadi wadah pengembangan moral spiritual masyarakat yang agamis, sehingga menciptakan demokrasi budaya yang lebih Islami tidak saja meratakan budaya, akan tetapi juga menciptakan aneka budaya yang baru dalam konteks sub-kultur agama (*The Cultural of Religion*). Pemerataan itu terjadi dengan mematahkan monopoli kelas-kelas sosial tertentu akan simbol-simbol.

Setiap kelompok akan menemukan sub-kulturnya sendiri, masing-masing dengan bentuk seni dan norma keseniannya sendiri dan mengakibatkan seleksi alamiah yang menggugurkan unit budaya yang tidak lagi fungsional. Sebaliknya juga refungsionalisasi unti budaya memberikan makna baru pada pendukung kelompok budaya tersebut.[26] Negara sekular tumbuh bersamaan dengan menguatnya dukungan kehadirannya diberbagai belahan dunia selain itu muncul berbagai dukungan dari kalangan sosiologis dan kaum sekularis yang menginginkan lepasnya konsep agama dalam tatanan politik yang ada. Bahkan muncul berbagai teori mengenai agama pada masa klasik hampir mayoritas menyepakati bahwa kematian agama. Ada banyak ilmuwan yang memprediksi hal yang demikian seperti Auguste Comte, Fredrich Engels, Max Muller, AE Crawley, Sigmund Freud, dan masih banyak lagi.

Auguste Comte, mengumumkan bahwa sebagai akibat modernisasi masyarakat akan tumbuh melampaui "tahap teologis" dalam evolusi sosial dan pada saat itu agama akan ditinggalkan. Fredrich Engels melihat bagaimana revolusi sosialis akan menyebabkan agama menguap, dia tidak mengatakan kapan itu terjadi namun dia mengatakan penguapan itu akan terjadi segera. Pada tahun 1878 Max Muller mengatakan bahwa yang paling banyak dibaca setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap kuartal, dalam jurnal tampaknya memberitahu kepada kita bahwa waktu untuk agama akan segera berakhir, iman adalah halusinasi atau penyakit kekanak-kanakan, bahwa para dewa akhirnya akan ditinggalkan .

---

[25] Vedi R Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Jakarta: LP3ES, 2019), 148.

[26] Kuntowijoyo, *Demokrasi & Budaya Birokrasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 281.

Pada awal abad ke 20 AE Crawley mengatakan bahwa agama dapat bertahan hidup hanya pada tahap primitif, dan dan kepunahan hanya soal waktu saja. Beberapa tahun kemudian Max Weber menjelaskan bahwa modernisasi hanya akan menjadikan kekecewaan dari dunia, dan Sigmun Freud meyakinkan murid-muridnya bahwa agama merupakan ilusi *neurotic* akan mati pada sofa terapis. Berbagai teori klasik yang menyatakan demikian akan tetapi mereka tidak mengetahui kapan dan kepastiannya. Ada satu kesamaan mengenai kapan terjadinya kepunahan agama yaitu ketika kemajuan modernisasi terjadi pada masyarakat. Modernisasi menyebabkan sekularisasi.[27]

Dalam dunia Islam sendiri sesungguhnya juga ada beberapa ilmuwan yang mendukung dan mengusung pemahaman sekularisme (memisahkan agama dan urusan politik dan negara), salah satunya ialah Ali Abdul Raziq. Pendidikan formalnya diperoleh di Universitas Al-Azhar Mesir pada usia yang amat belia, selain itu dia juga mengikuti beberapa tahun kuliah di al-Jami'ah al-Missriyyah (sekarang menjadi Univeristas Qahirah). Pada tahun 1911 Ali Abdul Raziq mulai mengajar di Al-Azhar, pada tahun 1913 dia berangkan ke Inggris untuk mendalami ilmu ekonomi dan politik di *Oxford University.* Akan tetapi dia tidak sempat menuntaskan studinya lantaran berkecamuknya parang dunia pertama, disaat dia belajar di Barat dia memperoleh teori-teori Barat melalui beragam literatur yang dia baca. Khususnya teori politik Thomas Hobbes dan Jhon Locke.

Pengaruh pembelajarannya di Eropa memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikirannya, khususnya rasionalitas dalam berpikir dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Hal tersebut merupakan ciri khas dari pengaruh peradaban Barat. Maka tidak aneh apabila memang demikian sebab Barat memberikan penetrasi yang luar biasa kepada Islam, sehingga wajar apabila negara Islam hadir sebagai antitesa dari negara sekular. Dunia politik negara sekular telah kehilangan ruh agama sebagai pembimbing politik dan hanya menjadi simbol-simbol yang tidak bermakna dan sistem nilainya dipertanyakan dan diragukan. Di Turki sendiri juga terjadi sekularisme

---

[27] Rd. Datoek A Pachoer, Sekularisasi dan Sekularisme Agama (*Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2016), 92.

besar-besaran di masa Kemal. Salah satu tokoh sosialis Turki ialah Zia Gokalp, Gokalp banyak mendapatkan pendidikan di Barat sehingga mempengaruhi pola konsep berpikirnya dan diajarkan secara masa sebab dia merupakan Guru Besar dalam Sosiologi di Turki.

Pada saat yang sama pula terjadi kemajuan dan puncak di belahan Barat, sedangkan dunia Islam bahkan sebaliknya mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Mesir juga menjadi negara sekular dalam sejarah dicatat pembawa pembaharuan dari Barat ialah Napoleon Bonaparte pada tahun 1789 M awal abad XIX, sejak saat itu Mesir intensif melakukan hubungannya dengan Barat salah satunya melakukan pertukaran pelajar ke barat khususnya Prancis sebagai salah satu mitra utama di masa Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1813 dan 1849 M Mesir mengirimkan 311 pelajar ke berbagai negeri Eropa seperti Italia, Inggris, Prancis, dan Austria. Sehingga menjadikan semakin masifnya politik sekular di negeri tersebut.

Sejarah juga mencatat bahwa salah satu aspek politik yang menjadikan politik sekular dan sistem negara sekular menyebar ke seluruh dunia adalah praktik kolonialisme, praktik ini sudah menyebar seiring melemahnya Kekhalifahan Turki Utsmani satu demi satu wilayah Islam dikuasai Barat dan mereka menerapkan sistem politik sekular dinegeri jajahan tersebut. Selain itu diperparah dengan hadirnya perang dunia pertama yang dimulai pada Juni 1914, serta diikuti dengan pernyataan perang dari Turki Utsmani kepada Inggris dan sekutu. Inggris juga menyeru kepada sekutu-sekutunya untuk menjadikan negeri Arab dibawah jajahannya seperti Iraq, Iran, Mesir, Bahrain, Kuwait, Palestina, Israel, Siprus, Uni Emirat Arab, Yaman, Yordania, dikuasai oleh Inggris yang pada awalnya negeri-negeri itu wilayah Turki Utsmani, kemudian Libya diberikan pada Italia, Maroko, Tunisia, Aljazair, diberikan kepada Prancis. Alhasil lengkaplah cara Barat menerapkan sistem politik sekular dan menjadikan mereka sebagai negara sekular. Akan tetapi tidak semua jajahan mereka berhasil disekularisasikan.[28]

[28] Farid Wajdi Ibrahim, *Khilafah Sorotan dan Dukungan Kajian & Pandangan Ali Abdul Raziq* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 59.

Dampak dari politik sekularisasi ialah memudarnya nilai agama dalam sistem yang ada, hal ini terjadi di banyak negara sekular. Ada sebuah pertanyaan dari Prof Amin Rais mengapa agama Katholik di dunia Barat sekarang memudar, tidak bersinar kembali? Karena pengikutnya mengucapkan *goodbye,* selamat tinggal, kepada greja. Mengapa ini terjadi? Karena greja tidak dapat menurunkan resep-resep agama Katholik itu sendiri untuk memecahkan masalah-masalah sosial kontemporer masyarakat Barat yang telah berdampingan dengan sekularisme. Juga di Argentina, Brazil, Meksiko, Nikaragua, dan negara-negara di Amerika Latin lainnya, yang sebagian besar beragama Katholik Pastor-pastor Katholik berlomba-lomba menawarkan teologi pembebeasan (*Theologi of Liberation*). Mereka sadar bahwa agama Katholik akan ditinggalkan masyarakat Amerika Latin kalau agama Katholik tidak mampu berbicara atau meng-*address* masalah-masalah sosial ekonomi kontemporer, dan sistem sekular yang ada telah menjadikan lemahnya pola ritus-ritus kesalehan publik yang ada.

Selain faktor sistem sekular, Amerika Latin juga marak praktik feodalisme dan kesenjangan yang tajam, ada stratifikasi sosial yang tinggi (*The High of Social Stratification*) adal lapisan tuan tanah (*land lord*), lapisan orang kaya, konglomerat yang hidup di tengah sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga agama Katholik seolah-olah ada di sebuah pulau, sementara kenyataan sosial ekonomi itu ada di sebelah pulau yang lain. Akibatnya tidak *gatuk*, tidak ada konektisitas, dan relevansinya. [29] Oleh sebab itu hadirlah negara Islam yang menjadi landasan pijakan penerapan nilai-nilai Islam.

Pada awalnya ingin menciptakan nilai-nilai agama yang masuk dalam sistem politik dan segala aspek yang lain. Dengan memsosisikan toleransi dan tempat-tempat ibadah seperti Masjid, Greja sebagai tempat untuk memohon kepada Tuhan demi keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia. Serta dapat meredakan tendensi konflik yang muncul, melindungi minoritas dalam sejarahnya perbedaan suatu negara jelas tergambar dapat dibuktikan dengan berbagai agama

---

[29] Mohammad Amien Rais, *Demi Kepentingan Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 71.

yang muncul. Akan tetapi nyatanya antara teori dan praktik berbeda jauh, sehingga menimbulkan kesenjangan antara keduanya.[30]

Selain itu sistem politik sekular yang diterapkan negara sekular. Mengakibatkan mayoritas masyarakatnya akan haus nilai agama. sehingga muncullah pencarian identitas agama yang baru, keadaan ini disusul dengan gelombang imigran dari TimTeng (Timur Tengah) dan memperkenalkan Islam khususnya di Barat. Fakta-fakta lapangan ini dapat kita temukan diberbagai media baik cetak maupun online. Penulis dalam hal ini mengutip buku perjalanan lapangan Prof Dr Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal). Di dalamnya banyak sekali aneka kemajuan Islam di negara sekular Eropa, Asia, Amerika Latin dan lainnya. Akan tetapi penulis hanya membahas sedikit tidak secara kompleks dan menyeluruh seperti; di Spanyol, Inggris, Rusia, dan Jerman.

Sebagai minoritas Muslim Spanyol selalu ditempatkan sebagai warga kelas dua, mereka sering menalami problem sosial. berbagai perilaku diskripminatif sering mereka dapatkan apalagi dalam bidang politik, mereka sering dikaitkan dengan kelompok teroris padahal sebenarnya belum tentu juga mereka pelakunya inilah yang menyebabkan beberapa komunitas Muslim memilih untuk diam dari berbagai aktivitas. Komunitas Muslim Spanyol dihadapkan pada problem-problem sosial-politik yang begitu kompleks. Kebebasan agama begitu dibelenggu, namun data kini menunjukan angka yang cukup menggembirakan. Terjadi penambahan populasi Muslim Spanyol, menurut data KIS (Komunitas Islam Spanyol) pada tahun 2015 disebutkan, komunitas muslim yang tinggal di Spanyol berjumlah 1.887.906 jiwa atau 4% dari populasi Spanyol, data lain menyebutkan bahwa 41% Muslim Spanyol berkebangsaan Spanyol, sementara 59% lainnya diantaranya imigran.

Inggris semakin memberikan ruang yang lebih kepada Islam pasca Maret 2006 selepas PM Inggris Tony Blair menandatangani piagam kerjasama antara Indonesia dan Inggris yang diberi nama *Indonesia-United Kingdom Islamic Advisory Group.* Dibalik tujuan

[30] Al Makin, *Plurality Religiousity And Patriotism Crictical Insight Into Indonesia and Islam* (Yogyakarta: Suka Press, and Globethics.net, 2017), 21-22.

itu sesungguhnya ada pengakuan bahwa masyarakat Inggris harus melihat kenyataan bahwa komunitas Muslim di negaranya sudah mencapai angka yang tidak bisa dipanang remeh. Di Leeds, salah satu provinsi terbesar yang ada di Inggris populasi Islamnya telah mencapai 40% dari penduduk, bahkan pada periode yang lalu ketua parlemennya ialah seorang Muslim adzan berkumandang memancar dari menara masjid yang menjulang tinggi. Di London sendiri sudah terdapat masjid yang megah dan besar diantaranya masjid Highpark di kota London. Selain itu banyak warga asli yang berpindah agama menjadi mualaf, rendahnya *Islamophobia* menjadikan Inggris salah satu negeri yang toleran kepada Islam.

Muslim di Rusia memiliki catatan sejarah yang kelam sebab Rusia merupakan negara yang melahirkan komunisme, dapat dibayangkan pada tahun 1917 jumlah masjid pernah mencapai 25.000 dan pada era 1970-an hanya tinggal 500 diseluruh Rusia. Akan tetapi kini selepas Uni Soviet runtuh Muslim semakin bertambah dan menjadi nomor dua setelah Kristen Ortodoks, populasi Muslim mencapai 21-28 Juta penduduk atau 15-20% dari 142 juta penduduk Rusia. Segi tatanan sosialnya juga semakin membaik dari pada sebelumnya. Presiden Rusia Vladimir Putin memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi Muslim dalam kabinetnya.

Jerman memang telah lama menjadi negara Eropa yang paling terbuka dalam menerima umat Islam. Bahkan dalam perang dunia pertama Jerman bersama Kekhalifahan Turki Utsmani berperang bersama dan menunjukkan eksistensinya. Selain itu antara Sultan Abdul Hamid II dan sultan-sultan penerusnya memiliki persahabatan politik yang kuat dengan kekaisaran Jerman, ahli strategi Jerman menciptakan surat kabar yang disebut *El Dschihad* (Jihad) untuk menarik tentara Muslim dari negara lain bergabung bersama Jerman. Sehingga tidak heran apabila perkembangan Muslim disana pesat baik dari segi kualitas dan kuantitas. Pada tahun 2018 populasi Muslim Jerman mencapai 4,7 juta jiwa atau sekitar 5,7% penduduk Jerman.[31]

---

[31] Nasaruddin Umar, *Geliat Islam Di Negeri Non-Muslim Sebuah Catatan Perjalanan* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019), 48-87.

Akan tetapi penulis juga kekurangan sumber bagaimana keadaan Muslim ketika tahun 1930-an. sebab pada tahun-tahun itu merupakan tahun tirani Gestapo bertindak sebagai polisi regular Jerman dan memimpin jalannya politik demokratik, kemudian di tahun-tahun itu juga para militer saling menikam dan membunuh sehingga keadaan kurang memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas. Dapat dilihat dari Maret 1930 ketika Hitler berkuasa Jerman menjadi ototriter yang berujung pada turunnya parlemen pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan muslim Jerman juga pernah mengalami pasang surut sebagaimana yang terjadi di era Hitler.[32]

Oleh sebab itu marilah berpikir secara jernih bahwa semua sistem ini baik sistem negara Islam atau sekular ibarat seperti kendaraan dan pengendalinya itu orang-orangnya mau di bawa ke kebaikan bisa mau di bawa ke keburukan juga bisa.

Kesimpulan

Politik merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola suatu kebijakan dalam dunia pemerintahan sehingga menjadikan kemaslahatan bersama. Dalam sejarahnya antara politik Barat dan Islam memiliki orientasi yang berbeda dunia Barat politiknya lebih orientasi kepada nilai dan kultur sekularisme artinya bahwa nilai agama dalam politik dipisahkan (lepas agama). Akan tetapi dalam politik Islam agama tetap dimasukkan sebab Islam menyeluruh dalam segala lini dan aspek. Munculnya negara Islam tidak lepas dari adanya tafsir tekstual sehingga dapat penulis katakan negara Islam merupakan antitesa dari negara sekular.

Politik sekular menyebar ke berbagai belahan bumi seiring dengan kolonialisasi dan westernisasi oleh sebab itu tidak aneh apabila kini banyak negara-negara yang menerapkan politik sekular dan menjadi negara sekular sebab dahulu kala sejak zaman kolonialisme sudah diprogram demikian. Kemudian ada keunikan dalam beberapa negara Islam sebab politik yang mereka gunakan lebih bernuansa teologis seperti halnya Iran di mana negeri ini memang negera Islam

[32] James Bryant Conant, *Germany and Freedom A Personal Appraisal* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1958), 41.

akan tetapi corak politik teologis yang mereka gunakan ialah teologi Syi'ah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik Islam yang mereka gunakan merujuk kepada doktrin-doktrin ajaran Syi'ah. Sistem sekular juga memberikan pengaruh dalam konsep agama masyarakat di mana agama menjadi barang yang mahal sehingga masyarakat cenderung akan haus agama dan mencari sensasi agama baru (*The Sensation of a New Religion*), yang pada akhirnya terjadi perpindahan agama secara besar-besaran seperti di Eropa.

BAB 2

NALURI DEMOKRASI ISLAM

Secara theologis, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyah* dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis ia merupakan sebuah fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial tidak hanya sekedar sejumlah doktrin yang menzaman dan menjagatnya universal tetapi juga mengejawatahkannya dalam sebuah institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.[1]

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "*demos*" berarti rakyat dan "*kratos/kratein*" berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti "rakyat berkuasa" (*government of rule by the people)* adapula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang di artikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah definisi singkat demokrasi akan tetapi sebenarnya penerapan dari demokrasi itu tergantung dari suatu negara yang menerapkan demokrasi itu sendiri.[2].

Begitu pula sebuah demokrasi sebagai ideologi dan sistem kekuasaan telah menjadi landasan dan bingkai kehidupan

---

[1] Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post- Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 2

[2] Achmad Zubaidi, dan Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 55

bermasyarakat dan bernegara hampir diseluruh dunia baik di Barat maupun di dalam dunia Islam, dalam perkembangan pemikiran tentang demokrasi kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan, sebagian mengagungkan demokrasi seakan-seakan demokrasi ialah sebuah bernda yang suci, sakral, dan bebas dari kesalahan, sehingga mereka beranggapan bahwa apabila memperjuangkan demokrasi berarti mereka memperjuangkan benda yang suci, dan pelakunya berhak mendapat gelar pahlawan. Ada pula suatu golongan yang berkeyakinan bahwa demokrasi dalam segala bentuknya adalah sebuah kekufuran, dan semua yang berideologi demokrasi, dan mengikuti demokrasi dihukumi kafir.

Di balik itu semua ada pula yang menganggap, tidak ada pemanfaatan kesempatan yang diberikan oleh demokrasi untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan mengantarkan rakyat kepada kehidupan yang lebih baik tanpa harus meninggalkan dan mengorbankan prinsip-prinsip Islam, penulis berpendapat bahwa ini termasuk di dalam klasifikasi kelompok moderat.[3]

A. Sudut Pandang Islam dalam Pemahaman Demokrasi

Bila dilihat dari ranah sejarah, maka Islam sesungguhnya tidak mengenal demokrasi ala barat, kecuali setelah adanya perbenturan antara kebudayaan Timur dan Barat. Berawal dari masa kolonialisme dan imperealisme, lalu di ikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses segala informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Banyak orang menuduh bahwa negara Islam maupun realitas-realitas politik Muslim yang menunjukkan bahwa Islam tak sejalan dengan demokrasi. Argumen yang seperti ini sering kita mendengarnya, bahkan tak jarang orang yang mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Menurut Jhon L. Ephosito,[4] Dalam Islam sendiri terdapat 2 pendapat yang berbeda dalam memaknai Demokrasi dan

---

[3] Muinudinillah Basri, Hukum Demokrasi Dalam Islam (*Jurnal Suhuf*), Vol. 27, No. 1, 2015), 2.

[4] Jhon L.Phosito adalah guru besar agama dan hubungan Internasional, Georgetown University, adalah pengarang buku *Unholy war* dan *Islam and Democracy* (bersama Jhon Obert Voll).

shura [5], sebagian dari kalangan muslim memandang bahwa antara demokrasi dan *shura* ialah dua hal yang identik; dan sebagian yang lain menganggap bahwa antara demokrasi dan *shura* berlawanan.

Diantara dua kelompok yang saling bertentangan ada pula yang menjadi penengah yang mengatakan antara demokrasi dan *shura* ada beberapa persamaan dan perbedaan. Hasil kongres Amerika pada tahun 1989, memutuskan beberapa kriteria sebuah negara yang dapat dikatakan demokratis bila; *Pertama,* didirikan sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil; *Kedua*, diakui secara efektif kebebasan dalam konteks; beragama, berbicara, dan berkumpul; *Ketiga,* dihilangkan semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi kebebasan pers yang bebas dan terbentuknya partai politik; *Keempat,* diciptakan suatu badan kehakiman yang bebas; *Kelima,* didirikan kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak memihak.[6]

Akan tetapi dalam bukunya Ayang Utriza Yakin mengatakan bahwa adanilai-nilai demokrasi ada dalam piagam Madinah yang menjadi ikatan peradaban (*bond of civility*) antara anggota masyarakat Madinah telah berwujud menjadi masyarakat yang ideal, yakni masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi tersebut adalah;

1. Persamaan

Persamaan disini mencakup persamaan derajat dan persamaan di muka umum hukum (keadilan). Dalam konteks ini, persamaan identik dengan keadilan yang kemudian menjadi proyek ideal untuk menghormati hukum. Ia bertujuan untuk menciptakan kedamaian sesungguhnya dan stabilitas di kalangan masyarakat. Persamaan dan keadilan itu terkandung dalam pasal 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37, dan 40. Pasal-pasal ini mendukung prinsip bahwa seluruh warga Madinah

---

[5] Memutuskan sebuah perkara kepada mereka yang berdampak pada keputusan tersebut.

[6] Kiki Muhammad Hakiki, Islam dan Demokrasi Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indinesia (*Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya,* Vol. 1, No. 1, 2016), 3.

berstatus sama di hadapan hukum dan mendapatkan hak sosial sama tanpa melihat status sosial, agama, suku, dan jenis kelamin.

2. Kebebasan

Kebebasan beragama tertuang dalam pasal 25 yang berbunyi "kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukmin agama mereka pula. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan agama mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat lalim dan jahat, merusak diri keluarga mereka". Komitmen keberagaman ini mendapatkan komitmen yang tegas disebutkan bahwa kaum Yahudi bebas menjalankan agama mereka sebagaimana umat Islam bebas menjalankan agama mereka. Karena kebebasan sebagaimana tertuang dalam piagam ini, Munawir Syadzali menilai piagam Madinah sebagai konstitusi negara Islam pertama yang tidak menyebutkan negara. Ini berarti mengakui semua agama negara. Hal yang demikian didasari prinsip saling menghormati kepada pemeluk agama yang lain.

3. Hak Asasi Manusia

Secara jelas memang dalam piagam ini tidak menyebutkan tentang Hak Asasi Manusia akan tetapi, hal yang demikian tertera dalam beberapa poin-poin seperti kebersamaan, keberagamaan, dan kesetaraan yang mencakup aspek tersebut. Dalam al-Qur'an Q.S. Al-Isra ayat 70, sendiri juga menegaskan pentingnya menghormati kebebasan manusia. Tentu saja hal ini didukung oleh praktek-praktek sosial Islam yang baik dan ramah terhadap Hak Asasi Mansia, salah satu contohnya saat Rasulullah melakukan khotbah perpisahan."*Sesungguhnya hidupmu, hartamu, dan harga dirimu adalah berharga (suci) bagai kalian seperti ini, bulan ini…*". Di akhir pidatonya beliau menegaskan "*bukankan telah aku sampaikan*", sebanyak tiga kali lalu beliau menyuruh pada siapapun yang hadir pada waktu itu. Dengan demikian Rasulullah menegaskan pentingnya HAM yang meliputi hidup, harta. Dan martabat.

4. Musyawarah

Poin ini menjadi inti dari demokrasi. Secara tekstual kata ini tidak disinggug dalam piagam Madinah, akan tetapi jika diperhatikan

secara detail pasal-pasal yang ada di dalamnya menyebutkan semangat untuk melakukan musyawarah. Bahkan, kelahirannya bagian dari hasil upaya musyawarah antar kelompok bangsa. Sebagai sebuah konsep sekaligus prinsip, syura dalam Islam berbeda dengan demokrasi. Baik *syura* maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama dari pada pilihan individual. Ke dua konsep tersebut mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat dari pada minoritas.

Piagam tersebut telah mengantarkan kita untuk mengenal ide-ide politik yang sangat revolusioner, etis, dan anggun. Bukan saja pada masa itu (awal decade ketiga abad ke 7 M), bahkan gaungnya masih terasa hingga kini. Piagam ini memiliki tujuan yang strategis bagi terciptanya keserasian politik dengan mengembangkan toleransi sosio-*religious* dan budaya seluas-luasnya.[7]

Di dalam pelaksanaan demokrasi, sering kita mendengar sebuah kalimat yakni "***Kebabasan yang bertanjung jawab***" yang berarti di satu pihak ada sebuah kebebasan namun dipihak lain ada sebuah tanggung jawab yang terbit dari kebebasan tersebut, jangan sampai konotasi tanggung jawab lebih besar dari kebebasannya atau dengan kata lain, konsep demokrasi menginginkan kebebasan haruslah lebih besar dari tanggung jawab. Ya kira-kira bila di lihat dari matematis ialah:

Demokrasi = kebebasan > Tanggung jawab

Kebebasan = > 80 %

Tanggung jawab = < 20 %

Sesuai dengan kalkulasi demokrasi diatas, maka seyogyanya haruslah kecil kesempatan negara untuk ikut campur mengatur masalah kebebasan rakyat, sehingga porsi kebebasanpun juga menjadi lebih besar dibandingkan porsi tanggung jawab.[8] Di dalam sebuah skripsi yang berjudul Prinsip Syura sebagai demokrasi

---

[7] Ayang Utriza Yakin, *Islam Demokrat dan Isu-isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 20.

[8] Mochamad Parmudi, Islam dan Demokrasi di Indonesia (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam (Semarang: *Laporan Hasil Penelitian Individual*, Uin Wali Songo, 2014), 77.

Islam (*the principle of shura as a democracy in Islam*), di dalam nya menjelaskan bahwa fakta-fakta sejarah nabi dan sunnahnya banyak menekankan bahwa Rasulullah telah menjadikan musyawarah dengan sahabat sebagai karakternya, hal ini membuat Abu Hurairah r.a berkata:" saya tidak pernah melihat seorang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan rekan-rekannya melebihi Rasulullah SAW. Menurut para sejarawan, terjadi banyak perbedaan pendapat tentang penerapan Rasulullah terhadap syura. Karena banyak pula orang yang berpikiran bahwa sebagai utusan Allah yang menerima wahyu semestinya Rasulullah tidak perlu lagi membutuhkan sebuah musyawarah. Banyak yang menyamakan antara syura dengan meminta pendapat yang di riwayatkan Rasulullah. Mereka mencampur adukkan keduanya itu, yang mana seharusnya terdapat sebuah perbedaan baik dilhat dari wujud kelazimannya.

Sebagai salah satu syari'at Islam yang ketetapan wajibnya berlandaskan pada Al Qur'an yang metodenya yang berkaitan erat dengan syari'at dan akidah. Jangkauannya meliputi kehidupan peribadi kelompok, hingga masyarakat luas, syura tetap menjadi syari'at dan kewajiban, bahkan walaupun tidak bernegara. Kewajiban akan adanya syura diambil dari sumber-sumber yang bersifat ilahiyah yang terpisah dari para penguasa. Syura menjadi benteng pelindung dari kesewenang-wenangan penguasa mereka bisa menghapus dan meniadakan konstitusi negara. Di sini penulis menyimpulkan bahwa syura ini merupakan demokrasi ala Islam.[9]

Selain itu penulis juga menemukan hal yang unik mengenai bagaimana sejarah pengenalan demokrasi oleh Islam didalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, vol. 11, No 1, Juli 2007, dunia Islam baru mengenal demokrasi barat pasca perang dunia (PD) 2, terutama setelah kolonialisme dan imperialisme mengacak-acak dunia Timur (Asia-Afrika). Konsep demokrasi lalu menjadi sebuah isu sentral dalam setiap sendi pemaknaan agama dan praktek bernegara, sehingga dengan berkembangnya waktu yang telah penulis kemukakan didalam

[9] Rany Apriani Nusa, Prinsip syura sebagai demokrasi Islam studi terhadap pemikiran Syekh Muhammad Abduh (Yogyakarta : *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*, 2018), 32-33.

latar belakang makalah ini bahwa di dalam perkembangan dunia Islam saat ini ada beberapa kelompok ada yang: 1. kelompok pro demokrasi dan lebih dari itu bahkan memuja-mujanya, 2. kelompok moderat, dan ada 3. kelompok yang menolak demokrasi.[10]

5. Kelompok yang pro demokrasi

Di dalam zaman yang katanya serba demokrasi ini, banyak hal yang merasuk kedalam pemahan-pemahan yang baik kita sadari maupun tidak kita sadari, sehingga memperjuangkan demokrasi merupakan anggapan perjuangan yang suci dan pelakunya berhak mendapat gelar pahlawan.[11] Kelompok ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan di dalam demokrasi demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam oleh karenanya demokrasi tidak harus dijauhi dan malah menjadi urusan didalam agama Islam, sebab didalam tubuh demokrasi ada unsur musyawarah, *ijma'* persetujuan, dan penilaian interpretatif yang mandiri ijtihad.

Pemikir-pemikir yang termasuk didalamnya ialah Muhammad Abduh (1845-1905), Rasyid Ridha (1865-1935), Ali abd al-Razaq (1888-1966), Khalid Muhammad Khalid, Muhammad Husein Haikal, dan masih banyak lagi. Menurut Yusuf Qadrawi, substansi hakiki dari demokasi sejalan dengan perinsip-perinsip Islam sehingga antara demokrasi dengan Islam tidak perlu di pertentangkan.

"bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci mereka juga diberikan hak untuk mengoreksi penguasa apabila keliru, ia diberi hak untuk mencabut dan menggantikannya apabila menyimpang, mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti sistem ekonomi, sosial, dan politik yang mereka tidak kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka akan dianiyaya dan dibunuh".

---

[10] Najid jauhar, *Islam,* Demokrasi, dan HAM sebuah benturan filosofis dan teologis (*Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Vol. 11, No. 1, 2007), 32.

[11] Muinudinillah Basri, Hukum Demokrasi Dalam Islam (*Jurnal Suhuf,* Vol. 27, No. 1, 2015), 4.

Menurut Yusuf Qadrawi inilah demokrasi yang sebenarnya. Selain Yusuf Qadrawi adapula pemikir islam yang melakukan sebuah sintesa antara Islam dan demokrasi yang hampir sempurna adalah Fahmi Huwaidi menurutnya demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif, serta akuntabilitas (tanggung jawab penguasa) jika tidak demikian maka akan di turunkan dari jabatannya, selain itu dia juga membahas sistem multi partai, yang menurut Hasan al Bana pendiri Ikhwanul Muslimin di dalam Islam tidak ada karena hanya akan menghasilkan perpecahan.[12]

6. Kelompok yang moderat

Menurut kelompok ini, Islam bisa menerima sebuah demokrasi disatu sisi Islam juga memiliki sebuah hubungan demokrasi, namun disisi lain juga ada sebuah perbedaan, Islam dapat menerima sebuah demokrasi namun ada sebuah catatan penting. Menurut Abu al-A'la Al- Maududi mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi ada kemiripan wawasan. Menurutnya hal tersebut didukung oleh beberapa alasan yang dimiliki oleh Islam itu sendiri seperti: keadilan, persamaan, akuntabilitas pemerintahan, musyawarah, dan tujuan negara, dan hak oposisi yang semuanya itu ada di dalam al Qur'an. akan tetapi menurutnya, perbedaan itu terletak pada sistem Barat, suatu negara yang demokratis menikmati hak-hak mutlak, maka dalam demokrasi Islam. Suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan Tuhan tidak dapat bertolak belakang dengannya (al Qur'an dan Hadist), walaupun konsensus rakyat mendukung.[13]

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Muhamad Arkoun. Ia tidak menyetujui dibentuknya sebuah negara Islam dan lebih meyetujuinya dibentuknya negara demokrasi yang tidak mengenal pertentangan antara nalar filsafat dan nalar agama. Menurutnya yang perlu ditegaskan ialah adanya sebuah perinsip-perinsip pemerintahan menurut Islam dan demokrasi. Islam menuntut adanya sebuah

---

[12] Ahmad Safrudin,"Demokrasi Dalam Islam", (Yogyakarta: Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2008), 58.

[13] Pandangan Al-Maududi tentang demokrasi desebut juga dengan "doktrin khilafah demokratik" ini juga sering disebut dengan Teodemokrasi", yaitu bahwa Islam hanya mengakui kedaulatan mutlak hanya dimiliki Allah, dan beberapa perinsip demokrasi modern bisa diterapkan didalam dunia muslim.

pembentukan sebuah masyarakat yang madani, sementara Barat berusaha mewujudkan *civil society,* dengan basis penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam membicarakan demokrasi, Muhammad Arkoun tidak terlalu melangkah secara dalam, misalnya disamping ia merujuk tradisi Nabi yang selalu dikelilingi oleh angota dewan, juga konsep *bai'at* (sumpah setia). Nabi yang mengesahkan secara peraktis si tersumpah itu tadi sebagai otokrat. Namun disisi lain ia pun telah mengkritisi sekularisme gaya Kemal Ataturk di Turki. Meskipun demikian ia juga menolak gaya pemikiran Khomeini karena telah melakukan sakralisasi yang sebenarnya telah berisfat duniawi, kata duniawi di sini sebenarnya tidak terlalu dijelaskan secara lebih rinci oleh karena itu penulis juga tidak mengetahui secara konkrit hal yang dimaksud secara duniawi yang di sini.[14]

7. Kelompok yang menolak demokrasi

Kelompok ini memandanga demokrasi sebagai sesuatu yang mutlak kufur dan muncul di tahun terakhir ini berbagai majalah, makalah yang mengkafirkan demokrasi, dan mengikuti demokrasi dalam segala bentuk di hukumi kafir, bahkan hanya sekedar memanfaatkan sebagian produk demokrasi seperti pemilu, atau menjadi pejabat di negeri yang menggunakan demokrasi dianggap kafir pula, tentu hal ini sering kita dengar responan pendapat mereka mengenai demokrasi itu buatan Barat, thaghut, dan masih banyak lagi hal yang mereka lontarkan.[15]

Bahkan ada segolongan kelompok yang mereka terang terangan menyatakan adanya sebuah dalil untuk menegakkan khilafah ya sebut saja HTI. Mereka punya dalil pertama: Dalil al Qur'an Abdullah bin Umar Sulaiman Ad-Dumaji dalam kitabnya al-Imamah al-'Uzmah'indah Ahl As-Sunnah wa al-Jama'ah di halaman 49-64, mengemukakan beberapa ayat sebagai dalil untuk menegakkan khilafah seperti An-Nisa' ayat 59, Al-Maidah ayat 48-

[14] Ahmad Safrudin,"Demokrasi Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Khaled Abou El Fadl", (Yogyakarta: *Skripsi, Uin Sunan Kalijaga,* 2008), 52-55.

[15] Muinudinillah Basri, Hukum Demokrasi Dalam Islam, (*Jurnal Suhuf* , Vol. 27, No. 1, 2015), 5.

49, Al-Hadid ayat 25 serta ayat-ayat hudud qishash, zakat dan lain lain yang pelaksanaannya di dalam khilafah, ke dua mengenai dalil Dalil as-Sunnah. Rasulullah SAW. Antara lain bersabda: yang artinya siapa saja yang mati dalam keadaan yang tidak ada baiat (kepada khalifah) diatas pundaknya, maka matinya mati jahiliyah. Hadist ini mengandung perintah untuk mewujudkan khilafah yang dibaiat oleh kaum muslimin. Pasalnya hanya dengan adanya khilafah akan terdapat baiat di atas pundak kaum muslim. Adanya sifat jahiliyah menunjukkan bahwa tuntutan perintah itu sifatnya tegas sehingga hukumnya wajib.[16]

Hizbut tahrir mereka memiliki 2 tujuan: 1. Melangsungkan kehidupan Islam, 2. Mengemban dakwah keseluruh penjuru dunia mereka punya jaringan dibanyak negara salah satunya di Indonesia, tujuan ini berarti ajakan agar umat Islam kembali hidup secara Islami di *daulah* atau darul (negara) Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti sekaligus menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur dengan hukum-hukum syariat (ajaran) Islam serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram dibawah naungan daulah Islam.

Daulah ini ialah daulah khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan *kitabullah* dan sunnah rasulnya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan Jihad.[17]

Selain HTI ada pula golongan yang menolak yakni Laskar Jihad (LJ) Laskar jihad ialah kelompok paramiliter yang menyatukkan para pemuda kelompok ini aktif di bawah payung organisasi Forum Komunikasi Ahlus sunnah wal jama'ah (FKAWJ), yang pendiriannya secara resmi dicanangkan di dalam acara Tabligh akbar yang di adakan di Yogyakarta pada Januari tahun 2000 sebelum resmi berdiri FKAWJ

[16] Tim penulis HTI, "*Khilafah ajaran Islam, mengapa dikriminalkan ?*", AL ISLAM HIZBUT TAHRIR INDONESIA Melanjutkan kehidupan Islam, (Edisi 856,12 Mei 2017, 15 Sya'ban 1438 H), 2.

[17] Rohmad Suryadi, "Tindakan Golput Aktivis Gerakan Islam di Kota Surakarta" (Surakarta : *Skripsi, Universitas Sebelas Maret (UNS)*, 2009), 85.

sebenarnya sudah ada. Ia berkembang dari jama'ah Ihyaus Sunnah, yang pada dasarnya merupakan gerakan dakwah yang berfokus pada pemurnian iman dan integritas moral pribadi-pribadi.

Laskar Jihad didirikan sebagai perluasan divisi khusus FKAWJ, yang markas pusatnya di Yogyakarta, dengan kantor-kantor cabang di tingkat kabupaten dan provinsi yang tersebar hampir di seluruh provinsi Indonesia. Divisi ini awalnya dibangun sebagai suatu unit keamanan FKAWJ, terutama untuk mengamankan kegiatan-kegiatan umum mereka.

Seperti layaknya organisasi militer Laskar Jihad yang terdiri dari satu brigade yang dibagi kedalam bataliyon-bataliyon, kompi, peleton, dan regu-regu, plus satu seksi intelejen. Empat bataliyon mengambil nama empat khalifah yakni: Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, 'Utsman bin 'Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan setiap bataliyon memiliki empat kompi, setiap kompi memiliki empat peleton, dan setiap peleton memiliki empat regu dengan 11 anggota, pendiri Laskar Jihad ini ialah Ust Ja'far Umar Thalib atau nama trendnya ialah ***JAMARTO***, beliau sekaligus menjadi komandan Laskar Jihad dan dibantu oleh sejumlah komandan lapangan. Simbol kelompok ini adalah dua pedang bersilang di bawah tulisan "*La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah*".[18]

Pada kenyataannya, Laskar Jihad ini muncul sebagai organisasi paramiliter terbesar dan paling terorganisir yang mengirimkan para sukarelawan jihad ke Maluku. Mereka mengaku telah memberangkatkan lebih dari tujuh ribu (7000) pejuang selama lebih dari dua tahun, kehadiran para sukarelawan ini, yang disebar di berbagai wilayah yang berbeda untuk melawan orang-orang Kristen, takayal lagi telah mengubah peta konflik komunal di kepulauan itu.[19]

B. Ayat-ayat Al-Qur'an Memandang Demokrasi

Di dalam Al-Qur'an sebenarnya menurut pengamatan penulis tidak ada kata demokrasi namun yang ada hanya bermusyawarah, dan

[18] Kalimat ini dikenal dengan sebagai *Syahadat* atau *Syahadatain,* yang berarti pengakuan Islam terhadap iman.

[19] Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad Islam, Militansi, dan pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: LP3ES dan KITLV-Jakarta, 2008), 7-8.

Syura yang mana dari dua hal tersebut juga telah mencakup adanya sebuah unsur-unsur demokrasi. Mengenai ayat-ayat demokrasi ini penulis jujur saja agak kesulitan awalnya, namun setelah penulis buka internet dan alhasil disini penulis menemukan ayat bermusyawarah, sehingga penulis mengambil ayat musyawarah untuk pembahasan di dalam topik ini. Hanya dua ayat saja yang penulis ambil, yakni: Q.S Ali Imran ayat 159, dan Q.S Asy-Syura ayat 38.

1. QS *Ali Imraan:* 159

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ
فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS Ali Imran : 159).[20]

Di atas ada kata yang penulis garis bawahi, sebab dikata tersebut ada kata وَشَاوِرۡهُمۡ dimana kata tersebut bermakna sebuah Musyawarah, dan di dalam Tafsir Ibnu katsir, Rasulullah senantiasa mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah mengenai suatu persoalan yang terjadi untuk menjadikan hati mereka senang dan supaya mereka lebih semangat dalam berbuat. Sebagaimana beliau pernah mengajak mereka bermusyawarah pada waktu perang Badar mengenai keberangkatan untuk menghadang pasukan orang-orang kafir. Para sahabat berkata Ya Rasulullah, jika engkau menyebrangi lautan, niscaya kami akan ikut kepada mu. Dan jika engkau menelusuri daratan dalam kegelapan ke Barkil Ghimad, niscaya kami akan ikut bersamamu. Kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan kepada kaum Musa kepadanya, dimana kaumnya itu berkata: "Pergilah engkau bersama *Rabb-mu* dan berperanglah, kami akan duduk-

[20] Al-Qur'an, 2:159.

duduk di sini saja". Tetapi kami akan senantiasa bersamamu, didepan, di kanan, dan kirimu untuk berperang.

Selain itu Rasulullah juga mengajak mereka bermusyawarah, di mana mereka harus berkemah, hingga akhirnya al-Mundzir bin 'Amr menyarankan untuk bertempat di hadapan lawan. Dan masih banyak lagi contoh Rasulullah bermusyawarah yang kami tidak bisa jelaskan semuanya secara menyeluruh.[21]

2. QS *Asy-Syuura*: 38

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya kepada mereka." (QS Asy Syura : 38).[22]

Dalam Tafsir Al Azhar kata yang penulis garis bawahi, ditafsirkan sebagai berikut, maka datanglah lanjutan ayat: "*sedang urusan-urusan mereka adalah dengan musyawarat diantara mereka*", sedangkan sudah jelas bahwa urusan itu ada yang urusan peribadi dan ada urusan yang mengenai kepentingan bersama, supaya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu sebabnya maka ujung ayat dipatrikan dengan: "*Dan sebahagian dari rezeki yang kami anugrahkan, mereka nafkahkan.*" (ujung ayat 38.) sebab suatu musyawarah tentang urusan bersama tidak akan mendapat hasil yang diharapkan kalau tidak mau menafkahkan sebahagian kepunyaan kepribadian peribadinya untuk kepentingan bersama.[23]

Penulis sedikit pula menyimpulkan bahwa sebagai seorang muslim kita juga harus senantiasa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelsaikan setiap permasalahan yang terjadi. Agar apa? agar kita menjadi seorang umat yang kuat, serta *ummatan wasatan*, *ummatan wasatan* ialah umat Islam yang dipilih sebagai umat yang berada diposisi tengah, adil dalam menangai sesuatu hal sehingga menjadi yang terbaik dan paling sempurna. [24]

---

[21] 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katisir Jilid 2,* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), 221.

[22] Al-Qur'an, 42:38.

[23] Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XXV-XXVI,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 36.

[24] Sabri Mide, "Ummatan Wasatan Dalam Al-Qur'an" (Makassar: *Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin*, 2014), 25.

Kesimpulan

Sesungguhnya dalam Islam tidak mengenal kata demokrasi akan tetapi dalam aspek atau nilai-nilai Islam ada gagasan demokrasi, egaliter dan persatuan. Mengenai demokrasi pemahaman umat Islam terbagi menjadi 3 yakni: pro, moderat, dan kontra. Dari 3 pemahaman ini mereka memaknai demokrasi secara beda-beda, ada yang mengatakan bahwa demokrasi buatan Barat yang memang sengaja diciptakan untuk merusak nilai-nilai Islam. bahkan untuk menandingi demokrasi mereka ingin mengagas khilafah Islam internasional dimana seluruh dunia di bawah 1 komando, akan tetapi hal yang demikian apabila ditinjau dari aspek, politik, sosial, budaya, dan agamis tentu akan sangat sulit mengingat tidak semua negara-negara di dunia khususnya dunia Islam masih banyak yang belum menginginkan yang demikian. Secara langsung demokrasi di dalam al-Qur'an memang tidak ada namun yang ada ialah Musyawarah dan Syura yang mana dari 2 hal ini telah ada unsur demokrasinya.

Oleh karena itu marilah kita saring secara bijak berbagai budaya yang ada dalam aspek-aspek demokrasi agar nantinya kita dapat mengambil yang positif dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta mengutamakan musyawarah dan mufakat yang memang hal yang demikian sudah ada akar sejarahnya dari masa-masa awal-awal Islam. dapat penulis katakana model yang demikian (musyawarah dan mufakat) merupakan demokrasi ala Islam yang penting untuk di amalkan.

BAB 3

DINAMIKA POLITIK ISLAM MALAYSIA

Malaysia merupakan sebuah negara yang berada di dalam kawasan Asia tenggara, yang mana negeri ini terdiri dari beragam etnis dan agama. Dari hasil sensus nasional tahun 2000 mencatat bahwa etnis melayu berjumlah 65,1% dari seluruh jumlah penduduk sisanya terdiri dari 26% Cina; kira-kira 6,9% India dan 2% lain-lain. Berbicara soal agama, Islam merupakan agama mayoritas di negeri Jiran tersebut. Survey yang dilakukan oleh *Pew Resarch Center's forum on Religion and Public Life* menyebutkan bahwa Muslim Malaysia berjumlah 16.581.000 jiwa, atau 60,4% dari total agama penduduknya sementara sisanya 19,2% memeluk Budha, 9% beragama Kristen, 6,3% Hindu, dan sisanya sebanyak 2,6% saja yang memeluk agama Tionghoa. Sisanya memeluk agama yang lainnya, termasuk di dalamnya berupa aliran kepercayaan (animisme), agama rakyat, Sikh, dan keyakinan yang lainnya.[1]

Secara konstitusional, Islam menikmati status resmi sebagai agama negara Federasi Malaysia, walaupun praktek agama-agama lain juga dijamin oleh undang-undang.Secara politik, peran Islam bahkan lebih penting lagi. Islam bukan lagi sebagai faktor penyatu bagi orang-orang Melayu akan tetapi Islam juga muncul sebuah ungkapan umum bagi identitas politik Melayu. Kebijakan Islami

[1] Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Syarif Kasim, 2014), 115.

Pemerintah pada gilirannya kemudian melahirkan seluruh tingkat kegiatan yang mengkonsolidasi kehadiran Islam secara lebih jauh dalam negara Malaysia.[2] Di dalam tulisan ini akan membahas tema bagaimana Islam dan Pemerintahan Malaysia, dengan mencakup juga sub pembahasan yakni: Kedudukan Islam dalam UUD Malaysia, Sistem Pemerintahan di Malaysia, dan Isu Negara Islam di Malaysia. Di dalam Konstitusi Malaysia, Islam merupakan sebuah agama yang diakui hal ini termaktub dalam Pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa "*Islam is the religion of Federation; but other religions may be practiced in peace harmony in any part of the Federation*". Islam adalah agama Federasi namun penganut agama lain diberikan kebebasan untuk mengamalkan ajaran mereka. Di dalam pasal ini disebutkan bahwa konstitusi memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non muslim. Untuk sumber yang lengkapnya tentang UUD Malaysia mengenai Islam di sini penulis juga mencantumkan alamat Website Perlemen Perlembagaan Persekutuan Federal Malaysia, yang akan kami ulas di dalam pembahasan tulisan ini.[3]

Pada tahun 1980, masyarakat Malaysia memulai menemukan momen untuk kembali membangun proses Islamisasi baik pembangunan domestic maupun internasional, sebagaimana yang diungkapkan oleh aktivis terkenal Malaysia Chandra Muzaffar. "*Islamisasi merupakan proses yang dibentuk sebagai hukum Islam, nilai dan praktek yang diselaraskan terhadap signifikasi kebesaran negara, masyarakat dan budaya*". Dalam kasus Malaysia fenomena Islamisasi merupakan pergeseran sosial bersamaan dengan perbedaan implikasi politik yang ada, Islamisasi yang dipercepat oleh UMNO dan PAS secara berkesinambungan memberikan pertanyaan bagi Islam yang ideal dan sesuai untuk diterapkan dalam legitimasi, popularitas, dan pilihan yang harus didukung.[4]

---

[2] Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1993), 280-283.

[3] Helmiati, *Islam dalam Masyarakat dan Politik Malaysia* (Riau: Suska Press UIN Suska Riau, 2007), 171.

[4] Joseph Chinyong Liow, *Piety and Politics Islamism in Contemporary Malaysia* (New York: Oxford University Press, 2009), 64.

Terlepas keterbatasan Implikasi dari ketentuan konstitusi Malaysia tentang posisi Islam sebagai agama resmi negara, yang jelas pengakuan negara atas Islam sebagai agama resminegara turut mendukung menguatnya Islam di Malaysia. Karena pengakuan itu dapat berimplikasi politis, hal ini mendapatkan momentumnya ketika Malaysia terdapat 2 partai Melayu: Partai UMNO yang mendominasi pemerintahan dan partai PAS yang merupakan partai oposisi Islam.[5] Pimpinan UMNO yang di lihat banyak mengmbil bagian dalam menjelaskan konsep negara Islam Malaysia diantaranya ialah Dato' Nakhaiei Hj. Ahmad yaitu Yang Dipertua YADIM, Wan Zahidi Wan Teh yaitu Pegawai Unit Penerangan Khas Kementerian Penerangan Malaysia.dan masih banyak lagi para pimpinan tokoh yang terlibat dalam isu negara Islam Malaysia yang akan dibahas di dalam penulisan ini, beserta metode dan kaidahnya.[6]

A. Kedudukan Islam Dalam UUD Malaysia

Malaysia terdiri dari masyarakat plural dengan keragaman penduduknya, akan tetapi citra dan nuansa Islam sangat menonjol terutama dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu faktor penting lainnya yang turut memperkuat pengaruh, citra dan nuansa Islam tersebut terkait erat dengan posisi Islam dalam konstitusi negara ini. Dalam konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi negara. Pasal 3 ayat 1 menegaskan "*Islam is the religion of the Federation; but otherreligious may be practiced in peace and harmony in any part of the Federation*".

Islam adalah agama Federasi namun pada saat yang sama konstitusi (UU) memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-Muslim.Mereka berhak menjalankan agama mereka, memiliki harta kekayaaan, mendirikan sekolah-sekolah agama, mengurusi perkara-perkara mereka sendiri. Namun mereka tidak diperkenankan untuk berdakwah atau menyebarkan keyakinan

---

[5] Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Syarif Kasim, 2014), 127.

[6] Mohammad Azriel, Mohd Alwee Y, "*Islamic Country Polemic Between Malaysian Party (PAS) and Malays Organization (UMNO): A Comparative Analysis*",https://umexpert.um.edu.my> publication diakses pada 06 September 2018.

mereka di kalangan kaum muslim; aturan ini dimaksud agar untuk membatasi pertumbuhan dan pengaruh mereka di wilayah-wilayah lain. Meskipun orang-orang non-Muslim dilindungi konstitusi dan hukum, hak dan kewajiban mereka dan kaum muslim Melayu tidaklah sama. [7]

Dalam tulisan ini penulis juga mengutip Undang-undang Malaysia Perlembagaan dan Persekutuan, di dalam Bagian 1 mengenai Negeri-negeri, Agama Undang-undang Bagi Persekutuan, pasal 3 mengenai Agama bagi persekutuan penulis akan menuliskan 5 point dalam pasal 3 yaitu :

1.1 *Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dimana-mana bahagian Persekutuan.*

1.2 *Di dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai Raja, kedudukan Raja adalah sebagai ketua Islam di negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapan oleh perlembagaan negeri itu, dan, tertakluk kepada perlembagaan itu, segala hak, keistimewaan, prerogative dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai ketua agama Islam, tidaklah tersentuh dan tercatat; tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang berkenaan dengannya Majlis Raja-Raja telah bersetuju bahawa perbuatan. Amalan atau upaca itu patut diperluas keseluruh persekutuan, setiap Raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai ketua agama Islam membenarkan yang di-Pertuan Agung yang mewakilinya.*

1.3 *Perlembagaan-perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, dan Serawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam dinegeri itu.*

1.4 *Tiada apa-apa jua dalam ini mengurangkan mana-mana peruntukkan lain dalam Perlembagaan ini.*

1.5 *Walau apa pun apa-apa jua dalam perlembagaan ini, yang di-Pertuang Agong hendaklah menjadi ketua agama Islam diwilayah Persekutuan-Persekutuan Kuala Lumpur. Labuan*

[7] Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Syarif Kasim, 2014), 124.

dan PutraJaya: dan bagi maksud ini Parlimen boleh melalui Undang-Undang membuat peruntukkan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam dan bagi menumbuhkan suatu Majlis untuk menasehati yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam.

Itulah 5 pasal yang termaktub di Undang-undang Malaysia Perlembagaan dan Persekutuan, mengenai agama Islam.[8] Terlepas dari makna dan ruang gerak yang diberikan konstitusi kepada Islam untuk berkembang, terkait dengan pasal 3 di atas, bagaimanapun ketentuan tersebut tetap memberikan tempat yang khusus bagi peran Islam dalam masyarakat plural seperti di Malaysia. karena selain memberikan kedudukan Islam yang istimewa bagi Islam, Konstitusi juga memberikan hak perlindungan kepada Islam dengan memberikan *Privilege* dan *legitimasi* kepada para Sultan untuk memimpin agama, sebagai pembela Islam, pendidikan, dan kebudayaan melayu, baik pada tingkat negara maupun negara-negara bagian.[9]

Secara politik, peran Islam bahkan lebih penting lagi. Dimana Islam telah bukan saja menjadi faktor penyatu bagi orang-orang Melayu tapi muncul sebagai ungkapan umum bagi identitas politik Melayu. Evolusi politik negara-negara Melayu tradisional tergantung Islam sebagai wahana penting bagi perubahan dan stabilitas.Juga Islam yang menjadi ramuan bagi resistensi anti kolonial orang-orang Melayu tradisional. Partai-partai politik Melayu selalu mengeklaim mendukung cia-cita islam, yang tanpa klaim itu mereka tidak mungkin tetap bertahan. Secara elektoral, politis ataupun ideologis, Islam tetaplah suatu faktor yang tidak dapat diabaikan oleh partai politik manapun.Persepsi umum mengenai Malaysia sebagai bangsa Muslim yang patut di contoh oleh bangsa-bangsa Muslim lain, apapun alasan pujian tersebut, merupakan akibat dari salah baca yang serius terhadap situasi yang sebenarnya.[10]

---

[8] www.kptg.gov.my diakses pada 06 September 2018.

[9] Helmiati, *Islam dalam Masyarakat dan Politik Malaysia* (Riau: Suska Press UIN Suska Riau, 2007), 173.

[10] Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1993), 282-286.

B. Sistem Pemerintahan di Malaysia

Malaysia adalah sebuah Negara Federasi yang terdiri dari tiga belas Negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi.Ibukotanya ialah Kuala Lumpur, sedangkan Putra Jaya menjadi pusat Pemerintahan persekutuan. Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional.Kepala Negara persekutuan Malaysia adalah yang Dipertuan agung, atau biasa disebut raja Malaysia.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa Parlemen Malaysia memiliki 3 komponen yaitu; yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat, maka keanggotaan Parlemen Malaysia adalah berbeda dengan ketiga-tiga komponen tersebut. Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala parlemen dipilih Raja-Raja Melayu, setiap 5 tahun sekali atau apabila yang di-Pertuan Agong yang sebelumnya meninggal dunia, maka kehilangan sebagai Yang di-Pertuan Agong atau tidak dapat menjalankan tugas sebagai yang di-Pertuan Agong karena sesuatu hal yang menghalang. Periode jabatan yang di-Pertuan Agong adalah selama 5 tahun, dan boleh melepas jabatan dengan menulis surat kepada raja-raja.Yang di-Pertuan Agong sekarang (2018) ialah Tengku Muhammad Faris Petra Ibni Tengku Ismail Petra.[11]

Sistem Pemerintahan di Malaysia bermodelkan Sistem Pemerintahan Parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Britania. Dalam praktiknya kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada legislatif.Yudikatif diperlemah oleh tekanan oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Muhathir.Kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah Negara bagian. Sejak kemerdekaan pada tahun 1957 Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut barisan nasional (disebut pula aliansi).

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa

---

[11] Muhammad Fawwaz Hadi bin Ismail, Parlemen Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Relevansinya Dengan Doktrin Ketatanegaraan Islam (Jakarta: *Skripsi,* UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 49-50.

Perdana Menteri harsuslah anggota dewan rendah (dewan rakyat) yang direstui yang Dipertuan Agung dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Pemerintah Negara bagian dipimpin oleh Menteri besar di negeri-negeri Malaya atau ketua Menteri di negara-negara yang tidak memiliki monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam dewan undangan negeri. Pada setiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri haruslah seorang suku Melayu muslim, meskipun penguasan ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuatan politik di Malaysia sangat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu, kekuasaan memainkan peran yang begitu penting dalam melakukan perubahan.

C. Isu Negara Islam Malaysia

Pemerintahan mulai berjalan aktif dalam memajukan Islam. Dibawah perdana menteri pertama Malaysia, Teuku Abdul Rahman (1957-70), pemerintahan telah melaksanakan politik-politik akomodasi sampai-sampai mengkerdilkan peranan Islam kecuali menjelang pada masa-masa pemilihan umum dimana saat mereka harus bersaing dengan PMIP dalam kampanye. Memang, pada saat ini ketegangan sangat sering berkembang di dalam tubuh UMNO karena anggota-anggota Parlemen yang lebih tradisional dan para pemimpin partai daerah merasa bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menaruh rasa perhatian terhadap kepemimpinan Islam.

Pada masa ini pula orang-orang pemerintah ingin agar kantor di buka pada hari Jum'at, dengan alasan adanya sebuah pasaran timah internasional. Mereka menyatakan perlunya mengikuti etika kerja Protestan, bahkan seorang menteri negara memuji manfaat alkohol. Disamping itu, adapula sejumlah peristiwa yang terjadi pada tahun 1969 serangkaian huru hara berdarah antara golongan China dan Melayu. Dampak dari huru-hara ini menyebabkan para politisi Islam

Melayu berpikir jauh dan menuntut agar usaha yang lebih sungguh-sungguh dilakukan untukmencapai tujuan yang semula dicanangkan yakni persamaan komunal.

Namun, dengan latar belakang konflik dan komunal ini, di Malaysia ini sampai akhir tahun 60-an telah berkembang menjadi pola konstitusi yang memenangkan Islam tetapi tetap menjamin kebebasan beragama bagi penganut keimanan yang lain. Periode itu pula adalah masa ketidakjelasan bagi politik aliansi karena pemimpin-pemimpin pemerintah di satu pihak berusaha menampung sejawat kerjanya yang di China dan India. Pada tahun 70-an nampak adanya dukungan terhadap Islam semakin meningkat, di samping itu juga masih melakukan politik akomodasi.

Pemerintah mulai memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok dakwah baik segi keuangan maupun bahkan dakwah. Disamping itu adapula faktor pendorong kebangkitan kembali Islam di Malaysia pada dawarsa itu adalah embargo minyak pada tahun 1973 yang dilakukan OPEC dan semakin meningkatkan kerjasama dan aktivitas diantara negara-negara Islam di Timur Tengah. Beberapa komentar sinis mengatakan bahwa semakin besarnya perhatian para politisi Malaysia terhadap Islam mencerminkan adanya sebuah keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari negara-negara Arab atau jaminan untuk mendapatkan minyak pada waktu embargo yang mungkin terjadi dimasa mendatang.Manifestasi dari sikap yang berubah ini adalah sebuah komentar-komentar pemimpin-pemimpin politik dan agama yang dikutip oleh pers dan demonstrasi oleh masa pada tahun 1973 saat perang Arab-Israel 1973.

Ada pula faktor lain yang mendorong kebangkitan Islam adalah banyaknya perpindahan golongan melayu ke daerah perkotaan dan masuknya anak-anak Melayu ke Universitas, baik dalam maupun luar negeri. Dalam dasawarsa ini jumlah golongan Melayu, terutama generasi mudanya berpindah keperkotaan semakin meningkat. Banyak dari mereka yang ikut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pemerintah tetapi juga banyak dari mereka yang melibatkan diri mereka didalam kegiatan industri dan perdagangan yang semakin

dikembangkan akhir-akhir ini, sebagian urbanisasi adalah hasil dari kebijaksanaan ekonomi baru yang bertujuan untuk melibatkan lebih banyak orang Melayu dalam kancah ekonomi modern. Diperkirakan bahwa sampai tahun 1980, 32% daerah perkotaan Malaysia di tempati orang Melayu.

Dalam tahun-tahun terakhir ini timbul bermacam-macam tindakan sebagai manifestasi kebangkitan Islam di Malaysia telah timbul. Beberapa nampak dangkal, sedang beberapa lainnya mempunyai dampak yang besar bagi masa depan politik negara. Diantara hal-hal yang nampak dangkal ialah perubahan cara berpakaian, meningkatnya pidato, dan pembicaaan yang menyongkong Islam. Banyak pengamat yang mencatat bahwa pemakaian busana Muslim tradisional meningkat terutama di kalangan wanita.

Disamping itu pidato tentang Islam dalam bermacam-macam seginya juga semakin meningkat walaupun hal ini selalu merupakan sebuah bagian dari perdebatan politik di Malaysia. Dengan demikian, yang kita lihat selama ini adalah lajunya kecenderungan masalalu, diantara hal-hal yang menjadi bahan perdebatan adalah perlunya sokongan yang lebih besar terhadap tujuan Islam bagi masyarakat Malaysia. Beberapa pernyataan tampak remeh, seperti misalnya sosis yang di import dari Australia mengandung Babi supaya kesucian Islam tercemar.

Contoh yang menunjukkan adanya perubahan suasana ini adalah adanya sebuah perubahan suasana dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk lebih ketat melaksanakan hukum-hukum Islam dan mewujudkan negara Islam. Sehubungan dengan yang demikian maka pimpinan agama dan pimpinan politik, termasuk pemimpin PAS, menuntut diadakannya amandemen konsitusional yang melarang segala tindakan pemerintah yang betentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam, manifestasi dari semangat kebangkitan Islam yang paling dramatis dan paling banyak dipublikasi adalah penodaan tempat suci Hindu selama 2 tahun ini.Tanda-tanda anti terhadap pandangan-pandangan Kristiani nampak pada kelompok-kelompok dakwah Islam, tetapi tindakan kekerasan tidak pernah terjadi atas agama-agama lain sampai tahun 1978. Pada tahun itu dimulailah

rangkaian serangan terhadap candi-candi Hindu di semenanjung Malaysia tahun 1979 telah terjadi 24 serangan-serangan serupa.

Pada tahun 1979 di Malaysia telah terdapat 7 kelompok dakwah yang besar dan aktif, 7 kelompok itu adalah :

1. Institut Dakwah Islam, yang disponsori lembaga dakwah PM, (*The Prime Minister's Departement*),
2. Yayasan Dakwah Islam, yang disponsori oleh Yayasan Islam di Malaysia, dan di luar negeri,
3. ABIM, Gerakan Pemuda Muslim Islam organisasi swasta yang menerima bantuan dana dari Timur Tengah
4. PERKIM, Organisasi Mualaf Muslim dipimpin oleh Teuku Abdul Rahman dan menerima bantuan juga dari pemerintah dan pihak luar negeri,
5. Darul Arkam, Kelompok intelektual yang agamis yang berorientasi lebih kepada kehidupan komunal,
6. Jamiyah Tabligh Islamiah kelompok intelektual agamis,
7. Jamaatul Tabligh Muslim India radikal.[12]

Sejak Tahun 1981, ketika Mahathir Mohammad menjadi perdana menteri pemerintahan pimpinan UMNO berupaya mempertahankan kebangkitan Islam tersebut dengan program Islamisasinya, dan dengan serentak pula mempertahankan kepemimpinan langsung dan control atas urusan-urusan keislaman, yang dapat dilihat dari sejumlah tindakan yang ditempuhnya pada tahun 1982 mereka mengambil hati dengan mengooptasi Anwar Ibrahim, pemimpin ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) yang karismatik, organisasi fundamentalis politis yang terpenting di negara itu. Pada periode ini banyak kebijakan politis yang menguntungkan umat Islam, seperti dengan berdirinya sejumlah institusi baru misalnya: Bank Islam Malaysia, yang disusul oleh perusahaan asuransi Islam dan pegadaian Islam dan pegadaian Islam, Universitas Islam

[12] Jhon.L.Esposito, *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 317- 340.

Internasional, Yayasan Pembangunan Islam Malaysia, dan akademik pelatihan guru Islam.

Langkah-langkah yang dilakukan Mahathir telah memperbaiki mandate UMNO sebagai partai Islam dan membantu UMNO dalam pemilihan umum menempatkan pesaingnya PAS "di luar Islam" namun belum jelas apakah Islamisasi ekstensif yang telah berjalan sejauh itu mengurangi ketetapan hati kelompok-kelompok fundamentalis untuk mengubah konstitusi sehingga memungkinkan pemberlakuan hukum administrasi Islam secara federal. Apabila UMNO merasa bahwa melakukan Islamisasi lebih lanjut merupakan suatu keharusan, maka hal ini akan melahirkan persoalan-persoalan negara yang plural baik dari aspek etnis dan agama.

Sehingga pada pemilihan raya tahun 1995 UMNO berhasil menunjukkan kejayaannya lewat kerjasama di dalam barisan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran yang tinggi dari orang Melayu untuk memberi kepercayaan pada UMNO, bukan kepada semangat 46 ataupun PAS yang juga oartai orang Melayu. Dukungan kuat yang diberikan orang Melayu kepada UMNO menunjukkan kepercayaan kuat masyarakat, bahwa UMNO menjadi partai pembela bangsa Melayu dan Islam.[13]

Pada tahun 1987 Mahathir mengonsolidasi dan memodifikasi demokrasi lokal bersamaan dengan penyentuhan sistem yang otoriter. Yang menjamin akan basis kekuatan politiknya yang akan membuat politik musuhnya menahan dukungan terhadap para loyalis mereka, disamping itu pula dia juga mengakui bahwa Inggris merupakan mitra bisnis internasional dan pembangun ekonomi Malaysia. Di waktu yang sama pula pemerintah Malaysia mendukung adanya sebuah reformasi yang memberikan pemahan tentang Islam, serta melukiskan kebenaran Islam sebagai suatu agama yang dinamis, bersamaan dengan etika kinerja sokongan Malaysia atas mendekatnya serangan terhadap binis dan industri. Dan visinya ialah agar Malaysia

---

[13] Hamdan Daulay, Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia (Dari wacana Syari'at Islam Hingga Konsep Islam Hadhari), (*Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Sari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013), 148-149.

menjadi sebuah negara yang bisa menasionalisasikan industrinya pada tahun 2020.[14]

Sepanjang tahun 1990-an perdebatan politik tentang Islam banyak menyentuh aspek pelaksaan nilai Islam itu sendiri dan diselaraskan pula dengan cita-cita Mahathir Mohammad yakni memodernisasi masyarakat Malaysia melalui dasar perindustrian yang dikenalkan. Bagi Mahathir Mohammad, umat Islam harus banyak melaksanakan ijtihad untuk mengikuti kemajuan zaman. Kalau umat Islam ingin maju dalam segala aspek kehidupan, maka konsep tradisionalis yang diusung PAS selama ini tidak relevan lagi.

Sebagai Presiden UMNO, Mahathir Mohammad menyeru kepada anggotanya agar jangan mempersoalkan isu keanggotaan warga negara non muslim di tubuh UMNO, karena konstitusi UMNO membenarkan penyertaan mereka. Dalam mewujudkan dasar toleransi seperti itu, dalam perhimpinan agung UMNO pada 10 November 1991 Mahathir mengubah kata "Anak Melayu" dengan kata "rumpun Melayu" pada lirik lgu resmi UMNO yakni "Bersatu, Bersetia, Berkhidmat" untuk menggambarkan komposisi warga negara non Melayu, dan non Muslim sabah sebagai anggota UMNO juga.[15]

Pada tahun 2001 semasa pemilihan raya umum di negeri Serawak, DAP telah mengisytiharkan untuk keluar dari Barisan Alternatif yaitu kerjasama gabungan partai pembangkang. Atas alasan tidak setujunya keinginan PAS untuk menegakkan negara Islam melalui Barisan Alternatif (BA).Jelasnya Isu negara Islam telah menjadi topik utama yang digunakan pihak UMNO untuk memerangkap PAS melalui media masa baik cetak, maupun elektronik.

Walaupun demikian terjadilah kehangatan di dalam suhu politik ketika itu, namun sebenarnya UMNO[16] telah membuat

---

[14] Othman bin Abdullah, "Islam And Democracy: Reflecting The Role Of Islam In Malaysia And Indonesia", (California:*Tesis,* Naval Postgraduate School Monterey, 2002), 38.

[15] Hamdan Daulay, Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia (Dari wacana Syari'at Islam Hingga Konsep Islam Hadhari), (*Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Sari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013), 148-149.

[16] UMNO dan PAS adalah dua partai utama Melayu yang selalu bersaing dipentas politik untuk menguasai pentadbiran negeri Malaysia. UMNO yang aslinya

pelbagai persediaan untuk menjawab tuduhan PAS yang mengatakan bahwa Malaysia adalah negara Islam. UMNO sadar bahwa label "Malaysia bukan negara Islam" mendatangkan kesan yang amat buruk bagi UMNO dari segi sokongan umat Islam. Oleh yang demikian Presiden UMNO (PM) ingin mengetahui jawaban tegas dan hujah konkrit yang dapat disimpulkan dengan kadar segera bahwa Malaysia bukan negara Islam. Sebab itu, dalam, perkembangan yang berlaku, seluruh tumpuan yang diberikan terhadap usaha menambah dan mengukuhkan hujah bahwa Malaysia adalah negara Islam. Diantara usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan ialah debat olok-olok yang dibuat oleh UMNO berkaitan dengan isu negara Islam dan isu takfir.

Langkah seterusnya adalah dengan mengeluarkan buku dan kertas kerja yang menguraikan konsep negara Islam Malaysia. antaranya kertas kerja/buku negara yang ditulis Wan Zahidi Wan Teh dan kertas kerja yang berkaitan dengan negara Islam yang ditulis oleh Datok Haji Nakhaei Hj Ahmad.[17] Ketika Mahathir mundur dari arena perpolitikan Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi menggantikannya sebagai pucuk pimpinan partai pemerintah, barisan nasional, dalam pemilu tahun 2004 yang merupakan pemilu pertama Abdullah sejak perdana menteri beliau memperoleh kemenangan yang signifikan untuk barisan nasional (koalisi UMNO), Dengan pencapaian 198 kursi dari 220 kursi di parlemen, di Terengganu partainya mengalahkan PAS yang sebelumnya partai PAS ini merupakan penguasa Kerajaan Negeri. Selain itu, Barisan Nasional juga hampir mengalahkan PAS di Kelantan.Kemenangan ini secara luas dianggap sebagai tanda Islam Hadhari (visi Islam yang sederhana) diterima dengan di fundamentalisme agama serta dukungan kepada konsep dasar pencegahan anti korupsinya.[18]

---

namanya ialah (United Malays National Organisation) yang berdiri pada tahun 1946.

[PAS] adalah partai saingan UMNO, yang memiliki kepanjangan nama (Partai Islam se Malaysia. partai ini didirikan pada 1951 dan salah satu tujuannya ialah dengan merealisasikan kehidupan yang berpandukan kepada Syari'at Islam.

[17] diakses pada 8 September 2018, 2-4.

[18] Mohd Ubaidah bin Abdullah, "Pemikiran Tun Abdullah Ahmad Badawi Tentang Islam Hadhari", (Riau: *Skripsi,* UIN SUSKA, 2011), 23.

Islam Hadhari ialah pemahaman akan peradaban Islam yang komprehensif, konsep ini bukanlah konsep inklusif yang selalu memiliki peran penting atas progress dalam aspek perspektif Islam yang terfokus pada ekonomi, sosial, dan perpolitikan, yang mana dalam kulit luarnya bertujuan membangun psikis dan spiritual. Islam Hadhari juga digunakan Badhawi dalam melakukan pendekatan dan pembangunan holistic pada Malaysia. kejadian ini memberikan pergeseran pada pembangunan dan penedekatan yang mulanya berlandaskan paradigma sekulaisme menjadi paradigma tauhid, pergeseran ini memberikan perubahan pembangunan pemikiran masyarakat, harmoni sosial, dan progress ekonomi.

Badhawi menuturkan "*Islam Hadhari is not a new religion. It is not teaching, nor is a new madhab (School Jurisprudence). Islam Hadhari is an effort to bring the Ummah (nation) back to basics, back to fundamentals as prescribed in the Qur'an dan Hadith, that from the foundation of Islamic civilization*". Islam Hadhari yang digagas Badhawi berlandaskan 10 prinsip, yang didemonstrasikan oleh bangsa dan komunitas muslim yaitu;

1. Keimanan dan kesalehan pada Allah.
2. Keadilan dan kepercayaan pada pemerintah.
3. Kebebasan dan kemerdekaan perseorangan.
4. Penguasaan atas keilmuan.
5. Keseimbangan dan pembangunan ekonomi secara komprehensif.
6. Kualitas hidup yang baik.
7. Melindungi hak dan kebenaran grup minoritas serta wanita.
8. Budaya dan integritas moral.
9. melindungi lingkungan.
10. Menguatkan pertahanan.

Prinsip ini digunakan dan diimplementasikan dan mendekatkan diantara grup multikultural dan *religious* Malaysia keadaan ini tidak dikarenakan ketakutan dan keterpaksaan. Prinsip ini merupakan

suatu cara yang menguatkan identitas seorang muslim atas tantangan global di era ini.[19]

September 2004, ketika bekas Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim bebas, yang telah dikurung oleh bekas Perdana Menteri Mahathir, memuji Abdullah di khalayak banyak karena tidak campur dengan, mengubah keputusan terhadap kasus liwatnya. Tahun 2008 saat pemilu Barisan Nasional yang diketuainya gagal memperoleh suara yang signifikan seperti pemilu 2004 yang lalu dimana mayoritas 2/3 kursi parlemen dan kehilangan kekuasaan di 4 negeri yakni Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Perak kepada oposisi serta sekali lagi gagal mengambil alih kekuasaan di Klantan dalam pemilihan umum Malaysia 2008. Oleh karena itu Mahathir, berpendapat bahwa Abdullah harus mempertimbangkan peletakan jabatan sebagai Perdana Menteri Malaysia pasca kegagalan besar Barisan Nasional didalam pemilu itu.[20]

Tahun 2008 juga menandai semaraknya pemilu Malaysia, terbesit suatu kepentingan untuk mencoba merealisasikan pembicaraan UMNO dan PAS tentang adanya pembentukkan suatu perjanjian untuk melindungi persatuan Muslim Malaysia. sebab belakangan ini dirumorkan bahwa Presiden PAS Haji Had Awang berkunjung ke London untuk melihat berita yang merepresentasikan persaudaraan Muslim disana. Beberapa bulan kemudian, tepatnya disaat perkumpulan Majelis umum yang ke 54, PAS menjadi tuan rumah di dalam perkumpulan persaudaraan Muslim Jordania, PAS menghadirkan Dr Amman Said sebagai seorang tamu yang terhormat. Secara umum, kebijakan PAS ini tentu memberikan sebuah kemanfaaan dari lingkungan secara keseluruhan yang mana hal ini terdorong akibat adanya invasi Amerika atas Afganistan, dan Iraq.Yang mana apabila dilihat nampaknya hal ini membuat peletakan

---

[19] Mohammed Sharif Bashir, Islam Hadhari: Concept and Prospect (*Article*: January 2005), 2.

[20] Mohd Ubaidah bin Abdullah, "Pemikiran Tun Abdullah Ahmad Badawi Tentang Islam Hadhari", (Riau : *Skripsi, UIN SUSKA,* 2011), 24.

Islam dibawah pengepungan yang berlarut-larut dari permusuhan kekuatan global.[21]

Pada 3 April 2009, Abdullah Badawi ahirnya melepaskan jabatannya kepemimpinan bangsa dan menyerahkannya kepada wakilnya yang terdahulu dan baru diangkat menjadi presiden UMNO Najib Razak, sejak mengambil alih kekuasaan dia memperkenalkan tentang 'Satu Malaysia' slogan tersebut ditujukam atas kemenangan kembali dari dukungan pemilih non muslim yang merasa tidak puas dikarenakan penambahan pengeluaran dari birokrasi politik Islam Abdullah, Najib juga mewaspadai dan tidak mengasingkan dari aliansi UMNO atas konstituante tradisional Muslim yang mana mereka juga meminta adanya sebuah upaya yang tegas kemajuan yang berkesinambungan struktur negara Islam setelah kemajuan yang dibuat sejak masa jabatan Dr Mahathir dan Abdullah.[22]

Sejak mengambil alih pemerintahan, Najib Razak memperkenalkan jargonnya "Satu Malaysia" dengan pokok-pokok sekema untuk menyediakan kebebasan dan membuka forum diskusi yang membahas pokok-pokok pemikiran yang sangat mendalam yang ditujukan atas (Malaysia) sebagai sebuah bangsa. Akan tetapi pandangan yang disekeptis itu tadi tidak lebih dari sebuah cara untuk memulihkan dukungan dari pemilih yang kecewa bersamaan dengan lintasan administrasi Islam Abdullah Badawi. Di era Najib Razak ini dapat pula disaksikan maraknya perkembangbiakan kaum Islam liberal dan budayawan sekuler NGOs di Malaysia.selain dari pada itu turut pula ditopang dengan kehadiran pengeklaiman orang non Muslim yang mengaku menjadi korban dari badan hukum Islam Malaysia, NGOs juga menyuarakan atas kepentingan muslim wanita, LGBT, dan pengikut sekte Muslim orthodox. Setiap anggota grup atau kelompok memberikan sebuah pengeklaiman sebagai korban dari pelegalan sistem sharia.

---

[21] Ahmad Fauzi Abdul Hamid, "Politically Engaged Muslims In Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009)", *Asian Journal of Political Science*, Vol. 18, No. 2, August 2010, 154-176), 160.

[22] Ibid., 169.

Pada pemilu tahun 2013 yang diselenggarakan di bulan Mei pemerintah Malaysia sangat mengantisipasi.Adanya sebuah upaya atau persetujuan yang dapat membuat pukulan telak kepada Najib Razak dan koalisi BN (Barisan Nasional).Dan pada ahirnya koalisi BN menang tipis dengan pesaingnya Anwar Ibrahim.[23] Pada tahun 2015 Najib Razak terkena kasus Korupsi yang bersar diperkirakan mencapai 681 juta US dolar versi Wall Street Journal, akan tetapi selama menjadi Perdana Menteri dia selalu menepis anggapan ini, akan tetapi Setelah Najib digulingkan oleh Mahathir dalam pemilu bersejarah 9 Mei lalu, pemerintah Malaysia langsung melakukan penyelidikan besar-besaran dan menyita barang-barang mewah dari kediaman sang mantan PM..[24]

Tentunya pemilihan 2018 itu tak lepas dari kemuakan masyarakat Malaysia atas tingkah laku Najib yang pro-asing sehingga dukunganpun diberikan kepada sang penantang Dr Mahathir Mohammad, Sebelum hasil akhir resmi dihitung, Mahathir sudah memperlihatkan keyakinan bahwa oposisi akan meraih kemenangan."Kami yakin bahwa berdasarkan penghitungan resmi kami, mereka tertinggal.Kemungkinan mereka tidak akan membentuk pemerintahan," kata Mahathir kepada para wartawan, dan ahirnya Mahathir menang pada pemilu 2018 ini.[25]

Kesimpulan

Dalam konstitusi (UU) memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-Muslim. Mereka berhak menjalankan agama mereka, memiliki harta kekayaaan, mendirikan sekolah-sekolah agama, mengurusi perkara-perkara mereka sendiri. Namun mereka tidak diperkenankan untuk berdakwah atau menyebarkan keyakinan mereka dikalangan kaum muslim. Kepala Negara persekutuan

---

[23] Ahmad Fauzi Abdul Hamid, dan Che Hamdan Che Mohd. Razali, "The Changing Face of Political Islam in Malaysia in Era of Najib Razak, 2009-2013", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 30, No. 2 , 2015), 312-321.

[24] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180620144023-106-307495/mahathir-sebut-najib-razak-dapat-dijerat-tuntutan-berlapisdiakses pada 19 September 2018.

[25] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44055446 diakses pada 19 September 2018.

Malaysia adalah yang dipertuan agung, atau biasa disebut raja Malaysia.Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala parlemen dipilih Raja-Raja Melayu, setiap 5 tahun sekali atau apabila yang di-Pertuan Agong yang sebelumnya meninggal dunia, maka kehilangan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sedangkan untuk sistem Pemerintahan di Malaysia bermodelkan Sistem Pemerintahan Parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Britania.Dalam praktiknya kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada legislatif.

Pada masa kepemimpinan perdana menteri pertama Malaysia, Teuku Abdul Rahman (1957-1970), pemerintahan telah melaksanakan politik-politik akomodasi sampai-sampai mengkerdilkan peranan Islam kecuali menjelang pada masa-masa pemilihan umum dimana saat mereka harus bersaing dengan PMIP dalam kampanye. Inilah awal munculnya isu-isu ketegangan di Malaysia sampai pada tahun 2018 saat ini. Hal yang sering menjadi isu ketengan di dalam pemerintahan adalah terkait dengan pemilu, kekuasaan, korupsi dan berbagai hal yang berbau pemerintahan lainnya.

BAB 4

POLITIK DAN ETIKA KEMANUSIAAN

Politik merupakan pembahasan yang tidak membosankan, bahkan dengan membahas politik dapat menimbulkan perubahan aneka nuansa yang ada, mulai dari yang *slow*, santai-santai, bahkan ada yang terlalu serius hingga terjadi percekcokan yang usainya lama. Konsep politik juga memiliki kaitan yang erat dengan demokrasi (kebebasan berpendapat), demokrasi dapat pula dimaknai sebagai konsep evolutif, dan dinamis, dalam demokrasi tidak ada konsep yang statis semua berubah berdasarkan situasi dan kondisi (kondisional). Sehingga memberikan pemaknaan yang beragam, demokrasi berkembang secara evolutif akan tetapi pasti. Oleh sebab itu, apa yang dipahami sebagai gagasan-gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno, misalnya tidak harus selalu sesuai dan relevan dengan gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini.[1]

Konsep politik tidak lepas dari unsur masyarakat dan negara. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki keterkaitan antara sesama manusia, manusia dengan institusi dan antar institusi yang lain, dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai dalam mengamati masyarakat disekelilingnya menurut Harold Lastwell adapun 8 nilai yang dibutuhkan yakni; 1. Kekuasaan (*power*), 2. Kekayaan (*wealth*), 3. Penghormatan (*respect*),

[1] Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat* (Malang: Intrans Publishing, 2017), 177.

4. Kesehatan (*well-being*), 5. Kejujuran (*rectitude*), 6. Keterampilan (*skill*), 7. Pendidikan/penerangan (*enlightenment*), 8. Kasih sayang (*affection*). Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus dan dapat pula memaksimalkan peran politik yang ada.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik (*The Real of Politic*), negara dapat juga dimaknai sebagai alat (*agency*) dari masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan manusia-manusia dalam masyarakat, menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas samapai sejauh mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik dalam ranah individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah bersama dalam rangka ini bisa dikatakan bahwa negara memiliki 2 tugas;

1. Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis dan membahayakan;
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari keseluruhan masyarakat. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan yang disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.[2]

Dengan hadirnya politik yang baik tentu akan menghasilkan kemanfaatan yang besar bagi keseluruhan aspek yang ada. Demi memenuhi prinsip politik dan nilai yang baik, seyogyanya Presiden ataupun orang yang memiliki wewenang dalam urusan negara mempertimbangkan 3 aspek dalam menunjuk pejabat publik; 1. Integritas, 2. Kompetensi, 3. Loyalitas. Prinsip integritas meliputi analisis yang serius dan mendalam terhadap rekam jejak (*Track Record*) calon pejabat; apakah ditemukan unsur pelanggaran hukum selama yang bersangkutan menempati posisi sebelumnya. Ini

[2] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 47.

menjadi prinsip fundamental yang dapat mengalahkan prinsip kedua kompetensi, sebab keberlangsungan hidup institusi yang dipimpinnya terletak sepenuhnya dipundak sang calon.

Jika dalam analisisnya ditemukan unsur-unsur yang melawan hukum, maka dengan segera yang berwewenang (Presiden atau yang ditugaskan) dapat mengambil tindakan tegas berupa pembatalan atau pencoretan sebelum pencalonan. Hanya ketika seorang calon pejabat publik lolos uji integritas, dapat masuk dalam tahapan kedua, kompetensi, pada aspek ini yang berwewenang dapat memeriksa kecakapan calon pejabat tersebut seperti tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan dengan meninjau rekam kinerja dan prestasi yang pernah diraihnya, artinya kegagalan dan kekurangan dimasa lalu dapat menggugurkan calon tersebut.

Baru pasca calon pejabat ini melalui dua tahapan, dia akan diuji dengan wawasan kebangsaan dan loyalitas pada negara, Pancasila, dan UUD 1945. Dalam konteks ini loyalitas harus dimaknai sebagai loyal terhadap institusi, bukan perseorangan. Kondisi ini memungkinkan seorang pejabat publik untuk tidak menaati pimpinan jika terdapat rasionalitas yang dibenarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Secara teoritis harusnya demikian, akan tetapi apabila ditinjau kembali di lapangan banyak terjadi penyimpangan dan pembusukan dari dalam, di mana institusi kenegaraan modern yang seharusnya bersifat impersonal akan rawan jatuh ke tangan elit-elit yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Disebut oleh Fukuyama sebagai "*reptarimonalisasi*". Demokrasi modern secara teoritis harusnya mampu menangani kasus yang demikian melalui penerapan prinsip pemerintahan yang akuntabel, baik, dan bersih. Demokrasi seharusnya didistribusikan pada *public good* seluruh warga negara melalui perangkat kelembagaan yang ada.[3]

Perangkat kelembagaan yang ada juga disebut sebagai eksekutif, penting bahwa harus ada pengawasan terhadap eksekutif agar apa yang di undang-undang dapat berjalan secara penuh. Sebab

[3] Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita Etika, Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik* (Malang: Intrans Publishing, 2017), 82.

pengawasan kepada eksekutif ialah dasar demokrasi, pengawasan ini menggunakan dua metode; *pertama,* melalui sistem pengawasan dan keseimbangan, atau pemisahan kekuasaan diantara badan-badan pemerintahan. *Kedua,* pengawasan parlemen metode yang kedua ini digunakan dalam sistem politik parlementer, di mana pemerintah harus meletakkan jabatan berdasarkan prinsip bahwa pemerintahan yang kehilangan kepercayaan dari parlemen tidak dapat memerintah. Perdana menteri, dan kabinet mengajukan pemunduran diri kepada raja yang kemudian dapat mengadakan penggantian atau menyerukan diadakannya pemilihan umum.[4]

Politik juga dapat dijadikan ajang memanusiakan manusia, sebab dengan politik pula seseorang dapat meraih kekuasaan dan membuat wewenang. Mengakkan hak menunaikan kewajiban, dalam Islam sendiri juga sudah diajarkan bagaimana berpolitik yang benar sebab politik dalam Islam haruslah memberikan dampak yang positif, perilaku berpolitik yang benar juga menawarkan bagaimana mengungkapkan ekspresi (kritik) yang baik, antara politik dan Islam juga sejalan dengan HAM banyak ahli politik yang menulis akan relasi Islam dan HAM Abu al A'la al-Maududi, Syeikh Syaukat Hussain, Ali Abdel Wahid Wafi, di Indonesia sendiri ada Hasbi ash-Shiddiqy, Harun Nasution, Bahtiar Effendi, dan Baharuddin Lopa. Pandangan ahli yang melihat adanya keserasian Islam dan HAM keserasian ini juga dimaknai bahwa HAM sejalan dengan tauhid (mengesakan Allah).

Dalam pandangan tauhid, semua manusia sama dengan hak-hak asasi (dasar) yang dimilikinya. Pada saat Islam pertama kali datang, tentu saja pandangan ini merupakan ajaran revolusioner. Prespektif tauhid seperti itu juga dapat dipahami, karena misi/ajaran Islam bukan saja menjadi rahmat bagi manusia, melainkan juga alam semesta. Politik yang baik akan memberikan tanggung jawab atas apa yang wacanakan dan dijanjikan ke *public* sehingga dengan diterapkannya kebijakan yang pro rayat akan memberikan nilai *plus* dalam meningkatkan kepercayaan rakyat, dan mengentas kemiskinan baik material maupun non material. Tentu saja praktik ini susah

[4] David E Apter, *Pengantar Analisa politik* (Jakarta: LP3ES, 1996), 177.

untuk direalisasikan sebab derasnya arus kepentingan dan pesanan kebijakan yang selalu datang sehingga apa yang menjadi hak rakyat sulit untuk ditunaikan.[5]

Dalam berbagai kasus banyak dijumpai ketika calon pemimpin melakukan kampanye demi meraup suara dan kepercayaan rakyat, mereka mengobral janji demi tercapainya tujuan mereka. Ada yang menjanjikan ini dan itu ditambah dengan gaya mereka yang merakyat sehingga banyak rakyat yang simpati dan memilih bahkan ada juga yang tidak segan melakukan *black campaign* dengan sogokan dana dan sembako. Wal hasil ada yang menang dan ada juga yang kandas, akan tetapi perlu diketahui menang ataupun kandas dua sisi ini pasti memiliki timbal balik yang besar. Bila menang si calon kurang memperhatikan bagaimana tugas mereka dalam menjalankan amanah rakyat kebanyakan dari mereka cenderung memikirkan bagaimana apa yang saya keluarkan dapat kembali berbagai cara mereka lakukan maka tidak heran apabila timbul tindak kejahatan yang merugikan negara seperti korupsi. Jangan kaget sebab kejadian ini merupakan dampak dari kampanye sogokan yang dilakukan semasa masih memperomosiakan diri mereka.

Adapula yang kandas, tidak semua panggung politik dan kampanye berakhir dengan *happy ending* adapula yang berakhir kandas dan hancur mereka mengorbankan apa yang mereka miliki bahkan harga diri mereka mereka gadaikan. Sehingga mereka terlilit aneka masalah yang ada, oleh sebab itu disini peran masyarakat dan agama juga penting di mana masyarakat menghibur dan memberikan dukungan atas apa yang terjadi, tidak terkecuali para tokoh agama, pranata sosial Islam, khususnya yang bergerak dalam bidang dakwah agar berbagai dan memberikan wejangan agama sebab kadangkala disaat orang frustasi mereka akan melakukan tindakan yang diluar nalar tentunya disini perlunya dorongan untuk memulai kehidupan baru yang lebih sehat. Sebab dengan hadirnya nilai spiritualitas agama juga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi tersebut.

---

[5] Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme dan Antikorupsi* (Jakarta: Kencana, 2013), 166.

Diharapkan dengan bangkitnya kehidupan baru pihak yang kandas juga dapat mensukseskan program kandidat yang berhasil sehingga bahu membahu dalam menciptakan kesejahteraan bersama.[6]

Kegagalan menejemen politik dapat menyebabkan otoriterianisme, kepemimpinan yang memaksa menutup kran pers, kebebasan berpendapat, dan hilangnya sifat memanusiakan manusia. Marilah kita melihat masalah otoriterianisme itu sendiri, masalah ini begitu kompleks sehingga memaksa kita untuk bertanya mengapa terjadi kebijakan yang memaksa dan meneror bahkan tidak segan mengerahkan orang bila bersebrangan dengan penguasa? Tentunya kejadian ini juga dilandasi akan kepentingan golongan atas yang seringkali apa yang mereka inginkan bertentangan dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, dan mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka inilah golongan yang menikmati kekuasaan dan mematikan demokrasi. Jadi kekuasaan didasarkan apa yang mereka suka-sukai bukan didasarkan atas hukum dan norma-norma yang ada.

Otoritarianisme menjadikan emosi dalam tingkah perpolitikan, para penguasa melakukan usaha-usaha mendayagunakan sumberdaya yang ada demi menunjukkan bagaimana ketegangan menimbulkan konflik, dan frustasi menyalakan agresi. Jadi konflik yang ada dapat hadir karena masifnya tendensi politik yang ada, tidak menutup kemungkinan politik juga dapat memiskinkan rakyat dan menggelamorkan elit, dan birokrat. Dalam sejarah banyak sekali terjadi ototarianisme yang berujung pada revolusi, sebut saja salah satunya Prancis pada tahun 1789. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ideologi revolusioner merangsang diterimanya oleh rakyat para pemimpin ekstrim yang menawarkan perpecahan. Permusuhan dapat diubah menjadi kebencian. Dalam kasus era kontemporer ini kita membutuhkan pemecahan-pemecahan secara demokratis, tetapi jika demokrasi yang lama tidak sesuai lagi, maka model behavioral mungkin lebih baik guna mengemukakan apa yang salah ketimbang menetapkan apa yang benar.

---

[6] Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 61.

Model-model itu mendefinisikan masalah-masalah yang harus ditemukan pemecahan politiknya; mereka menggambarkan mengapa sesuatu itu salah. Tidak akan ada persesuaian yang sempurna antara kategori – kateori behavioral dan pemecahan politik. Selain itu jika model ini masih kurang relevan maka alternatif lain dapat menggunakan kajian pluralisme-pluralisme modern, yang mengarahkan diri kepada masalah menengahi yang ekstrim-ekstrim, serta berusaha menemukan jawaban sebagian ketegangan-ketegangan yang ada.[7]

Kadangkala kita harus melihat bahwa maju mundurnya negara tergantung bagaimana suhu perpolitikan, dan tingkat demokrasi yang ada. Banyak negara yang gagal dalam perpolitikannya juga berimbas ke sektor lain seperti ekonomi, keadilan, dan sosial yang semuanya saling terhubung. Rakyat juga memiliki andil penting untuk meluruskan jika ada yang bermasalah semua ada konsepnya. Lalu jika ada rezim otoriter yang meguasai bagaiman peran rakyat? Rakyat juga peka dan jeli untuk memberikan kritik dan saran yang disampaikan lewat tulisan dan lisan.dengan tatacara yang baik sebab dalam Islam sendiri seburuk pemimpin juga wajib ditaati selagi masih memperbolehkan untuk melaksanakan kewajiban dalam agama.

Oleh sebab itu dalam politik terdapat pembatasan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Imanuel Kant (1724-1804), dan Fredrich Julius Stahl menggunakan istilah *Reichsstat*, sedangkan ahli *Anglo Saxon* seperti A.V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Stahl menyebutkan ada 4 unsur *Rechsstat* dalam arti klasik yaitu;

a. Hak-hak manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa disebut *Trias Politika*)
c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

[7] David E Apter, *Pengantar Analisa politik* (Jakarta: LP3ES, 1996), 282.

Unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti klasik, seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey *Introduction to the law of the constitution* mencakup;

a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
b. Kedudukan yang sama dalam mengahadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku bagi orang biasa maupun pejabat.
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan peradilan.[8]

Melalui mekanisme perpolitikan yang benar dapat memperbaiki tatanan sosial yang ada melalui pertumbuhan yang spontan maupun konstruksi yang disengaja dan terukur. Pertumbuhan spontan terjadi jika individu dan kelompok dengan pengetahuan terbatas berinteraksi dengan individu dan kelompok lain serta tanpa disengaja membentuk polapola perilaku dan berbagai bentuk kelembagaan. Interaksi individu dan kelompok tidak akan tercapai apabila masih terjadi sentimen antara satu dengan yang lain, seringkali sentimen ini tercipta oleh keadaan politik yang panas baik itu pilkades, pilbup, pilgub, bahkan pilpres yang skalanya nasional. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita, akan tetapi janganlah mengabaikan persoalan masyarakat yang ada disekitar kita demi menjaga keberlangsungan harmoni yang ada.

Masalah politik lainnya ialah tumbuhnya pemikiran politik demokrasi kaum elit, tidak lepas dari generasi teoritisi elitisme politik. Mereka mencoba membangun teori baru tentang demokrasi yang dapat diselaraskan dengan teori elit politik. mereka membangun suatu konsepsi tentang demokrasi sebagai suatu sistem politik di mana partai-partai partai politik berlomba-lomba meraup suara masa. Karl

[8] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 113.

Mannheim (1893-1947) yang dalam tulisannya telah menghubungkan teori-teori elit dengan fasisme dan anti intelektualisme, memiliki peran penting dalam usaha pembentukan teori demokrasi elitis ini. Manheim menyatakan pembentukan kebijakan sebetulnya ada di tangan kaum elit; tetapi hal ini bukan berarti bahwa masyarakat tersebut tidak demokratis.

Menurut Michels, tumbuhnya oligarki disebabkan karena mayoritas manusia apatis, malas, berjiwa budak, dan senantiasa tidak mampu memerintah diri sendiri. Mereka sudah terbiasa dalam ketidak tetapan menjadi budak dengan adanya paksaan. Michels adalah seorang demokrat dan menegaskan keyakinannya atas demokrasi, dalam pengertian pemerintahan oleh rakyat. Joseph Schumpeter (1883-1950) demokrasi sistem politik pasar. Menurutnya demokrasi muncul dengan sistem ekonomi kapitalis dan secara klausal berhubungan dengan hal itu oleh sebab itu dimengerti dalam konteks tersebut, peran rakyat dalam suatu masyarakat demokratis adalah tidak untuk memerintah, atau bahkan untuk menjalankan keputusan-keputusan umum atas kebanyakan masalah politik. pemilu memiliki peran untuk menghasilkan suatu pemerintahan atau suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan eksekutif nasional atau pemerintahan.

Pemilu ialah mekanisme pemilihan umum dan hasilnya tergantung rakyat, pemilih yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, sebaliknya pemilih yang buruk akan menghasilkan pemimpin yang buruk. Dengan pemilu pula akan memberikan keserasian antara elemen-elemen dan pranata yang ada, akan tetapi dengan pemilu pula dapat menjadikan rusaknya elemen-elemen dan pranata[9] yang ada lebih buruknya menghasilkan *chaos* kekacauan di

---

[9] Dalam memaknai kebutuhan hidup manusia terdapat 8 penggolongan pranata yang mencakup kebutuhan hidup manusia yakni;

1. pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, disebut *kinship* atau *domestic institution.*

2. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang mencakup pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta benda, disebut *economic institution.*

mana-mana. Sehingga pada awalnya niat tulus dan murni dari politik yang bertujuan memanusiakan manusia bisa rusak seketika.[10]

Kita patut bangga dan kagum akibat semangat spontanitas rakyat dan pejuang kemerdekaan, dengan suatu revolusi fisik telah berhasil mencapai tahap yang konkret dalam proses pembentukan bangsa kita (kemerdekaan). Akan tetapi masih banyak **PR** yang harus dituntaskan bersama salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa kata cerdas ini banyak maknanya tidak hanya dalam akademik semata salah satunya juga dalam politik dan bernegara diharapkan dengan kecerdasan itu dapat menjadi warga negara yang baik. Bahkan banyak para ahli politik menyebutnya dengan dekolonialisasi. Dalam proses itu, norma-norma serta peraturan lama yang dianggap feodal atau kolonial dijebol dengan maksud untuk diganti dengan norma-norma dan pertauran-peraturan yang baru. Akan tetapi biasanya fungsi semula dari anjuran-anjuran supaya meninggalkan norma-norma lama itu menjadi kabur; penjebolan norma-norma lama itu sendiri menjadi tujuan utama, dan norma-norma baru dibina dan disusun. Dengan demikian jelaslah keragu-raguan dalam hidup tanpa pedoman bertambah lagi.

---

3. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna disebut *educational institutions.*

4. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, untuk menyelami alam semesta sekelilingnya, ialah *scientific institusion.*

5. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyatakan keindahan, dan untuk reaksi ialah *ascetic and recreational institutions.*

6. Pranata yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam ghaib ialah *religious institutions.*

7. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia unuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara ialah *political institutions.*

8. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah dari manusia ialah *somatic institutions.* **(lebih lanjut lihat Koentjaraningrat Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan)**.

[10] Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat* (Malang: Intrans Publishing, 2017), 189.

Menejemen politik yang tepat saran diharapkan dapat mengurangi sifat mentalitas yang mengurangi mutu, mental-mental penerabas, sifat tidak percaya pada diri sendiri, kurang disiplin dalam bertindak, dan sikap yang sering mengabaikan tanggung jawab sebagai birokrat yang melayani rakyat. Sebagaimana yang sedikit penulis singgung di atas intinya dari politik yang baik ialah bagaimana dapat menjalankan etika kemanusiaan yang benar demi keberlangsungan dan kemajuan bersama.[11]

Kesimpulan

Politik menjadi pembahasan yang dinamis dan membutuhkan pemaknaan yang mendalam, dengan politik jugalah tercipta aneka kebijakan-kebijakan baik yang menguntungkan atau merugikan rakyat di mana memang harus demikian sebab bila tidak ada politik maka akan sulit juga cara mengatur dan memberikan wewenang atas institusi ataupun kelompok. Butuh seorang pemimpin yang tangguh yang mengayomi dan menimbulkan nuansa yang positif, politik memiliki niat baik untuk membenahi dan memanusiakan manusia akan tetapi kadangkala semua itu bisa berubah. Sesuai dengan kondisi dan iklim sosial yang ada, sebab tidak semua orang yang berpolitik paham bagaimana menggunakan politik itu secara bijak, banyak dari mereka tidak tahu dan asal-asalan dalam beropolitik yang *ending*nya menjadikan kerugian bersama.

Hendaknya dalam menjalankan politik juga harus menyesuaikan kultur dan adat setempat mengapa agar tercipta efektifitas dalam menambil kebijakan yang memberikan kemaslahatan bersama. Banyak terjadi kecelakaan politik dan gagalnya kebijakan salah satu penyebabnya ialah tidak adanya kesesuaian antara kultur dan adat setmpat, selain itu permasalahan-permasalahan politik semakin parah dengan semakin masifnya pengaruh elit dan birokrat atas yang menjadi dalang di balik layar sehingga muncul kebijakan-kebijakan pesanan yang merugikan rakyat dan menguntungkan kaum elit dan birokrat atas. Kejadian ini akan menciderai dan memfitnah

[11] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 48-50.

politik yang awalnya lahir dari niatan tulus berubah menjadi ajang memperbutkan jabatan, harta, dan pengaruh, yang berakhir atas kesengsaraan rakyat bawah.

BAB 5

PENDIDIKAN INDONESIA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan primer yang harus dibutuhkan oleh setiap manusia, di Indonesia sendiri bila kita melihat dari aspek sejarah pendidikan negeri ini meiliki sebuah sejarah pendidikan yang sangat lama. Hal ini terbukti dengan adanya sistem pendidikan pada masa Hindu Budha yang materinya seperti : Agama Budha atau Brahma, Kepustakaan (literatur), Falsafah dan kesucian, Kesenian, seni lukis, dan seni pahat, Kenegaraan, ilmu bangunan yang memungkinkan untuk didirikannya candi-candi ilmu pasti dan ilmu alam itu merupakan materi pokok dalam pendidikan zaman hindu budha.[1]

Di samping itu di negara ini sebenarnya juga banyak manuskrip-manuskrip sebuah ilmu pengetahuan yang termuat dalam sebuah lontar, daluang, dan prasasti yang semuanya itu merupakan sebuah ilmu yang pernah ada di masa lampau, dimana semua itu di rangkum dan di pelajari di dalam sebuah ilmu yang bernama filologi.[2]

Akan tetapi dalam tulisan ini sejatinya hanya akan membahas tentang Pendidikan Islam di masa Kolonial yakni, pada masa Kolonial

[1] Muhammad Rifa'I, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: AR-RUZZMEDIA, 2017), 22.

[2] Siti Baroroh Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi* (Yogyakarta: BPPF Seksi Filologi, Fakultas Sastra UGM, 1994), 3.

Belanda, tentunya dalam setiap masa kolonial tersebut terjadi banyak perbedaan sistem pendidikan, yang di masa Belanda umat Islam di perlakukan dengan rendah namun di pihak Kristen di perlakukan sama seperti bangsa Eropa. Namun di masa Jepang Pendidikan itu semua sejajar entah Islam atau Kristen.[3]

A. Sistem Pendidikan di Masa Belanda

Pada saat zaman kolonial Belanda pendidikan Islam sebenarnya sudah ada malah sudah ada sejak zaman penyebaran agama Islam, yakni diperkirakan sejak abad ke 15-16 M. di dalam buku yang penulis kutip ini pendidikan agama dibagi menjadi 2 yakni: Pendidikan Langgar atau Surau, selain itu ada juga pendidikan yang masih eksis hingga zaman modern ini yakni Pendidikan Pondok Pesantren.

1. Pendidikan Langgar

Hampir disetiap desa di Pulau Jawa terdapat sebuah tempat peribadahan. Di tempat tersebut umat Islam bisa melakukan aktifitas ritual ibadahnya sesuai dengan perintah agamanya. Tempat tersebut dikelola seorang petugas yang disebut: *"Amil"*, *"Modin"*, *"Lebai"* (di Sumatra). Selain sebagai petugas pengelola mereka ini juga memiliki sebuah peran ganda seperti memberikan doa pada waktu hajat upacara keluarga atau desa, dan juga sekaligus sebagai pendidik agama.

Apa yang diajarkan di Langgar merupakan sebuah pelajaran agama dasar, dimulai dari huruf Arab, tapi tak juga langsung mengikuti guru dengan menirukan dari apa yang dibacakan dari kitab al-Qur'an. Tujuan pendidikan Langgar ini adalah agar murid dapat membaca dan lebih tepat melagukan menurut irama tertentu seluruh isi al-Qur'an.

Adapun pola pengajaran yang digunakan dalam sistem pendidikan Langgar ini yakni: murid-murid diajar secara individual, yaitu menghadap para guru satu persatu bisa juga dibilang simakan antara murid dan guru sehingga bisa tahu mana bacaan yang salah dan benar. Sementara murid yang belum dapat giliran maju menghadap

---

[3] Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 279.

guru, duduk bersila melingkar dengan tetap berlatih melagukan ayat-ayat suci. Disini sang guru melakukan koreksi terhadap bacaan murid-murid yang salah mengucapkannya. Pelajaran biasanya diberikan habis Subuh atau petang hari (sesudah atau sebelum Maghrib) lama pertemuan tiap harinya sekitar satu hingga dua jam. Peruses tersebut bisa selesai atau dapat diselsaikan pada umumnya selama beberapa bulan, tetapi umumnya sekitar 1 tahun.

Akan tetapi menurut penulis sebenarnya sistem pengajaran ini tergantung siapa yang mengajar sebab berbeda dalam orang yang mengajar pasti beda juga metodenya. Seperti dikampung penulis dahulu dimana saat penulis masih mengaji di Langgar penulis juga mengaji dengan sistem semacam itu akan tetapi ada sedikit perbedaan dimana saat murid yang antri menunggu giliran mereka disuruh *menderes* atau mengulang bacaannya hingga lancar dan fasih. Serta waktu untuk mengaji dipendidikan Langgar ini menurut penulis tidak ada batasannya, jadi bisa 2 tahun atau lebih sebab dalam memaknai, menghayati, dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an itu membutuhkan waktu yang panjang bukan waktu yang pendek atau waktu yang isapan jempol saja.

Para murid yang belajar di langgar itu tidak dipungut biaya. Kalaupun adanya uang itu tergantung dari keihklasan dan kerelaan yang diberikan wali murid. Adapun orang tua murid yang memberikan sebuah barang sebagai tanda trimakasih atas mendidik anaknya. Sesudah murid menyelsaikan pelajaran di Langgar ini atau bahasa umumnya ***Khatam*** dalam membaca al-Qur'an, biasanya diadakan *selametan* dengan mengundang teman-temannya, kerbatnya, di rumah guru atau di Langgar. Hubungan antara murid dan guru pada umumnya berlangsung terus walaupun murid kemudian meneruskan pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi.[4]

2. Pendidikan Pesantren

Menurut Gunawan dan Ali Hasan Siswanto di dalam buku Islam Nusantara dan kepesantrenan, Pondok pesantren adalah gabungan dari kalimat pondok dan pesantren. Istilah pondok berasal

---

[4] Muhammad Rifa'I,*Sejarah Pendidikan nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: AR-RUZMEDIA, 2017), 37.

dari kata *Funduk,* dari bahasa Arab yang berarti rumah penginapan atau hotel akan tetapi didalam ke-pesantren-an Indonesia, khususnya pulau Jawa, lebih mirip dengan pemondokan yang lebih mirip seperti dalam sebuah lingkungan padepokan, yaitu sebuah perumahan sederhana yang di petak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama bagi santri. Istilah pesantren bisa disebut pondok saja, pesantren saja, atau digabung dengan sebutan pondok pesantren yang maksudnya sama. Sedangkan istilah pesantren secara etimologis berarti pe-santrian yang berarti tempat santri, pondok pesantren adalah suatu lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan menyebarkan ilmu agama Islam. Pesantren disebut pondok pesantren atau pendidikan tradisional, sekalipun sudah banyak pesantren modern, merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Pesantren merupakan tempat para santri. Poerwadarminta mengartikan pesantren sebagai asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji.[5] Uniknya dari sistem pondok pesantren ini tidak mengenal kasta-kasta atau sebuah perbedaan kelas yang umumnya lazim dalam sebuah sistem pendidikan dimasa Belanda. Dr Imam Bonjol Jauhari mengatakan di dalam bukunya mengenai sebuah stratifikasi sosial yakni artinya lapisan. Karena stratifikasi sosial juga bisa diartikan sebuah lapaisan didalam masyarakat yang mana dari lapisan tersebut menghasilkan sebuah kelas-kelas sosial atau kasta-kasta sosial, hal ini terjadi di dalam sistem pendidikan Belanda. Namun itu tidak berlaku di dalam sebuah pondok pesantren semua di perlakukan sama entah anak pejabat maupun orang biasa.[6]

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren adalah salah satu tempat yang dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai tempat lahirnya pemberontakan-pemberontakan. Meskipun pada awalnya Belanda hanya memandang sebelah mata. Namun pada akhirnya pesantren adalah tempat yang berbahaya bagi para kolonial. Meskipun tidak secara langsung melakukan penyerangan akan tetapi di dalam

---

[5] Gunawan, Ali Hasan Siswanto, *Islam Nusantara dan Kepesantrenan* (Yogyakarta: INTERPENA, 2016), 113.

[6] Imam Bonjol Jauhari, *Sosiologi Untuk Perguruan Tinggi* (Jember: STAIN PRESS, 2014), 61.

pesantren ditanamkan ideologi anti penjajah, yang tidak dapat dipungkiri akan melahirkan fenomena yang besar dalam sejarah.

Salah satu contoh keganasan Belanda terhadap pesantren menimpa kyai Makmur pemimpin pesantren yang kemudian diangkat sebagai bupati Pemalang yang dibunuh Belanda akibat tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Semasa menjadi seorang santri kyai Makmur sering berpindah-pindah tempat mula-mula di Pesantren Godong (Grobogan), pindah ke Pesantren Jamsaren (Solo), dan terakhir di Tebu Ireng (Jombang) yang diasuh dan dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari.[7]

Sistem pendidikan di pondok pesantren seorang murid mendatangi seorang guru yang membacakan beberapa baris Qur'an atau kitab-kitab bahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah masing-masing di seluruh wilayah Indonesia. Pada gilirannya murid mengulangi dan menerjemahkan kata demi kata persis seperti yang dilakukan oleh gurunya. Sistem pendidikan ini disebut *sorogan*, murid dikhususkan mengetahui bacaan dan terjemahan tersebut secara tepat hanya bisa menerima tambahan pelajaran bila telah berulang-ulang kali mendalami pelajaran sebelumnya. Para guru pengajian atau dalam bahasa sehari-harinya disebut ustad, selalu menekankan kualitas.

Metode utama sistem pengajaran dilingkungan pesantren ialah sistem *Bandongan* atau seringkali disebut juga sistem *Weton* dalam sistem ini sekelompok murid (antara 5 sampai 500 murid) mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan bahkan sering kali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Tentu ulasan bahasa Arab buku-buku tingkat tinggi diberikan kepada sekelompok santri senior yang diketahui oleh guru besar atau kyai besar dapat dipahami oleh santri senior.

Setiap murid menyimak bukunya sendiri dan membuat catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pemikiran yang sulit. Kelompok kelas sistem bandongan ini disebut *halqah* yang arti bahasanya ialah lingkaran murid, atau kelompok siswa yang

---

[7] Fajruddin Muttaqin,Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional* (Bandung: Humaniora, 2015), 68.

belajar dibawah bimbingan seorang guru. Semua pesantren tentu memberikan sistem *sorogan* tetapi hanya diberikan kapada santri-santri yang baru yang masih memerlukan bimbingan individual.[8]

Selain itu juga masih ada metode-metode yang digunakan di dalam pondok pesantren. Diantaranya adalah metode hafalan, yang biasanya diperuntukkan bagi santri tingkat dasar dan menengah, kemudian mtode ceramah, metode demonstrasi atau praktek. Kemudian metode *ta'lim* yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam yang bersifat umum atau terbuka. Ada juga metode yang disebut dengan metode *pasaran*. Akan tetapi metode ini serupa dengan metode ta'lim akan tetapi biasanya diselenggarakan di lapangan-lapangan dan diadakan untuk memperingati momen–momen tertentu, seperti hari-hari besar Islam, adapun metode yang menitik beratkan atau menekankan kebahasaan seperti Gontor, metode ini disebut dengan metode *muhawarah*.[9]

Selain itu pesantren sebenarnya juga memiliki 5 elemen yang penting yakni: asrama, masjid, santri, pengajian kitab-kitab klasik, dan kyai.

a. Asrama

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang dikenal dengan sebutan kyai. Yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional masjid-masjid yang berkembang diwilayah Islam negara-negara lain.

b. Masjid

Menurut Sidi Gazalba, dilihat dari segi harfiah, perkataan masjid berasal dari bahasa Arab. Masjid berasal dari pokok *sujudan* dengan *fi'il madly* "*sajada*" yang berarti tempat sujud atau tempat sembahyang, karena merupakan ism makan, maka diberi awalan "*ma*" maka akan berubah menjadi "*masjidu*".

---

[8] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), 53.

[9] Gunawan, dan Ali Hasan Siswanto, *Islam Nusantara dan Kepesantrenan* (Yogyakarta: INTERPENA, 2016), 143.

Umumnya dalam bahasa Indonesia huruf "a" menjadi "e", sehingga adakalanya disebutkan dengan masjid.

Sependapat dengan Sidi Gazalba, Wahyudin Sumpeno memberikan definisi masjid secara harfiah sebagai kata yang berasl dari bahasa Arab. Kata pokoknya "*Sujudan*", masjidun yang berarti tempat sujud atau tempat Shalat, sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pengertian lain tentang masjid, yaitu seluruh permukaan bumi adalah tempat sujud atau tempat beribadah bagi umat Islam, kecuali kuburan dan toilet atau bahasa yang dilafalkan sehari-hari ialah WC.

Masjid di masa awal perkembangan Islam, selain sebagai tempat ibadah masjid juga berfungsi sebagai institusi pendidikan. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika berhijrah ke Madinah, yang dibangun pertama kali ialah masjid. Di masjidlah mereka mempelajari agama Islam bersama Rasulullah. Jika terdapat persoalan-persoalan agama Islam maka Rasulullah yang menjadi tumpuannya.

c. Santri

Santri adalah peserta terdidik yang ada di pesantren, yang arti sosiologis bermakna yang taat dengan melaksanakan perintah agama Islam. Manfred Ziemek membagi santri menjadi 2: pertama, santri mukim ialah santri yang bertempat tinggal di pondok pesantren, dan kedua santri santri kalong santri yang mengunjungi pondok pesantren secara teratur untuk belajar agama dan masuk kategori ini adalah mereka mengaji di langgar-langgar atau masjid-masjid pada malam hari saja, sementara pada siang mereka pulang ke rumah.

Selain dua istilah santri di atas ada juga istilah "santri kelana" dalam dunia pesantren, santri kelana adalah santri yang sering berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain, hanya untuk memperdalam ilmu agama.

Santri kelana ini akan selalu berambisi untuk memiliki ilmu dan keahlian tertentu dari kyai yang dijadikan tempat belajar atau dijadikan gurunya. Namun di zaman sekarang santri juga dituntut untuk menguasai materi umum seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pasti seperti pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Yang mana semua itu ditambahkan yakni dengan tujuan agar mereka bisa membekali dengan berbagai keahlian dalam menjalani kehidupan yang keras. Namun ada juga santri yang mengabdi kepada kyainya seperti membantu di dalam perdagangan dan lain-lain.

d. Pengajaran Kitab-Kitab Klasik

Pengajaran kitab-kitab klasik merupakan salah satu elemen yang tak terpisahkan dari pondok pesantren. Bahkan ada seorang peneliti mengatakan, sebagaimana yang diikuti Arifn, apabila pesantren tidak mengajarkan kitab kuning, maka kaslian pesantren itu semakin kabur, dan lebih tepat dikatakan sebagai sistem perguruan atau madrasah dengan sistem asrama dari pada sebagai pesantren. Hal tersebut dapat berarti bahwa kitab-kitab klasik merupakan bagian integral dari nilai dan faham kepesantrenan yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Kitab-kitab klasik biasanya ditulis atau dicetak di kertas berwarna kuning dengan memakai huruf arab dalm bahasa arab, melayu, jawa dan sebagainya. Huruf-huruf tidak diberi vokal, atau biasa disebut dengan istilah kitab gundul,[10] lembaran-lembarannya terpisah-pisah atau biasa disebut dengan *Koras*.

Satu *koras* terdiri berdasarkan catatan kitab-kitab klasik, khususnya karangan-karangan Madzhab Syafi'iyah. Keseluruhan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren

[10] Kitab gundul merupakan kitab-kitab klasik biasanya dikenal juga dengan istilah kitab kuning yang terpengaruh warna kertas kitab-kitab tersebut ditulis oleh ulama zaman dahulu yang berisikan tentang ilmu agama atau ke Islaman seperti : fiqih, hadits, tafsir, maupun tentang akhlaq.

digolongkan ke dalam 8 kelompok yaitu : 1) Nahwu dan saraf, 2) Fiqih, 3) Ushul Fiqih, 4) Hadits, 5) Tafsir, 6) Tauhid, 7) Tasawuf dan etika, 8) cabang-cabang lain seperti Tharikh, dan Balaghah. Kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang berjilid-jilid tebal mengenai Hadits, Tafsir, Fiqih, Ushul Fiqih, dan Tasawuf.

e. Kyai

Dari berbagai unsur tersebut yang menjadi ciri khas utama bagi suatu pesantren adalah dari aspek tenaga pengajarnya yaitu kyai. Kyai pada hakikatnya adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu dibidang agama Islam dan merupakan suatu personofikasi yang sangat erat kaitannya dengan suatu pondok pesantren. Bahkan rata-rata pesantren yang berkembang di wilayah Jawa, dan Madura sosok kiai sangat berpengaruh kharismatik dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat dilingkungan pesantren. Disamping itu kyai pondok pesantren selain sebagai pengagas juga sekaligus berperan sebagai pendiri dari pesantren yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat wajar apabila dalam pertumbuhannya, pesantren sangat bergantung pada seorang kyai.

Kyai dikenal juga sebagi seorang pendidik di pondok pesanten, karena merekalah yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, pendidikan kepada para santri. Pendidik lainnya sebagai pembantu dikenal dengan sebutan ustadz atau santri senior. Kyai, dalam pengertian umum adalah pendiri atau pimpinan pesantren, sebagai musim terpelajar ia telah membaktikkan dirinya kepada Allah demi menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan.

Kyai di dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam pengemban dan mengembangkan pesantren. Kiai bukan hanya pemimpin pondok namun juga sebagaiyang memiliki pondok. Dengan demikian kemajuan,dan kemunduran pondok pesantren terletak pada kemampuan kyai dala

mengatur pelaksanaan pendidikan di dalam pesantren. Hal ini disebabkan karena besar pengaruhnya seorang kyai tidak terbatas hanya di lingkup pesantren saja, melainkan juga di lingkup masyarakatnya.[11]

Akan tetapi pada saat masa kolonial Belanda para kyai ini selalu dicurigai oleh Belanda, sebab dengan adanya kharisma yang terpancar dari sang kiai akan menimbulkan sebuah daya tarik kepada masyarakat dan melahirkan bebagai pemberontakan-pemberontakan yang menyulitkan Belanda. Salah satu perlawanan Islam yang menonjol ialah seruan yang disampaikan kyai Kalasan pada tahun 1832, Jawa Tengah, kepada raja Surakarta dan Yogyakarta untuk mengambil inisiatif memimpin "perang suci" menentang Belanda. [12]

B. Pengaruh Kebijakan Kolonial

Kebijakan kolonial Belanda yang mencolok mengenai pendidikan ialah politik etis dan Ordonasi.

1. Politik Etis

Pada permulaan abad ke XX, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubaha arah yang mendasar dalam sejarahnya. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama bagi kekuasaan Belanda, dan digantikkan dengan pertanyaan-pertanyaan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini dinamakan 'politik etis'[13].

Awal terjadinya politik etis ini saat Van Deventer menulis sebuah artikel dala majalah *De Gids* tahun 1899 denga judul "*Een Eereschuld*" atau "*Hutang Kehormatan*", di dalam tulisannya itu dia menjelaskan bahwa ke kosongan kas negara Belanda akibat perang Diponegoro dan perang kemerdekaan Belgia itu telah diisi oleh orang Indonesia. Dengan kata lain orang Indonesia telah berjasa membantu pemerintah Belanda untuk memulihkan keadaan ekonominya

[11] Ibid.,154-163.

[12] Idris Mahmudi,"Kyai dan Ancaman Hegemoni", at-tajdid, 51 (2018), 1-4.

[13] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: UGM Press, 2017), 227.

meskipun dengan penuh pengertian. Oleh karena itu seyogyanya atau sewajarnya apabila kebaikan orang Indonesia itu dibayar kembali. Keuntungan yang diperoleh dari cucuran keringat orang Indonesia itu jangan dibawa semua tetapi harus ada tetes ke bawah (*trickle down effect)* untuk kesejahteraan orang Indonesia. Oleh karena itu menurut Van Deventer "Hutang Budi" itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan dengan *trias* nya yang terkenal itu, "Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi". Dukungan politik datang dari kalangan kapitalis dan industrialis. Alasannya bahwa golongan kapitalis ini malah ingin memasarkan barangnya sambil mengadakan perbaikan ekonomi penduduk yang telah berjasa terhadap pemerintah Belanda.[14]

Masa kemunculan kebijakan ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar sedemikian rupa dilingkungan penjajahan, perubahan halauan politik kolonial juga dipercepat oleh perkembangan ekonomis sekitar tahun 1900. Perkebunan gula dan kopi mengalami kerugian besar karena terserang penyakit-penyakit. Industri perkebunan yang mengalami kemajuan pesat sejak tahun 1870, dan karena perbaikan teknis dapat mengatasi krisis dan wabah penyakit tebu sehingga politik kolonial liberal mencapai hasil baik dengan keuntungan-keuntungan yang berjuta-juta gulden[15]. Dalam keadaan itu banyak modal asing ditanam secara besar-besaran. Bagaimana nasib rakyat di tengah-tengah kemajuan dan perkembangan industri perkebunan itu? pada kenyataannya kemakmuran rakyat terancam, karena perusahaan-perusahaan pribumi mengalami kemunduran. Disamping itu juga kepentingan materil dan moril rakyat, antara lain di bidang Irigasi, pendidikan, kerja rodi dan perpajakan.

Kejadian-kejadian yang mendadak, antara lain panen yang gagal penyakit ternak, bencana alam, mendesak agar segera ada pertolongan. Sementara keuangan negeri Belanda mundur sekali, keadaan yang sangat memburuk itu diakui dalam pidato takhta pada tahun 1901, dimana ditegaskan usaha-usaha apakah yang dilakukan untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut yakni dengan :

---

[14] Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 16.

[15] Gulden merupakan mata uang negara Belanda sebelum mata uang euro yang dipakai saat ini.

a. Dengan membentuk panitia kemunduran kesejahteraan untuk menyelidiki sebab-sebab kemunduran itu. Hasilnya akan digunakan sebagai landasan politik praktis.
b. Untuk memajukan perusahaan pribumi perlu dihidupkan kembali antara lain dengan diadakannya kembali usaha-usaha agraris maupun industrial.
c. Mengadakan usaha-usaha untuk mencegah kemunduran yang lebih lanjut, antara lain dengan peminjaman tak berbunga sebesar 30 juta gulden yang dikembalikan dalam jangka waktu 5-6 tahun; pemberian sebagai sebagai hadiah uang sebesar 40 juta gulden.

Beberapa penyelidikan keadaan ekonomis seperti yang tercantum didalam karya Van Deventer, Kielstra dan D. Fock, kesemuanya memberi gambaran bahwa rakyat di pedesaan sangat miskin; hidup tertekan dari hari ke hari; hasil minimum dari tanah yang telah terpecah-pecah; dan upaya kerja-nya sangat rendah. Kesimpulan Van Deventer ialah bahwa perkembangan penduduk lebih cepat dari sumber-sumber seperti makanan dan ternak. Pendepatan keluarga f. 80, dan hanya f. 39 berupa uang tunai dan sisanya dalam bentuk hasil bumi, sedangkan pajak menjadi f. 16 dan dari jumlah itu f. berupa uang tunai.

Fock berpendapat bahwa pendidikan yang lebih baik akan memperkuat kaum pribumi dalam administrasi; ia juga menyarankan agar diusahakan irigasi, pembangunan jalan kereta api, pembelian tanah-tanah partikelir[16]; untuk memajukan kesejahteraan rakyat disarankan juga untuk memperbanyak bangunan irigasi. Pemberian keredit untuk pertanian, dan mendorong industri. Dari laporan-laporan itu terbukti bahwa tidak lagi politik kolonial liberal dianut sepenuhnya, tetapi ada kecenderungan untuk memberi kesempatan kepada negara untuk campur tangan. Negeri Belanda diharapkan agar memberikan sumbangan untuk memajukan kesejahteraan di Indonesia. Yang di utamakan ialah perkembangan materil.

---

[16] Tanah Partikelir adalah yang dimiliki orang-orang swasta Belanda dan orang-orang pribumi yang mendapat hadiah tanah karena dianggap berjasa kepada Belanda.

Politik etis merubah cara pandang dan berfikir dalam politik kolonial yang beranggapan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai daerah yang *Wingewest* (daerah yang menguntungkan) menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat di penuhi keperluannya, dan ditingkatkan budaya rakyat pribumi. Politik Etis juga memberikan manfaat yakni seperti: Irigasi, Emigrasi , dan Edukasi:

a. Irigasi

Sangat vital bagi petanian ialah pengairan. Dan oleh pihak pemerintah telah dibangun secara besar-besaran sejak tahun 1885 bangunan-bangunan irigasi Brantas, dan Demak seluas 96.000 bau; pada tahun 1902 menjadi 173.000 bau; menurut rencana tahun 1890 akan dibangun irigasi seluas 427.000 bau selama 10 tahun, akan tetapi pada tahun 1914 secara kenyataan hanya terlaksana 93.000 bau. Untuk membebaskan rakyat dari cengkraman lintah darat atau "riba" maka didirikanlah kredit-kreidit pertanian, yang di ketuai pembesar pemerintah setempat, keanggotaan pengurus dipegang pegawai-pegawai negeri.

b. Emigrasi

Penduduk Jawa dan Madura tahun 1865 berumlah 14 juta pada tahun 1900 telah bertambah 2X lipat. Daerah yang subur tanahnya menjadi daerah padat. Di daerah tersebut umumnya sudah tidak ada tanah yang kosong, bahkan tanah persewaan juga digunakan sebagai tanah tanaman ekspor seperti; tebu, dan tembakau. Dalam abad ke 19 terjadi migrasi daerah dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur, berhubung dengan perluasan tanaman tebu. Perusahaan gula ini memberikan pencairan baru di daerah dimana perkembangan penduduk lebih cepat dari perluasan tanah pertanian. Dari tahun 1885-1900 penduduk bertambah 30 %, sawah pengairan hanya bertambah 5,7%, dan tanah pertanian 16%.

Emigrasi keluar Jawa disebabkan permintaan besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan Sumatera Utara,

khususnya di Deli. Sedangkan emigrasi ke Lampung memiliki tujuan untuk menetap.

c. Edukasi

Pengajaran diberikan disekolah kelas I kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkuasa atau berharta, di sekolah kelas II kepada anak-anak peribumi pada umumnya. Sekokah jenis pertama didirikan menurut stb. 1893 no 128, perdagangan dan kerajinan. Pada tahun 1903 terdapat 14 sekolah kelas I di ibu kota karesidenan dan 29 di ibukota *afdeling.*[17] Matapelajaran yang diberikan ialah membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah dan menggambar.

Pada tahun 1903 di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah kelas II negeri, 326 sekolah partikelir, diantaranya 63 dari *Zending*. Jumlah murid pada tahun 1892 ada 50.000, diantara 35.000 di sekolah negeri dan 15.000 di sekolah swasta. Pada tahun 1902 ada 1623 orang anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropa. Perbandingan Jawa dan Madura antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah penduduk ialah 1:523 dan biaya yang dikeluarkan untuk setiap anak hanya f. 0.035.

Untuk pendidikan calon pamongpraja ada 3 sekolah OSVIA, masing-masing di Bandung, Magelang dan Probolinggo dengan 60 murid setiap sekolah. Ada 3 sekolah guru, yaitu di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo, satu sekolah dokter pribumi di Jakarta yang mengeluarkan 18 dokter setiap tahun, sepertiganya diperuntukkan di luar Jawa. Untuk Jawa dan Madura ada 1 dokter untuk 100.000 penduduk. Pada tahun 1902 dibuka sekolah pertanian di Bogor. [18]

Apabila pembaca melihat paragraf pertama dibawah nomor 3, tampaklah diskriminasi yang dilakukan oleh pihak colonial yakni

[17] Afdeling adalah sebuah wilayah administrative pada masa pemerintahan kolonial Belanda setingkat kabupaten.

[18] Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 36-42.

dengan membeda-bedakan kelas pendidikan, penulis juga mengutip buku yang ditulis oleh prof Abuddin Nata, didalamnya beliau menjelaskan lebih tepatnya ada di halaman 280 paragraf kedua. Beliau berkata bahwa diskriminasi sosial terlihat juga pada sekolah yang didirikan oleh Belanda, yang membedakan antara sekolah yang diperuntukkan khusus untuk kaum bangsawan dengan sekolah yang khusus untuk rakyat biasa. Untuk kaum bangsawan/anak raja sekolahnya bernama *Hofdenschool. Hofdenshool* ini ada dibeberapa tempat seperti Tondano (Sulawesi Utara),yang didirikan pada tahun 1865 dan 1872, serta ada juga *Hofdenschool* yang ada di Bandung, Magelang, dan Probolinggo yang berdiri pada tahun 1878. Selain itu Belanda juga mendirikan sekolah untuk anak pemuka-pemuka, tokoh terkemuka, dan orang terhormat bumi putera yang bernama (*de Schoolen de Eeerste Klasse)* yang artinya sekolah angka satu, adapun sekolah untuk rakyat biasa yakni (*De Schoolen de Tweede Klasse)* atau yang lebih sering dikenal sekolah *ongko loro*.

Selanjutnya diskriminasi ras juga terlihat dengan jelas pada klasifikasi sekolah di Indonesia. Pada tingkat dasar pemerintah membuka sekolah-sekolah yang dibedakan menurut ras keturunan seperti *Europeeche Lagere School* (ELS) untuk anak-anak Eropa, *Hollands Chinese School* untuk anak-anak China dan keturunan Asia Timur, *Hollandsch School* yang kemudian disebut sekolah bumi putra untuk anak-anak pribumi dari kalangan ningrat, dan terakhir adalah *Inlandsch School* yang disediakan untuk pribumi pada umumnya.[19]

Penulis juga menemukan perbedaan pendapat antara 1 buku dengan buku yang lain yang kami tulis sebagai perbandingan dan pengetahuan, Kemudian atas keputusan Raja pata tanggal 25 September 1892 yang dimuat dalam Lembaran Negara 1883 No 125, pendidikan rendah bagi anak-anak bumi putra diubah dengan membaginya menjadi 2 macam :

1. Sekolah Kelas satu (*De Scholen Der Tweede Klase*) yang kelak menjadi HIS (*Holand Inlande School*), sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak pemuda atau tokoh masyarakat, pegawai pemerintah atau orang-orang Bumiputra terhormat

[19] Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 280.

lainnya. Sekolah ini hanya ada di karisidenan, kabupaten, kecamatan, atau tempat-tempat perdagangan perusahaan.

2. Sekolah kelas dua (*De Scholen Der Tweede Klase*), yaitu sekolah bagi anak-anak bumiputra pada umumnya. Berbeda dengan sekolah kelas satu tadi, sekolah ini didirikan di daerah kota, kecamatan, atau di daerah desa yang maju. Lama belajarnya 5 tahun. Tujuannya tidak jelas. Bahasa pengantarnya ialah bahasa daerah atau bahasa Melayu.

Disamping itu berkat jasa Gubernur Jendral Van Heurtsz, pada tahun 1906 didirikan pula sekolah bagi anak-anak bumi putera yang lebih rendah disebut "sekolah desa (*Volgschool)* lama belajarnya hanya 3 tahun. Bahasa pengantarnya ialah bahasa daerah, materi pembelajarannya terpusat pada membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Jadi sekolah ini sebetulnya hanya semacam kursus pemberantasan Buta Huruf (PBH), tetapi lebih rendah ketimbang Kelompok Belajar Pendidikan Dasar (KBPD) sekarang. Sekolah ini tidak banyak manfaatnya. Tamatan sekolah tidak bisa menjadi pgawai negeri (mungkin karena tidak bisa berbahasa Belanda). Setelah 3 atau 4 tahun, murid keluar dari sekolah sambungan/lanjutan (*Vervolkschool)* yang merupakan sekolah sambungan dari desa, lama belajarnya 2 tahun.

Tamatan sekolah desa yang mampu akan diberi kesempatan melanjutkan ke sekolah peralihan (*Sckakel School).* Lama belajar sekolah ini 5 tahun. Mulai dari tahun pertama telah diberi pelajaran bahasa Belanda dan mulai tahun ketiga telah digunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar disekolah. Materi pelajaran disamakan dengan HIS, dan bagi tamatannya akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke MULO (SMTP). Bagi anak-anak Belanda, disediakan sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sekolah rendah itu :

1. HIS (*Holand Inlandse School*), lamanya 7 tahun. Sekolah ini dapat dimasuki anak-anak Indonesia dari anak-anak pegawai pemerintah Belanda.

2. ELS (*Eropese Lagere School*), lamanya 7 tahun, sekolah ini memiliki 3 tingkatan, yaitu:
    - ELS kelas I (*erste)*
    - ELS kelas II (*tweed)*
    - ELS kelas III (*thirte)*

ELS kelas III ini juga di peruntukkan bagi anak-anak Indonesia yang hidupnya seperti orang belanda atau anak-anak indo. Sekolah untuk anak-anak Cina (HCS = *Holand Chinese School*) dan anak-anak Arab (HAS = *Holand Arabishe School*) juga menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sekolah dan sistemnya juga disesuaikan dengan sekolah rendah Belanda sehingga setingkat ELS. Selain tersebut diatas ada juga sekolah rendah khusus, seperti :

1. Sekolah rendah untuk anak-anak Ambon (*Ambonsce Burger School*), pada pada 1922 dijadikan HIS.
2. Sekolah rendah untuk anak-anak serdadu Belanda atau bahasa kita yang tren yaitu anak-anak KNIL (*Soldaten School*) didirikan di kota Garnisiun besar seperti : Jakarta, Magelang, Padang / Bukittinggi.
3. Sekolah rendah untuk anak-anak raja/bangsawan, sekolahnya bernama *Hofdenschool. Hofdenshool* ini ada dibeberapa tempat seperti Tondano (Sulawesi Utara), yang didirikan pada tahun 1865 dan 1872, tetapi kemudian di integrasikan kepada ELS atau HIS.
4. Sekolah rendah yang didirikan oleh *Misionaris* [20] dan *Zending*[21] yang kebanyakan merupakan HIS swasta.

Sebenarnya hanya terdapat satu jenis sekolah lanjutan yang menurut sistem persekolahan Belanda digolongkan kedalam sekolah dasar, yaitu sistem sekolah yang lebih luas (*Meer Uitgebreid Lager Ondrwijs* = MULO). Sekolah ini merupakan lanjutan dari sekolah

---

[20] Misionaris ialah penyebar agama Kristen Katolik

[21] Zending ialah penyebar agama Kristen Protestan, Misionaris dan Zending hingga saat ini masih eksis menyebarkan agama Kristen baik itu katolik maupun protestan, peran mereka kelihatan jelas di wilayah Indonesia bagian Timur, namun apabila di Indonesia Barat peran mereka tidak kelihatan jelas yakni bisa juga samar-samar, sebab di wilayah Indonesia Barat mayoritas penduduknya Muslim.

dasar (rendah) yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Waktu yang ditempuh untuk menyelsaikan studi ini adalah 3 dan 4 tahun. Didirikan pertama kali pada tahun 1914 dan diperuntukkan bagi anak bumiputera dan timur asing kelanjutan dari MULO ini adalah sekolah menengah umum (*Algemene Middelbareschool* = AMS). Yang mulai berdiri pada tahun 1915. AMS terdiri atas 2 jurusan, yakni :

Bagian A : pengetahuan kebudayaan (*Cultureweten Schap)* yang dibagi lagi menjadi : 1. Bagian A1 : Sastra Timur 2. Bagian A2 : Sastra Klasik Barat

Bagian B : Pengetahuan Alam

Disamping itu juga terdapat sekolah menengah bagi warga negara Eropa, bangsawan bumiputra, atau tokoh-tokoh terkemuka. Sekolah ini disebut *Hoorgere Burger School* (HBS) kelanjutan dari ELS. Bahasa pengantarnya ialah bahasa Belanda bahan pelajaran yang diberikan berorientasi ke Eropa Barat (khususnya Belanda), waktu yang ditempuh untuk studi ialah 3 tahun (yang dulu disebut *Gymnasiumi*), sudah ada sejak 1860. Dan HBS 5 tahun mulai didirikan pada 1867.

Dimasa Belanda ada juga sekolah tinggi, seperti :

Sekolah Kedokteran (GHS = *Geneskudige Hooge School*) yang didirikan pada tahun 1928. Namun sebelumnya telah ada Sekolah Dokter Jawa (1851), Tahun 1902 di ubah menjadi STOVIA (*School Tor Opleiding Indische Arsten*), pada tahun 1928 semuanya di jadikan satu yang disebut GHS, ada di Jakarta dan Surabaya.

Sekolah Tinggi Hukum (RHS= *Rechts Hoge School*) yang didirikan di Jakarta pada tahun 1924.

Sekolah Tinggi Teknik (*Technische Hoge School*) yang berdiri di Bandung pada tahun 1920 yang kelak dikenal dengan nama ITB, pembangunan ini di prakarsai atas *Konintelijk Institut Voor Hoger Technisch Onderwijs in netherlandsch Indie* sehingga mutunya dapat diakui dunia.

Selain itu adapula sekolah yang khusus membina kejuruan, seperti :

Sekolah Pertukangan (*Ambachts Leergang*), lama studi yang di tempuh ialah 2 tahun, menerima lulusan sekolah ini saat zaman kemerdekaan, penulis sebenarnya kurang mengetahui mengapa lulusan sekolah ini diterima saat zaman kemerdekaan bukannya zaman Belanda. Sekolah ini dijadikan sekolah kerajinan (SK). Sekolah pertukangan ini ada 2 jenis yakni yang berbahasa daerah diperuntukkan bagi yang bekerja di pabrik, dan yang berbahasa Belanda diperuntukkan bagi calon mandor.

Sekolah Teknik (Technisch Onderwijs), lama studi yang ditempuh ialah 3 tahun sekolah ini mendidik tenaga pengawas. Sekolah Dagang (*Handels Onderwijs*), lama studinya 3 tahun. Dibuku yang penulis kutip tidak menyebutkan bagai mana kurikulum dan harapan output dari sekolah dagang ini. Sekolah Pertanian (*Landbouw Onderwijs*) mendidik tenaga yang bekerja di bidang Agraris, pertnian, dan Kehutanan. Sekolah Kewanitaan (*Maisjes Vakonderwijs*). Sekolah ini berdiri atas jasa R.A. Kartini.[22]

Zaman Belanda ada juga sekolah yang khusus mendidik manusia menjadi guru sekolah, guru ini ditujukan bagi orang Indonesia yang ingin menjadi guru terdapat beberapa sekolah :

Sekolah guru Bumiputera (*Kweekschool Voor Indlands Nder Wijsers*) didirikan pada tahun 1908. Lama belajarnya 4 tahun. Mereka yang bersekolah di sekolah guru bumiputera yang bahasa pengantar pendidikannya bahasa-bahasa daerah (Jawa, Sunda, Melayu, atau Bugis). Sekolah rendah jenis pertama mula-mula disebut sekolah Pribumi kelas I (*Eerste Inlandsche School*). Kemudian sekolah ini disebut dengan nama *Holands Inlandsche School* (H.I.S). sekolah pribumi kedua disebut dengan (*Tweede Inlandsche School*), atau *Standaard School.*

Kedua jenis sekolah guru ini memilki susunan yang berjenjang. Artinya, ada bagian yang terletak di jenjang atas bahasa Belanda, pada jenjang bawah, dan ada pula bagian yang terletak di jenjang atas. Untuk sekolah guru bagi sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa Belanda, pada jenjang terbawah terdapat *Kweekschool,* pada

[22] Muhammad Rifa'I, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: AR-RUZZMEDIA, 2017), 59-64.

jejang di atasnya terdapat *Hogere Kweekschool,* yang artinya sekolah guru yang lebih tinggi. Kata Belanda "*Kweekschool*" berarti sekolah pembibitan atau sekolah persemainan". Artinya sekolah ini ditanam atau disemaikan bibit guru.

Pada awalnya yang diterima sebagai murid Kweekschool ialah lulusan dari sekolah pemerintah untuk anak-anak pribumi, berumur paling tidak 12 tahun, yang berasal dari keluarga baik-baik. Dikemudian hari, yang dapat diterima di *Kweekschool* ini hanya mereka yang telah tamat kelas VII HIS. Lama masa studi di *Kweekschool* ini 4 tahun. Perlu dijelaskan bahwa dalam hubungan ini, bahwa antara *Kweekschool* yang mula-mula didirikan yaitu *Kweekschool* lama pada tahun 1852- dengan *Kweekschool* yang berkembang kemudian yaitu *Kweekschool* baru versi 1915, terdapat beberapa perbedaan yang cukup penting. Salah satu perubahan penting ialah bahwa *Kweekschool* lama bahasa belanda diajarkan sebagai pelajaran sedangkan di *Kweekschool* bari bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar. perubahan penting lainnya ialah, kurikulum pada *Kweekschool* baru lebih ramping, lebih sederhana dari pada kurikulum pada *Kweekschool* yang lama.

Sekolah *Hogere Kweekschool* lebih sering disebut dengan singkatnya, HKS pada tahun 1927 di modernisasikan, dan diganti dengan pendidikan guru yang baru, dan nama sekolah di ubah menjadi *Hollandsch Inlandsche Kweekschool*, lazim disebut dengan singkatannya HIK. Perubahan ini dilakukan secara berangsur-angsur. Pembaharuan HKS menjadi HIK ini dilakukan, karena program pendidikan HKS tidak di pandang lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Program HKS di pandang kuno dan perlu sebuah penyegaran. Pendidikan di HKS terlalu menekankan penguasaan bahasa Belanda secara sempurna dengan mengorbankan kebutuhan akan pengetahuan umum sebagai bagian penting dari kesiapan menjadi guru yang kompeten.

Untuk menjadi guru di SD dengan bahasa pengantar bahasa daerah pada jenjang terendah terdapat program pendidikan yang disebut *Cursus Voor Volksschool Onderwijzers* (disingkat OVVO). Program ini berupa kursus selama 2 tahun. Yang menjadi pengajar pada program ini adalah guru-guru SD yang di pandang sudah

cukup berpengalaman. Metode pembelajaran yang digunakan ialah melihat, dan meniru, yaitu menyaksikan bagaimana para guru senior mengajar, kemudian mereka menirukan. Setelah tamat dari pendidikan ini para siswa ditempatkan sebagai guru pada sekolah desa atau *Volksschool*, yaitu SD 3 tahun. Kurikulum di sekolah ini sederhana Cuma membaca, menulis, dan berhitung.

Pada jenjang yang lebih tinggi dakam jenis pendidikan guru ini terdapat *Normaalschool* dengan masa studi 4 tahun, jenis kurikulum yang digunakan ialah dengan meliputi 14 mata pelajaran : pendidikan bahasa-bahasa daerah, bahasa Melayu, ilmu mendidik, ilmu hitung, ilmu bangun, ilmu tanaman-tanaman, ilmu hewan, ilmu alam, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, menyanyi, pendidikan jasmani dan permainan di luar sekolah. Setelah lulus karir pekerjaannya ialah ditempatkan sebagai guru SD 5 tahun. Kurikulum pada SD 5 tahun ini mencakup ilmu bumi, pengetahuan alam, dan sejarah disamping, membaca, menulis, dan berhitung.

Normaalschool untuk siswa laki-laki pertama didirikan pada tahun 1915, sedangkan *Normaalschool* untuk siswa perempuan pertama didirikan pada tahun 1918. *Normaalschool* untuk laki-laki didirikan di Blitar, Padangpanjang, Jember, Garut, Jombang, dan Makassar. *Normaalschool* untuk perempuan didirikan di Padangpanjang, Blitar, Tondano, dan Salatiga. Pada setiap *Normaalschool* terdapat SD Pribumi Negeri sebagai tempat latihan mengajar (*leerschool*). Para siswa *Normaalschool* diharuskan tinggal di asrama (*internaat*). Melalui kehidupan di *Internaat* ini para siswa mendapat bimbingan dalam berbagai hal, dari kebiasaan belajar sampai kepada berpakaian yang santun, dan tatakrama waktu makan.

Untuk mengajar Sekolah Menengah seorang guru harus memiliki "*MO Akte*", yaitu akte yang memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk mengajar di pendidikan menengah (*Middlebaar Onderwijs*). Terdapat dua jenis akta MO, yaitu MO A dan MO B. akta MO A memberi wewenang penuh untuk mengajar ke dalam mata pelajaran tertentu di tingkat MULO (*Meer Uitgebreide Lager Onderwijs*, yang berarti pendidikan rendah yang di perluas) dan HBS 3. "Keduanya adalah pendidikan pada tingkat SLTP. Akta MO B

memberi wewenang penuh untuk mengajar mata pelajaran tertentu pada tingkat AMS (*Algemene Middlebare School*, yaitu sekolah menengah umum) dan HBS 5 keduanya terdapat pada jenjeng SMU.

Pendidikan untuk mendapatkan Akta MO pada umumnya hanya tersedia di negeri Belanda. Pendidikan yang menuju ke arah ini dan terdapat di Indonesia pada waktu itu adalah pendidikan untuk mendapatkan Akta Mo Ilmu Pasti dan akta MO A Bahasa Inggris. Pendidikan untuk Akta MO dalam Ilmu Pasti ini dititipkan pada *Technische Hoogeschool* di Bandung (sekarang ITB), dan diberi nama *Leergang tot Opleiding Voor de Middelbare Akte Wiskunde*, dan akta yang diberikannya ialah akta K 1. Di Belanda terdapat sekolah untuk mencapai akta MO dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan pengetahuan pengetahuan tentang Arkeologi, Ilmu Bumi dan Etnologi Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, dan Bahasa Sunda. Program-program pendidikan ini diselenggarakan di Universitas Leiden.

Di samping itu ada pula Sekolah Guru Swasta. Perlu diketahui bahwa pendidikan guru dalam zaman Hindia Belanda tidak hanya di selenggarakan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh pihak swasta. Jadi di samping sekolah-sekolah guru pemerintah, juga terdapat sekolah-sekolah guru swasta, yang struktur Institusionalnya serta program pendidikannya sama dengan yang terdapat pada sekolah guru pemerintah. Ada empat HIK Swasta pada ahir zaman Hindia Belanda, yaitu : 1. HIK Gunungsari di lembang yang didirikan oleh perguruan *Neutrale Scholen*, yaitu perguruan yang tidak terikat pada salah satu Gereja; 2. HIK Kristen di Solo, yang didirikan oleh Gereja Kristen Protestan; 3. HIK Katolik Muntilan, yang didirikan oleh Gereja Katolik; dan 4. HIK Muhammadiyah di Solo dan Yogyakarta, yang didirikan oleh perserikatan Muhammadiyah.

Perbedaan HIK Swasta dengan HIK Pemerintah terutama dalam pengangkatan menjadi guru pada sekolah pemerintah. Yang diutamakan ialah tamatan dari HIK Pemerintah, sedangkan

pengangkatan sebagai guru untuk tamatan HIK Swasta dianggap bukan tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda.[23]

2. Ordonansi

Sejalan dengan misi Belanda yang tidak senang melihat Islam di Indonesia mengalami kemajuan, maka pemerintah Belanda mengeluarkan serangkaian peraturan dan kebajikan guna menghalangi kemajuan dan perkembangan agama Islam. Diantara kebijakan itu sebagai beerikut :

1. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut dengan nama *Priesterrden.* Dari nasihat badan inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang baru yang di kenal dengan nama Ordonansi Guru.
2. Tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi guru yang kedua, yang isinya mewajibkan bagi setiap guru agama untuk melaporkan diri pada pemerintah secara berkala. Kedua Ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol pada pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama di negara ini.
3. Pada tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonansi).* Ordonansi ini berisi kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak disukai Belanda.

Dalam realisasinya, peraturan Ordonansi tersebut digunakan untuk menekan Islam, karena dikaitkan dengan ketertiban dan keamanan. Misalnya ketika terjadi persaingan ketat antara Islam dan Kristen di tanah Batak, latar belakang munculnya Ordonansi tersebut adalah sepenuhnya untuk tujuan politisasi, yakni untuk menekan pendidikan yang sedemikian itu, sehingga pendidikan agama tidak menjadi factor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.

[23] Mochtar Buchori, *Evolusi Pendidikan di Indonesia Dari Kweekschool sampai ke IKIP: 1852-1998* (Yogyakarta: INSIST Press, 2009), 11-22.

Pengalaman penjajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat Cilegon tahun 1888, misalnya, merupakan pelajaran serius bagi pemerintah Hindia-Belanda yang bersifat diskriminatif dan menekan pendidikan Islam ini pada dasarnya disebabkan karena Kekhawatiran timbulnya militansi kaum muslim terpelajar.

Berkaitan dengan Ordonansi tersebut, umat Islam menilai sebagai kebijakan yang tidak saja membatasi perkembangan pendidikan Islam, tetapi sekaligus menghapus peran penting umat Islam di Indonesia. Dengan Ordonansi ini para guru dan penganjur agama Islam tidak lagi memiliki keluasan dalam bergerak, sangat dibatasi dengan ketat, dan selalu dicurigai. Demikian halnya dengan adanya ketidak lengkapan laporan sebuah lembaga pendidikan Islam sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan dikalangan umat Islam. Dengan alasan ini, maka kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nonformal banyak yang dibubarkan. [24]

Kesimpulan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dari masa kemasa dan merupakan salah satu perioritas yang masih diunggulkan hingga kini. Bahkan saat penjajahan pendidikan ini merupakan barang yang mahal tidak semua warga dapat megenyamnya, hal ini terbukti dengan adanya klasifikasi pendidikan bagi kaum pribumi kelas bawah (rakyat jelata), kaum ningratan atau kaum bangsawan, kaum pendatang yang lain seperti China, Arab, dan kaum penjajah yakni Belanda yang mereka semua ini memiliki batasan-batasan dalam mengenyam pendidikan. Seperti halnya SR bagi kaum jelata, ada HIS, AMS, dan MULO yang hanya orang tertentu saja yang dapat memasukinya. bahkan apabila mereka beruntung atau dekat dengan Belanda dapat sekolah di perguruan tinggi dan belajar di Univeristas Leiden Belanda.

[24] Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 285.

BAB 6

PENYUSUPAN ASPEK AGAMA DALAM PENDIDIKAN

Agama dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *a* yang berarti tidak, *gama* yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau, dengan pengertian terdapat ketentraman dalam berpikir sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan yang mendasari kelakuan tidak kacau itu. Atau berarti sesuatu yang mengatur manusia agar tidak kacau dalam kehidupannya. Pengetahuan dan kepercayan tersebut menyangkut hal-hal keilahian dan kekudusan. Dalam Islam, agama disebut *al-Din* (*the religion*). *Al-Din* hanya untuk agama Islam sebab hanya ada dalam al-Qur'an.[1]

Ilmu pendidikan tidak terlepas dari eksistensi manusia yang senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai yang bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat dan pandangan hidup, serta norma agama. Ilmu pendidikan pun terjadi perubahan dalam sistem akibat adanya pergeseran paradigma yang dilandasi adanya perubahan filsafat yang menjadi acuan. Petikan kata-kata Abuddin Nata dan Ishak Abdulhak pada perkembangan zaman yang semakin maju pesat tidak luput dari manusia yang masih bisa berpikir dan berkembang maju kedalam segi yang serba cepat. Oleh sebab itu maka disusupkanlah aspek agama agar jalanan pendidikan ini terarah dan tidak bebas.

[1] Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 2.

Adapula alasan lain mengapa agama disusupkan dalam aspek pendidikan, yakni agar dapat menjadikan generasi yang shaleh dan beradab sesuai yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Indonesia bukan negara liberal yang bebas, dan pula negara agama yang menjadikan agama sebagai dasar negara akan tetapi Indonesia merupakan negara Pancasila. Yang mengakomodir antara agama dan tradisi keberadaban Nusantara yang telah ada. Oleh sebab itu tak ayal dalam prakteknya aspek agama dimasukkan dalam satuan kurikulum pendidikan Indonesia.[2]

Diharapkan dengan hadirnya agama dalam sendi pendidikan, dapat mengoptimalkan untuk mempelajari makna kehidupan yang nyata, bukan hanya sekedar mengejar aspek materealistik saja. Perlu diketahui juga bahwa hal yang menakjubkan dalam dalam hidup manusia adalah seringkali gagal melihat dan menangkap kebenaran, melihat hakikat kehidupan, menangkap makna kebenaran dan menjadi manusia yang shaleh baik dimata Allah SWT dan dimata manusia. Kebenaran itu sejatinya ada di depan matanya, padahal dia (kebenaran) terang benerang ada di dalam semua wujud alam raya ini. Kebenaran hidup di depan mata kita dan terhampar di balik semua peristiwa yang kita hadapi setiaphari, tapi kita kerap gagal melihatnya. Ini sama dengan lampu yang begitu terang, sehingga menyilaukan mata, sehingga mata kita tidak kuasa untuk melihat lampu itu.[3]

A. Moral dan Tanggungjawab Siswa

Pendidikan dilaksanakan sebagai sarana dalam memfasilitasi seseorang untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan kemampuan untuk mengubah sikap ke arah yang lebih baik, yang memiliki manfaat untuk kehidupan yang lebih terarah, layak, serta berguna bagi kehidupan yang baik untuk diri sendiri maupun keberadaan kedudukannya sebagai anggota dalam masyarakat.

---

[2] Chairul Wahid Septialana "Pendidikan Sikap Mengendalikan Teknologi Modern", dalam Faiq Ilham Rosyadi, dkk, *Pendidikan Di Era Disrupsi* (Yogyakarta: Timur Barat, 2020), 1.

[3] Ulil Abshar Abdalla, *Menjadi Manusia Rohani Meditasi-Meditasi Ibnu Atha'illah dalam Kitab al-Hikam* (Bekasi: Alifbook dan el-Bukhori Institute, 2019), 120.

Pengembangan diri, penanaman dan pembiasaan untuk hidup bertanggung jawab bukan sesuatu yang diwariskan, melainkan hasil proses pembelajaran seorang siswa dengan lingkungan.

Pengembangan potensi diri dan pribadi siswa tidak cukup hanya dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas saja, akan tetapi perlu dikembangkan dalam ranah kegiatan ekstrakulikuler. Ekstrakulikuler juga dapat menjadi sarana menumbuhkan nilai moral dan tanggung jawab siswa kepada guru dan sekolah. Dari aspek moral siswa dituntut untuk bisa menghargai sesama dan memberikan dukungan kepada teman yang mengikuti ekstrakulikuler di sekolah mereka. Aspek tanggungjawab juga demikian, di mana siswa diminta untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab demi kemajuan semua baik siswa sendiri, sekolah, maupun teman yang menjadi rekan satu tim mereka.

Pengertian nilai tanggungjawab menurut Departemen Pendidikan Nasional, di dalam tanggungjawab terkandung sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut didukung pula dengan tanggungjawab dalam Lickona, tanggungjawab adalah sisi aktif moralitas. Tanggungjawab meliputi aspek kepedeulian baik diri sendiri, dan orang lain, memenuhi kewajiban, memberi kontribusi terhadap masyarakat, meringankan penderitaan orang lain, dan menciptakan dunia yang lebih baik.[4]

Ajaran agama yang dianut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Secara yuridis agama berfungsi menyuruh dan melarang, kedua unsur suruhan dan larangan memiliki latar belakang yang mengarahkan bimbingan agar pribadi panganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Dengan demikian apabila telah tumbuh moral dan tanggungjawab siswa mereka akan semakin bertambah solidaritas sebab mereka

---

[4] Ira Novianti, Umi Chotimah, dan Emil Faisal, Pemerolehan Nilai-Nilai Tanggung Jawab Siswa Kelas XI Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Gelumbang) (*Jurnal Bhineka Tunggal Ika,* Vol. 3, No.1, 2016), 55.

merasakan satu kesatuan salah satu aspek pendorongnya ialah kesamaan iman dan kepercayaan.

Agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Hal ini juga terjadi dalam aspek yang lebih mikro yakni siswa (peserta didik). Dalam kajian psikologis seorang anak bila sudah terbiasa dengan penanaman dasar moral yang baik maka secara teoritis akan mudah mengarahkan kedepannya, akan tetapi bila sejak kecil diabaikan nilai moral maka bila sudah dewasa akan sulit mengarahkannya.[5]

Penguatan moral dan tanggungjawab siswa harus galakkan sebab bila kita ingin mencetak generasi emas maka kita mulai dari yang terkecil dahulu. Tanamkanlah kepada peserta didik kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Hal ini berkaca pada sabda Rasulullah SAW;

خَيْرُ النَّا سِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّا سِ

Hadist ini memiliki makna yang mendalam dalam memberikan penanaman moral dan tanggung jawab siswa. Kemanfaatan itu tidak melulu berkaitan dengan presasi yang ikut lomba lalu mengalahkan saingan mereka, akan tetapi kemanfaatan itu jangkauannya luas bahkan mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam diri sendiri yang coba menghalanginya saja sudah berprestasi.[6] Dengan tumbuhnya moralitas pada sanubari siswa maka mereka akan mudah mendapatkan ilmu sebab mereka menghargai guru dan teman mereka, dalam kitab ta'alimul muta'alim disebutkan bahwa:

اعلم ان طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به الا بتعظيم الأستاد وتوقيره

"Intinya bahwa seorang penuntut ilmu (murid) tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya kecuali mereka menta'dzhimkan dan menghormati seorang guru." Sebab guru merupakan lentera yang menyinari kebodohan, dalam rutinitas kehidupan santri hal yang demikian sudah dipraktekkan secara turun temurun sehingga

---

[5] Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 60.

[6] Muhammad Ardiansyah, *Catatan Pendidikan Refleksi Tentang Nilai-Nilai Adab dan Budaya Ilmu Dalam Islam* (Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa, 2020), 158.

menghasilkan kebudayaan yang positif. Sebab mereka bukan hanya sekedar siswa yang hanya sekolah pulang-sekolah pulang tapi mereka lebih dari itu.[7]

Moralitas dan tanggungjawab secara eksplisit dijelaskan dalam UU 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab 2 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , beraklak mulia, sehat, berilmu, mandiri, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dengan hadirnya UU ini jelaslah bagi kita untuk memberikan pembinaan yang menjadikan siswa beradab, dan bertanggungjawab sebab ini merupakan amanat negara yang dibebankan dipundak pendidik.[8]

Tingginya moralitas dan tanggungjawab siswa tidak lepas dari peran guru atau tenaga pendidik. Prof Nur Syam dalam bukunya yang berjudul menjaga harmoni menuai damai, menjelaskan bahwa seorang pendidik juga menjadi pamong. Dia akan menjadi seseorang yang memberi arah ke mana perjalanan harus ditempuh. Kemudian menjaganya agar arah itu dapat ditempuh sesuai dengan waktu yang disediakannya. Jangan berlebih, pendidik adalah orang yang mengajarkan tentang betapa pentingnya waktu. Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman pada Q.S. al-Asr ayat 1-3.

وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣

Artinya: Demi waktu, Sesungguhnya manusia manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh tolong menolong dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran.

[7] Burhan Az-Zarnuji. 1425/2004. *Ta’lim al-Mutaalim Thorikotu al-Ta’alam* (Sudan Khartoum: Dar Sudaniyah al-Kitab), 25.

[8] Ratri Rahayu, Peningkatan Karakter Tanggung Jawab Siswa SD Melalui Penilaian Produk Pembelajaran *Mind Mapping* (*Jurnal Konseling Gusjigang,* Vol. 2, No.1, 2016), 97.

Seorang pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga menjadikan anak didiknya menjadi orang yang beriman dan beramal shaleh, serta mau menolong dalam kebaikan dan saling menasehati kesabaran.

Inti dari meningkatnya moralitas dan tanggungjawab siswa ialah untuk menjadikan kader-kader yang shaleh dan siap mengabdi untuk bangsa. Menciptakan nuansa atmosfer realitas kesalehan publik yang memadai, sehingga pada akhirnya menciptakan *baldatun thayyibun wa rabbun ghafur.*[9]

B. Bibit Unggul Bangsa

Proses pencarian dan pengkaderan bibit unggul bukanlah perkara yang mudah ibarat membalik telapak tangan dari atas ke bawah, semua itu butuh waktu yang lama, kerjakeras, usaha yang kuat, dan memantapkan sebuah niat. Dalam sejarah Islam pola pembangunan dan penanaman komunitas yang unggul sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam membimbing sahabat baik dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Khususnya dalam periode Madinah, sejumlah langkah yang ditempuh Nabi diantaranya sebagai berikut;

1. Pembangunan Masjid Quba sebagai langkah awal simbolis bahwa pembangunan masyarakat Islam harus dimulai dari masjid. Karena itu, benarlah apa yang dikatakan Sidi Gazalba bahwa masjid bukan semata tempat ibadah (*sembahyang*), melainkan juga pusat peradaban manusia.
2. Pembentukan lembaga *ukhuwah* antara kalangan Muhajirin dan Anshar menyimbolkan bahwa masyarakat Islam membutuhkan basis organisasi yang kukuh serta tangguh demi integritas umat. Ini yang kemudian diambil oleh dunia manajemen modern yang meniscayakan adanya *teamwork* untuk meraih sesuatu yang lebih besar.
3. Piagam Madinah mengajarkan bahwa pembinaan masyarakat Islam memerlukan semacam *memorandum of agreement* sebagai landasan politis yang menjamin integrasi sosial.

---

[9] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 72.

Singkat cerita hal inilah, yang dilakukan Nabi dalam membangun dan mencetak generasi emas di masa awal-awal Islam.[10]

Apabila ditarik dalam ranah Indonesia sendiri. Tentu aslinya sama saja 11 12. Dalam mencetak kader bangsa tentu 1. Tidak lepas dari guru yang baik dan shaleh, 2. Memfungsikan sumberdaya guna yang ada seperti masjid, sekolah, alam dan masyarakat sebagai objek kajian pembelajaran yang efektif, dan 3. Persetujuan orang tua (memasrahkan pendidikan secara optimal di luar rumah) kepada guru tujuan utamanya ialah agar guru lebih maksimal dalam mendidik aspek persetujuan orang tua dalam konteks ini juga dapat disimpulkan sebagai *memorandum of agreement*. Akan tetapi kini di era globalisasi yang semakin kompleks bangsa ini dihadapkan berbagai persoalan sosial yang berat seperti liberalisasi, westernisasi, konsumerisme, dan sikap individualisme yang tinggi.

Sehingga pada akhirnya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mencetak generasi yang berbobot menurun secara perlahan-lahan. Aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar*, kata al-Ghazali adalah kutub terbedar dalam urusan agama. Ia adalah sesuatu yang penting, dan karena misi itulah maka Allah SWT mengutus para nabi. Jika aktivitas ini hilang, maka syiar kenabian juga hilang, agama menjadi rusak, kesesatan tersebar, kebodohan merajalela, satu negeri akan binasa begitu juga dengan umat secara keseluruhan. Allah SWT juga melaknat bagi peninggal *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Ma'idah ayat 78-79.

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ٧٩

Artinya; "Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu

---

[10] Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 84.

tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya, amat buruklah apa yang mereka perbuat.[11]

Salah satu amanah kemerdekaan yang harus diwujudkan negara Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" begitu disebutkan dalam undang-undang Dasar 1945. Bagaimana mewujudkan amanah besar ini? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cerdas diartikan "sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya)". Kemudian kata mencerdaskan diartikan mengusahakan dan sebagainya supaya sempurna akal budinya; menjadikan cerdas. Jadi kecerdasan bukan hanya bersifat intelektual (akal), akan tetapi juga meliputi emosional dan spiritual (budi), meski sebutannya berbeda akan tetapi ketiganya saling berkaitan.

Selain itu dalam rangka menciptakan bibit unggul bangsa setiap orang tua harus sadar, bahwa anak merupakan amanah dan tanggungjawab. keluarga merupakan pendidikan pertama dalam masa petumbuhan anak, kewajiban orang tua juga mencakup mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan anak. Orang tua juga harus sadar bahwa kebutuhan anak bukan hanya kebutuhan jasmani akan tetapi ada aspek rohani yang perlu untuk diperhatikan salah satunya cara memuaskan aspek rohani ialah dengan mencari ilmu pengetahuan. Anak harus mencari guru yang tepat untuk membimbingnya ke arah yang baik, tujuan mencari guru yang baik ialah agar selalu terjaga fitrahnya. Orang tua harus memberikan solusi atas pilihan anak-anak mereka dalam menimba ilmu sebab bila tidak diperhatikan. Keadaan ini malah akan berubah menjadi fitnah sebab kegagalan dalam mendidik anak.

Aplikasi pendidikan seperti ini mungkin tidak mudah dilakukan, akan tetapi tidak mustahil dilakukan. Asal ada kemauan *Insyallah* ada jalan, akan tetapi masalahnya kita mau atau tidak mengamalkannya. Harus ada kerjasama dari semua pihak kemudian diberi dukungan penuh oleh pemerintah karena tugas pemerintah itu bukan membangun infrastruktur semata. Yang jauh lebih penting adalah mewujudkan lahirnya manusia yang berketuhanan, adil, dan

[11] Adian Husaini, *10 Kuliah Agama Islam* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), 228.

beradab lewat pendidikan. Hal ini mengingatkan penulis dalam bait lagu Indonesia Raya yang berbunyi "bangunkah jiwanya, bangunlah badannya". Sebagus apapun pembangunan fisik, tanpa pembangunan jiwa, pada akhirnya akan menghasilkan kerusakan.[12]

Dengan terciptanya bibit unggul bangsa *Insyallah* dapat mengurangi bibit perpecahan antar bangsa. Kita harus banyak belajar dari sejarah terdahulu di mana muncul berbagai perselisihan dan perpecahan. Sejarah banyak mengajarkan kepada kita berbagai perpecahan yang timbul selepas pemimpin mereka wafat. Dalam dunia Islam kaum muslimin selepas Nabi wafat sebagaimana yang ditulis oleh Imam al-Asy'ari (w.324H) dalam pengantar bukunya yang berjudul *Maqalat al-Islamiyyin wa ikhtila al-Mushallin*, "terjadi dalam banyak hal. Perbedaan itu membuat mereka saling menyalahkan. Mereka saling mencuci tangan dari kesalahan yang lain, hal itu membuat mereka tercerai berai menjadi beberapa kelompok. Meskipun terjadi perpeahan dan perbedaan nilai dan aspek Islam dapat menyatukan dan memayunginya kembali. Dalam pandangan Imam al-Asy'ari perbedaan merupakan unsur yang memungkinkan dipersatukan oleh Islam.[13]

Manusia yang memahami dan beradab terhadap budaya, bahasa, dan sejarah dalam suatu masyarakat akan mampu meletakkan diri dan dapat duduk di mana saja. Ungkapan ini merupakan ungkapan yang bijak dan memiliki esensi yang mendalam, penulis melihat bahwa aspek ini dapat menjadi semangat guna menciptakan kader yang tangguh demi bangsa. Secara batin, memikirkan dan merasakan akan alasan suatu budaya dapat tegak dalam suatu masyarakat sehingga tidak terburu-terburu dalam menerima atau menghukumi suatu kebudayaan begitu saja. Selanjutnya dalam memahami sejarah agar dapat melihat dan memahami suatu kebudayaan secara tepat, serta dibutuhkan untuk membaca sejarah dan kebudayaan secara benar.

---

[12] Muhammad Ardiansyah, *Catatan Pendidikan Refleksi Tentang Nilai-Nilai Adab dan Budaya Ilmu Dalam Islam* (Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa, 2020), 169.

[13] Muhammad Yunus Masrukhin, *Menjadi Muslim Moderat Teologi Asy'ariah di Era Kontemporer* (Banten: Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, 2020), 21.

Aspek agama juga menjadi katalisator dalam perubahan generasi ke generasi, menurut Hamka mulai dari masa kolonial hingga setelah Indonesia merdeka, bekas doktrin-doktrin dari orientalis masih terasa dan memang telah tertanam. Banyak upaya untuk menyingkirkan agama dalam kebudayaan masyarakat Nusantara, memisahkan antara agama dan dasar negara, serta pendidikan yang membuat anasir-anasir kebencian terhadap Islam dan mengembangkan budaya Barat penjajah. Akibatnya kini banyak kaum muslim yang tumbuh secara pesimisme, serta penentangan terhadap keyakinan dan perkembangan agamanya. Oleh sebab itu sebagai generasi yang bijak marilah belajar mencerna makna budaya yang berasal dari luar sebab dapat juga dipastikan bahwa budaya itu belum tentu baik bila diterapkan di Nusantara ini.[14]

Adab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijaksanaan dan keadilan oleh sebab itu hilangnya adab akan menyebabkan datangnya kebodohan (*humq*), ekstremis agama maupun sekular, ketidakadilan, kegilaan (*junun*), dan bahkan terorisme. Saat ini dunia seakan sebuah kampung global peran pendidikan begitu penting dalam mencetak manusia yang baik, yakni laki-laki dan perempuan beradab dijamin lebih memberikan manfaat dari pada pendidikan yang hanya sekedar mencetak generasi yang pintar. Hal ini dikarenakan proyek-proyek penting, baik ekonomi, pendidikan, maupun politik, semakin mendunia sifatnya.

Perkembangan teknologi IT (internet) telah menghapus batas-batas nasionalisme, menyebarkan informasi secara tidak terbatas baik itu informasi yang positif atau negatif. Banjir informasi ini telah menyebabkan kebingungan yang luar biasa, serta membawa isi yang membahayakan secara etika, budaya, dan sosial. Kondisi ini sangat memerlukan individu-individu yang beradab, baik laki-laki maupun perempuan. Ekonomi global dapat menghancurkan kehidupan jutaan manusia apabila manusia-manusia dari negara super power mencari keuntungan jangka pendek bagi dirinya maupun negaranya saja.[15]

---

[14] Adian Husaini, dan Bambang Galih Setiawan, *Pemikiran & Perjuangan M. Natsir & Hamka Dalam Pendidikan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 185.

[15] Wan Mohd Nor Wan Daud, *Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer dan peran Universitas Islam Dalam Konteks Dewesternisasi dan Dekolonisasi* (Bogor:

C. Ajang Pembenahan Bangsa

Pendidikan merupakan sarana untuk membenahi bangsa, banyak pola dan metode pendidikan dalam al-Qur'an untuk membenahi generasi dari generasi, salah satunya dalam surat Luqman. Dalam surat itu Luqman memberikan nasehat-nasehat kebaikan kepada anaknya, secara eksplisit memiliki makna yang mendalam. Di bawah ini akan penulis lampirkan ayat-ayat tersebut, mulai dari ayat 12-19;

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

Artinya; Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu: «Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji».

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya; Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: «Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar».

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya; Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Universitas Ibnu Khaldun Bogor &Center for advanced Studies on Islam, Science and Civilization-Universitas Teknologi Malaysia (CASIS-UTM), 2013), 77.

Artinya; "Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan lah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kaulah kembali kamu, maka Ku-beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ ١٦

Artinya; "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, dan berada dalam batukarang atau dilangit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧

Artinya; " Wahai anakku, laksanakanlah shalat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemunkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal diutamakan."

وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ ١٨

Artinya; Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩

Artinya; Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Secara garis besar penulis menangkap lima pembelajaran yang besar dalam ayat-ayat ini; 1. Pembelajaran Tauhid, 2. Menjadi anak yang shaleh dan taat, 3. Menolak untuk bermaksiat dan menyekutukan Allah SWT, 4. Larangan untuk sombong dan angkuh, 5. Bertutur dan berperilaku yang baik. Lima elemen ini merupakan elemen mendasar yang digunakan untuk merubah dan menjadikan generasi yang lebih baik. Memang sudah seharusnya sebelum kita mengajarkan hal-hal

yang kompleks kepada generasi muda, kita harus mengokohkan fondasi iman mereka dengan pemaknaan *Syahadat* dalam kalimat ini, terdapat persaksian tauhid bagi Allah SWT dan persaksian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul dan hamba.

Persaksian ini juga sering digaungkan dalam khotbah, sebagai ajang edukasi bagi jamaah baik tua maupun muda. Hal itu, disebabkan tauhid merupakan dasar keimanan. Kalimat ini juga lah yang menandai apakah manusia seorang muslim atau non muslim. Maksud dari kalimat ini selain yang penulis sebutkan diatas ialah, meminta kepada Allah SWT agar memberikan pujian kepada Rasulullah SAW menampakkan keutamaan dan kelebihannya, memuliakan serta mendekatkannya. Dengan demikian shalawat Allah SWT kepada Rasul-Nya adalah pujian Allah untuk beliau, menempatkan kelebihannya, keutamaan, memuliakan, dan mendekatkan beliau kepada-Nya [16]

Ada banyak akibat buruk yang menimpa seseorang apabila dia sering berperilaku sombong, angkuh, dan merasa paling benar. Akan tetapi yang paling bahaya ialah jika dia sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sehingga banyak membuat kerugian dari berbagai aspek baik itu aspek dirinya sendiri, masyarakat dan secara global. Dia akan kehilangan ilmu, yang selama ini dipelajari ada sebuah syair yang menyebutkan bahwa ilmu akan pergi meninggalkan pemuda yang tinggi hati seperti aliran air pergi meninggalkan tempat yang tinggi. Maksudnya, hati-hati dengan perasaan. Kadangkala semakin bertambah banyak hal yang dipelajari dan dikaji akan membuat perasaan semakin meninggi, merasa hebat, mengerti banyak hal, kenal dengan orang-orang besar, dan memiliki banyak penggemar.

Padahal, seringkali kita mendengarkan istilah ilmu padi. Semakin berisi semakin menunduk, jika sudah paham ilmu yang tinggi, jangan remehkan ilmu yang dasar. Apabila sudah mengerti banyak hal, insaflah bahwa yang tidak kita ketahui masih lebih banyak. Ketika sudah kenal dengan orang-orang besar, maka jangan amnesia

[16] Khalid bin Abdullah al-Mushlih, *Syarkh al-Aqidah al-Wasithiyah,* terj Abdullah (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2018), 5.

dan melupakan majelis ilmu yang kecil. Seandainya sudah terkenal maka janganlah terlalu percaya diri, sampai lupa diri, tapi seharusnya tetap tahu diri. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu tak henti-hentinya memberikan contoh dan tutur kata yang baik bagi generasi penerus sebab hal ini merupakan ajang pembenahan bangsa. Antara yang tua dan yang muda saling mengingatkan, saling menghargai, dan saling tolong menolong dalam kebaikan.[17]

Perlu diketahui bahwa pembenahan bangsa harus didukung dengan pendidikan yang lebih berorientasi sebagai *ta'dib*. Konsep *ta'dib* merupakan konsep yang paling sesuai untuk menunjuk pendidikan Islam, dan bukan ta'lim atau tarbiyah sebagaimana yang banyak digunakan oleh umat Islam diseluruh dunia saat ini. Hal tersebut karena *ta'dib* dalam struktur konseptualnya telah mencakup unsur ilmu (*'ilm*), intruksi (*ta'lim*), dan perkembangan (tarbiyah). Oleh sebab itu jelaslah bahwa pendidikan sebagai *ta'dib* adalah berbeda dari hanya sekedar instruksi atau pelatihan profesional yang mendominasi keseluruhan sistem pendidikan. Pelatihan dapat diterapkan pada manusia dan juga binatang, namun pendidikan, hanya dapat diberlakukan kepada manusia. Dapat penulis simpulkan bahwa *The education has changed of civilization*.[18]

Ketika menafsirkan surah Luqman ayat 12-19, Hamka menyimpulkan bahwa ayat ini mengandung dasar-dasar pendidikan bagi seorang muslim, yaitu mengandung pokok aqidah yang menuntun pada keyakinan terhadap Allah SWT sehingga menimbulkan jiwa merdeka, serta bebas dari pengaruh benda dan alam. Selanjutnya, dasar bagi tegaknya rumah tangga Muslim, yaitu sikap hormat, penuh cinta, dan kasih sayang dari anak kepada ibu dan ayahnya. Selain itu, dijelaskan pula masa pengasuhan anak-anak bagi seorang ibu. Kemudian diberikan pedoman hidup ketika terjadi

[17] Muhammad Ardiansyah, *Catatan Pendidikan Refleksi Tentang Nilai-Nilai Adab dan Budaya Ilmu Dalam Islam* (Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa, 2020), 146.

[18] Wan Mohd Nor Wan Daud, *Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer dan peran Universitas Islam Dalam Konteks Dewesternisasi dan Dekolonisasi* (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun Bogor &Center for advanced Studies on Islam, Science and Civilization-Universitas Teknologi Malaysia (CASIS-UTM), 2013), 71.

pertikaian terdapat antara orang tua dan anak. Jika orang tua kufur dan masih hidup, kecintaan kepada mereka tidak berubah. Namun, cintanya itu tidak boleh mengalahkan aqidah. Selanjutnya, anjuran untuk selalu berbuat baik kepada kepada sesama manusia, serta tidak memperlakukan dan berinteraksi dengan akhlak, dengan suara yang lemah lembut, sikap yang sopan santun dan perhatian.[19]

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam juga menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmah lill-'alamin*), termasuk di dalamnya adalah manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam surat al-Anbiya' ayat 107 yang artinya "*dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta*". Kenalkanlah Islam kepada generasi penerus agar mereka mengetahui mengapa dalam Islam terdapat larangan dan perintah, tujuan Islam melarang dan memerintahkan kepada penganutnya agar selamat dan bahagia baik di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akan dirasakan ketika manusia memiliki hubungan baik dengan Sang Pencipta (Allah SWT) dan ketika satu sama lain dapat hidup secara berdampingan, damai, mengormatu, dan saling membantu. Karena itu Islam memerintahkan untuk menolong orang yang berada dalam kesusahan, menjenguk orang sakit, melayat, paling tidak mendoakan saudara seiman yang meninggal dunia.

Sebaliknya Islam melarang kita membunuh, menipu orang lain, menyakiti orang tua, dan aneka perbuatan yang merugikan baik dalam ranah mikro hingga makro. Selain itu perlu diketahui bahwa aspek perintah dan larangan yang ada pada Islam masih dalam jangkauan kemampuan manusia, tidak satupun ajaran Islam yang harus dilaksanakan berada di luar kemampuan manusia. Hal ini termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 285; "......*Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya*.......". ajaran Islam juga memperhatikan martabat manusia. Islam diturunkan untuk mengayomi manusia secara keseluruhan. Dalam Islam tidak ada perbedaan derajat sosial, material, ras, suku, kulit, dan *gender*. Tinggi rendahnya derajat manusia ditentukan oleh tingkat ketaqwaan

[19] Adian Husaini, dan Bambang Galih Setiawan, *Pemikiran & Perjuangan M. Natsir & Hamka Dalam Pendidikan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 123.

seseorang. Jadi sebelum Barat menggangungkan kesetaraan *gender,* keadilan, dan kesetaraan-kesetaraan lainnya dalam Islam sudah ada bahkan lebih maju dari apa yang Barat agung-agungkan selama ini.

Diharapkan dengan mempelajari Islam secara menyeluruh generasi muda dapat menerapkan pola hidup yang Islami mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Banyak pesan-pesan moral yang kita tidak sadari dalam Islam, mulai dari rukun Islam, Iman, dan sendi yang lain, akan tetapi seringkali kita mengabaikannya dan sibuk memikirkan hal yang sesungguhnya kurang memberikan kemanfaatan dan menambah keimanan kita. Memang kita harus bersabar dalam melaksanakan ketetapan Allah SWT, yang namanya manusia pasti diuji Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam surat al-Insan ayat 24 yang artinya "*Maka bersabarlah (untuk melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang kafir diantara mereka*".

Kesabaran juga menjadi penentu kesuksesan dalam kaderisasi memang perilaku setiap individu berbeda akan tetapi jangan menyerah sebab itu ujian dari Allah bila mampu untuk melewatinya maka akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda sebagaimana dalam Az-Zumar ayat 10; "*Orang-orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa perhitungan*".[20]

Generasi muda haru memiliki kemampuan dan kepakaran dalam satu bidang tertentu, agar mereka bisa menghadapi tantangan zaman. Apalagi jika dilihat dari konteks kekiniannya kita hidup di era disrupsi, menurut Rhenald Kasali, ciri era disrupsi ialah perubahan yang terjadi secara cepat (*speed*) mengejutkan (*surprise*), dan tiba-tiba (*sudden*). Meskipun sesungguhnya pembahasannya dalam ranah ekonomi akan tetapi dampak disrupsi juga terasa dalam aspek kehidupan yang lainnya, dengan lahirnya generasi yang pakar dan menguasai keahlian tertentu tentu ini dapat menopang kemajuan suatu bangsa, menjadi bangsa yang sehat, mandiri, dan *religious*. Bukan bangsa yang manja, malas, dan mau dijadikan musuh untuk melawan bangsanya sendiri dalam bahasa Jawa-nya (*jongos*).

---

[20] Sahiron Syamsuddin, *Al-Qur'an dan Pembinaan Karakter Umat* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Karya dan Baitul Hikmah Press, 2020), 5.

Disrupsi dalam dunia pendidikan bisa dilihat dengan lahirnya ilmuwan gadungan dan matinya kepakaran. Sejak lama Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas mengingatkan, masalah umat ini adalah masalah ilmu. bukan masalah ilmu lawan dari kejahilan, tapi ilmu yang telah dirusak, tapi diyakini, diamalkan, dan disebarkan secara luas. Masalah ini berlanjut dengan hilangnya adab (*The loss of adab*), lalu munculnya pemimpin palsu diberbagai bidang. Orang yang tidak memiliki otoritas dan kapasitas namun dianggap sebagai ahli dan diberikan kepercayaan.[21]

Kesimpulan

Pendidikan dihadirkan untuk membentuk etika, moral, dan tanggung jawab manusia. Peran pendidik amat besar dalam rangka menciptakan seorang siswa yang berkompeten baik secara akademis dan moralitas, pembentukan moral dan tanggungjawab tidak cukup di kelas saja akan tetapi butuh contoh dan prakek dari seorang pendidik kepada peserta didik sehingga secara langsung mereka dapat mengamati, mempelajari, dan mengamalkan ajaran tersebut. Inti dari meningkatnya moralitas dan tanggungjawab siswa ialah untuk menjadikan kader-kader yang shaleh dan siap mengabdi untuk bangsa. Menciptakan nuansa atmosfer realitas kesalehan publik yang memadai, sehingga pada akhirnya menciptakan *baldatun thayyibun wa rabbun ghafur.*

Proses pengkaderan dan pembibitan merupakan kewajiban dari satu generasi ke generasi yang lain. hal ini penting sebab dengan hadirnya kaderisasi akan melangsungkan pembangunan dari generasi yang terdahulu, nuansa agama dapat mempengaruhi cara kader muda dalam mengambil kebijakan, mereka akan selektif dan tidak sembarangan dalam mengambil langkah kedepannya. Dengan suksesi kaderisasi diharapkan akan menciptakan; kerukunan, dan ketentraman, bersama demi membangun bangsa yang lebih baik.

[21] Muhammad Ardiansyah, *Catatan Pendidikan Refleksi Tentang Nilai-Nilai Adab dan Budaya Ilmu Dalam Islam* (Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa, 2020), 232.

Pendidikan juga digunakan sebagai ajang pembenahan bangsa, semakin majunya pendidikan maka semakin maju pula bangsa itu dalam mengarungi masa depannya. Akan tetapi pendidikan haruslah dilekatkan dengan sendi agama, sebab bila tidak maka nilai esensi pendidikan itu semakin luntur, penguatan tauhid, pondasi iman merupakan tujuan utama pendidikan sebab dengan kuatnya tauhid dan pondasi iman maka akan meningkatkan kesalehan publik yang ada. Menjadikan generasi yang peka, sadar, dan menyayangi bangsanya. Selain itu mereka akan sadar pentingnya mengamalkan apa yang mereka dapatkan dan menjadikan mereka pakar dalam satu bidang tertentu saling melengkapi demi kemajuan bersama.

BAB 7

PENDIDIKAN SEBAGAI PENOLONG MASA DEPAN BANGSA

Sumberdaya manusia dari suatu bangsa, merupakan faktor paling menentukan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Pendidikan dapat dikatakan suatu aset, *human capital investment,* pendidikan diharapkan meningkatkan mutu SDM dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya, akan tetapi disisi lain pendidikan juga dapat dipandang sebagai status sosial dari produktivitas suatu bangsa. Esensi pendidikan bagi suatu bangsa tidak saja menunjukan tingkat peradabannya, akan tetapi juga mencerminkan kualitas bangsa sebagai manusia yang berdaulat, bermartabat, terhormat, dan mampu berkompetisi serta bersaing di dunia internasional. Kualitas bangsa tidak akan terlepas dari pendidikan sebab mau tidak mau pendidikan merupakan modal hidup kita diera global ini, Indonesia memiliki banyak generasi muda yang seharusnya mampu bersaing secara sehat dan mandiri dan diharapkan dapat menjadi penolong dan agen kemajuan bangsa.[1]

Akan tetapi kenyataannya yang ada di lapangan belum tentu demikian, ada generasi muda yang benar-benar berdedikasi mengabdi pada bangsa adapula yang menjadi sorotan *public* akibat ulah mereka, seperti halnya yang dilansir dalam media beberapa tahun yang lalu di

[1] Sri Hidayati Djoeffan, Revitalisasi pendidikan Sebagai Paradigma Peningkatan Kualitas Bangsa (*Jurnal Mimbar,* Vol. XX, No. 2, 2014), 220.

mana remaja meminum air rebusan pembalut, mereka mengaku nge-*fly* setelahnya. Dilansir detikcom Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise berpendapat perilaku remaja yang kecanduan air rebusan pembalut dikarenakan kurang optimalnya peran keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Akhirnya para remaja tersebut terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam Undang-Undang perlindungan anak orang tua bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak mereka, jangan sampai melakukan hal-hal yang salah, dan juga mendidik anak-anak agar berperilaku yang baik dalam kehidupan mereka.[2]

Tentu saja sebagai masyarakat pada umumnya akan miris mendengar berita yang demikian sebab sama saja hal ini akan mencoreng bangsa ini. Selain itu faktor lingkungan juga mempengaruhi bagaimana pola perilaku mereka sehari-hari, oleh sebab itu penting untuk mengajarkan nilai-nilai agama, dan Pancasila agar dihayati serta diamalkan untuk semua khususnya bagi generasi muda demi keberlangsungan masa depan bangsa. Sebab agama juga difungsikan sebagai penjaga keteraturan sosial dan disisilainnya sebagai penentu konflik sosial. sebagai orang yang beragama, tentu penting adalah menjadikan agama perekat relasi sosial. Agama dapat menjadi perekat solidaritas sesama manusia, selama ini agama juga telah membuktikan menjadi tali perekat antara manusia dan masyarakat. Begitupula Pancasila, Pancasila digunakan di Indonesia sebagai aturan bernegara yang diantara agama dan Pancasila saling mendukung dalam unsur Pancasila ada nilai-nilai agama, dan kemanusiaan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menjadi seseorang yang terdidik dan mengamalkan pendidikan yang diperoleh agar sesuai juga dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini.[3]

---

[2] Safira Raudhatul, https://www.haibunda.com/moms-life/20181109193457-68-27956/pelajaran-untuk-ortu-dari-kasus-remaja-mabuk-air-rebusan-pembalut diakses pada 31 Mei 2020.

[3] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 126.

A. Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kebhinekaan

Indonesia bukanlah negara sekular dan Islam. Indonesia merupakan negara Pancasila dalam seminar yang diselenggarakan di D.I. Yogyakarta yang dibawakan oleh tokoh Katholik Prof. Dr. N. Drijarkoro S.J., menghasilkan kesimpulan bahwa; "Negara yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi bukan profane, sebab dengan Pancasila kita berdiri di tengah-tengah, tugas negara yang berdasarkan Pancasila hanyalah memberi kondisi yang sebaik-baiknya pada hidup dan perkembangan religi. Dengan demikian oleh negara dapat dihindari bahaya-bahaya yang dapat timbul bila agama dan negara dijadikan satu. Prof. Dr. N. Drijarkoro S.J., juga menegaskan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara yang sekular, karena mengakui dan memberi tempat pada religi. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa negara itu adalah negara agama, sebab negara tidak mendasarkan diri atas sesuatu agama tertentu.

Negara yang berdasarkan Pancasila adalah negara yang berpotensi (*potential religious*) artinya memberikan kondisi yang sebaik-baiknya bagi kehidupan dan perkembangan religi. Jadi negara Pancasila itu tidak bersikap *indifferent* terhadap religi. Perumusan ketuhanan yang maha esa dipandang menurut keyakinan bangsa kita yakni monotheisme. Tentunya berangkat dari nilai-nilai Pancasila yang berisikan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Akan memberikan nuansa transformasi pendidikan berbasis Pancasila, maksudnya ialah memberikan kepada peserta didik bagaimana menjalankan Pancasila sebagai warga negara yang baik dibarengi dengan keajekan menjadi manusia yang *shaleh* dan mengamalkan ajaran agama yang dianut.[4]

Secara tidaklangsung dengan hadirnya pendidikan dapat memberikan nuansa toleransi dan saling menghargai serta menerapkan HAM (Hak Asasi Manusia). Di mana masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak untuk bebas mengekspresikan kesalehan agama mereka, bebas berpendapat. Demokrasi yang ada

[4] Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 85.

di Indonesia berbeda dengan yang ada di Barat, Indonesia memiliki nuansa demokrasi yang dipadukan dengan pendidikan berbasis agama dan Pancasila. Dan secara langsung akan meruntuhkan teori yang berkembang di Barat bahwa selama ini demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kajian terakhir Syaiful Mujani menunjukkan bahwa Islam di Indonesia berkesesuaian dengan demokrasi dan memberikan sumbagan yang berarti bagi tegaknya demokrasi di Indonesia.[5]

Pancasila memberikan ruang untuk menghargai pendapat orang lain. Sehingga terjadi kesesuaian sebagaimana yang telah dijelaskan pada Qur'an dan Hadist. Akan tetapi kini sulit dipungkiri bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup mulai ditinggalkan, dipihak lain akibat globalisasi semakin mempengaruhi pola dan perilaku rakyat Indonesia. Artinya bahwa kini Pancasila yang berfungsi sebagai filter nilai-nilai kehidupan sudah mulai tidak efektif. Informasi dan nilai-nilai dunia luar sudah hadir dan semakin intensif marak digandrungi oleh masyarakat-masyarakat pada umumnya, dalam konteks *Global Village* seperti sekarang ini terjadinya informasi dan ide adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang hampir tidak mungkin dihindari atau suatu yang tidak terelakkan. Ide-ide tentang liberalisme, sekularisme, hedonisme, dan radikalisme yang sering dijumpai hampir setiap hari akan menimbulkan konsekuensi pada pola pikir masyarakat dan akan melunturkan nilai-nilai kebhinekaan Indonesia.

Guna menghindari hal yang demikian perlu ada pembekalan bagi masyarakat yakni instrumen yang tepat dengan mengokohkan pegangan Pancasila agar dapat diresapi dan diamalkan sebagai pedoman bernegara dan berbangsa. Sebab bangsa yang baik ialah bangsa yang mengenal sejarahnya, dengan berfungsinya Pancasila sebagai dasar bernegara maka akan menjadikan bangsa Indonesia mengenal jati dirinya sendiri, yang bebas dari westernisasi, liberalisme, hedonisme, individual, serta ideologi-ideologi dari luar. Kita harus peka dan sadar bangsa ini kini sedang krisis eksistensi nilai-nilai

---

[5] Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad* (Jakarta: Kencana, 2016), 65.

Pancasila, oleh sebab itu perlu digalakkan kembali pendidikan Pancasila yang terstruktur dan masif. Selama era reformasi atau selama hampir dua dekade masyarakat Indonesia asing terhadap keberadaan Pancasila kondisi ini merupakan sesuatu yang ironis karena Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup yang susah payah dirumuskan oleh pendiri bangsa.

Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut sehingga pemerintah punya tanggung jawab politik untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mengembalikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan dinamika yang terjadi dewasa ini. Wacana transformasi pengalaman Pancasila diharapkan memiliki dampak strategis pemerintah Indonesia dan masyarakat. 1. Dampak strategis untuk pemerintah, pemerintah Indonesia selama era reformasi kurang menyadari bahwa Pancasila adalah dasar negara. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara NKRI adalah sangat menentukan kelanjutan NKRI ke depan. Jika Pancasila dianalogikan dengan rumah maka Pancasila adalah dasarnya bila Pancasila dilupakan maka sama saja dengan membiarkan rubuhnya rumah itu dan rumah yang besar itu adalah Indonesia, 2. Dampak bagi masyarakat diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk kembali menyadari bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya agar kembali berfungsi menjadi nilai-nilai dasar dalam interaksi sosial di level nasional maupun internasional, rujukan dalam merespon arus globalisasi dan pilar besar pemersatu bangsa.[6]

Transformasi nilai Pancasila dan kebangsaan juga sangat penting dalam menjaga harmoni dan keamanan negara. Apalagi pascareformasi, kini negeri ini sering dirundung berbagai kasus intoleran, radikalisme dan terorisme. Aksi penembakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan kebengisan, terorisme menjadi ancaman manusia. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila agar tidak merebaknya aksi-aksi yang melanggar

[6] Siswanto, Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan (*Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1, 2017), 56.

hukum. Selain itu negara juga telah membentuk tim densus 88. Tim densus 88 melakukan pendekatan secara kuratif. Tidak diragukan lagi sepak terjangnya mereka telah memadamkan berbagai aksi-aksi terorisme yang terjadi, Tim densus 88 juga melakukan sosialisasi pendidikan kepada lembaga-lemabaga baik formal seperti sekolah dan universitas, dan non-formal seperti pondok pesantren (*traditional boarding schools*) dan grup-grup masjid. Alasan memilih institusi keagamaan ialah sebab agama dapat menjadi penyeimbang antara tugas (kewajiban) dan kemanusiaan.[7]

Kamajuan ilmu pengetahuan sebagai akibat dari revolusi industri 4.0 sangat berbeda dari pada perkembangan revolusi industri sebelumnya, pada revolusi 4.0 terjadi peningkatan daya teknologi sehingga menjadikan perubahan gaya hidup. Era ini memerlukan sumberdaya manusia yang unggul yang tidak hanya mampu bertahan saja, akan tetapi juga mampu menciptakan peluang, inovasi, dan kreativitas. Revolusi 4.0 memiliki indikasi berkembangnya *internet of things and for things* yang diikuti teknologi baru dalam data sains, kecerdasan buatan, robotik, cetak tiga dimensi, serta teknologi nano. Kehadirannya terlalu cepat tanpa disadari akan memberikan pergeseran dalam pendidikan, oleh sebab itu penting ditanamkan bagaimana menggunakan barang yang canggih ini demi kemajuan bangsa yang sesuai dengan tata konsep Pancasila dan agama. Sebab apabila tidak diarahkan dengan nilai-nilai yang sudah ada maka akan dapat dipastikan teknologi itu akan menjadikan kerusakan dikemudian hari.

Kunci sukses dalam pendidikan abad 21 disangga dengan berbagai macam pilar, yang pertama adalah pilar *character education*. *Akhlaq* menjadi hal yang sangat pokok dalam pembentukan jati diri manusia bukan hanya kepada peserta didik akan tetapi juga semua manusia, degradasi *akhlaq* yang terjadi di Indonesia sendiri disebabkan oleh hilangnya nilai-nilai agama dan Pancasila. Sebagai warga negara yang baik penting bagi kita untuk menghadirkan kembali apa yang

[7] Al Makin, *Plurality Religiousity And Patriotism Crictical Insight Into Indonesia and Islam* (Yogyakarta: SUKA Press, dan Globethics.net, 2017), 110.

telah hilang dan menjadikan diri kita sendiri sebagai contoh yang baik agar dapat ditularkan kepada lingkungan kita sehari-hari.[8]

B. Meneropong Realitas Pendidikan

Pendidikan pembebasan, secara konseptual sering dikaitkan dengan upaya atau program pendidikan yang berbasis rakyat. Pendidikan yang berguna adalah pendidikan yang menyadarkan sikap kritis terhadap dunia dan kemudian mengarahkan perubahannya. Dalam menghadapi dunia, pendidikan diarahkan tidak hanya pada kemampuan retorika yang bersifat verbal, akan tetapi juga mengarah kepada pendidikan kelakuan yang bertumpu pada kemampuan profesional. Untuk memiliki kemampuan itu tentunya harus dirangsang sikap kritis terhadap kenyataan-kenyataan disekelilingnya dan berbekal dengan sikap kritis melalui diskusi, dan debat akan ditemukan berbagai hal yang dialaminya sendiri dan masyarakatnya. Pendidikan bergerak dari *self-empowerment* ke *social empowerment.*

Hingga dewasa ini, kurikulum pendidikan di berbagai negara, lebih didominasi oleh pola pendidikan tradisional yang mengedepankan urain verbal dan hafalan dari pada kemampuan praktik yang merangsang profesionalisme. Akibatnya dunia pendidikan lebih banyak menghasilkan retorika atau ungkapan-ungkapan verbal dari pada mencermati kenyataan sosial dan kemudian mengubahnya melalui kemampuan yang dimilikinya. Pendidikan seharusnya menjadi instrumen bagi *self empowerment,* yang bertujuan membebaskan manusia dari belenggu penindasan dan pengebirian manusia atas manusia lainnya.

Manusia yang memiliki kebebasan ditandai dengan adanya kemampuan diriya untuk memaksimalkan potensi dirinya dalam kehidupan yang dijalaninya. Jadi, pendidikan boleh menghasilakan generasi yang memiliki sikap tergantung bukan mandiri. Ketergantungan itu salah satunya disaranai oleh pendidikan model kapitalistik, yang sangat merugikan bagi proses pemberdayaan diri dan masyarakat.

---

[8] Moh Syauqi Malik, "Pendidikan Ideal Abad 21 Solusi Problematika Pendidikan di Era Disrupsi", dalam Faiq Ilham Rosyadi, dkk, *Pendidikan Di Era Disrupsi* (Yogyakarta: Timur Barat, 2020), 21.

Model-model pendidikan yang digunakan di Indonesia juga ditandai dengan pengayaan dimensi pengetahuan timbang perilaku yang mengarah kepada penguasaan suatu bidang yang dapat menjadi penguat dalam memasuki dunia pekerjaan. Pendidikan di Indonesia memang belum memiliki relevansi yang kuat dengan program pendidikan sebagaimana didesain oleh para praktisi pendidikan pembebasan. Dalam banyak hal, pendidikan Indonesia masih didesain sebagai model pendidikan yang lebih menekankan pada dimensi pengetahuan atau *knowledge.* Akan tetapi, yang masih tampak mengedepankan adalah penerapan pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan teoritik atau konseptual sehingga dimensi praksis agar pendidikan dapat menjadi *output*-nya memiliki seperangkat keterampilan praksis masih jauh dari harapan.[9]

Potret pendidikan yang ada di Indonesia sendiri memang sudah lama direncanakan untuk membangun karakter, menjadi karakter yang baik dan berakhlak mulia. Kata "akhlak" berasal dari bahasa Arab , kh-l-q, jamaknya *khulqun* yang makna asalnya adalah ukuran, latihan, dan kebiasaan. Dari makna pertama, ukuran lahir kata makhluk yakni ciptaan yang mempunyai ukuran; serta makna ke dua latihan, dan ketiga kebiasaan lahir sesuatu positif dan negatif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia "akhlak diartikan menjadi budi pekerti dan kelakuan. Dalam pemakaian kata ini sehari-hari artinya bisa sangat banyak dan kata. Akhlak juga bisa menjurus kepada budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, dan tindakan.

Berkenaan dengan akhlak, ada kecenderungan banyak orang menerjemahkan akhlak itu segala hal baik dan buruk yang dilandasannya adalah wahyu atau *nash.* Tegasnya, akhlak itu sesuatu yang *mansukh* (ada *nash*-nya). Adapun etika berangkat dari nilai filosofis. Demikian juga dengan moral, oleh sebab itu kita mengenal filsafat moral.[10] Kemajuan dan perkembangan pendidikan manjadi faktor keberhasilan hal ini terjadi dibelahan dunia Barat seperti

---

[9] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 11.

[10] Saidurrahman, dan Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam Prespektif Prof.K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.* (Jakarta: Kencana, 2019), 143.

Amerika, dan Eropa mereka berhasil membangun pendidikan mereka sehingga banyak sekolah-sekolah dan kampus yang menjadi tujuan utama tempat belajar dari penjuru dunia.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang posisinya masih dikatakan sebagai berkembang sedang mencari bentuk tentang bagaimana menjadi negara maju. Tanpa terkecuali di bidang pendidikan, Indonesia masih berusaha mengembangkan potensi yang ada, visi dan misi sistem pendidikan nasional tertuang dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah sebagai berikut;

> "*terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.*"
>
> Adapun nilai yang diemban oleh SISDIKNAS adalah;
>
> "*Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat (UU RI SISDIKNAS:41).*"

Dengan upaya mewujudkan visi dan misi SISDIKNAS tersebut apakah sesuai dengan realita yang ada dan idealitas yang diharapkan bangsa Indonesia permasalahan inilah yang perlu untuk dibahas. Selain itu perlu untuk dipelajari bahwa sistem pendidikan juga harus menyesuaikan dengan lingkungan, bahkan lingkungan juga mengandung kendala dalam proses pendidikan itu sendiri setiap medan atau lingkungan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, misalnya; keterbatasan sumberdaya, untuk itu sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumberdaya pendidikan yang efektif dan efisien.

Disamping itu hendaknya pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara demokratis, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan. Pemanusiaan dalam bidang pendidikan tidak datang dengan sendirinya tetapi datang dari masyarakat, hal ini merupakan ciri dari demokrasi pendidikan yang diharapkan. Semua keputusan ada pada anggota masyarakat yang terlibat dalam

pendidikan baik secara individu maupun sosial. tuntutan pendidikan demikian dalam era modern adalah penyelenggaraan satuan yang demokratis dan otonom yang memenuhi prinsip *school based management* atau pengelolaan sekolah berbasis masyarakat yang mengusung budaya yang melingkai sekolah itu, namun tetap dalam nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.[11]

Siswa yang saat ini duduk di bangku sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau mahasiswa yang sedang kuliah di Perguruan Tinggi (PT) diperkirakan lahir antara tahun 1995 sampai 2002. Mereka berusia kira-kira antara 16 sampai 23 tahun. Generasi ini adalah anak kandung generasi milenial (generasi Y) dan sebagian kecilnya generasi Z. karena pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pendidikan di Indonesia, sebagian besar generasi tersebut mengenyam pendidikan formal sampai SMA dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang menempuh pendidikan sampai PT.[12]

C. Arah Baru Orientasi Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bangsa, sebab pendidikan dapat memberikan nuansa pola pikir, dan pengambilan keputusan yang bijak. Mengabaikan *experimental science* dalam pendidikan tentu akan merugikan khususnya umat Islam sendiri, karenanya harus ada upaya yang serius dalam upaya membenahi sistem pendidikan tersebut. Selain itu pentingpula untuk menafsirkan kembali (*reinterpretation*) konsep-konsep dasar Islam seperti Islam, Iman, Ihsan, dan akhlak sekedar menyebut contoh sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist menjadi keniscayaan, tentu upaya reinterpretasi konsep kunci dimasud tidak hanya berhenti pada term yang telah disebut, akan tetapi harus menyentuh konsep al-Qur'an lainnya.

---

[11] Munirah, Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita (*Jurnal Alaudina,* Vol. 2, No. 2, 2015), 242.

[12] Suhadi, "Menu Bacaan Pendidikan Agama Islam Di SMA dan Perguruan Tinggi", dalam Noorhaidi Hasan, Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), 29.

Pendidikan adalah salah satu cara jika tidak ingin disebut sebagai satu-satunya cara kebangkitan sebuah peradaban. Lewat pendidikan pula lahir manusia-manusia yang mumpuni yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan dapat mengelola manfaat alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Bahkan pendidikan merupakan syarat utama untuk kebangkitan berbagai aspek-aspek yang lain, tidaklah mengherankan jika dalam al-Qur'an dorongan menuntun, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu untuk menopang tugasnya sebagai *abdun* dan khalifah sangat-sangat kuat.

Sampai disini, pernyataan Wan Mohd Nor Wan Daud dalam disertasinya yang berjudul, "*Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M Naquib Al-Attas*" menarik untuk dicermati. Ia menuliskan bahwa kaum intelektual telah mengamati bahwa salah satu karakter khas peradaban Islam yaitu perhatiannya yang serius terhadap pencarian pelbagai cabang ilmu. pada awal era modern, para pemikir dan pemimpin muslim menyadari pendidikan merupakan aspek penting dalam memajukan umat, termasuk untuk menghadapi hegemoni sosial-ekonomi, dan budaya Barat.

Selain itu penting bagi kita sebagai orang Islam untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu tersebut dalam pakem aturan Islam yang ada. Baik *natural science* dan *social science*, seperti matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, kedokteran, arsitek, sosiologi, geografi, antropologi, sejarah dan lain-lain. Kemudian kita juga harus menghilangkan dikotomi dalam ilmu pengetahuan sebab semua ilmu pengetahuan saling berkesinambungan, sebab bila kita masih mendikotomikan pengetahuan maka ini akan menjadi alamat kemunduran peradaban khususnya Islam.

Integrasi agama dan sains artinya menyatukan ilmu sains dan agama. jika selama ini agama dalam kotak tertentu demikian pula halnya dengan sains dalam kotak yang lain, tidak saling berhubungan keduanya dan bekerja dalam wilayahnya masing-masing. Namun dengan hadirnya integrasi agama, dan sains maka keduanya dapat keluar dari kotaknya dan memasuki satu kotak yang sama, dapat pula kedua kotak itu saling mendekat dan menempel. Ada irisan

yang mempertemukan keduanya. Namun harus dicatat, memadukan atau menyatukan agama dan sains bukan tanpa masalah. Konflik antara sains dan agama menjadi hambatan tersebut. Selanjutnya dalam proses integrasi itu, ada halnya integrasi dilakukan secara padu. Namun tidak menutup kemungkinan, integrasi juga akan sulit bahkan belum tercapai. Oleh sebab itu kita ubah pola *mindset* agar tercipta arah reorientasi nuansa pendidikan yang lebih berkemajuan dan bersinergi demi menyongsong masa depan.[13]

Dalam kajian ilmu sosial juga dapat dipadukan dengan aspek agama. sebab ilmu sosial dan ilmu agama saling berkaitan dan diaplikasikan setiap hari oleh manusia baik sadar maupun tidak sadar. Seperti halnya kita menangani berbagai konflik baik secara vertikal maupun horizontal, dalam Islam sendiri konflik merupakan suatu keniscayaan oleh sebab itu Islam juga berfungsi sebagai kredo yang diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang telah sempurna, dalam pengaturan segala aspek dari yang makro hingga mikro termasuk diantaranya konflik. Pengelolaan konflik dalam Islam dialamatkan kepada penegakkan keadilan dan mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Kuntowijoyo, Islam mengakui adanya diferensiasi dan polarisasi sosial. Al-Qur'an melihat fenomena ketidaksamaan sosial tersebut sebagai *sunnatullah* sebagai hukum alam, sebagai realitas empiris yang ditakdirkan terhadap dunia manusia. Banyak ayat al-Qur'an yang memaklumkan dilebihkannya derjat sosial, ekonomi, atau kapasitas-kapasitas lainnya dari sebagian orang atas lainnya.[14]

Pendidikan merupakan bekal kehidupan manusia, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai hadiah terbaik dari orang tua untuk anaknya. Apa yang ditanam orang tua kepada anaknya, *insyallah* akan terlihat hasilnya di masa yang akan datang. Jika sejak dini sudah ditanamkan adab, *insyallah* anak-anaknya akan tumbuh menjadi manusia beradab. Akan tetapi jika sejak dini adab diabaikan, semakin

---

[13] Saidurrahman, dan Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam Prespektif Prof.K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.* (Jakarta: Kencana, 2019), 154.

[14] Imam Bonjol Jauhari, *Teori Sosial Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press, 2012), 77.

berat mendidikanya kala dewasa. Adab adalah istilah khas dari Islam yang memiliki makna dan cakupan yang sangat luas, adab bukan hanya sekedar sopan santun kepada sesama. Adab meliputi adab kepada Allah, adab kepada manusia, adab kepada ilmu, adab kepada linkungan, bahasa, dan sebagainya.

Jadi dalam pandangan Islam manusia yang beradab ialah manusia yang toleran tanpa menggadaikan iman atau menjual keyakinan. Dia juga harus menjadi pekerja keras, akan tetapi harus didasari keikhlasan, bukan pencitraan dan pujian. Harus zuhud tampil sederhana sekaligus menjaga lingkungan dari orang-orang yang tamak kekayaan, dan ambisi kekuasaan. Pendidikan yang mengabaikan masalah adab hanya akan melahirkan orang-orang biadab baru (*new barbarians*). Langkah perbaikan (*ishlah*) harus terus diupayakan bersama. Sebab jika tidak, pendidikan malah akan mengundang musibah besar, musibah yang memaksa kita tak berhenti mengucapkan *istirja'. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.*[15]

Pada poin arah baru orientasi pendidikan penulis menggaris bawahi bahwa pentingnya merubah pola pikir pendidikan menjadi lebih tranformatif, dan berintegratif. Dengan memadukan aspek agama dalam kajian ilmu alam (*natural science*) dan ilmu sosial (*social science*) mengapa harus demikian? Sebab semua saling berkesinambungan. Selain itu penting merubah orientasi pendidikan yang awalnya hanya mengedepankan prestasi dan akademik, ke arah adab sebab bangsa ini butuh tuntunan bukan tontonan sadar bahwa generasi kita setiap masa selalu berbeda jadi harus ditanamkan bagaimana menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi sesama

Kesimpulan

Transformasi pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila merupakan aspek yang harus ada, dan dilaksanakan. Sebab Pancasila merupakan dasar bernegara kita semua, pascareformasi nilai-nilai Pancasila semakin luntur oleh sebab itu penting bagi kita untuk

[15] Muhammad Ardiansyah, *Catatan Pendidikan Refleksi Tentang Nilai-Nilai Adab dan Budaya Ilmu Dalam Islam* (Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa Depok, 2020), 73.

mengkaji dan menerapkannya secara masksimal pada bangsa ini. Apalagi kini dengan maraknya globalisasi, dan budaya kebarat-baratan yang muncul, secara langsung ini akan meluntukan budaya bernegara dan berbangsa kita. Dalam tulisan kecil ini penulis menghimbau kepada masyarakat marilah kita sadar dan bangga akan bangsa ini, sebab bangsa ini ialah bangsa yang kuat dan besar jadi pertahankan nilai-nilai Pancasila sebab itulah jati diri bangsa ini.

Potret pendidikan bangsa ini harus menemukan konsep yang baru jangan hanya melulu akademisi, hafalan dan prestasi. Harus ada orientasi yang baru sebab seiring perubahan zaman maka kita harus menyesuaikannya pula dengan catatan tidak keluar dari koridor agama dan negara, selain itu banyak teori-teori pendidikan yang kenyataannya dilapangan masih gagal ini penting untuk ditinjau ulang agar kedepannya tujuan dan cita-cita pendidikan lebih tepat sasaran. Aspek perilaku juga harus dipertimbangkan dalam pembentukan pendidikan sebab kita ini mendidik manusia, manusia membutuhkan contoh dan panutan oleh sebab itu maka berilah contoh yang baik agar dapat ditiru dan diaplikasikan, beban guru berat sebab mereka mendidik generasi penerus yang handal dan beradab maka sebagai seorang yang bijak marilah kita hargai mereka dan memberikan kesan yang terbaik baik selama proses pendidikan sebagai transformasi pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 8

PENDIDIKAN BERBASIS NON FANATISME

Pendidikan merupakan sarana untuk menjadikan kemajuan dan kebradaban bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa dapat dilihat dari aspek pendidikan dan *output* nya, sehingga seringkali pendidikan juga dijadikan barometer seberapa berkualitaskah SDM (Sumber Daya Manusia) di negara atau bangsa tersebut. Bagi kita tujuan pendidikan yang utama ialah menjadikan mukmin yang berkualitas, kata berkualitas disini memiliki pemaknaan yang luas. Berkualitas kepada Allah dan sesama manusia memberikan kemanfaatan, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya;

> *Mukmin yang kuat lebih baik dicintai Allah dari pada mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusan mu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.* (HR. Muslim).[1]

[1] Muhammad Ardiansyah, *Catatan Pendidikan Refleksi Tentang Nilai-Nilai Adab dan Budaya Ilmu Dalam Islam* (Depok: Yayasan Pendidikan At-Taqwa Depok , 2020), 171.

Selain itu juga perlu diketahui bahwa kini kita hidup di era disrupsi yang memaksa untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru yang belum ada sebelumnya, mulai dari individualisme, hedonisme, meningkatnya sentimen antar masyarakat, meningkatnya fanatisme dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan sebelumnya. Oleh sebab itu pendidikan harus hadir demi membenahi apa yang memang harus dibenahi dengan merubah pola dan strateginya ke arah non fanatisme, sebab dalam agama ada aspek teologis dan sosial yang salahsatunya tidak bisa diabaikan harus diserasikan agar tercipta puncak keiimanan dan kekuatan dalam membangun relasi baik vertikal maupun horizontal.

Agama dalam aspek teologis berwujud keyakinan konfensional tentang keterlibatan Tuhan dalam proses keselamatan umat manusia. Dalam sejarahnya keterlibatan Tuhan tidak harus merujuk pada apa yang sesungguhnya terjadi akan tetapi lebih kepada aspek apa yang diyakini sebagai kehendak atau renana (takdir) Tuhan. Secara esensi makna teologis dapat direkonstruksi dari sumber-sumber yang Non-historis juga, seperti hadis, maka korpus hadis, dapat ditemukan penjelasan atau rincian ajaran agama yang detail sebagai tuntunan hidup kaum beriman.[2]

Begitupula dengan aspek sosial agama menawarkan pola untuk lebih membangun peradaban dengan mengangkat dajat kaum *mustad'afin* (kaum yang lemah). Islam memperhatikan nasib orang/ kaum lemah baik secara fisik maupun psikis, baik dalam bidang materi maupun non materi. Dalam prakteknya semua itu diimplementasikan dengan berbagai jalan seperti zakat, shadaqah, dan anjaran untuk saling menolong dalam kebaikan. Mengapa Islam menyuruh dan mewajibkan itu? Semua demi kebaikan bersama dan sebagai fakta bahwa Islam ialah rahmad bagi alam semsta. Sebaliknya juga Islam mengutuk orang-orang yang tidak memperhatikan nasib orang yang lemah, termaktub dalam surat al-Ma'un ayat 1-7 secara *real* memberikan kritik bagi orang yang mengabaikan anak yatim dan orang miskin.[3]

---

[2] Mun'im Sirry, *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal* (Yogyakarta: Suka Press, 2018), 4.

[3] Sahiron Syamsuddin, *Al-Qur'an Dan Pembinaan Karakter Umat* (Yogyakarta: Ladang Kata dan Baitul Himah, 2020), 10.

Melihat realitas dalam sedikit cuplikan di atas tentu harus ada perubahan dalam pengajaran pendidikan yang dijalani. Menurut Masdar Hilmy ada 9 *point* sebagai alternatif yang mengarahkan pendidikan ke arah keberagaman yang antroposentris, setidaknya teo-antroposentris. Solusinya ialah;

1. Pembelajaran yang terintegrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
2. Materi pelajaran harus sedapat mungkin dikaitkan dengan, atau berangkat dari, realitas empiris yang dialami oleh peserta didik.
3. dengan berpijak pada realitas empiris kehidupan manusia, maka berbagai persoalan dapat terpecahkan dengan sendirinya.
4. merasionalkan cerita dan dongeng yang berisi hal-hal yang berlawanan dengan akal sehat.
5. lebih banyak mengedepankan paradigma berpikir induktif-rasional dalam pembelajaran dari pada deduktif normatif.
6. pembelajaran harus meminimalisir disensitifdan memaksimalkan insentif.
7. melakukan visualisasi terhadap materi pembelajaran sesering mungkin melalui alat bantu atau alat peraga yang dapat dijangkau oleh biaya pendidikan.
8. menghentikan kultur kekerasan dan menggantinya dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan manusia.
9. menarik aspek antroposentrisme dan teo-antroposentrisme dalam pembelajaran, khususnya dalam materi pendidikan agama Islam.[4]

Kurang lebih demikian 9 *point* yang menjadi alternatif dalam aspek pendidikan. Penulis dalam hal ini menambahkan aspek keikhlasan sebagai landasan dalam melaksanakan pendidikan, sebab keikhlasan akan memberikan kemudahan dalam perjalanan pembelajaran pendidikan dengan niatan tulus maka akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. keikhlasan akan menghadirkan pengabdian yang suci sehingga pola pemikiran kita tidak berpikir bahwa pengabdian ini sia-sia, dan tidak bertahan lama.

---

[4] Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 110.

Sehingga menumbuhkan tanggungjawab dengan berat.[5] Sebagaimana yang termaktub dalam surat Asy-Syams ayat 9-10;

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

Artinya; "Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya."

Pendidikan yang baik akan menghilangkan sifat fanatisme dalam individu, fanatisme lahir dari kekaguman dan perasaan mengidolakan sesuatu secara berlebihan. Oleh sebab itu pendidikan harus di arahkan ke arah apresiatif pemberian dukungan baik moral maupun moril agar aspek-aspek fanatisme dalam individu dapat hilang, sebab lambat laun apabila pendidikan seperti ini digelorakan dan diimplementasikan secara memadai dapat menimbulkan rasa kekeluargaan saling memiliki bersama, dan timbul rasa tidak ingin menyakiti dengan sikap kasar, fanatisme, dan intoleran. Akan tetapi jika individu tidak memiliki rasa kekeluargaan akan menjadi malapetaka yang besar yang bisa dibayangkan. Tantangan ini berat sebab zaman ini manusia juga bebas mengakses pengetahuan lainnya sehingga mereka juga dapat dengan mudah di *brain wash* dengan aneka informasi yang tidak tahu apakah itu asli atau *hoaks.*

Fanatisme juga dapat dimaknai sebagai perbuatan zalim, mengapa dikatakan perbuatan zalim? Mereka melakukan diskriminasi, pemecah belah harmonisasi, perusak hubungan sesama manusia, dan lebih parahnya lagi mentuhankan apa yang mereka anggap benar padahal apabila dilihat secara fakta apa yang mereka anggap itu benar. Tetapi semuanya hanya menurut perspektif mereka dan bisa jadi salah apabila dilihat dari perspektif yang berbeda. Fanatisme juga menjadi ajang penyiksaan baik *verbal* maupun non *verbal*, fanatisme yang hari ini terjadi diberbagai tempat haruslah dijadikan pemebelajaran, berbagai kasus fanatisme tersebut mencuat dan dipublikasikan baik dalam media elektronik maupun cetak dan beredar luas di masyarakat. Tapi perlu diingat bahwa sejarah tidak akan terhapus begitu saja.

Berita cetak dan elektronik hari ini adalah milik generasi selanjutnya, bahkan sampai ribuan tahun kedepan. Banyak kasus yang menjadi bukti nyata seperti; bangsa Jerman yang malu terhadap

[5] Said Nursi, *Risalah lkhlas & Ukhuwah* (Banten: Risalah Nur Press, 2016), 30.

tindakan Hitler, bangsa Italia terhadap Mussolini, bangsa Vietnam terhadap Pol Pot, bangsa Filiphina terhadap Marcos, dan banyak lagi yang sudah menjadi catatan hitam sejarah peradaban dunia. Kita juga harus malu akan munculnya fanatisme yang menghegemoni hampir disegala lini baik politik, agama, dan duniawi yang tidak ada habis-habisnya. Sejarah mencatat bahwa suatu dinasti dan peradaban yang maju ialah yang merajut harmoni, multikultural, dan saling melindungi antara yang lemah dan kuat, yang kaya dan miskin. Bukan dengan saling memukul dan menghancurkan satu dengan yang lain.

Keanekaragaman dan kontribusi dari berbagai pihaklah yang menyokong kekuatan Indonesia tegak dan kokoh. Sebagaimana Pancasila sendiri adalah sebuah kompromi politik dan ideologi pendiri bangsa hilangkanlah saling memaki, mencaci, dan fanatisme yang tidak kunjung usai, semua berkontribusi dari segi apapun yang bisa dikeluarkan, semua itu harus direvolusi agar lebih memberikan nuansa yang positif. Disini peran pendidikan diuji apakah hanya sebatas teori apa terjadi kesesuaian antara teori dan praktis, merdeka dalam belajar demi keutuhan bangsa. Nasionalisme Indonesia bukan dilandasi sentimen dan fanatisme semata, akan tetapi ada elemen-elemen yang mengkombinasikan semua itu baik dari Barat, Timur, agama, filsafat, tradisi, kemajemukan, dan toleransi yang membudaya sejakan dahulu kala.[6]

Fanatisme dapat menimbulkan radikalisme bagi yang menjadi korban sebab mereka ingin adanya perubahan, terkadang dalam menilai radikalisme janganlah langsung mengambil tindakan yang keras akan tetapi lihatlah apa yang melatarbelakanginya sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak. Sama juga yang terjadi pada kasus fanatisme cara mengubahnya agar tidak menjadi radikal yakni dengan memberikan pemahaman dan pendidikan keberagaman yang lebih masif agar mereka paham dan muncul saling tenggang rasa, apabila ini dibiarkan maka jangan salahkan jika mungkin suatu hari nanti akan terjadi sikap yang lebih agresif yang membahayakan dalam skala yang besar.

Apalagi jika terjadi kepada kaum muda, disaat jiwa-jiwanya bergelora akan perubahan justru akan mempercepat perubahan tersebut.

[6] Al Makin, *Membela Yang Lemah, Demi Bangsa Dan Ilmu Keragaman, Minoritas, Khilafah, Kapitalisme Agama, dan Madzhab Yogya* (Yogyakarta: SukaPress, 2019), 26-30.

Secara etimologis radikalisme berasal dari kata *radix* yang berarti akar. Seorang radikal ialah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol hingga ke akar-akarnya. Sebuah kamus menerangkan bahwa seorang radikal adalah seorang yang menyukai perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan. Secara sosiologis dapat dijelaskan bahwa radikalisme muncul akan menimbulkan kontradiksi di masyarakat yang ada, kejadian ini diperparah jika masyarakat mengalami kesenjangan dalam mengadaptasi perubahan dan nilai-nilai dengan pengalaman yang mereka dapatkan.[7]

Dalam melaksanakan pendidikan yang berbasis non radikal dibutuhkan komitmen, komitmen ialah faktor yang sangat penting dalam melaksanakan program terebut demi mencapai sasaran yang tepat. Kita tidak dapat memahami kepribadian seseorang sebelum kita mengenal dan berkomunikasi, selain itu pendidikan dapat membaca dan menganalisis semua itu jika memang sudah menemukan sisi orang tersebut. Pendidikan juga mampu melihat bagaimana komitmen seseorang dalam aspek sosial dan agama sehingga dapat menilai apakah dia baik atau tidak. Seseorang yang memiliki komitmen baik dalam beragama pasti dia tidak akan menjelekkan agama dan saudaranya apabila dia tidak memiliki komitmen maka dia akan merusak dan menjelekkan agama dan saudaranya.

Pembacaan agama juga harus dilihat dari seberapa jauh dia peduli, menderita, dan sedih. Dia menderita bukan dalam rangka mencari kemenangan, namun demi memperbaiki nasib manusia; dia sedih bukan karena kegagalan yang dialaminya namun karena penderitaan yang menimpa sesamanya; dia memiliki kepedulian bukan untuk kemuliaan dirinya, namun untuk kemuliaan seorang pencipta dan seluruh makhluk hidup. Dia tidak berkeinginan untuk mencari kemapanan keagamaan, memaksakan ibadah ritual yang *rigid* dan memperjuangkan program partai, namun dia berusaha memajukan kehidupan manusia sebagai jalan terbaik untuk mengabdi kepada Tuhan.[8]

---

[7] Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1991), 132

[8] Asghar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan* terj Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 221.

Penerapan pendidikan berbasis non fanatisme hendaknya juga menghadirkan esensi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sebab agama tidak hanya memainkan peran yang integratif dan menciptakan harmoni sosial saja dalam masyarakat, tetapi juga memiliki peran untuk memecah dan dengan begitu mencerminkan perimbangan antara kekuatan integratif dan disintegratif yang ada dalam sistem sosial, tergantung apakah konflik itu kemudian diperkecil atau diubah menjadi keuntungan yang positif. Di Indonesia, kerukunan antar umat beragama juga pernah dirumuskan dan diimplementasikan Orde Baru dengan melibatkan segenap tokoh antar agama, selama Orde Baru relatif tidak ada konflik antar umat bergama. Motivasi kerukunan hidup antarumat beragama menjadi etika dalam pergaulan kehidupan beragama.

Dengan demikian, agama selayaknya berfungsi menafsirkan kenyataan hidup dan mengarahkan; artinya, memiliki interpretatif dan fungsi etis. Dalam prespektif ini, agama juga tidak hanyut dan tenggelam dalam politik, dan politik tidak memperalat agama. Secara mendasar dan umum, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia ghaib, khususnya dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.[9]

Penerapan ilmu dalam pendidikan menjadi kewajiban, sebab sejatinya ilmu yang dipikirkan dengan akal mengharuskan diterima dengan hati yang bersih dan lapang, yang akan membuka pengetahuan terhindar dari dinding yang menghalangi hatinya dengan ilmu yang membawa pada kebenaran dan pengenalan. Hamka menjelaskan bahwa ilmu seharusnya dapat membawa manusia pada taraf keyakinan dan semakin yakin, memberikan kemanfaatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, bukannya mendorong kepada keraguan dan ikut-ikutan. Ilmu yang tidak memberikan kepastian ialah kekosongan, ilmu yang tidak menghantarkan pada keyakinan adalah keraguan, dan mencari ilmu, tetapi tidak mendapatkan kebenaran adalah kebodohan. Bagi Hamka, ilmu yang demikian itu tidak ada haganya dalam Islam.

Apa yang dituturkan oleh Hamka sejatinya merupakan tamparan bagi orang yang berilmu akan tetapi tidak dapat menggunakan

[9] Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 111-126.

semestinya, orang itu belum mampu memberikan nilai yang baik bagi diri dan orang lain, akan tetapi dia melakukan tindakan yang merugikan salah satunya dengan menghadirkan fanatisme dan saling menghakimi sehingga dapat dikatakan pendidikannya gagal hanya sebatas slogan tanpa *action*.[10]

Kesimpulan

Pendidikan menjadi sebuah kewajiban baik bagi agama maupun bagi seorang individu, sebab dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kompetensi dalam kehidupannya. Pendidikan juga menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa, pendidikan menjadikan perubahan pola pikir menjadikan individu untuk mampu beradaptasi, tahan banting, dan mampu memberikan trobosan baru dalam kinerja. Orientasi pendidikan harus dirubah bukan hanya mengedepankan akademis semata akan tetapi juga mengedepankan rasionalisme, agama, dan afeksi sehingga mampu menyentuh hati siswa dan menghadirkan rasa kekeluargaan serta saling memiliki sehingga menjadikan manusia yang memiliki jiwa pengasih dan tidak ingin melakukan perbuatan yang merugikan seperti diskriminasi, fanatisme, keras watak, dan perbuatan buruk lainnya.

Peran pendidik penting apalagi di tengah zaman yang disrupsi dalam berbagai aspek, dengan melaksanakan sistem pendidikan berbasis non fanatisme. Diharapkan dengan terlaksananya sistem tersebut generasi muda dapat menyongsong masa depan yang cerah dan terhindar dari sifat fanatisme yang merusak kesatuan dan kerukunan, semua itu butuh komitmen yang serius bukan hanya slogan, dan teori semata. Akan tetapi butuh *self implementation* yang bermula dari pribadi pendidik kemudian ditiru dan diimplementasikan oleh siswa sehingga peran seorang pendidik besar disini, dengan demikian dapat terimplementasi juga semboyan pendidikan bangsa ini; *Ing Ngarsa sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani.*

---

[10] Adian Husaini dan bambang Galih Setiawan, *Pemikiran & Perjuangan M. Natsir, & Hamka Dalam Pendidikan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 69.

kajian islam sosial

BAB 9

NU DAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI PEMBENTUK PERADABAN BANGSA

Perkembangan Islam di Indonesia merupakan proses yang berkaitan dengan kehidupan yang lain serta memiliki berbagai problem yang kompleks sehingga mengharuskan manusia untuk membentuk sebuah organisasi. NU dan Muhammadiyah dilahirkan untuk memberikan nuansa yang baru dalam Indonesia sendiri. Secara *hitoris* NU dan Muhammadiyah sudah ada sebelum Indonesia merdeka, selain itu ada latar belakang *hitoris* yang berbeda dalam pendirian 2 ormas besar ini. Organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan di Surabaya pada tahun 1926 merupakan organisasi yang bergerak dan menjadi wadah bagi pergumulan Islam dengan nilai budaya setempat yang menuntut adanya penyesuaian secara terus menerus tanpa kehilangan identitas keasliannya.

Keberhasilan ulama menghimpun pengikut yang besar menumbuhkan solidaritas dan integrasi yang kuat, menjadikan politik organisasi ini sebagai salah satu kekuatan sosial politik, kultural, keagamaan yang berpengaruh di Indonesia hingga kini. Gagasan yang pertama kali ketika NU dibentuk bukanlah wawasan politik, melainkan wawasan sosial keagamaan.[1] Sedangkan Muhammadiyah dibentuk sebagai perkembangan dan sifat gerakan

[1] M Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 5.

modern di Indonesia, dalam pembicaraan kita tentang organisasi, baik sosial, pendidikan ataupun politik, golongan pembaharu lebih memperhatikan Islam pada umumnya. Bagi mereka Islam sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan, Islam berarti juga kemajuan, agama tidak akan menghambat usaha untuk mecari imu pengetahuan, sains serta kedudukan wanita. Islam adalah agama yang *universal*, serta dasar-dasarnya telah diungkapkan oleh para nabi, baik yang dikenal mupun tidak dikenal. Selain itu organisasi ini lahir dengan niatan memurnikan Islam dari penyakit TBC (*Takhayul, Bid'ah* dan *Churafat*).[2]

Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana 2 organisasi yang memiliki pandangan dan corak yang berbeda yakni tradisionalis, dan modernis sebagai pembentuk peradaban bangsa, yang tentunya mencakup bagaimana sejarahnya, kiprah dalam pendidikan, dan kemanusiaan, ditutup dengan pembahasan menjaga kutuhan bangsa.

A. Sejarah NU dan Muhammadiyah

Sudah seringkali dinyatakan bahwa NU didirikan oleh kyai tradisionalis yang menyaksikan posisi mereka terancam dengan munculnya Islam reformis. Pengaruh Muhammadiyah dan SI yang kian lama kian semakin meluas, demikian menurut argumen ini, telah memarginalisasikan kyai yang sebelumnya merupakan satu-satunya pemimpin dan juru bicara kaum muslim, dan ajaran baru telah melemahan legitimasi mereka. Dikatakan bahwa NU lahir didirikan untuk mewakili kepentingan mereka, *vis a vis* pemerintah dan kaum pembaharu untuk menghambat perkembangan organisasi-organisasi yang telah lahir terlebih dahulu.

Tentu saja ada kebenaran juga mengenai tesis ini, akan tetapi sebenarnya juga gagal dalam menjelaskan alasan NU berdiri pada tahun 1926 dan tidak lima atau sepuluh tahun lebih awal, saat SI sedang giat-giatnya dan ketika banyak keluhan kepada kaum pembaharu yang agresif menyebarkan ajarannya di Jawa. Pada waktu itu, sedang dilakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan kongres

---

[2] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), 322.

khilafah yang akan diadakan di Kairo pada Maret 1925. Inisiatif penyelenggaraannya berasal dari ulama al-Azhar, yang didorong oleh raja Mesir Fu'ad calon lain untuk kursi khilafah. Pemikir pembaharu terkemuka, Rasyid Ridha salah seorang penyelenggaranya sudah mengirim undangan kepada SI dan Muhammadiyah, organisasi penting yang ada di Indonesia pada waktu itu. Namun kesulitan-kesulitan internal di Mesir mengganggu persiapan kongres dan menyebabkan kongres itu harus ditunda sampai Mei 1926.

Dalam pandangan Ibn Sa'ud, persiapan kongres Kairo, dengan kemungkinan terpilihnya Fuad sebagai khalifah baru merupakan ancaman atas posisi yang yang baru dimenangkannya di Hijaz oleh karena itu dia melaksanakan kongres tandingan di Makkah selama Juni-Juli 1926, berpura-pura menyelenggarakan urusan pembicaraan haji akan tetapi aslinya berusaha untuk memperoleh legitimas atas kekuasaannya atas Hijaz, kedua kongres itu yang hampir bersamaan menunjukan akan adanya persaingan yang tidak terlalu tersembunyi untuk meraih kekuasaan sebagai pemimpin muslim. Di Indonesia sendiri pada tahun-tahun itu juga sedang diadakan kongres-kongres umat Islam pada tahun 1922 sampai 1926. Para aktifis muslim dari berbagai organisasi membahas berbagai masalah penting yang menjadi keprihatinan bersama.

Tidak satupun dari kedua kongres tersebut yang secara jelas berhubungan dengan Islam tradisional. Kita telah menyaksikan bahwa pembaharu yang terkenal itu (Rasyid Ridha) adalah salah seorang penyelenggara kongres, kemudian Ibn Saud dan pengikutnya adalah beraliran wahabi, yang berusaha memurnikan Islam dari segala yang berbau sinkretisme, hal-hal yang bernada pemujaan atas wali dan orang yang sudah meninggal, selama di Makkah pada waktu sebelumnya, wahabi banyak menghancurkan makam di dalam dan sekitar kota tersebut. Bagi kaum tradisionalis Indonesia praktek ini berkaitan dengan praktek yang mereka jalani dan hal yang demikian dikutuk wahabi.

Kaum tradisionalis Indonesia menghendaki agar ada utusan Indonesia ke kongres Makkah dan meminta jaminan pada Ibnu Saud agar menghormati madzhab-madzhab fiqh ortodok dan membolehkan

praktek-praktek ritual tradisional. Akan tetapi jika tidak disetujui merupakan pukulan yang berat bagi tradisionalis Indonesia jika fiqh Imam Syafi'I dilarang di Makkah, demikian juga pelarangan terhadap peziarah dan tarekat-tarekat yang kesana untuk berziarah sebab hal ini akan menghilangkan pengalaman yang berharga bagi mereka. Kyai Wahab Hasbullah merupakan yang paling *vocal* dalam kongres al Islam dan mendorong kyai Jawa Timur agar mengirimkan utusan sendiri ke Makkah untuk membicarakan madzhab dengan Ibn Sa'ud. Untuk tujuan ini mereka membentuk komite Hijaz, yang bertemu di rumahnya Surabaya pada 31 Januari 1926 untuk menentukan siapa yang diutus. Untuk memperkuat kesan dari pihak luar, komite ini memutuskan mengubah diri menjadi sebuah organisasi, menggunakan *Nadlatoel 'Ulama*. Hal ini yang menjadi latar belakang lahirnya NU.[3]

Sejak awal penyebaran agama Islam memiliki pusat-pusat penyebaran di kota dan di desa. Di tempat itu agama Islam berkembang ke daerah sekitarnya. Para tamatan ponpes mendirikan ponpes-ponpes baru di tempat lain atau di rumah asal si santri, dengan demikian siklus penyebaran Islam semakin meluas. Pada umumnya pesantren-pesantren yang berpusat di pedesaan menjadi pusat pengaruh agama Islam yang sudah tua sekali, sebelum datangnya pengaruh baru. Pusat pengembangan agma Islam yang ada di kota-kota biasanya datang kemudian dan menjadi pusat pembaharuan Islam. dapat dikatakan bahwa pusat agama Islam dan pengikutnya yang ada di pedesaan adalah para ulama yang tradisionalis dan mereka yang tinggal di perkotaan adalah pengikut modernis.

Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks kini tesis ini sudah terpatahkan sebab banyak golongan tradisionalis yang sudah ke kota, dan sebaliknya sudah ada golongan modernis yang di desa tentunya asumsi yang demikian memang relevan dahulu apabila menengok tahun-tahun pada masa awal-awal hingga tahun 90-an. Tahun 90-an ke atas sudah mulai nampak akan perpaduan yang memberikan nuansa

[3] Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 33.

Islam yang berbeda baik dari desa maupun kota.[4] Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terpenting di Indonesia sebelum perang dunia ke dua dan mungkin juga sampai saat ini. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa anggota BU untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis, anak dari Kyai Abu Bakar bin Kyai Sulayman, khatib masjid sultan kota itu. Ibunya adalah anak haji Ibrahim penghulu. Setelah Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh, dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, ia pergi ke Makkah belajar selama satu tahun. Salah seorang gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib. Sekitar tahun 1903 mengunjungi tanah suci dan menetap 2 tahun lamanya disana.[5]

Muhammadiyah, sebagai organisasi yang berusia lebih dari 105 tahun dan besar secara nominal, dalam sejarah dianggap telah berjasa dalam mengembangkan Islamisasi di Indonesia bahkan di dunia secara global. Gerakan Muhammadiyah telah menimbulkan gaung yang sangat besar pada generasi Islam Indonesia dari sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan bukti bahwa Muhammadiyah diakui secara nasional dan internasional. Pandangan sarjana asing mengakui bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dan gerakan sosial keagamaan yang didirikan untuk menghadirkan Islam di Indonesia, sebagai respon akan keadaan waktu itu.

Dalam konteks menurut pandangan Muhammadiyah umat Islam haru berpandangan maju dan memiliki semangat perubahan *tajdid* maju melebihi wawasan Islam yang sebelumnya. Menurut Muhammadiyah kunci kemajuan dan kemakmuran adalah pendidikan. Meskipun pada awalnya organisasi ini bersumpah untuk tidak terlibat politik praktis, akan tetapi dalam sejarahnya juga pernah ikut politik Masyumi pada tahun 1955. Organisasi ini mendapatkan respon yang luas dari kalangan Islam, sebab umat Islam Indonesia

---

[4] Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 49.

[5] Deliar Noer, *Gerakan Modern Indonesia 1900-1942* (Jakrta: LP3ES, 1982), 84.

nampaknya ingin sekali memperoleh sebuah wawasan baru tentang ke-Islaman yang mampu mendobrak kejumudan di kalangan Islam sendiri. Umat Islam berharap dengan adanya organisasi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.[6]

Muhammadiyah juga memiliki andil dalam perimbangan misi kristenisasi yang dilakukan oleh *Zending* di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tujuan pergerakan ini adalah; 1. Menyesuaikan diri degan kemajuan zaman sehingga orang Islam tidak hanya paham dengan ajaran-ajaran agama akan tetapi juga paham akan pengetahuan yang dibutuhkan di masa-masa kini;2, memurnikan diri dari unsur tradisi Jawa yang menyimpang atau bertentangan dengan ajaran Islam. selain itu Muhammadiyah juga meniru cara *zending* untuk menarik anggota dan simpatisannya seperti;

1) Mendirikan sekolah-sekolah (bukan pondok pesantren) dengan memasukkan pengajaran agama dan dengan kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman.
2) Mendirikan rumah-rumah sakit, dengan mengatas namakan PKO (Pertolongan Kesengsaraan Umum).
3) Mendirikan rumah yatim piatu atau panti asuhan.
4) Mendirikan kepanduan (Hizbul Wathon).[7]

Para anggota dan simpatisan Muhammadiyah terdapat banyak di pulau Jawa dan Sumatera khususnya Sumatera Barat dan Aceh. Dalam perkembangannya Muhammadiyah juga menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif. Mereka melihat Muhammadiyah begitu terbuka kepada budaya Barat, sehingga khawatir apabila dengan sikapnya itu kemurnian Islam akan dirusak. Oleh karena itu hal ini juga menjadi faktor mereka mendirikan NU sebagai basis Islam kultural yang diniatkan untuk memurnikan Islam dari Barat. Sikap penerintah Belanda terhadap gerakan Islam umumnya tidak senang, akan tetapi menjelang Perang Pasifik sikap tersebut mengalami perubahan, dikarenakan ancaman perdamian terutama

---

[6] Zuly Qodir, Islam Berkemajuan dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat (*Jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 13, No. 2, 2019), 212.

[7] G Moedjanto, *Indonesia Abad Ke 20 Jilid 1 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 32.

berhubungan dengan gerakan Islam. khususnya Muhammadiyah untuk diajak bekerjasama menghadapi ancaman-ancaman Jepang itu. Untuk itu pemerintah membantu dalam; 1. Mendirikan Universitas Islam, 2. Memberikan fasilitas atau bantuan dalam pengurusan haji, 3. Membantu mendidik penghulu, 4. Mengeluarkan perangko seri Muhammadiyah yang hasil penjualannya diserahkan pada perkumpulan ini.[8]

Dalam sejarahnya Muhammadiyah melakukan pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan, yaitu pendekatan *high politics* dan *allocative politics*. Pendekatan *high politics* berorientasi kepada tujuan-tujuan moral yang luhur, anggun, sesuai dan sebangun dengan martabat dan harkat manusia yang beriman. Sementara *allocative politics* adalah peropolitikan untuk mengalokasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik bernegara. Hingga kini 2 pendekatan tersebut berhasil melewati ujian meskipun politik di Indonesia mengalami pergeseran dan perubahan karakter berbegai rezim yang berkuasa, yang dibagi dari awal kemerdekaan, orde baru, dan reformasi.[9]

B. Kiprah Dalam Pendidikan dan Kemanusiaan

NU dan Muhammadiyah memiliki kiprah yang besar dan tidak perlu diragukan dalam rangkaian kemanusiaan, ada banyak aspek seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, ekonomi, kepedulian sosial dan masih banyak lagi. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis tidak menjelaskan semua disini penulis akan lebih kepada aspek pendidikan, dan kepedulian sosial (kemanusiaan).

Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting dalam pengembangan SDM dalam menghadapi persaingan global. Investasi pendidikan memang tidak dapat dirasakan langsung. Artinya, bahwa membutuhkan waktu untuk mengetahui bagaimana hasil pendidikan tersebut. Jika berinvestasi sekarang maka maka akan dirasakan hasilnya 10-15 tahun yang akan datang. Muhammadiyah dan NU

---

[8] Ibid., 33.

[9] Nazaruddin Latif, Dinamika Politik Muhammadiyah (*Jurnal Tajdida,* Vol. 9, No. 1, 2011), 128.

telah meniti pendidikan sejak lama. Pendidikan dalam artian ini tidak harus pendidikan formal seperti di sekolah akan tetapi ada pendidikan non formal seperti di TPQ, Ponpes, dan lainnya.

Hingga dewasa ini, masih dinyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dari *human capital*. Artinya, bahwa pengembangan sumber daya manusia yang paling penting melalui pendidikan. Negara-negara maju selalu meningkatkan APBN untuk kepentingan pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan adalah *human investment* yang kelak akan membawa kebahagiaan dan kebanggan bagi bangsanya, jika anggaran pendidikan sudah dinaikkan, ketetapan juga sudah dicanangkan, maka yang mendasar adalah bagaimana menyiapkan generasi yang akan datang dan menjadi generasi yang cerdas, kompetitif dan bermoral. Itulah sebabnya di dalam visi pendidikan nasional, maka terdapat perubahan-perubahan jika pada masa sebelumnya adalah mencetak insan Indonesia yang kompeten. Maka sekarang diselaraskan dengan mencetak generasi yang ber-*akhlakul karimah*.[10]

Akan tetapi jauh sebelum Indonesia ini ada Muhammadiyah dan NU sudah ada dan memberikan kontribusinya dalam pendidikan, NU dengan rona pondok pesantren-nya, Muhammadiyah dengan pendidikan formal yang di komparasikan dengan kurikulum Barat. Pondok pesantren adalah cikal bakal institusi pendidikan di Indonesia kehadiran lembaga ini diperkirakan 300-400 tahun yang lalu. Dan hampir menjangkau tingkat komunitas yang ada di masyarakat khususnya pulau Jawa, dalam sistem pendidikan di Ponpes ini lebih menekankan *akhlaqul karimah* ada nilai nuansa tawadu' seorang siswa kepada guru, ustadz, dan kyai. Ada sifat saling memahami antara satu santri dengan santri yang lain, dan mereka para santri diajari bagaimana menjadi masyarakat yang baik.

Pembentukan karakter haruslah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan melibatkan aspek *knowledge, feeling, lovind and action*. Pembentukan karakter dapat diibaratkan pembentukan seseorang menjadi binaragawan yang memerlukan latihan otot-

[10] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 70.

otot secara terus menerus agar menjadi kokoh dan kuat. Di dalam pondok sendiri telah ada aspek-aspek pendidikan karakter yang menjadi landasan seseorang untuk berperilaku dari setiap individu, seperti yang dirumuskan oleh Indonesia Heritage Foundation ; 1. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, 2. Tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama, 3. Jujur, 4. Hormat dan santun, 5. Kasih sayang, peduli, dan kerjasama, 6. Percaya diri , kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, 7. Keadilan dan kepemimpinan, 8. Baik, rendah hati, dan, 9. Toleransi cinta damai dan persatuan.[11]

Sementara itu pesantren dikenal sebagai pendidikan rakyat gerakan-gerakan sosial yang pernah muncul di era kolonial Belanda selalu menjadikan pesantren sebagai basis perjuangan melawan kolonialisme dan eksploitasi penjajah. Selain menekankan penguasaan peralatan yang cukup untuk kebutuhan beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Pesantren sendiri juga berfungsi sebagai wadah transformasi kultural secara total kisah para kyai yang "*babat*" mendirikan pesantren dengan sengaja di daerah-daerah hitam di pinggiran kota adalah bukti nyata dan kecendrungan untuk menggunakan pendidikan di pesantren sebagai alat transformasi kultural yang berlangsung secara perlahan tetapi menyeluruh.[12]

Selain itu di ponpes sendiri santri juga dituntut untuk memperaktekkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab Islam memang mengajarkan yang demikian maka dalam hal ini ponpes berusaha memberikan pengajaran yang baik kepada santri agar mereka dapat menjadi penerang bagi masyarakat dan dapat memberikan solusi bagi problem yang ada. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa aktivitas *amar ma'ruf dan nahi munkar* adalah kutub terbesar dalam urusan agama. ia adalah sesuatu yang penting dan karena misi itulah, maka Allah mengutus para Nabi. Jika aktivitas ini hilang, maka syiar kenabian juga akan ikut hilang, agama menjadi rusak, kesesatan

---

[11] Imam Syafe'I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter (*JurnalAl-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 8, No. 1, 2017), 63.

[12] Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), 387.

tersebar, kebodohan merajalela, suatu negeri akan binasa. Begitu juga umat secara keseluruhan.[13]

Hingga tahun 2017 terdapat sekitar 48 ribu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah lembaga pendidikan ma'arif PBNU, dari tingkat MI/SD, MTs/SLTP, MA/SLTA sederajat. Sedangkan untuk pondok ada 23.000 pesantren yang tergabung di dalam asosiasi pesantren NU atau *Raithah Ma'ahid Islamiyah* (RMI NU). Jumlah ini masih memungkinkan untuk semakin bertambah, sebab pesantren-pesantren baru juga masih bermunculan, disamping terdapat pesantren-pesantren salaf yang enggan diasosiasikan di dalam RMI NU.[14]

Begitupula Muhammadiyah ghirah organisasi ini dalam rangka mencerdaskan generasi Indonesia tak henti-henti penulis dalam hal ini mengakses di website resmi Muhammadiyah. Akhirnya penulis menemukan data bahwa:

NO	Jenis Amal Usaha	Jumlah
1	TK/TPQ	4.623
2	SD/MI	2.604
3	SMP/MTs	1.772
4	SMA/SMK/MA	1.143
5	Perguruan Tinggi Muhammadiyah	172
6	SLB	71

Data ini belum dihitung panti asuhan, rumah sakit, tanah wakaf, Pondok Pesantren, Panti jompo, Rehabilitasi cacat, Masjid, Musholah, dan aset yang lain.[15]

Pada hakekatnya amal bakti usaha pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah sangat penting dan besar. Karena dengan adanya sistem pendidikan maka bangsa Indonesia akan terdidik dan menjadikan bangsa yang utuh kepribadiannya, tidak terbelah menjadi peribadi yang berilmu umum saja atau yang berilmu agama saja.

[13] Andian Husaini, *10 Kuliah Amaga Islam Panduan Menjadi Cendekiawan Mulia dan Bahagia* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), 227

[14] Muhammad Najib Azca, Hairus Salim, Moh Zaki Arobbi, Budi Asyhari, dan Ali Usman, *Dua Menyemai Damai:Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Perdamaian dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, 2019), 184.

[15] http://m.muhammadiyah.or.id/en/content-8-det-amal-usaha.html diakses pada 06 januari 2020.

Menjadi kenyataan yang sampai sekarang masih dirasakan efeknya, adalah sekolah-sekolah yang bersifat netral kepada agama, akhirnya tidak sedikit para siswa yang memiliki keahlian dalam bidang umum dan tidak memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama. dengan kenyataan ini banyak orang yang mudah goyah dan gonjang ganjing dalam menghadapi problem kehidupan.

Karena tidak mungkin menghapus sama sekali sistem sekolah umum dan sistem pesantren maka ditempuhlah usaha perpaduan antara keduanya, yaitu dengan:

a. mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan kedalamnya ilmu-ilmu agama.
b. mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberikan pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu umum.
c. Mendirikan perguruan tinggi/ universitas dengan memasukkan pula di dalamnya ruh pergerakan Al-Islam dan Muhammadiyah pada jurusan non- Agama.

dengan usaha perpaduan berikut diharapkan tidak adalagi perbedaan mana ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya adalah perintah dan dalam naungan agama.[16]

Dalam aksi kemanusiaan kiprah NU dan Muhammadiyah sangat panjang dan besar sekali, seperti aksi kemanusiaan LPBNI NU untuk Rohingya di Aceh pada 26 Juni 2015. Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU), melakukan akse kemanusiaan di kamp Rohingya di Aceh dan rencananya akan dilakukan selama sepekan. LPBINU menggandeng *Islamic Help*, LSM internasional asal Inggris yang pernah melaksanakan aksi kemanusiaan bersama NU dalam Tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta. Serta melibatkan PWNU Aceh, PCNU Kota Langsa dan *dayah* (pesantren) di kota Langsa.

Menurut ketua LPBINU Avianto Muhtadi menuturkan bahwa kondisi pengungsian hingga kini sangat terjamin. Hal yang demikian berkat masyarakat Aceh yang sangat membantu secara ikhlas, melalui

[16] Milana Abdillah Subarkah, Muhammadiyah Amal Usaha Di Bidang Pendidikan (*Jurnal Rausyan Fikr,* Vol. 13, No. 2, 2017), 20.

surat elektronik. Setelah dilakukan observasi dan interaksi dengan pengungsi dan panitia, ia memberikan penilaian bahwa bantuan yang dibawa oleh LSM, ormas, partai, seharusnya dijadikan 1 koordinasi agar tidak berdampak kepada benturan kepentingan ideologi dan pencitraan. Ia juga menambahkan akan ada bantuan asing baik langsung dibawa oleh LSM maupun ormas Nasional yang perlu didampingi agar jelas akuntabilitas dan transparasinya.[17]

Selain aksi untuk Rohingya NU juga melakukan Musyawarah Nasional Tokoh Antaragama untuk membangun budaya damai. Munas ini dihadiri oleh 250 tokoh agama di seluruh Indonesia, dengan perwakilan 6 majelis keagamaan serta utusan peninjau penghayatan kepercayaan, salah satu pembicara pada acara ini adalah Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBINU) M Ali Yusuf, yang berbicara tentang sinergisitas lintas Agama dalam aksi kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut Ali menyampaikan keterlibatan kiprah NU dalam aksi kemanusiaan, melalui program bersama NU peduli, yang juga menjadi anggota *Indonesia Humanitarian Alliance* (IHA), dan *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI).

Dia menceritakan bahwa NU peduli selalu bermitra dan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Institusi keagamaan, *Non-Goverment Organization* (NGO), dan *International Non Goverment Organization* NU juga turut melakukan aksi kemanusiaaan di NTB, Sulteng, Lampung Selatan, Banten, dan Sulawesi Utara. Kemudian NU juga aktif turut memberikan bantuan kemanusiaan internasional di Banglades, dan Myanmar. Melalui *Indonesian Humanitarian Alliance* (IHA), kata Ali di Hotel Shangri-LA, Jakarta.[18]

Musayawarah nasional antartokoh agama yang dilakukan NU, merupakan bentuk resolusi atas berbagai konflik agama yang mengatas namakan agama yang dalam sejarah umat manusia masih berlangsung hingga kini, unsur-unsur teologis dan nonteologis dalam hal tertentu

---

[17] https://www.nu.or.id/post/read/06419/aksi-kemanusiaan-lpbi-nu-untuk-rohingya-di-aceh diakses pada 07 Januari 2020.

[18] https://www.nu.or.id/post/read/111032/ketua-lpbnu-paparkan-kiprah-nu-dalam-aksi-kemanusiaan-di-munas-tokoh-antaragama diakses pada 07 Januari 2020.

memberikan andil terhadap situasi *chaos* pada masyarakat beragama. Konflik kepentingan baik yang bersifat politik, ekonomi, kultural, dan sebagainya masih memberikan warna kehidupan dalam masyarakat dibanyak tempat di dunia, termasuk di Indonesia sendiri sebenarnya yang dikenal karena memiliki banyak suku, budaya, dan agama.

Semakin suatu agama bergerak menuju perencanaan dan rekayasa politik, semakin agama itu kurang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Penekanan politis terlihat dalam keputusan-keputusan, dan perspektif-perspektif teologis. Katakanlah polemik dan apogetik yang pertama mengarah kepada ketegangan politik yang terakhir mengarah kepada menjaga ketegangan itu dalam batas-batas yang dapat dicocokkan.[19] Pada akhir-akhir ini saat hujan dan banjir melanda Jabodetabek, NU melaksanakan solidaritas peduli banjir lewat NU Care-LAZISNU hujan mengguyur wilayah Jabodetabek sejak selasa 31 Desember 2019 hingga rabu 1 Januari 2020 telah merendam wilayah itu dan mengharuskan warga yang terdampak untuk mengungsi.

Tim NU peduli melakukan efakuasi bagi warga yang terdampak bencana tersebut, dilansir dalam BBC, pada hari kamis 02 Januari bahwa banjir yang melanda Jakarta menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan lebih dari 31.000 orang mengungsi. Tidak hanya itu, BMKG juga memperkirakan bahwa puncak hujan baru akan terjadi dipertengahan Januari hingga Maret yang artinya bahwa intensitas hujan yang sekarang bukanlah yang tertinggi. Mobil dapur halal NU berjalan seiring evakuasi yang terus dilakukan pula oleh NU, tidak hanya itu NU juga memberikan bantuan seperti pemenuhan bantuan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang dapur, kemudian NU juga mendirikan dapur umum, dan mendirikan pos pengungsi, berikut ini adalah daftar Posko NU peduli;

1. PWNU DKI Jakarta, jalan utan kayu No. Mataraman Jakarta Timur.
2. Jalan Slamet Riyadi No, 4, RT. 008/004 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Mataraman Jakarta Timur.

---

[19] Muhammad Ali, *Teologi Pluralis, Multikulturalis Menghargai Kemajemukan, menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Kompas, 2003), 188.

3. Jalan Swadaya IV, Kp Pulo Jahe, RT 004/RW 10 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
4. Jalan Komodor Halim RT 005/07 No. 28 Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
5. Jalan Permata 2 Kampung Melayu, Jakarta Timur.
6. Jalan Gardu RT07/02 Kantor LMK (Eks kantor Kelurahan Balekambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur).
7. Masjid Al Muwanah, Jalan Dharmawanita V RT 06/01 Rawabuana Cengkareng Jakarta Barat.
8. Pesing Poglar, Jalan Daat Mogot Jakarta Barat.
9. Kantor PCNU Jakarta Utara, Jalan komplek UKA Kramat Jaya Jakarta Utara.
10. Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Gg buaya RW 07 karet Tengsin Jakarta Pusat.[20]

NU juga memiliki lembaga NU Care-LAZISNU, NU Care-LAZISNU adalan *rebranding* dan pintu masuk agar masyarakat mengenal LAZISNU. NU Care LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyaraka, sebagaimana diamanatkan dalam Muktamar Solo 2005, Nu Care-LAZISNU secara formal dikukuhkan dalam SK MENAG No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak, sedekah kepada masyarakat secara luas. Sebagai nirlaba milik PBNU, NU Care-LAZISNU bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF). Itulah sebabnya, NU kemudian aktif melakukan kerja-kerja sosial yang peduli kepada korban musibah alam, tragedi kemanusiaan, baik dalam negeri seperti banjir dan gempa bumi, maupun luar negeri seperti pada kasus korban muslim Rohingya. Sampai saat ini, NU Care-LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS (Zakar, Infak, dan Sedekah) di 12 negara seperti Taiwan, Hongkong, Belanda, Korsel, Jepang, Belgia, Malaysia, Australia, Jerman, Turki, dan lain-lain, 34 provinsi, 376 kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai lembaga filantropi NU

[20] https://nucare.id//project/nu-peduli-banjir diakses pada 08 Januari 2020.

Care terus berupaya meningkatkan kepercayaan dari para donatur, salah satunya dengan melakukan transparansi keuangan, semua arus keuangan, pencatatan dan penyaluran dana yang ada dapat dilihat secara *real time* melalui sistem IT.

Kepengurusan LAZISNU sendiri bersifat struktur, dari pusat sampai daerah (PWNU hingga ranting). Namun hubungan LAZISNU dari pusat ke daerah bersifat otonom dan koordinatif bukan instruktif. "bentuk koordinatif itu berupa pelaporan, misalnya di Lombok ada LAZISNU Lombok, maka untuk ranting yang di bawahnya jika ingin melakukan donasi atau semacamnya hanya melakukan pelaporan dengan PWNU LAZISNU Lombok," kata Abdul Rauf sekertaris LAZISNU Pusat. NU Care LAZISNU memiliki fokus pada beberapa pilar program. *Pertama,* di bidang pendidikan yang berkomitmen menangani sekolah layak huni, siswa berprestasi, dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mendidik serta mempunyai jiwa kepemimpinan sosial. *Kedua,* di bidang kesehatan melalui Layanan Kesehatan Gratis (LKG), yakni program bantuan meningkatkan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional NU Care LAZISNU di Indonesia dan di luar negeri, *Ketiga,* di bidang pengembangan ekonomi melalui program ekonomi mandiri NU Care (EMN), yakni dengan memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan pemberian modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro.[21] Aktivitas kemanusiaan atau filantropi[22] yang lainnya adalah pengumpulan dana secara sukarela oleh warga nahdliyin secara nasional yang dikenal dengan sebutan "Koin NU", Koin NU berjalan secara alamiah sebagai kegiatan filantropi warga. Meski tergolong sedikit, dari jumlah nominal rupiah perkepala keluarga hanya

[21] Muhammad Najib Azca, Hairus Salim, Moh Zaki Arobbi, Budi Asyhari, dan Ali Usman, *Dua Menyemai Damai:Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Perdamaian dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, 2019), 176.

[22] Filantropi adalah semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat, baik berupa benda atau layanan yang digunakan untuk kepentingan umum. Filantropi memiliki cakupan makna yang luas dari amal (*charity*). Dalam Islam filantropi dapat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Rp 100-500/ hari dikalikan jumlah warga nahdliyin pada daerah tertentu, namun dana yang terkumpul perbulan berjumlah fantastis. Sejarah gerakan Koin NU dipelopori oleh Kyai Ma'ruf Islamuddin sebagai mustasyar MWCNU Karangmalang Sragen, Jawa Tengah saat memberikan arahan dan pengajian semangat berinfak kepada warga diranting-ranting NU Kecamatan Karangmalang, Sragen. Dari ajakan ini, pada tahap pertama berhasil dikumpulkan infak sebesar Rp 7.000.000 dari 600 kotak berlanjut Rp 20.000.000 dari 1000 kotak pada tahap kedua permintaan kotak bertambah lagi dan mencapai perolehan Rp 30.000.000. tahapan-tahapan yang dimaksud adalah pengumpulan rutin tiap *selapanan* 35 hari. Pengumpulan dilakukan di beberapa ranting di saat Kyai Ma'ruf mengisi pengajian.

Gerakan ini lambat laun membuahkan hasil yang tidak bisa dianggap remeh. Secara resmi apa ang diinisiasikan oleh Kyai Ma'ruf dinamakan "Gerakan Koin NU Menuju Nusantara Mandiri" yang diluncurkan ketua umum PBNU Kyai Said Aqil Siroj pada 14 April 2017. Pada awal, gerakan tersebut berhasil mengumpulkan 2 milyar rupiah. Saat ini rata-rata per 35 hari terkumpul Rp 300.000.000 - 400.000.000 di tingkat kabupaten Sragen sedangkan pengumpulan Koin NU tahun 2017 sudah mencapai 5,8 milyar rupiah.[23]

Gerakan Koin Nu juga dapat digunakan sebagai pembiayan kegiatan keagamaan seperti pengajian, penguatan akidah aswaja dalam pertemuan rutin tingkat ranting MWC maupun PCNU, sosialisasi gerakan Koin NU baik berupa kotak infak, biaya *launching* Gerakan Koin NU dan sosialisasi di acara-acara NU yang lain, karitas yang lain berupa pemberian sembako santunan kepada guru TPA dan marbot masjid dan musholah yang diberikan secara berkala setiap bulan serta dengan memberikan tunjangan di bulan Ramadhan disamping buka bersama yang diberikan baik berupa uang atau bahan pangan. Hasil Koin ini juga dapat digunakan untuk merenovasi masjid, Ponpes, beasiswa pada siswa-siswi yang berada di bawah naungan pendidikan LP Ma'arif NU.

Filantropi berbasis karitas dapat diibaratakan dengan memberi ikan pada orang miskin dan lapar. Sehingga kita harus terus

[23] Ibid., 178.

memberikan ikan setiap kali mereka merasa lapar, terus berulang. Hal yang demikian tentu saja tidak akan mengatasi akar masalah yang ada, yaitu kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.[24]

Secara normatif, filantropi Islam sudah terumuskan dalam pelbagai sumber keislaman, terutama dalam Al-Qur'an dan hadis. Setidaknya terdapat dua tipe bentuk kedermawanan yang berkembang dalam Islam, yaitu kedermawanan yang bersifat wajib bagi setiap individu muslim dalam bentuk pembayaran zakat; dan kedermawanan yang besifat *tidak wajib,* akan tetapi dalam hal yang demikian setiap muslim dianjurkan untuk menunaikannya, seperti melaksanakan infak, sedekah dan wakaf. Sebagaimana yang sudah penulis gambarkan bentuk filantropi NU, dalam poin ini penulis akan menjelaskan bentuk filantropi Muhammadiyah. Dengan dukungan sekitar lebih dari 30 juta warga, sebuah angka yang sering digunakan oleh para peneliti untuk menyebut anggota dan simpatisannya, persyarikatan Muhammadiyah memang patut diperhitungkan sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Apalagi organisasi ini bukan hanya dikenal gagasannya sebagai organisasi pembaharuan, melainkan juga aktivitas sosialnya. Hampir seluruh kebijakan dirumuskan melalui mekanisme keorganisasian yang baku dalam forum-forum permusyawaratan yang dihadiri oleh pimpinan Muhammadiyah mulai dari tingkat pusat hingga ranting. Untuk merealisasikan agenda kerjanya.

Hampir semua lembaga sosial dan aset yang ada dalam atau diasosiasikan dengan Muhammadiyah, termasuk sekolah, adalah milik organisasi, bukan individu-individu tertentu. Dalam hal ini, Muhammadiyah berbeda dengan NU dengan pesantren-pesantren yang didirikan para kyai. Setelah krisis moneter di Indonesia pada akhir tahun 90-an Muhammadiyah menyadari pentingnya memiliki sebuah lembaga zakat profesional, Persyarikatan Muhammadiyah

[24] Nur Kasanah, Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian nahdliyin (Studi Tentang Gerakan Koin NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen) (Ponorogo: *Tesis Program Studi Ekonomi Syari'ah,* IAIN Ponorogo, 2019), 119.

kemudian mendirikan sebuah lembaga amil zakat independen, bernama Lazismu pada 14 Juli 2002 dan secara resmi pada 16 September 2002. Sejak 21 November 2002, pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama mengukuhkan Lazismu sebagai salah satu amil zakat nasional. Lazismu tampil dihadapan publik sebagai sebuah lembaga modern yang mempromosikan berbagai prinsip seperti kepercayaan, profesionalisme, dan transparansi. Sampai semester awal 2007 Lazismu mampu mengumpulkan dana masyarakat sebesar 14,3 Milyar dan menyediakan beasiswa untuk 2.478 siswa SMA yang berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu, mensubsidi biaya pendidikan 364 siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan memberikan tambahan penghasilan bagi 2.640 guru SD honorer bergaji rendah, dan membuat kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui dana bergulir bagi 14.939 keluarga miskin, dan mendukung gerakan dakwah dai-dai di daerah terpencil.

Indonesia Zakat and Development Report 2009 yang dikeluarkan oleh CID (*Circle of Information and Bisnis Syari'ah*) UI menyebutkan bahwa pada tahun 2005 Lazismu temasuk salah satu dari 10 lembaga amil besar di Indonesia. Dibandingkan dengan 3 lembaga zakat besar Indonesia seperti Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompet Dhuafa Republika (DD), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang telah beroperasi sejak tahun sejak tahun 1990-an, tingkat keberhasilan Muhammadiyah dalam mengelola dana umat, seperti yang direpresentasikan oleh Lazismu, memang jauh dari angka yang diperoleh 3 lembaga di atas.

Selain Lazismu Muhammadiyah juga memiliki sumber dana yang masing-masing untuk menolong umat, seperti halnya PKU juga memiliki amil zakat yang bersumber dari para dokter, karyawan maupun pengunjung rumah sakit. Sedangkan diperguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang lain yang setingkat biasanya terdapat lembaga serupa badan pengelola infaq (BPI) yang dananya berasal dari mahasiswa.

Muhammadiyah juga memberikan pelayanan kepada kaum pinggiran kota, bayi terlantar, yatim piatu, perempuan dan lansia. Dengan menggunakan panti asuhan, pendirian panti asuhan anak

adalah satu di antara pendekatan yang kerap digunakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam mengurangi resiko kerentanan sosial di kalangan anak-anak dan keluarga miskin. Bila menengok kepada sejarah, panti asuhan adalah salah satu lembaga sosial adalah salah satu lembaga sosial yang cukup awal didirikan oleh komunitas keagamaan yang masih bertahan hingga kini. Dengan mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat, panti asuhan anak tersebar di pelbagai pelosok. Muhammadiyah menjadikan pendekatan pelayanan sebagai pendekatan yang masih mendominasi dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Dengan cangkupan yang luas, yaitu anak-anak panti, pengasuh, relawan, dan donator.

Muhammadiyah juga bersentuhan dengan isu-isu gender, perempuan, dan lansia. Dengan membangun jaringan yang bersinergi antara panti asuhan anak dan gerakan orang tua asuh secara umum dalam Muhammadiyah serta bagaimana pula bayi terlantar menjadi daya tarik tersendiri untuk melakukan mobilisasi dana.[25] Di balik usaha-usaha besar kemanusiaan yang telah dilakukan Muhammadiyah, tentu memiliki kekuatan. Sebagai organisasi yang telah berusia lebih dari satu abad Muhammadiyah, kekuatan Muhammadiyah terletak pada; 1. Fondasi Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang disertai pengembangan ijtihad, hal ini menunjukkan keseriusan Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam, sekaligus memperoleh kepercayaan luas dari umat Islam yang luas khususnya dari umat Islam Indonesia, dan masyarakat dunia pada umumnya; 2. Reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan Nasional modern yang besar telah tersebar dan terkenal luas baik dalam skala nasional dan inernasional, sehingga berdampak bagi kemudahan dan dukungan yang diperoleh Muhammadiyah dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam skala nasional dan internasional; 3. Jaringan organisasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air dan beberapa negara ASEAN maupun di sejumlah negara lain yang membuat Muhammadiyah lebih mudah memberikan kekuatan kelembagaan dalam mengembangkan aktivitas

---

[25] Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 169.

di tingkat akar rumput yang membutuhkan koordinasi berjenjang, serta melibatkan partisipasi masyarakat luas di berbagai daerah; 4. Perkembangan amal usaha yang besar secara kuantitas juga menjadi aset sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur yang sangat penting bagi persyarikatan Muhammadiyah selain dalam mempertahankan diri dari berbagai krisis, sekaligus berkiprah luas dalam memajukan kehidupan bangsa dan umat manusia; 5. Muhammadiyah sebagai kekuatan organisasi sosial keagamaan atau organisasi kemasyarakatan yang telah berkiprah lama dan luas di Indonesia sejak pra hingga setelah kemerdekaan, telah menjadikan gerakan Islam ini memiliki modal sosial dan modal moral seingga menjadi kekuatan politik kebangsaan yang diperhitungkan di negeri ini.[26] Muhammadiyah juga memberikan layanan kepuasan pasien, dan membantu pasien yang tidak mampu. Sikap ini sejalan dengan pendapat Dokter Soetomo, pada saat peresmian Rumah Sakit Muhammadiyah di Surabaya (yang merupakan rumah sakit Muhammadiyah ke dua di Indonesia, yang pertama didirikan di DIY pada tahun 1923), mengatakan bahwa besok pagi akan kita buka poliklinik (rumah sakit) ini, siapa juga boleh datang kemari, dan akan di tolong dengan Cuma-Cuma asal dia miskin. Menurut Syafi'i Ma'arif ada dua prinsip yang harus di pegang dalam kita membenahi masyarakat atau organisasi, dua prinsip itu adalah; *ta'awun* (saling membantu seperti yang tersurat dalam surat Al Maidah ayat 2 dalam al Qur'an dan *tawashi* (saling memperingatkan/ menasehati).

Memelihara dan menguatkan iman pasien adalah selaras dengan konsep *tawashi* (saling mengajak dalam kebaikan dan menjauhkan dari keburukan). Ketika pasien dalam kondisi sakit dan harus dirawat di rumah sakit maka sebenarnya ia sedang berada dalam kesusahan dan ujian. Maka saat itulah diperlukan tampilnya seseorang yang menguatkan iman. Konsep *tawashi* inilah yang membuat Muhammadiyah menjadi independen, sebab amalan dan aktivitasnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak

[26] Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 6.

terikat dengan lembaga termasuk pemerintah.[27] PKO sebagai produk institusionalisasi pelayanan sosial Muhammadiyah *Hoofdbestuur* Muhammadiyah memiliki bagian PKO yang diresmikan dalam rapat anggota istimewa Muhammadiyah pada 18 Juni 1920. KH Ahmad Dahlan mempercayakan PKO dipimpin oleh Soedjak.[28]

PKO juga banyak melaksanakan aksi kemanusiaan, seperti saat Aceh mengalami Tsunami tahun 2004, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, disusul dengan gempa bumi dan tsunami di Jawa Barat tahun 2007, gempa di Sumatera Barat 2009, yang memakan ribuan korban manusia. Ketika merespon bencana alan seperti tsunami dan gempa besar yang melanda di Aceh, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Padang Muhammadiyah bersama organisasi kemanusiaan yang lain ikut menjalankan misi kemanusiaan dengan menerjunkan beberapa tim khusus yang dibentuk untuk menangani korban bencana. Pada tahun 2006, sebuah proyek kemanusiaan dirancang oleh beberapa aktivis Muhammadiyah dari berbagai ortom dengan label *the PKO (People Kampung Organized),* namun misi yang diemban tetap dengan spirit PKO zaman dulu yaitu dianggap darurat, bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan.[29]

C. Menjaga Keutuhan Bangsa

Pandangan umum yang selama ini menyatakan "cinta tanah air dan bangsa adalah bagian dari iman" (*hub al-Wathan minal iman*). Bahkan ada yang menyebut ungkapan ini berasal dari perkataan atau hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai panutan tradisi NU, para Walisongo di masa lain justru banyak mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai bangsa dan tanah air kita seperti ini.

Gagasan tentang "sebangsa", "menjadi sebangsa", dan "hidup bersama dalam suatu kebangsaan", adalah ungkapan-ungkapan

---

[27] Anna Marina, Meningkatkan Kinerja Berbasis Nilai-nilai Ekonomi Pada Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan (*Jurnal Salam Studi Masyarakat Islam,* Vol. 15, No. 2, 2012), 176.

[28] Ghifari Yuristiadhi, Aktivisme *Hoofdbestuur* Muhammadiyah Baguan PKO di Yogyakarta Sebagai Representasi Gerakan Pelayanan Sosial Masyarakat Sipil (1920-1931), (*Jurnal Afkaruna,* Vol. 11, No. 2, 2015), 199.

[29] Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 229.

kebersamaan, solidaritas, kemandirian, dan kesatuan sebagaimana terbentuk tentang imajinasi Nusantara. Sejumlah sejarawan sudah menunjukkan Nusantara sebagai wilayah yang strategis sejak ratusan tahun lalu. Bahwa bangsa ini telah mampu mengatur hidupnya secara mandiri dan memiliki peradaban yang besar bahkan hamparan politik bangsa ini dibangun mereka sendiri.

Selanjutnya pada Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin, ada keputusan yang unik kemudian pada dekade-dekade berikutnya mendasari pandangan dan sikap kebangsaan NU. Terhdap pertanyaan tentang status tanah Hindia Belanda, yang sedang diperintah oleh penguasa non-muslim Belanda, haruskah ia dipertahankan dan dibela dari serangan luar? Jawaban yang dikemukakan adalah bahwa hal yang demikian wajib dalam hukum agama dan fiqih. Jawaban itu diperoleh dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Syekh al-Hadrami. Alasan yang ada di dalamnya sebagai berikut. Negara ini pernah mengenal yang namanya kerajaan-kerajaan Islam, penduduknya sebagian masih menganut dan melaksanakan ajaran Islam, dalam Islam sendiri tidak dalam keadaan diganggu atau diusik.

Sebagaimana NU pula, dengan Abdurrahman Wahid sebagai motor penggeraknya, yang melindungi kelompok aktivis pro demokrasi yang ditekan Orde Baru. Dan era reformasi ini, NU dan PKB-nya tampil membela kehadiran Darul Arqam, Komunitas Syi'ah dan Ahmadiyah Indonesia dan menjadi pelindung kekuatan pembendung terhadap sektarian dan fundamental agama yang membenarkan aksi sekian terorisme di tanah air ini. Pembelaan ini bukanlah tanpa sebab bahwa dalam kitab *I'anah ath-Thalibin* dijelaskan bahwa melindungi khormatan orang-orang yang perlu dibela , baik muslim maupun non-muslim.[30]

Selain itu NU juga memberikan pembekalan kepada kader mereka dengan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, seperti halnya dalam pendidikan kader Pemimpin Nahdlatul Ulama (PKPNU) angkatan ke 4 di Malang Jawa Timur. PKPNU kali ini sudah sampai pada pertemuan yang ke 16-nya, dari program kuliah 3

[30] Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), 388.

bulan yang direncanakan. Tema materi kuliah yang akan disampaikan adalah "Membangun Wawasan Politik Kebangsaan". Materi kali ini disampaikan oleh Fatchullah anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PKB, kuliah kali ini memaparkan tentang realita politik Indonesia saat ini dalam skala nasional. Selain itu juga menjelaskan profil partai-partai berpengaruh yang ada di Indonesia dan ideologi yang dimiliki mereka.

Fatchullah juga menekankan akan pentingnya pendidikan dan sekolah politik bagi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kalangan yang memperjuangkan kepentingan sesaat. Selain itu dia juga menitik beratkan akan wawasan kebangsaan yang kokoh, memperjuangkan NKRI yang juga didirikan oleh alim ulama NU. Hal ini dilakukan sebab semakin melemahnya kesadaran warga Indonesia akan wawasan kebangsaannya sendiri, sehingga tidak sadar mereka terbawa kepada perpecahan.[31]

NU dan Muhammadiyah juga turut melakukan aksi deradikalisasi, yang sudah penulis singgung dalam bab 2, NU dan Muhammadiyah juga sepakat menolak paham khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir sebab paham ini bisa mengancam NKRI. Selain itu HT juga memiliki pandangan bahwa Pancasila adalah ideologi kufur. Hal ini digambarkan oleh selebaran HT yang menyatakan bahwa Pancasila tidak sesuai dengan Islam. sebab Pancasila mengakomodir pluralisme agama hal ini ada dalam sila Persatuan Indonesia yang menjaga dan menghormati kemajemukan agama yang bertentangan dengan prinsip HT yang menekankan kebenaran tunggal atas Islam.[32]

Muhammadiyah juga melaksanakan pendidikan berbasis Pancasila melalui lembaga sekolah-sekolahnya, dan memberikan kesadaran bahwa Pancasila sudah *final* sebagai ideologi Indonesia. Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari NKRI yang menjadi pilihan cerdas pendiri bangsa. Pancasila memang bukan menegaskan kembali sebagai negara agama dan juga bukan

---

[31] https://www.nu.or.id/post/read/44005/kader-nu-dibekali-pendidikan-politik-dan-wawasan-kebangsaan diakses pada 10 Januari 2020.

[32] Syaiful Arif, Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila (*Jurnal Keamanan Nasional,* Vol. 11, No. 1, 2016), 22.

menegaskan kembali menjadi negara liberal, akan tetapi pancasila dapat dimaknai sebagai ideologi yang memberikan tempat agama untuk menjadi pedoman bagi kehidupan bernegara. Yang menjadikan relasi yang mutualisme.[33]

Kesimpulan

NU dan Muhammadiyah sudah ada sebelum Indonesia merdeka, 2 organisasi ini banyak berkorban pra dan pasca kemerdekaan Indonesia, dari banyak aspek, seperti; pendidikan, sosial, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dan masih banyak lagi. NU dan Muhammadiyah setia memberla NKRI, memberikan wawasan keagamaan, dan wawasan kebangsaan. NU dan Muhammadiyah juga menolak gagasan khilafah serta menyatakan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila sudah *final* dan tidak dapat diganggu gugat. Walaupun Pancasila tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara Islam atau negara sosialis akan tetapi dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Sebab dalam sila-sila Pancasila banyak cerminan dari nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam sendiri, seperti kewajiban beragama, memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Persatuan sebagai sebuah bangsa yang besar, kebijaksanaan dalam memimpin, dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang kelas sosial, agama, suku, ras, dan usia.

Sila-sila Pancasila itu adalah; Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis rasa hal yang demikian merupakan pilihan yang bijak oleh pendiri bangsa sebab bangsa ini merupakan bangsa yang multi dalam banyak aspek, seperti; bahasa, ras, suku, dan agama.

---

[33] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 175.

BAB 10

ISLAM MEMANDANG ETIKA SOSIAL

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern memberikan perubahan kebutuhan dan keinginan dalam mewujudkan harapan, meskipun demikian harapan itu belum mampu memuaskan diberbagai aspek.[1] Oleh sebab itu harus didasarkan akan etika yang baik bagaimana sebagai seorang manusia yang beragama memberikan refleksi yang nyata sehingga dapat diarahkan kepada yang baik. Bahkan Islam juga tidak memberikan paksaan untuk memeluknya Islam merupakan agama yang halus bukan ditegakkan dengan kekerasan, hal itu juga sudah termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 256:, "*Tidak ada paksaan dalam beragama*" agama yang dimaksud di ayat ini adalah Islam.

Selain al-Baqarah ayat 256, Allah SWT kembali menegaskan dalam Q.S Yunus ayat 99: "*Seandainya Tuhan mu ingin, pastilah beriman orang yang ada di bumi seluruhnya, apakah kau akan memaksa manusia hingga mereka beriman?*" secara tegas ayat ini menyapaikan bahwa Allah SWT dapat saja menjadikan manusia satu bumi ini beriman, akan tetapi Allah SWT tidak ingin. Sebab kalaupun manusia semuanya beriman mereka juga akan tetap berkelahi sebab mereka memiliki perbedaan pendapat. Bahkan Allah membebaskan

[1] Imam Mawardi, Transinternalisasi Budaya Pendidikan Islam: Membangun Nilai Etika Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat (*Jurnal Hunafa: Studi Islamika,* Vol. 8, No. 1, 2011), 28.

mereka memilih apakah mereka mau iman atau kufur sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. al kahfi ayat 29.[2]

Islam juga memberikan berbagai pelajaran seperti mencintai orang tua, guru, teman dan sahabat. Allah SWT akan memberikan kebahagiaan bila kita memberikan penghormatan kepada kedua orang tua kita baik saat hidup ataupun sudah meninggal kelak sebab ridha kita tergantung pada orang tua, Islam sudah mengajarkan hal yang demikian sejak awal adanya agama ini. Selain itu Islam juga memberikan balasan kepada kita sebab mencintai teman dan sahabat dengan catatan semua itu didasarkan cinta kepada Allah SWT balasannya ialah kalian akan duduk di atas kursi-kursi surga dalam kondisi saling berhadap-hadapan yang di sebut '*ala sururin mutaqabilin* dan mengingat berbagai kenangan dan peristiwa saat masih di dunia.[3]

A. Makna Etika Sosial

Sebenarnya apabila ditinjau kembali tentu kita akan mendapat gambaran yang luas mengenai makna etika sosial ini. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis akan mengulas bagaimana makna etika sosial, dan politik. Etika selalu menjadi sesuatu yang relevan sepanjang masa, sebab kehidupan manusia terus menerus ditandai oleh pertarungan (konflik) antara kekuatan baik, dan kekuatan jahat yang tak pernah henti. Etika mendasarkan pada rasio untuk menentukan kualitas moral kebajikan maka disebut juga sistem filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkenaan dengan tanggungjawab dan kewajibannya atau untuk menggunakan retorika postmodernisme (fungsional) karena persaingan dalam permainan kelompok kuasa, kelompok ekonomi, atau budaya tertentu yang selalu berhasrat merebut supremasi untuk menjadi yang paling dominan.[4]

---

[2] Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad* (Jakarta: Kencana, 2016), 107.

[3] Said Nursi, *Tuntunan Generasi Muda* (Banten, Risalah Nur Press, 2018), 189.

[4] Runi Hariantati, Etika Politik Dalam Demokrasi (*Jurnal Demokrasi,* Vol. 2, No. 1, 2003), 59.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang memiliki sifat individual, oleh sebab itu kehidupan sosial merupakan keharusan dalam kehidupan manusia. Menurut sosiolog, inti sosial kehidupan ialah interaksi sosial, atau apa yang disebut dengan proses sosial. tanpa proses sosial tidak mungkin ada kehidupan sosial suatu kehidupan sosial berlangsung sebab manusia menyadari bahwa kehidupan akan berkualitas jika terjadi hubungan antara dirinya dengan dengan orang lain.

Kehidupan sosial yang berintikan interaksi sosial diharapkan selalu dalam keadaan yang stabil, akan tetapi dengan hadirnya kepentingan dari berbagai individu dan suatu kelompok tidak selamanya bahkan sering berbeda, maka yang terjadi dalam kehidupan sosial bukan *stabilitas* tetapi justru *instabilitas*, salah satu faktor yang memunculkan *instabilitas* sosial ialah terciptanya stratifikasi sosial di tengah masyarakat. Tak jarang ditemui ada klaster-klaster dalam pelayanan dan perlakuan sosial yang berbeda antara si kaya dan si miskin. Akan tetapi disisi yang lain dengan adanya stratifikasi masyarakat semakin sadar dan bahu membahu meringankan beban sesama.[5]

Dari aspek yang lain masyarakat Indonesia sejatinya memiliki corak yang beragam. Tumbuh kembangnya tidak hanya dibesarkan oleh dimensi teologis, melainkan juga konstruksi sosial yang mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir masyarakat berbagai latar belakang yang melingkupi kehidupannya, turut serta dalam memberikan jaringan pengetahuan sebagai manifestasi ajaran yang paling dipercayai. Tidak aneh, apabila anatara satu orang dengan orang yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain serta menggambarkan perbedaan tata laksana keagamaan yang diekspresikan.[6]

Pemaknaan etika sosial itu sendiri nampak disaat satu individu atau kelompok melakukan interaksi sosial sebagaimana yang telah sedikit penulis uraikan di atas. Secara langsung interaksi sosial

---

[5] Nurul Fuadi, Konsep Etika Sosial Dalam Al-Qur'an (Yogyakarta: *Disertasi UIN Sunan Kalijaga Ilmu Agama Islam*, 2009), 1.

[6] Fathorrahman Ghufron, *Ekspresi Keberagaman di Era Milenium Kemanusiaan, Keragaman, dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 19.

merupakan syarat utama terjadinya hubungan-hubungan sosial, bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial menciptakan dinamika-dinamika yang menyangkut hubungan antara orang dengan orang kelompok dengan orang dan kelompok dengan kelompok. Berlangsungnya suatu proses interaksis sosial didasarkan pada pelbagai faktor, seperti; imitasi, indetifikasi, sugesti, dan simpati. Salah satu segi positif dengan adanya imitasi ialah dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya imitasi juga memberikan hal yang negatif misalnya percontohan tindakan-tindakan yang menyimpang.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya kemudian diterima oleh pihak lain. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi, yang menghambat daya berpikir yang rasional. Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak yang lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dari pada imitasi karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses ini dapat terbentuk baik secara sadar maupun tidak sadar.

Proses simpati sebenarnya merupakan proses seseorang merasa tertarik pada pihak yang lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang didorong oleh keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dan harus dihormati karena memiliki kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. Proses simpati dapat berkembang dalam suatu keadaan faktor saling mengerti terjamin.[7]

Etika Sosial itu sendiri dalam bidang sosial jika menemukan kesesuaian akan menjadikan proses-proses yang asosiatif pada

[7] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 55.

seseorang atau kelompok, akan tetapi sebaliknya bila tidak menemukan asosiatif akan menjadi disosiatif. Gambaran proses asosiatif banyak wujudnya seperti kerjasama (*Cooperation*), bentuk dan pola-pola kerjasama dapat dijumpai pada semua individu atau kelompok apabila mereka menemukan kesesuaian dan menjadikan etika sosial positif serta seimbang[8] (*equilibrium*) antara orang dengan orang, kelompok dengan orang atau sebaliknya.

Sedangkan dalam proses disosiatifnya sering di sebut sebagai proses *oppositional processes,* yang persis halnya dengan kerja sama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat baik individu maupun kemlompok , walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Contoh dari proses disosiatif ini seperti adanya konflik yang kompleks seperti persaingan baik dari sisi ekonomi, kebudayaan, kedudukan dan peran, serta persaingan ras sehingga muncul rasisme pada akhirnya.

Dengan adanya persaingan dan konflik yang berkepanjangan jelas hal ini juga akan mempengaruhi pola etika sosial yang terjadi seperti berubahnya kepribadian seseorang di mana lebih agresif dan emosional dalam menyikapi permasalahan yang ada di sekitarnya, menghambat kemajuan baik dari sisi sosial, agama, ekonomi, politik, kebudayaan, dan berbagai aspek-aspek kehidupan yang lain, melemahkan solidaritas kelompok sehingga seringkali menciptakan disharmonisasi, pertentangan, dan pertikaian. Serta menjadikan akan adanya serangan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang kuat menindas yang lemah dan seterusnya.[9] Perubahan disosiatif juga menjadikan rusaknya struktur yang ada dalam masyarakat yang bermuara pada kontravensi.[10]

---

[8] Makna keseimbangan disini merujuk kepada akomodasi. Menurut Gilin dan Gilin akomodasi digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama dengan pengertian adaptasi yang digunakan oleh ahli –ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya.

[9] Ibid., 81.

[10] Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi ini ditandai dengan adanya gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang atau kelompok sehingga memunculkan kebencian yang disembunyikan, keragu-raguan atas

Etika dalam ranah politik juga demikian, pada hakikatnya tidak lepas dengan masyarakat, sebab masyarakat merupakan makhluk individu sebagai mana yang sudah dijelaskan di atas mereka juga memiliki kepentingan bersama serta memiliki budaya. Etika yang baik dalam ranah politik ialah memberikan porsi yang sama dalam berdemokrasi, hal ini dilakukan untuk membuka kanal-kanal baru yang mendukung kelompok-kelompok untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam berpolitik.

Politik tidak boleh mematikan masa yang majemuk dan membenamkan diri mereka di dalam individualisme yang tidak koheren atau dalam eksklusivisme partai. Politik memberikan kesadaran suara hati akan kebutuhan negara sebagai kebutuhan bersama, yang dapat dianggap sebagai kehendak Tuhan yang tentu saja merupakan legitimasi fungsional yang menopang kekuasaan yang benar dan mengambil bagian dalam otoritas Tuhan sendiri. Maka dibutuhkan keutamaan sosial yang saling membuka diri untuk bersama mencari jalan terbaik demi menciptakan kesejahteraan bersama. Keutamaan itu akan memberikan ruang gerak kepada tanggung jawab sosial, setiap orang yang bertanggungjawab atas dinamika di dalam komunitas tempat ia hidup yang demikian merupakan bentuk etika sosial politik yang nampak.

Tujuan hadirnya etika politik ini ialah, untuk menciptakan kesejahteraan bersama (*common good*). Kesejahteraan bersama memiliki suatu keaslian yang muncul dari komunitas itu sendiri walaupun dibentuk dan dihidupkan dari kesejahteraan partikular namun dia tidak diidentikkan dengan kesejahteraan dari setiap peribadi, tidak juga dari kombinasi keinginan dari kesejahteraan individu, tetapi ia adalah suatu keseluruhan hidup dan dinamika yang terpancar dari koordinasi yang harmonis dari aktivitas dan fungsi sosial dari seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat itu.

Menurut etika, hubungan individu dan masyarakat ditemukan di berbagai elemen esensial dalam konsep kesejahteraan bersama

---

kepribadian, atau perasaan tersebut dapat pula berkembang terhadap kemungkinan, kegunaan, dan keharusan atau penilaian atas usul, buah pikir, kepercayaan, doktrin, atau rencana yang dikemukakan orang perorang atau kelompok manusia yang lain.

memasukkan sosialitas sebagai kondisi dan kekayaan yang dibawa setiap orang, sebagai kemampuan untuk keluar dari dirinya sendiri untuk bertemu dengan orang. Kesejahteraan bersama mengimplikasikan dan menuntut penghargaan akan martabat manusia karena mempromosikan penghidupan yang maksimal terhadap totalitas nilai-nilai manusiawi yang mengalir dari keberadaannya sebagai manusia. Totalitas ini tidak mereduksi diri hanya pada suatu kebersamaan keuntungan kekayaan tetapi mengimplikasikan suatu integrasi sosiologis dari nilai; suara hati, keutamaan politis, hukum dan kebebasan, kegiatan semua anggotanya, kekayaan spiritual, ketahanan moral, keadilan, heroisme di dalam kehidupan individual dan dalam hubungan semua anggota di dalam masyarakat itu. Negara diarahkan dan ditempatkan di bawah kesejahteraan bersama, dari prinsip ini seluruh inspirasi dan kegiatan hidupnya berlangsung.[11]

Setiap sistem politik mempunyai gambaran tersendiri mengenai manusia, sistem sosial, dan tujuan-tujuannya. Dalam masyarakat yang totaliter, negara dianggap sebagai nilai yang tertinggi dalam hierarki-hierarki sosial, sedangkan dalam masyarakat yang demokratis manusia adalah nilai yang tertinggi. Implikasi dari cita-cita yang menganggap manusia sebagai puncak nilai adalah adanya subordinasi negara kepada masyarakatnya. Negara adalah instrumen dari kepentingan-kepentingan masyarakat, oleh sebab itu bentuk negara, lembaga-lembaga, dan mekanismenya ditentukan oleh keputusan bersama rakyat. Dalam keputusan bersama masyarakat itulah seluruh sistem kenegaraan diatur, yang demikian merupakan alur etika berpolitik yang baik.

Akan tetapi perlu juga dipahami bahwa dalam sebuah sistem demokrasi, terdapat sebuah kekuatan sosial yang berkuasa menggunakan negara untuk kepentingan sendiri, sehingga berimbas pada hilangnya porsi kekuatan-kekuatan sosial lainnya dalam kehidupan bernegara dan kepentingan-kepentingan sosial ekonominya dilalaikan kekhawatiran yang demikian membuat Marx mengecam apa yang disebut demokrasi borjuis mapun proletar tetap juga sebuah antidemokrasi, dalam arti

[11] Mateus Mali, Revitalisasi Etika Sosial-Politik Dalam Hidup Berdemokrasi, (*Jurnal Orientasi Baru,* Vol. 20, No. 1, 2011), 49.

bahwa sebuah kekuatan sosial mendominasi negara. Oleh sebab itu demokrasi bukan hanya mekanisme politik, tetapi juga sebuah sistem yang di dalamnya terkandung nilai-nilai untuk menjadikan nuansa perpolitikan yang lebih sehat.[12]

Sebagai seorang intelektual yang bijak dan paham akan etika politik yang benar tentunya harus memiliki idealisme yang kuat agar tidak menjadi pengabdi kekuasaan. Sebab seorang intelektual merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan umum secara memadai sehingga mampu menangkap fenomena yang tengah berlangsung di masyarakat, bangsa dan memiliki komitmen untuk membela kepentingan bangsanya serta sanggup menanggung resiko dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian kaum intelektual memegang peran menentukan dalam setiap perubahan sosial bahkan revolusi, yang terjadi di negara mereka.

Kemampuan yang dimiliki oleh kaum intelektual yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lainnya adalah kemampuan untuk melahirkan ide atau gagasan segar yang memiliki tenaga pendorong perubahan sosial. Ada ungkapan asing yang mengatakan bahwa "*ideas are the moving forces of history*" (gagasan adalah tenaga penggerak dalam sejarah). Namun adakalanya gagasan yang dijual oleh seorang intelektual atau kelompok intelektual justru melahirkan tragedi sejarah.

Akibat rusaknya etika politik juga dapat menjadikan seorang intelektual bermental *inlander*, satu hal yang perlu dicatat dan diingat bahwa kebanyakan intelektual bermental *inlander* dapat dijumpai di negara yang berkembang. Akan tetapi janganlah kita menggeneralisasi bahwa semua negara berkembang demikian, satu hal yang perlu diketahui bahwa negara berkembang mudah dijadikan negara komprador, negara subordinat, atau negara yang menjadi obyek kepentingan kapitalisme internasional yang para pemimpinnya masih menderita penjajahan mental. Selama kolonialisasi mental itu tetap ada dan bercokol dibenak bangsa dan pemimpinnya, maka

[12] Kuntowijoyo, *Demokrasi & Budaya Birokrasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 72.

selama itu sulit diharapkan bangsa itu benar-benar dapat memelihara kemerdekaan dan kedaulatannya.[13]

B. Etika Sosial Zaman *Now*

Kini kita dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada di zaman ini mulai dari hilangnya rasa solidaritas bersama, virus westernisasi, liberalisasi, hedonisme yang sangat digandrungi kaum milenial +62, dan maraknya kasus-kasus yang dilakukan remaja seperti tawuran, judi, balapan dan masih banyak lagi. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis hanya menjelaskan point hilangnya solidaritas bersama, dan hedonisme kaum milenial +62.

Hilangnya solidaritas bersama itu sendiri menjadi permasalahan yang akut pada bangsa ini sebab akhir-akhir ini banyak nilai-nilai kebersamaan hilang sebab bangsa ini sudah terkena imbas globalisasi. Kita juga harus menengok dan belajar kembali dari sejarah sebab bangsa ini juga dibangun atas nilai-nilai kebersamaan kita juga harus menyadari bahwa ruang publik memiliki sikap yang heterogen dan multi identitas, agama tidak lain menjadi ekspresi absolutisme salah satu pihak. Namun ia dilibatkan secara relatif agar nilai dan spiritnya bisa diakses oleh berbagai pihak.[14]

Lebih lanjut lagi, hilangnya solidaritas bersama juga dapat menumbuhkan sikap intoleran dalam menyikapi perbedaan. Toleransi itu perlu sebab toleransi dapat menjaga masyarakat bersama-sama, bahkan dalam menghadapi konflik yang intens. Jika ada ketaatan hukum aturan kesetaran dan intens. Jika ada ketaatan umum aturan kesetaraan dan toleransi, maka konflik dapat ditangani dengan cara damai. Jika demikian besar rakyat tidak setuju dengan prinsip toleran, tentunya kebebasan, dan solidaritas diambang masalah. Toleransi harus dapat dilihat sebagai kekuatan utama demokrasi karena masyarakat tidak benar-benar homogen.

---

[13] Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), 127-138.

[14] Fathorrahman Ghufron, *Ekspresi Keberagaman di Era Milenium Kemanusiaan, Keragaman, dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 160.

Toleransi juga merupakan dari hak-hak sipil di mana individu-individu dapat diharapkan di alam demokrasi. Individu seyogyanya harus mampu menjalani kehidupan mereka tanpa mengidap ketakutan, tanpa mengalami kekerasan fisik dan mental sikap ini juga akan memberikan situasi yang aman dalam kehidupan nyata. Individu dengan sikap toleran akan memiliki perilaku yang toleran. [15]

Hilangnya solidaritas bersama juga banyak memicu munculnya aksi teror di lingkungan kita sendiri. Aksi teror ini jenisnya beragam tidak hanya melulu menggunakan bom akan tetapi kadangkalanya juga melukai fisik seperti yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, aksi *klithih* merupakan contoh kecil yang tidak menggunakan bom bagi masyarakat Yogyakarta hal ini merupakan teror, kemudian ada serangan air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan pada tanggal 11 April 2017 teror ini menyebabkan wajah novel luka parah. Matanya bengkak, benjol, dan mengalami kelainan saraf. Ada juga aksi teror yang menngunakan bom seperti aksi teror di Plaza Sarinah, Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat. Dalam ledakan ini delapan orang tewas (empat orang pelaku teror sendiri dan empat orang warga sipil) dan melukai 24 orang, kelompok ISIS mengeklaim bertanggung jawab atas peledakan tersebut.

Dengan demikian, dalam kehidupan kita sebangsa menyimpan potensi disharmoni, dan disintegrasi sosial. Masing-masing golongan merasa terancam eksistensinya dengan golongan lain. Berbagai kasus tragis telah menimbulkan trauma yang memerlukan waktu lama untuk dihilangkan dari memori bangsa kita. Selama tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dan tepat semua pihak untuk memulihkan rasa aman dan keyakinan akan terjalinnya kehidupan rukun dan damai, maka benih-benih permusuhan akan tetap hidup di sudut hati masyarakat kita yang sewaktu-waktu bisa menjelma menjadi konflik sosial yang mengancam disharmonisasi sosial dan integrasi nasional. Hal ini harus diantisipasi sejak dini agar konflik dapat ditangkal dan dicegah.

Sebagai manusia yang masih memiliki nurani penting bagi kita untuk terus meningkatkan solidaritas bahu membahu agar teror ini

---

[15] Alamsyah M Dja'far, (*In) Toleransi Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama* (Jakarta: PT Media Elex Komputindo, 2018), 18.

tidak berlangsung terus menerus. Sebab bila kita tidak peka maka hal ini sudah menjadi budaya sebab mengapa penulis mengatakan hal ini menjadi budaya? Sebab sesuatu yang menurut anggapan orang biasa-biasa saja dan sudah terjadi secara berkesinambungan maka hal yang demikian diangap budaya.[16]

Ada banyak peradaban yang runtuh akibat hilangnya solidaritas bersama sebab diantara mereka sudah tidak ada niat untuk membangan peradaban yang lebih baik. Selain itu mereka acuh akan keadaan orang disekitar mereka tidak ada yang saling menasehati dalam kebaikan kita belajar juga dari sejarah bagaimana kebesaran Bani Umayyah mereka awalnya begitu kokoh dan kuat akan tetapi dikarenakan kurangnya kebersamaan mereka runtuh dan kalah bertempur dengan bani Abbasiyah dan khalifah terakhirnya meninggal terbunuh oleh Ash-Shaffah.

Bani Umayyah berhasil membangun peradaban Islam yang besar pertama dalam sejarah karena ilmu pengetahuan, perpustakaan, dan percampuran ras dan iman. Damaskus menjadi kota metropolitan dan kosmopolitan, saat itu Damaskus jangan dibandingkan dengan Damaskus masa kini yang monoton dengan gamis dan masjidnya. Atau sebagai kota santri yang hanya disuguhkan dengan ilmu-ilmu dan budaya agamis saja, melainkan New York di zamannya. Sebab semua komponen di dunia diajak untuk bergabung mereka berduyun-duyun bermigrasi ke Damaskus, ilmu pengetahuan tidak hanya bersumber dari tradisi Islam akan tetapi juga berasal dari Yunani, Persia, Romawi, Nasrani dan lain-lain.[17]

Hedonisme merupakan perilaku menyimpang yang umumnya bayak terjadi pada remaja. Salah satu faktornya ialah rasa ingin diakui sebagai anggota atau bagian dari mereka semisal mengikuti tren yang membuat percaya diri dan diterima dilingkungan sosialnya, sebab remaja kebanyakan menghabiskan waktu mereka bersama teman sebaya mereka secara langsung mereka akan terpengaruh mulai

---

[16] Faisal Ismail, *Islam Konstitusionalisme Dan Pluralisme* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 92.

[17] Al Makin, *Membela Yang Lemah, Demi Bangsa dan Ilmu Keragaman, Minoritas, Khilafah, Kapitalisme Agama, dan Madzhab Yogya* (Yogyakarta: SUKA Press, 2019), 27.

dari sikap, budaya, dan keagamaan mereka. Mereka aslinya sadar bahwa barang yang mereka pakai itu kadang kalanya berlebihan akan tetapi mereka ingin diterima dalam bagian itu jadi mereka agak memaksakannya sebab kebanyakan dari mereka berpikiran bahwa semakin banyak kesamaan mereka dengan kelompok itu makan dapat dipastikan kesempatan untuk bergabung juga lebih besar.[18]

Hedonisme kaum milenial +62, merupakan permasalah yang kompleks sebab hal ini juga menyangkut kemajuan bangsa ini. Pemuda-pemuda zaman kini ialah pemimpin masa depan bila kita berkaca pada masa kini kita akan mendapati berbagai kehidupan yang hedon dan individual hinggap pada anak-anak muda. Penulis juga menyadari bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perubahan ialah adanya penemuan-penemuan baru. Alurnya ialah ada penemuan baru, kemudian menyebar di tengah masyarakat, diterima, dipelajari, dan akhirnya digunakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Discovery (penemuan baru) menjadi *invention* kalau masyarakat sudah mengakui, dan menerima serta mengaplikasikan penemuan itu. Keinginan akan kualitas juga merupakan pendorong untuk meninggikan kualitas penemuan itu, seringkali bagi mereka yang telah menemukan hal-hal yang baru diberikan hadiah atau tanda jasa atas jerih payahnya. Penulis juga meyakini salah satu penemuan itu ialah *gadged* di mana benda ini membuka mobilisasi tanpa batas oleh penggunanya serasa dunia berada digenggaman, kita dapat mengakses berbagai ilmu, peradaban, budaya, bahkan hingga gaya hidup suatu bangsa. Kita melihat, meniru, mengamati, dan mengamalkan. Maka tak ayal bila sistem sosial dan budaya kita berubah mengikuti pola di luar budaya dan sosial kita.[19]

Kita juga harus mempelajari dan mengatahui jenis-jenis masyarakat dalam kehidupan kita agar apa yang kita lakukan bisa efektif untuk mengarahkan generasi muda ke arah yang lebih baik. Jenis masyarakat ada dua, yakni; homogen dan heterogen Spencer

---

[18] Sandi Saputra, Ririn Dewi Lestari, dkk, Analisis Karakter Remaja Gaul Pada Hedonisme *Vlog* (*Jurnal Mediaps*, Vol. 3, No. 1, 2017), 26.

[19] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 274.

melukiskan perubahan masyarakat dari homogen ke heterogen dengan membandingkan antara masyarakat primitif dan masyarakat modern. Dalam tingkatan tipologi lainnya yang lebih terkenal, dia membedakan masyarakat-masyarakat militer dan industri, yang didahului masyarakat primitif. Jadi, struktur sosial menurut Spenser adalah berevolusi dari kelompok kecil (*small groups*) menjadi lebih besar, dari kelompok yang sederhana ke kelompok yang lebih kompleks, dari yang lebih kompleks menjadi menjadi dua kali lebih kompleks lagi.[20]

Semakin Kompleks masyarakat maka semakin besar pula peluang muncul benih-benih konflik. Konflik sosial merupakan sesuatu yang inheren, menurut pandangan Islam sendiri tidak bisa diartikan bahwa Islam mentoleransi adanya ketidakadilan sosial. Islam merupakan agama yang serius dan konkret yang berupaya untuk menghilangkan ketidakadilan sosial, sehingga menciptakan harmoni mengikis konflik dan membangun bangsa ke arah yang lebih progresif.[21]

Dewasa ini, perilaku konsumtif telah melanda berbagai kalangan masyarakat khususnya generasi muda sebab memang masa-masa muda ini ialah masa semangat-semangatnya manusia untuk menunjukkan kekuatan mereka baik dari segi fisik maupun non fisik yang menyangkut ekonomi, keinginan untuk memiliki pamer dan sebagainya. Selain itu menurut Santrock pada masa remaja, individu akan cenderung menyukai berbagai hal yang baru dan cukup menantang bagi dirinya, hal tersebut karena remaja berupaya untuk mencapai kemandirian dan menemukan identitas diri mereka, serta menimbulkan perubahan fisik, sikap, perilaku, emosi, dan perubahan perilaku yang lebih konsumtif.

Menurut Bush remaja merupakan salah satu kelompok yang sangat potensial bagi target pemasaran produk, sehingga remaja tumbuh dalam budaya konsumerisme yang membuat remaja terlibat perilaku konsumtif lebih lanjut bahwa Mangkunegara mengungkapkan karakteristik remaja yang mudah dibujuk, dan masih labil, implusif

---

[20] Imam Bonjol Jauhari, *Teori Sosial Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, dan STAIN Jember Press, 2012), 93.

[21] Ibid., 79.

dalam berbelanja, dan realistis dalam berpikir cenderung seperti boros yang menjadikan remaja lebih konsumtif.

Dewasa ini, gaya hidup hedonis memiliki daya tarik di kalangan remaja khususnya +62. Dengan demikian mereka akan cenderung memilih gaya hidup yang instan, *glamour*, enak, dan malas-malasan dalam menggapai tujuan hidup (tidak bekerja keras). Bahkan kadangkali sempat penulis lihat sendiri muncul kata-kata yang *nyelekit* seperti *kaum rebahan*, *mager*, dan berbagai istilah lainnya yang lazim di kalangan kaum muda +62. Menurut Kotler dan Amstrong bahwa gaya hidup merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif. Selain itu mereka juga terbiasa hidup secara individualis mengabaikan teman yang perhatian pada mereka padahal dalam Islam sendiri diajarkan untuk saling menasehati dan tolong menolong dalam kebajikan, pernah penulis alami sendiri saat yang demikian dalam hidup penulis ketika penulis dikomentari "*kamu gak usah urus hidup ku urus hidupku sendiri*" memang ini merupakan kalimat penolakan bantuan akan tetapi apabila dilihat dari sisi makro ini akan menimbulkan kejelekan sebab bila masalah itu besar pasti akan berimbas kepada sisi yang lain dan mempengaruhi dalam hubungan sosial kita sebagai manusia.[22]

Hedonisme juga dapat memberikan runtuhnya nilai keteraturan sosial, Comte memberikan analisis mengenai keteraturan sosial. Keteraturan sosial dalam perspektifnya dibagi menjadi dua fase, *pertama* usaha untuk menjelaskan keteraturan sosial secara empiris dengan menggunakan metode positif, *kedua*, usaha untuk meningkatkan keteraturan sosial sebagai suatu cara normatif dengan menggunakan metode-metode yang bukan tidak sesuai dengan positivisme, tetapi yang menyangkut perasaan dan juga intelek. Comte melihat sesungguhnya individu dibentuk oleh lingkungan sosialnya, sehingga satuan masyarakat yang asasi adalah bukan individu-individu, melainkan keluarga.[23]

---

[22] Ranti Tri Anggraini dan Fauzan Heru Santhoso, Hubungan antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja (*Jurnal Gadjah Mada Journal Pschology,* Vol. 3, No. 3, 2017), 132.

[23] Imam Bonjol Jauhari, *Teori Sosial Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, dan STAIN Jember Press, 2012), 109.

C. Langkah Yang Perlu Diambil

Langkah yang perlu diambil untuk mengurangi pengaruh hedonisme dan kurangnya solidaritas sosial ada tiga, yaitu; 1. Penanaman Nilai Agama Sebagai Dasar Pegangan Hidup, 2. Pengajaran pendidikan yang beorientasi kepada aspek agama dan sosial, 3. Jangan bosan untuk berbuat baik kepada sesama.

1. Penanaman Nilai Agama Sebagai Dasar Pegangan Hidup

Agama merupakan pegangan hidup manusia, hubungan antara agama dan kehidupan sangat erat. Apabila dikaji dalam sudut pandang sosiologis. Menurut E.K. Nottingham secara empiris, agama dapat berfungsi di dalam masyarakat antara lain sebagai (1) faktor yang mengintegrasikan masyarakat; (2) faktor yang mendisintegrasikan masyarakat; (3) faktor yang bisa melestarikan nilai-nilai sosial; dan (4) faktor yang bisa memainkan peran yang bersifat kreatif, inovatif bahkan bisa refolusioner.

Oleh karena itu amat penting kita tanamkan dedikasi keagamaan yang kuat pada generasi muda kita sebab dalam nilai agama banyak mengandung unsur yang memiliki cipta rasa positif yang besar. Dengan agama mereka akan semakin tahu dan belajar arti kehidupan yang sesungguhnya sehingga dapat menjadi generasi yang lebih bijak dalam mengambil keputusan.[24]

Dengan agama pula kita dapat belajar mana yang baik dan mana yang buruk sebab kita memiliki ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih *shaleh* dan taat dalam menjalani hidup. Ilmu adalah pengetahuan manusia yang dihimpun menjadi disiplin tertentu. Ilmu terbagi menjadi berbagai bidang di era modern ini dengan terbaginya ilmu maka semakin mudah kita belajar akan kesalahan-kesalahan bangsa yang terdahulu agar tidak jatuh di tempat yang sama pula. Ilmu dimulai dari aktifitas berpikir. Lalu cara berpikir itu disusun dan dihimpun sehingga menjadi pengetahuan, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Sebelum muncul tradisi tulis menulis yang kita kenali saat ini, dahulu kala ilmu diajarkan melalui lisan (oral) dan disimpan dalam

[24] Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 59.

memori kolektif masyarakat sama pula halnya ilmu agama dahulu kala saat masa-masa fase Makkah dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Islam didakwahkan secara lisan, dengan baik dan bijak sehingga akan memunculkan penganut-penganut yang shaleh dan taat mereka rela mempertaruhkan harta dan nyawa demi kejayaan Islam. akan tetapi seiring berjalan waktu Islam juga didakwahkan dengan tulisan yakni dengan semakin banyaknya orang Makkah yang pandai masuk Islam.[25]

Dengan ditanamkannya etika keagamaan yang kuat pada generasi muda diharapakan mereka akan menjadi pribadi yang semakin peduli kepada sesama sebab Islam adalah agama yang *universal*. Islam senantiasa mengajarkan kepada pemeluknya agar memelihara persatuan, kesatuan, dan kerjasama guna mewujudkan kebaikan, serta kemaslahatan bersama ikatan kedekatan dan jalinan keakraban di antara anggota umat yang dikenal dengan sebutan "saudara" (*akhun*). Dalam hal ini, Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa seorang muslim bersaudara atas muslim lainnya atas dasar kesamaan keyakinan keagamaan (iman) atau akidah agama. persaudaraan ini dikenal dengan sebutan *ukhuwah Islamiyah.*

Tentunya di zaman kini yang banyak kasus dan mewabahnya virus seperti korona maka sangatlah bijak dan baik bila kita membantu sesama apalagi dia saudara seiman kita. Janganlah kita terlalu memamerkan apa yang kita miliki tapi jadilah manusia yang dapat memberikan kemanfaatan bagi lingkungannya bila tidak mampu banyak cukuplah orang yang membutuhkan di sekitar kita, mereka itu muslim saudara seiman kita jangan kita telantarkan sebab itu kewajiban yang diberikan Allah SWT kepada kita yang mampu.

Al-Qur'an sendiri memberikan prinsip-prinsip persatuan dan persaudaraan, dan sekaligus sejumlah pedoman dan petunjuk yang sangat berharga dalam rangka membangun, membina, dan menjalin ikatan *ukhuwah* yang kuat, harmonis, sejuk nan damai. Secara eksplisit hal ini jelas tertera dalam firman Allah SWT;

[25] Al Makin, *Membela Yang Lemah, Demi Bangsa dan Ilmu Keragaman, Minoritas, Khilafah, Kapitalisme Agama, dan Madzhab Yogya* (Yogyakarta: SUKA Press, 2019), 175.

1) Perselisihan di antara kaum muslimin harus didamaikan dengan cara-cara yang adil (Q.S. al-Hujurat (49): 9);
2) Perbuatan cela mencela harus dijauhi (Q.S. al-Hujurat (49): 11);
3) Prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan pergunjingan harus dihindari (Q.S. al-Hujurat (49):12).[26]

2. Pengajaran Pendidikan Yang Berorientasi Kepada Agama dan Sosial

Pendidikan bukan pembelajaran, pembelajaran hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan tentu lebih dari hal itu. Di dalam pembelajaran, maka yang lebih diutamakan adalah pengisian rasio atau akal. Sedangkan dalam pendidikan mengisinya dengan karakter, budi pekerti, dan akhlak yang baik.

Oleh sebab itu sebagai seorang pendidik dituntut tidak hanya mengajar, akan tetapi juga harus mendidik. Itulah sebabnya, Kementerian Pendidikan Nasional adalah ungkapan yang pernah dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik nasional, seorang guru bangsa, *tut wuri handayani.* Secara lengkap dinyatakan: "*ing ngarso asung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.*" Ungkapan ini memiliki makna yang dalam bagi seorang pendidik, bila di depan dia memberi contoh. Dia harus memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat dicontoh anak didiknya.

Guru juga harus menjadi pendorong agar seorang pencari ilmu memiliki kesuksesan, makanya ketika berada di tengah-tengah komunitas belajarnya, maka pendidik harus memberikan dorongan, motivasi, dan dukungan sepenuhnya agar mitra belajarnya menjadi sukses. Pendidik juga harus menjai pamong, dia akan memberi arah kemana perjalanan harus ditempuh. Dan kemudian menjaga agar arah itu dapat ditempuh sesuai dengan waktu yang disediakannya. Jangan berlebih, pendidik adalah orang yang mengajarkan tentang betapa pentingnya waktu.

Pendidikan Indonesia membutuhkan guru dan dosen yang memiliki pandangan kedepan. Pendidikan karakter bukan hanya

[26] Faisal Islmail, *Islam Konstitusionalisme Dan Pluralisme* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 32.

pendidikan yang mengedepankan pengetahuan rasional saja, akan tetapi justru pendidikan yang berbasis pada pengasahan kepekaan hati nurani. Dengan demikian orientasi pendidikan karakter lebih menjadikan manusia yang terdidik dan memiliki orientasi kepada nilai-nilai agamis dan sosial.[27]

Pendidikan yang berorientasi kepada agama juga berguna dalam masyarakat dunia yang global ini sebab pada kenyataannya dalam sistem masyarakat global terjadi pola hubungan sosial yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan jaringan komunikasi yang menjangkau seluruh hunian manusia yang setiap anggotanya saling mengenal. Agama berfungsi menjaga aturan baku norma yang telah paten, kemudian aspek sosial pendidikan memberikan nuansa membangun peradaban yang berkemajuan.

Globalisasi juga memberikan nuansa yang berbeda pada tatanan yang telah ada, khususnya kaum remaja yang masih terlena dengan hingar bingarnya kehidupan modern. Oleh sebab itu, dengan adanya pendidikan yang berorientasi pada aspek agama dan etika sosial dapat menjadikan nilai substantif yang berbeda. Amerikanisasi berjalan seiring waktu malah semakin menumpuk dengan globalisasi, dengan kata lain globalisasi yang terjadi saat ini dapat dipandang secara sederhana sebagai Amerikanisasi, dan gerakan itu sudah menunjukkan reaksi yang patut diamati dan akan menjadikan proses denominasi dunia oleh berbagai hal yang berasal dari Amerika, seperti; bahasa, budaya, etika, ekonomi, hukum, dan aspek-aspek sosial lainnya.[28]

3. Jangan Bosan Berbuat Baik Kepada Sesama

Islam mengajarkan kebaikan sebab dengan kebaikan dapat mempererat persaudaraan dan tali silaturrahmi. Akan tetapi di zaman ini kadangkala sebuah kebaikan terdengar asing dan hal yang sudah

---

[27] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 71.

[28] Nurcholish Madjid, "Kosmopolitanisme Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban", dalam *Agama & Dialog Antar Peradaban,* ed. Nurcholish Madjid, dkk (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2011), 33.

dinggap aneh. Penulis menyadari kadang kala juga terjadi dalam hidup penulis, di saat penulis melihat hal yang buruk dianggap baik atau sebaliknya yang baik dianggap buruk. Akan tetapi janganlah menyerah sebab Allah SWT sudah mejanjikan pahala dan kecukupan sebab kita mau menolong kepada sesama apalagi sesama muslim tentu akan sangat banyak mendatangkan faidah.

Penulis juga menyadari tatanan baku yang baik ini juga sudah di rusak oleh berbagai hal seperti kemajuan teknologi yang katanya mendekatkan yang jauh dan semakin mendekatkan yang dekat akan tetapi di lapangan tidak demikian malah nyatanya yang dekat sering terabaikan oleh yang di sana, malah kadang-kadang yang jauh jadi semakin jauh sebab tidak ada keperluan mengapa harus komunikasi, mengapa harus bertegur salam dan menyapa sungguh sangat menyedihkan keadaan ini.

Penulis juga sadar bahwa perubahan sosial yang terjadi pada abad 21 ini, disebabkan oleh pertambahan penduduk yang tidak terkendali sehingga menjadikan mereka mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepada sesama yang membutuhkan. Sehingga disisi lain juga menjadikan lingkungan mereka terganggu, semuanya itu bermuara kepada nilai material dan konsumsi padahal dalam al-Qur'an sudah dijelaskan untuk mencari yang baik dan halal, sesuai dengan kebutuhan dan tidak *israf* dan *tabdzir* (mubazir). Hal ini merupakan nasihat bijak bagaimana kita mencari yang baik, dan secara eksplisit mengajarkan kita untuk peduli kepada yang membutuhkan.[29]

Dengan hadirnya sikap saling tolong menolong dapat mengurangi jarak sosial di dalam lingkungan kita. Sebab kita memberikan kenyamanan dan harmonisasi. Secara teoritis benar bahwa dalam struktur masyarakat terbagi-bagi di dalam kelas sosial, terbelah dalam tingkat pendidikan, tingkatan umur, *gender*, dan seterusnya. Kendatipun demikian konsep pembagian sosial yang objektif ini diimbangi oleh konsep lain yang normatif. Yakni konsep tentang "*umat*" ada aspek agama yang masuk, dengan hadirnya aspek tersebut dapat mereduksi pembagian dan pembelahan struktur sosial yang ada.

---

[29] Saidurrahman, dan Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam Perspektif Prof.K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.* (Jakarta: Kencana, 2019), 127.

Selanjutnya Kuntowijoyo menegaskan, bahwa perangkat kesatuan yang sebenarnya berfungsi untuk mereduksi pembagian sosial empiris yang terdapat dalam masyarakat khususnya Islam. Ia juga berfungsi untuk mencegah konflik baik secara horizontal maupun veritkal. Dengan adanya kepekaan, dan tolong menolong juga akan menjadikan bangsa ini kuat dan bahu membahu demi meraih kemajuan. Islam juga mengakui bahwa sah untuk membela kelompk yang tertindas, sebab keadilan akan tercipta bila menempatkan sesuatu pada tempatnya.[30]

Kesimpulan

Perubahan sosial yang terjadi di masa kini menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang begitu kompleks. Selain itu hal ini juga memberikan pergeseran etika, moral, dan budaya bangsa ini. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya berbagai hal yang baru seperti budaya individu, hedonisme, dan konsumerisme yang menghegemoni hampir disetiap sudut lingkungan sosial kita. Kita tidak bisa membendung dan mengakhiri semua ini sebab budaya ini sudah berkembang dengan pesat seiring denga arus globalisasi yang semakin mendunia, tak dapat dipungkiri pula bahwa berbagai penemuan juga mempercepat budaya ini seperti hal nya *gadged* mainan yang kita gunakan setiap hari.

Akan tetapi dalam hal ini kita masih bisa mengurangi dengan menanamkan nilai etika, akhlak, dan agama yang baik kepada generasi muda, mencontohkan pembelajaran, dan pendidikan yang lebih berorientasi pada aspek agama, dan kepekaan sosial, serta tak henti-hentinya saling menolong dalam kebaikan sesuai dengan perintah agama demi mengakkan sebuah hal yang baik demi kehidupan bersama.

[30] Imam Bonjol Jauhari, *Teori Sosial Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, dan STAIN Jember Press, 2012), 79.

BAB 11

MISI KEMANUSIAAN ISLAM

Beratus tahun sejak kelahirannya, Islam membuktikan sebagai agama yang toleran dan membawa misi kemanusiaan, selain itu Islam juga mengakui dan menghargai perbedaan sejak dahulu. Tanpa harus kehilangan keyakinan. Saat Rasulullah diutus, di wilayah Timur Tengah, sudah ada pemeluk selain agama islam dan mereka juga telah eksis, seperti Yahudi, Nasrani/Kristen, dan kaum musyrik Arab. Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, mengakui keesaan Allah satu-satunya Tuhan dan dirinya adalah utusan Allah. Akan tetapi Rasulullah tidak menyatakan semua agama sama-sama jalan yang sah menuju Tuhan! Bahkan ada perintahnya dalam Surat al-Kafirun.[1]

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang bersifat *universal* artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia, bahkan jagat raya, namun demikian, pemahaman *universalitas* Islam dalam kalangan muslim sendiri tidak seragam ada kelompok yang mendefinisikan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasululah yang *nota-bane* nya adalah budaya Arab adalah final, sehingga harus diikuti sebagaimana adanya. Adapula kelmpok yang memaknai bahwa

[1] Adian Husaini, *10 Kuliah Agama Islam Panduan Menjadi Cendekiawan Mulia dan Bahagia* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), 94.

universalitas ajaran Islam tidak terbatas kepada waktu dan tempat, sehingga dapat masuk ke budaya apapun.

Kelompok pertama berambisi menyeragamkan budaya yang ada di dunia menjadi satu, adapula kelompok yang kedua yang menerima budaya apapun asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[2] Dalam penelitian agama-agama setidaknya terdapat tiga paradigma agama dan keberagamaan, yakni: eksklusif, inkflusif, dan pluralis. Yang akan sedikit penulis uraikan disini;[3]

Pertama, paradigma eksklusif. Eksklusifisme agama adalah ajaran-ajaran agama yang mengajarkan dominasi suatu agama atas agama yang lain. Kaum eksklusif biasanya mendorong penganutnya untuk menutup diri atas relasi sosial pemeluk agama yang lain. Kebanyakan dari mereka beralasan bahwa orang non muslim sesat, jahat, dan senantiasa ingin merusak umat Islam.

Kedua Inklusifisme adalah, sikap keagamaan yang memandang bahwa di luar agama yang dipeluknya, juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuhnya sempurna dan sebenar agama yang dianutnya. Biasanya kelompok ini cenderung mendorong penganutnya bersikap terbuka kepada pemeluk agama lain, yang tentu saja sikap ini memberikan dampak yang sehat dan harmonis kepada sesama masyarakat.

Ketiga Pluralis, berbeda dengan pluralisme yang menganggap semua agama sama, sedangkan pluralis adalah sikap keagamaan yang berpandang bahwa secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai realitas keniscayaan yang masing-masing berdiri sendiri, sejajar, sehingga semangat misionaris dan dakwah dianggap tidak relevan.[4]

Selain itu apabila dilihat dari ajaran-Nya Islam memiliki sendi-sendi kemanusiaan yang berbeda dengan yang lain, seperti

---

[2] Khabibi Muhammad Lutfi, Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal (*Jurnal Shahih,* Vol. 1, No. 1, 2016), 2.

[3] Abdul Aziz, *Pandangan Pemuka Agama Tentang Eksklusifisme Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2013), 14.

[4] Abu Bakar, MS, Argumen Al-Qur'an Tentang Eksklusivisme, Inklusivisme, dan Pluralisme (*Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama,* Vol. 8, No. 1, 2016), 46.

halnya Puasa. Disini penuli mencontohkan puasa sebagai salah satu ajaran Islam. Puasa secara etimologis berarti menahan makan, minum, kegiatan seksual, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Puasa dalam hal ini merupakan ibadah individual, tentunya apabila individu makan yang mengetahuinya hanya dia dan Allah saja. Dalam aspek sosial puasa dapat dikatakan sebagai aspek pensucian diri, sebab dengan puasa diharapkan seorang hamba akan memiliki hubungan yang baik kepada Allah dan manusia. Sebab disisi lain puasa juga harus menahan amarah, dan syahwat duniawi. Sehingga secara langsung akan membentuk sikap dan tindakan yang shaleh, puasa yang dilakukan dengan tingkatan keikhlasan yang tinggi akan menjadikan seorang hamba sadar dan peka akan lingkungan sekitar sebab dia merasakan menjadi seorang yang takpunya dia tidak makan dari terbit hingga terbenamnya fajar, sehingga dia akan merasakan lapar, haus, yang tentunya hal ini bukan persoalan yang sederhana.

Puasa juga akan mengajarkan keseimbangan kepada seorang hamaba. Secara manusiawi tentu manusia akan condong dengan sesuatu baik berupa harta dan jabatan. Sehingga dengan berpuasa diharapkan hamba akan tidak menguras energi demi tujuan yang sia-sia. Islam telah memberikan rambu-rambu kepada seorang hamba agar dia menjaga kehidupan dengan mengayun diantara dua kutub ekstrim. Jangan terlalu condong ke dunia dan jangan terlalu condong ke akhirat dengan melalaikan dunia. dalam kehidupan ini materi penting akan tetapi bukan perioritas utama seorang muslim, dengan harta itu akan mengantarkan seorang hamba yang memperhatikan akhirat. Maka kehidupan duniawi kita penuhi sebagai jembatan menuju akhirat, para ahli tasawuf menyatakan bahwa kehidupan dunia adalah jembatan menuju akhirat.[5]

A. Persatuan Dan Kesatuan

Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik. Kegiatannya berdampingan dan berimpitan saling menciptakan dan meniadakan. Satu sisi manusia telah menciptakan

[5] Nur Syam, *Demi, Agama, Nusa, dan Bangsa Memaknai Agama, Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

sebuah sejumlah nilai bagi masyarakat, pada sisi yang lain secara bersamaan kodrati senantiasa berhadapan dan berada dalam masyarakatnya. Manusia tidak akan eksis apabila terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat (sebagai kumpulan individu-individu manusia) diciptakan manusia sedangkan manusia sendiri merupakan produk masyarakat.

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta bentuk jamak dari kata *buddi* yang artinya budi atau akal. Dengan kata lain diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal dan mencakup keseluruhan yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Clifford Geertz mendefinisikan kebudayaan adalah sebagai berikut; 1. Keseluruhan cara hidup suatu masyarakat, 2. Warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompok, 3. Suatu cara berpikir, merasa dan dipercaya, 4. Suatu abstraksi dari tingkah laku, 5. Suatu teori pada pihak antropolog tentang suatu cara kelompok masyarakat nyatanya bertingkah laku, 6. Suatu gudang untuk mengumpulkan hasil belajar, 7. Seperangkat orientasi-orientasi *standard* pada masalah-masalah yang berlangsung, 8. Tingkah laku yang dipelajari, 9. Suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat *normative*, 10. Seperangkat teknik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar maupun dengan orang lain, 11. Suatu endapan sejarah.[6] Masalah agama tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan masyarakat, kerena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain, sebagai berikut;

1. Fungsi Edukatif,
2. Fungsi Penyelamat,
3. Fungsi Pendamai,
4. Fungsi Sosial Kontrol,
5. Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas,
6. Fungsi Transformatif,
7. Fungsi Kreatif, dan
8. Fungsi Sublimatif.

---

[6] Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 71.

Islam sendiri memiliki semua nilai itu tentunya Islam merupakan agama persatuan dan kesatuan.[7]

Salah satu segi tentang agama Islam yang banyak ditegaskan dalam Qur'an adalah baha Islam berlaku untuk seluruh alam raya, termasuk seluruh umat manusia. Tentang Nabi Muhammad SAW disebutkan dengan jelas: "*Kami (Allah) tidak mengutus engkau Muhamamd melainkan untuk seluruh umat manusia, sebagai kegembiraan, dan pembawa ancaman*" (Q.S. Saba'/34:28), juga dalam firman Allah pada surat al-Anbiya ayat 107, *"Tidaklah kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmad untuk seluruh alam.*

Segi keuniversalan Islam berdasarkan firman-firman itu sudah menjadi kesadaran yang sangat umum dikalangan kaum Muslimin. Namun sebenarnya masih banyak sekali penegasan-penegasan dalam Qur'an tentang keuniversalan Islam Tuhan yang patut sekali menjadi bahan renungan Islam zaman kini. Islam juga memberikan misi persatuan dan kesatuan sebab Islam menghargai aspek-aspek keuniversalan, sebab Islam tunduk dan patuh kepada Allah, sang maha pencipta, adalah pola wujud (*mode of existence*) seluruh semesta. Dalam bahasa yang tegas , seluruh jagad raya adalah suatu wujud eksistensi ketundukan dan kepasrahan (Islam) kepada Allah, baik terjadi secara sendirinya atau mampu karena pilihan secara sadar (suka rela).[8]

Masih perlukah kita beragama? Itulah pertanyaan yang seringkali mengusik akhir-akhir ini berkenaan dengan maraknya berbagai bentuk tindakan kekerasan yang menyertai aneka ragam konflik yang ada di masyarakat yang jika tidak terselesaikan akan membawa kepada kahancuran nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi penulis dalam hal ini begitu yakin bahwa dari perspektif manapun kita melihat, agama masih sangat diperlukan terutama dalam membangun masyarakat yang humanis, damai, dan bahagia. Karena itu, menurut penulis pertanyaan yang relevan adalah bagaimana

---

[7] Ibid., 60.

[8] Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), xiii.

menjadikan agama sebagai alat yang dapat memanusiakan manusia atau dengan ungkapan lain, bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai dan ajaran agama yang apresiatif atas nilai kemanusiaan?.

Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 ideologi sekular telah mengalami keruntuhan. Kejatuhan komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dan munculnya berbagai kritik keras kepada modernisme dan kapitalisme yang menandai suatu era yang sering disebut *the end of history of ideology* yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Pada awalnya, ideologi sekular tadi dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, akan tetapi sesungguhnya idologi tersebut gagal mengangkat harkat dan martabat manusia. Komunisme dengan watak totalitarianiseme-Nya telah gagal mewujudkan keadilan sosial, demikian pula kapitalisme yang menempatkan manusia hanya sebatas alat produksi. Modernisme dengan paradigma developmentalisme-Nya, pembangunan juga tidak mampu mewujudkan pemerataan kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.[9]

Akan tetapi sebagai seorang yang memiliki nilai spiritual yang hebat tentu berpikir bahwa semua ini pasti ada maksudnya dan pasti memiliki ibrah yang dapat dipetik. Sebab segala sesuatu pasti diciptakan dengan maksud dan tujuan yang tersembunyi bersama-sama dengan tujuan tersembunyi ini ada beberapa keuntungan bagi seorang mukmin dalam semua peristiwa. Hal ini dikarenakan Allah berada disisi orang-orang yang beriman dan tidak pernah mengecewakan mereka.

Pada awalnya perjuangan hidup tampak tidak menyenangkan. Akan tetapi seseorang muslim harus mengerti bahwa kejadian yang tampaknya menakutkan, contohnya, persekongkolan orang kafir melawan melawan orang beriman, akan berakhir dengan kemenangan orang beriman. Cepat atau lambat, Allah akan memberikan

[9] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 78.

kemurahan hati-Nya, sehingga orang beriman harus yakin bahwa terdapat hikmah pada semua kejadian.[10]

Islam pada esesnsinya memandang manusia dan kemanusiaan secara positif dan optimis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama, yaitu keturunan Adam dan Hawa. meski berasal dari nenek moyang yang sama, namun juga berbangsa-bangsa lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan dan *distingsi* ini selanjutnya mendorong untuk saling mengenal untuk menumbuhkan apresiasi umat manusia, dalam pandangan Islam, bukanlah karena warna kulit dan bangsa, tetapi hanyalah tergantung pada pada tingkat ketakwaan masing-masing.

Hal ini termaktub dalam Q.S. Al Hujurat ayat 13 yang artinya;*"hai orang, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*. Tentunya dari secuplik ayat ini Islam mengajak manusia untuk saling menghargai dan menghormati kepada sesama dan memperhatikan aspek-aspek nuansa Islam agar kita semakin sadar betapa lemahnya kita tanpa Islam yang menyangga iman dan pondasi sistem kemasyarakatan kita.[11]

Keberhasilan proyeksi kemanusiaan tentunya juga menyangkut proyek konservasi lingkungan yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan. Tentunya hal yang demikian juga ditentukan dari aspek intelektual dan spiritual yang mumpuni. Dua aspek inilah yang menentukan kualitas serta motivasi kesadaran Nya. Sayyed Hosen Nasr dalam artikelnya "*In The Beginning of Creation Was Consciousness*" menyebut kesadaran sebagai suatu ciptaan pertama. Nasr, selanjutnya menyatakan "*Consciousness is, Therefore, the*

[10] Harun Yahya, *Nilai-Nilai Moral Al-Qur'an terj Ummu Azizah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 18.

[11] Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Bergama Studi Pemikiran Tarmizi Taher tentang Studi Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PT Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 95.

most primary reality through which we knowe and judge every other reality." Penegasan Nasr dapat diperluas maknanya, misalnya, untuk menjelaskan khususnya dalam konservasi lingkungan, pengendalian penduduk, dan konsumsi hanya memperoleh kekuatan bila secara internal ditopang oleh nilai-nilai intelektual dan spiritual keduanya merupakan komponen kesadaran. Nilai intelektual dan *prime mover* yang mengoperasikan tindakan-tindakan kebajikan manusia.[12]

Dalam konteks Indonesia sendiri peran Islam untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan telah banyak diuji dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Selain itu Indonesia merupakan negara yang memiliki 34 provinsi, lima diantaranya merupakan daerah khusus atau daerah istimewa. Ada lebih dari 17.504 pulau dari Sabang sampai Merauke. Termasuk pulau-pulau yang berbatasan dengan segala bentuk ketertinggalan-Nya dalam gerak pembangunan fisik. Ada kurang dari 746 suku dengan 583 ragam bahasa dan dialek-Nya masing-masing.

Dalam kepercayaan atau agama juga demikian, ada enam agama yang diakui oleh pemerintah RI selain itu juga ada sekian banyak aliran kebatinan dan kepercayaan yang dianut oleh sekian banyak kelmpok. Masyarakat. Kesemuanya ada dalam potensi masyarakat Indonesia. Dalam potensi itu juga ada kemungkinan akan munculnya agama atau aliran kepercayaan baru ditengah masyarakat Indonesia. Hal yang demikian menjadi bahaya laten, sekalilagi yang demikian juga disebabkan oleh kreativitas manusia dalam menerobos aspek metafisik di luar batas-batas keyakinan yang telah menwarkan dirinya.[13]

Islam dalam hal ini memiliki peran yang penting sebab Islam merupakan agama mayoritas dalam segi kuantitas, dalam hal ini penulis menyebut dalam hal kuantitas sebab mereka menang jumlah akan tetapi kalah dalam kualitas. Meskipun kalah dalam kualitas Islam Indonesia masih menjunjung nilai-nilai HAM yang tertuang dalam pendidikan Pancasila saat ini bahkan dahulu saat masa orde

---

[12] Mudhofir Abdullah, *Masail Al Fiqhiyah Isu-isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 65.

[13] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam Pendidikan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 105.

baru presiden Soeharto sudah ada penataran P4 yang tentu menurut penulis lebih jitu dalam mengembangkan Islam yang berkarakteristik Pancasilais. Bagi bangsa Indonesia, sudah tentu persoalan HAM harus dicari dan digali, ke akar-akarnya dalam ideologi nasional Indonesia dalam hal ini lepas dari usaha yang dijalankan untuk meghayati, dan mengamalkan Pancasila. Agaknya saat ini apalagi pascareformasi semakin nampak krisis moral, etika, dan kemanusiaan yang menerpa bangsa ini, semakin maju semakin individu semakin hedon, dan konsumeris.

Oleh sebab itu perlu dibutuhkan penegasan dan penekanan kembali atas nilai-nilai Islam, dan nilai Pancasila agar meminimalisir hal yang demikian. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang diambil dan berserasih pada Islam, kita ambil yang paling mudah yang berkenaan dengan tema ini seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tentunya hal ini sesuai dengan cita-cita Islam itu sendiri, selain itu sila ini juga berkaitan dengan kemanusian dan HAM yang dikomparasikan dengan sila berikutnya Persatuan Indonesia sebab tanpa adanya kesatuan maka mustahil akan terciptanya kemanusiaan. Dalam hal ini kita juga arus merenung dan berpikir seberapa jauh kita menghayati dan mengamalkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia? Tentunya jawaban diserahkan masing-masing individu sebab hanya diri mereka sendiri yang tahu sejauh mana pelaksanaan hal ini.[14]

B. Islam Konteks Indonesia

Nusantara yang menjadi persimpangan dari tradisi tua dunia: India, Semitik, Barat, dan juga fondasi lokal masing-masing etnismembuktikan bahwa watak elastiknya dalam menerima unsur-unsur yang berbeda. dalam poin ini menyinggung Islam Indonesia yang memiliki banyak perbedaan anatara satu konsep Islam dengan konsep Islam lainnya. Islam di Indonesia sendiri banyak mengadopsi dari masalalu agama yang ada di Indonesia, sejak abad ke 15 unsur Islam Indonesia Hindu-Budha banyak di tambahi aspek-aspek Islam

[14] Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), 207.

dengan begitu akan menghasilkan tradisi unik seperti halnya cerminan arsitektur masjid yang beratap meru tiga tingkatan, berkembang mekara, dan beralun-alun dengan pohon beringin lengkap dengan burung Kinnara dan Kinnari. Yang merupakan hiasan-hiasan candi-candi tua.

Ramuan kuno ini juga diteruskan oleh para peletak fondasi bangsa Indonesia modern dengan menggabungkan unsur Eropa dan keagamaan: Marxime, Nasionalis, dan Agamis. Kristiani dari Eropa menyatu juga dengan tradisi Indonesia, tradisi China yang menyatu yang sering tersisihkan. Dari itulah muncul slogan *Bhinneka Tunggal Ika* dari kitab *Sutasoma* yang digunakan Indonesia.[15]

Said Aqil Siradj, berpandangan bahwa agama sebagai sesuatu yang sakral, datang dari Tuhan, turun dari langit, kepada manusia yang parsial, lemah terbatas, terikat dengan ruang dan waktu. Maka, agama harus sesuai dengan kondisi kebutuhan manusia, bukan kondisi Tuhan. Agama Untuk manusia, dan arena itu harus sesuai dengan tantangan yang dihadapi manusia. Ia juga menegaskan, kepemimpinan yang Islami adalah kepemimpinan yang berada dalam format dan alur kelayakan dan kepantasan. Seseorang yang menjadi pemimpin bukan karena dia muslim melainkan, karena dia layak dan pantas.[16]

Sejarah mencatat Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 dan 13, berdasarkan 3 teori. Akan tetapi dalam hal ini penulis lebih cenderung meyakini di Abad ke 7, di bawah ini akan penulis uraikan secara singkat 3 teori ini;

1. Teori Gujarat

   Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke 13, tokoh dari teori ini adalah para tokoh orientalis seperti Snouck Horgronje, bukti-bukti teori ini adalah:

---

[15] Al Makin, *Keragaman dan Perbedaan Budaya dan Agama Dalam Lintas Sejarah ManusiaI* (Yogyakarta: Suka-Press, 2017), 254.

[16] Said Aqil Siradj, dan Mamang Muhammad Haeruddin, *Berkah Islam Indonesia Jalan Dakwah Rahmatan Lil'alamin* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 110.

a. Batu nisan sultan pertama kerajaan Samudra Pasai, Malik al Shaleh yang wafat pada tahun 1297 M. relif dinisan ini bersifat Hinduistis, yang memiliki kesamaan dengan yang ada di Gujarat.
b. Adanya kenyataan bahwa Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia dan Cambai (Gujarat-Timur Tengah-Eropa).

2. Teori Makkah

Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke 7 atau 1 H. teori ini di cetuskan oleh Hamka. Dia menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke 13, sebab dalam kenyataannya, di Nusantara kala itu telah berdiri suatu kekuatan politik Islam. maka, pastinya. Islam telah masuk jauh sebelum itu, pada tahun 674 M, telah ada perkampungan pedagang Islam Arab di pantai Barat Sumatera, yang bersumber dari berita Tiongkok. Kemudian ditulis ulang oleh T.W. Arnold tahun 1896, J.C. Van Leur pada tahun 1955, dan Hamka pada tahun 1958.

3. Teori Persia

Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13, tokoh dari teori ini adalah P.A. Hoesein Djajadiningrat. Teori ini menitik beratkan tinjauannya kepada budaya yang hidup dikalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Peringatakan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syi'ah atas syahidnya Husein.
b. Adanya kesamaan ajaran anatar Syekh Siti Jenar dengan ajaran sufi Iran, Al-Hallaj. Meskipun Al-Hallaj telah meninggal dunia pada tahun 310 H atau 922 M. tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi,

sehingga memungkinkan Siti Jenar yang hidup di Abad 16 dapat mempelajarinya.[17]

Dari secuplik gambaran masuknya Islam di Indonesia nampak jelas bahwa memang akar sejarah Islam sudah lama tertanam maka tak ayal bila kini Islam jadi mayoritas. Sehingga sering memunculkan trobosan-trobosan yang memberikan nilai-nilai yang berkemajuan di Indonesia, seperti kebhinekaan, kesatuan, dan persatuan masyarakat Indonesia.

Islam sesungguhnya mengajarkan keselamatan sebagai pilar utamanya. Kalau kita perhatikan hampir seluruh upacara ritual yang bercorak ketuhanan atau ibadah *mahdoh* pastinya di dalamnya juga mengandng dimensi kemanusiaan. Shalat yang diawali oleh *takbirotul ihram* melalui bacaan mengagungkan Allah, dan diakhiri dengan ucapan salam. Shalat dulu lalu memiliki makna proses relasi vertikal dan horizontal. Hakikat ajaran Islam adalah pentingnya mengedepankan keselamatan dalam merangkai kehidupan. Tafsir keselamatan ini. Misi yang diemban bukan untuk memberikan keselamatan bagi seluruh alam, Islam akan menjadi *rahmatan lil 'alamin* jika Islam menjadi penyelamat bagi kehidupan seluruh umat manusia.[18]

Cak Nur dalam pembahasannya mengenai Islam Indonesia, beliau menulis buku *Islam, Kemoderatan, dan Keindonesiaan*. Disana beliau bercita-cita dan menggagas sebuah pencerahan untuk agama dan bangsa yang selaras dengan kemodernan. Karena menurutnya modernisasi adalah rasionalisasi bukan westernisasi. Modernisasi yang mencerminkan sebuah masyarakat yang terbuka, demokratif, dan partisipatif. Islam yang diamalkan cak Nur adalah Islam substantive, Islam non-Simbol, nir-kekerasan, dan intoleransi. lebih dari pada itu, cak Nur juga telah memberikan teladan bagi kita, regenerasi bangsa, untuk mendakwahkan Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Islam yang merangkul bukan Islam yang gemar memukul. Islam yang

[17] Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 482.

[18] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam Pendidikan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 75.

siap memberikan pertolongan bukan Islam yang *pentungan,* Islam dengan bertradisi Indonesia, bukan Islam Saudi Arabia atau Eropa.

Apa yang dinyatakan Cak Nur dulu menjadi kenyataan hingga hari ini. Umat Islam di Indonesia menjadi umat yang hanya berfokus pada kuantitas, akan tetapi jauh dari kualitas. Umat Islam yang mudah terprovokasi, menyalahkan, dan terjadi banyak konflik. Perbedaan sebagai rahmat tidak lagi menjadi modal untuk membangun harmoni. Ia jusru menjadi laknat , untuk mencari kambing hitam sambil menyalahkan berbagai pihak yang berbeda dan menjadi boomerang yang mudah menyerang pihak lain yang tidak segolongan.[19]

Seperti halnya bom Bali yang dilakukan Amrozi, Imam Samudra dan kawan-kawan. Imam Samudra dalam bukunya yang berjudul Aku Melawan Teroris menegaskan secara garis besar ada beberapa efek samping dengan adanya bom Bali yakni jatuhnya korban dikalangan muslim. Akan tetapi hal yang demikian tidak dikehendaki. Dia menagatakan bahwa tujuan dari bom Bali adalah usaha untuk balas dendam pada orang kafir, dan memberangus bisnis-bisnis keji disana. akan tetapi apabila dikaji secara agama hal yang demikian tidak diperbolehkan sebab dalam aturan Islam sendiri nyawa adalah sebuah hal yang diperhatikan sebut saja ada hukum *Qisash* bila dia membunuh maka dalam Islam hukumannya ya dibunuh sebab dia menghilangkan 3 hak; 1. Hak Allah, 2. Hak mayit, 3. Dan Hak keluarga. Selain dari aspek agama dari aspek sosial hal ini akan menimbulkan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), dimana manusia memiliki hak untuk[20] hidup dan diperlakukan secara adil, serta memberikan ketidak harmonis antar agama dan antar bangsa.

Persatuan dan kesatuan Islam Indonesia dalam hal ini ditopang oleh 4 ormas besar Islam seperti; NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Sehingga memiliki nilai esensi keberagaman yang berbeda. kalangan NU memberikan Islam ala Indonesia dengan sebutan Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari kata Islam yang berarti

---

[19] Said Aqil Siradj, dan Mamang Muhammad Haeruddin, *Berkah Islam Indonesia Jalan Dakwah Rahmatan Lil'alamin* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 202.

[20] Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris* (Solo: Jazera, 2004), 152.

penyerahan, ketundukan, kepatuhan, dan perdamaian. Agama ini memiliki lima ajaran pokok sebagaimana di sabdakan oleh Rasulullah "Islam adalah bersaksi sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan menunaikan haji bagi yang mampu." Selain itu Islam memiliki dua pedoman rujukan yakni; al-Qur'an dan Hadist, dua hal ini adalah pembimbing dan penuntun ke dalam Islam yang lurus sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Nusantara adalah kata yang menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kata ini berasal dari manuskrip berbahasa Jawa sekitar abad ke 12 sampai abad ke 16 sebagai konsep negara Majapahit. Sementara dalam literatur bahasa Inggris abad ke 19 kata Nusantara merujuk kepada kepulauan Melayu. Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah ini pada abad ke 20 sebagai salah satu rekomendasi untuk nama wilayah di Hindia Belanda. Sebab mayoritas pulau itu berada di wilayah negara Indonesia, karena itu maka kata itu disinonimkan dengan kata Indonesia.[21]

Kalangan Muhammadiyah juga memiliki Islam berkemajuan sebagai bentuk gagasan yang dilabelkan pada mereka, Muhammadiyah merupakan salah satu elemen penting dalam bingkai Islam Indonesia, hal ini disebabkan di Indonesia, sebagai ormas Muhammadiyah merupakan arus Islam yang utama dengan latar belakang *Sunni ahlus-sunnah wal Jama'ah* pengikut Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah mengeklaim memiliki 45-50 juta jiwa, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Haedar Nasir saat Muktamar Muhammadiyah di Makasar tahun 2015. Sementara itu NU mengeklaim memiliki anggota tak kurang lebih dari 75 juta bahkan lebih dari 100 juta jiwa.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern mengusung dakwah *Islam rahmatan lil'alamin,* selain itu Muhammadiyah juga mengusung jargon Islam berkemajuan, disinilah letak pentingnya Muhammadiyah di kancah pergulatan Indonesia. Muhammadiyah mengemban visi keislaman pada dimensi Islam moderat dan inklusif.

---

[21] Khabibi Muhammad Lutfi, Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal (*Jurnal Shahih,* Vol. 1, No. 1, 2016), 3.

Dalam kajian ini, lebih menekankan kontribusi Muhammadiyah pada umat, bangsa, dan negara, ini sebagai kontribusi kebangsaan dalam pencerahan umat. Sekalipun tidak membentuk partai politik atau berbentuk partai politik. Inilah yang dikatakan sering dikatakan sebagai politik kebangsaan Muhammadiyah, bahkan Buya Syafi'I Ma'arif menekankan kader Muhammadiyah merupakan kemanusiaan, kader bangsa, kader Islam, dan organisasi.

Dalam konteks yang demikian, sebagai organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah berpandangan bahwa umat Islam harus memiliki wawasan yang lebih baru dan maju dari pada wawasan Islam yang sebelumnya. Menurut Muhammadiyah kunci kemajuan dan kemakmuran adalah perbaikan pendidikan.[22] Dengan terciptanya kemajuan dalam bidang pendidikan tentu diharapkannya masyarakat Indonesia semakin memahami apa itu Islam, dan siap memperaktekan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Kesimpulan

Islam merupakan agama yang memberikan persatuan dan kesatuan, bahkan dalam Al-Qur'an juga ditekankan aspek untuk saling mengasihi dan memberikan persatuan antara satu dengan yang lain, sehingga dapat penulis katakana bahwa Islam merupakan agama yang lengkap dan kompleks dalam memberikan pemahaman bagi penganut dan luar penganutnya yang ingin belajar akan kesatuan dan persatuan, sebab Islam memiliki esensi nilai *universalisme* bagi semua golongan bagi yang ingin mengetahuinya.

Islam Indonesia sendiri merupakan Islam yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam di daerah yang lain sebab Islam Indonesia sendiri masih terpengaruh dengan tata aspek budaya dan watak sosiologis bangsa Indonesia. Yang apabila dilihat secara umum antara aspek satu bangsa yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga mereka memberikan totalitas penerapan aspek agama mereka juga berbeda. akan tetapi mereka memiliki sebuah titik temu

[22] Zuly Qodir, Islam Berkemajuan dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat (*Jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 13, No. 2, 2019), 211.

dalam Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits. Yang dengan itupula mereka dapat bersatu dalam aspek agama Islam.

BAB 12

ISLAM MENOLAK EKSKLUSIVISME SOSIAL

Tidak diragukan lagi, Islam dengan karakter totalitas yang mengatur berbagai aspek dan tatanan kehidupan umatnya, bersifat multi-dimensi atau *multi-facetted*. Karena itu, menekankan pada segi atau aspek tertentu Islam bisa salah paham terhadap Islam. di sini terlihat urgensi memahami Islam secara menyeluruh dan komprehensif, tidak sepotong-sepotong atau *ad hoc*. Sifat multi-dimensional Islam terlihat jelas dalam pemahaman praksis Islam. Islam memang lebih dari pada dua sumber pokoknya; al-Qur'an dan Sunnah. Kenyataan bahwa kedua sumber pokok ini memerlukan penafsiran, penjelasan, dan elaborasi rinci, memunculkan berbagai kompleksitas dan kerumitan di kalangan penganutnya.[1]

Pada era globalisasi dan modern ini, banyak masalah yang muncul beriringan dengan kebutuhan zaman. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari muncul berbagai perilaku yang berbeda dari sebelumnya seperti; individual, acuh, tidak mau tenggang rasa dengan tetangga dan orang yang membutuhkan, dan aneka perilaku yang tidak terpuji. Akan tetapi yang lebih parah dari semua itu ialah munculnya sikap eksklusivisme sosial, di mana menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan kebijakan-kebijakan serta perilaku masyarakat yang berbeda dari dirinya. Lambat laun disadari atau tidak bahwa perilaku eksklusivisme akan menjadikan krisis dalam individu yang bersangkutan sebab semua yang berbeda dikalangan umumnya dianggap salah.

---

[1] Azyumardi Azra, Islam Indonesia Inklusif VS Eksklusif : Dinamika Keberagaman Umat Muslim (*Makalah Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah:* Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), 1.

Manusia mengalami banyak krisis yang terjadi dalam masa-masa hidupnya, krisis itu menjadi objek perhatian manusia, dan sangat menakutkan. Betatapun bahagianya seseorang, harus diingat akan kemungkinan-kemungkinan krisis yang muncul dikemudian hari. Oleh sebab itu aspek Islam hadir sebagai antitesa krisis tersebut. Islam secara langsung memberikan dampak yang luar biasa sebab nilai Islam (*The Islamic of value*) muncul karena ada kesadaran jiwa dan dipadukan dengan jernihnya pemikiran.[2]

Selain itu sebagai manusia terkadang muncul momen-momen dalam kehidupan manusia dimana Tuhan begitu dekat, amat dekat sekali begitu rupa sehingga ia seperti merasakan kehadiran seorang sahabat, atau bahkan kekasih inilah momen puitis momen di mana Tuhan begitu dekat pada kita. Kita harus meyakini Tuhan maha melihat lagi maha mengetahui zaman ini memang memaksa kita mengeluarkan usaha diluar batas kita maka hendaklah berusaha dan berpasrah demi kebaikan dan hilangnya nilai eksklusivitas itu.[3]

Teologi eksklusivisme hanya cocok dalam masyarkat yang homogeny. Jika kita hidup dalam komunitas yang semuanya menganut keyakinan yang sama, pandangan eksklusivisme baik dalam ranah agama ataupun sosial tidak masalah dan sah-sah saja sebab masih memiliki 1 kesamaan baik dalam aspek sosial ataupun agam. Akan tetapi apabila hidup dalam msyarakat yang plural (majemuk) baik dari aspek agama dan sosial tentu hal ini yang akan jadi permasalahan sebab banyak memiliki perbedaan dan dituntut untuk saling menghargai serta menghormati. Keadaan eksklusivisme ini juga mengancam sendi-sendi kemajemukan itu sendiri dengan demikian kenyataan keberagaman sebagai kehendak Ilahi (sunnatullah) menuntut kita untuk meninggalkan keberagaman dan eksklusivisme.

Pelanggaran sunnatullah yang paling nampak ialah upaya sebagian kalangan untuk meninggalkan keragaman dan mengingkari perbedaan. Alasan penolakan perbedaan ini biasanya dibungkus dengan berbagai alasan baik segi ilmiah, maupun non-ilmiah semisal mereka

---

[2] Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 46.

[3] Ulil Abshar Abdalla, *Jika Tuhan Mahakuasa, Kenapa Manusia Menderita? Memahami Akidah Islam Bersama Al-Ghazali* (Yogyakarta: Buku Mojok, 2020), 54.

beranggapan dan menjustifikasi perbedaan ialah gangguan. Bahkan melayangkan ancaman baik fisik maupun psikis. Oleh sebab itu, diperlukan rekonseptualisasi sudut pandang dalam melihat "dirinya" (*self conceptions*) dan "yang lain". kedua hal tersebut saling terkait: melihat "dirinya" dalam kaitan dengan "yang lain" dan melihat "yang lain"dalam sinaran "dirinya". Dan mungkin hanya terjadi apabila memiliki minat mempelajari dan berinteraksi dengan "yang lain". Tentu saja kejadian yang demikian tidak mengagetkan, dalam berbagai survei ditemukan bahwa mereka yang kurang menerima keterbukaan khususnya dalam ranah sosial dan beragama umumnya kurang mengerti makna sosial dan agama dan mereka kurang melakukan interaksi dengan kalangan yang berbeda (plural) baik dalam sisi sosial dan agama.[4]

Islam adalah agama kemanusiaan. "Siapa yang membunuh satu jiwa, ia seumpama membunuh seluruh manusia itu sendiri". Inilah makna kesatuan kemanusiaan Islam (al-Ma'idah:32). Menurut al-Qur'an pendusta agama adalah mereka yang tidak mengembangkan dan memberdayakan. Masih menurut al-Qur'an misi risalah Islam adalah pemberdayaan; mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, mengatasi himpitan hidup, dan melepaskan belenggu-belenggu yang memberangus orang-orang. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan manusia-manusia yang tercerahkan (*muthahhar*) yang siap mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk perbaikan umat. Jelas dari penjelasan singkat di atas Islam melarang akan eksklusivisme dalam masyarakat sebab akan merusak persatuan yang ada, serta menimbulkan konflik antara sesama masyarakat yang ada.

Orang-orang yang tercerahkan akan menjadi lokomotif dari upaya memberdayakan dan memperkuat posisi masyarakat yang tengah ditimpa berbagai lara, tapa, dan derita. Merekalah penolong-penolong sosial yang kehadirannya diharapkan membawa perubahan yang segar bagi masyarakat yang dilanda kebodohan, kemelaratan, kejahatan, ketakhayulan, dan kebobrokan.[5] Eksklusivisme sosial lahir

[4] Mun'im Sirry, *Islam Revisionis Kontestasi Agana Zaman Radikal* (Yogyakarta: Suka Press, 2018), 270.

[5] Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 71.

dengan semakin menghegemoninya globalisasi, sedangkan proses globalisasi dewasa ini menurut Kavalijt Singh ditandai dengan lima perkembangan pokok; *Pertama,* pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat; *Kedua,* pertumbuhan perdagangan yang cepat khususnya perusahaan-perusahaan multinasional; *Ketiga,* gelombang investasi asing langsung (FDI) yang mendapatkan dukungan luas dari kalangan internasional; *Keempat,* timbulnya pasar global; dan *Kelima,* penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran sebagai akibat ekspansis sitem transportasi komunikasi yang cepat. Dalam sistem kapitaliasme, globalisasi adalah sebuah keniscayaan dan memaksa perubahan-perubahan dalam sendi-sendi kehidupan sehingga memunculkan budaya baru salah satunya eksklusivisme sosial.

Oleh sebab itu ada baiknya kita mempelajari watak dan perilaku agar tidak terjerungus dalam eksklusivisme sosial disamping memperkokoh iman dan *ikhsan.* Dalam kajian sosiologi ada pembahasan mengenai behaviorisme dan kajian interaksionisme simbolik sebagaimana namanya 2 kajian ini mempelajari tingkah laku manusia secara objektif dari luar sebagai bentuk rangsangan dari luar, dan melihat suatu perbedaan kualitatif antara keduanya. Perbedaan yang jelas adalah mengenai penggunaan bahasa serta kemampuan belajar yang tidak dimiliki oleh binatang. Akan tetapi perlu diketahui pula bahwa dalam sejarah pendiriannya sudah terjadi antagonisme antara interaksionisme simbolik dan behaviorisme. Interaksionisme simbolik beranggapan bahwa behaviorisme menilai perilaku manusia semata-mata merupakan tanggapan terhadap rangsangan dari luar dirinya.[6]

Manusia harus mengetahui prioritas dalam hidupnya. Mana yang harus didahulukan, dan mana yang harus dikemudiankan; mana yang akan memperkaya kehidupan batin dan akhiratnya; mana yang akan mengeruhkannya; mana yang membuatnya ingat tujuan utama kehidupan, dan mana yang justru membuatnya lalai. Paham akan prioritas adalah tanda awasnya mata batin kita, tidak buta. Orang yang tidak tahu akan tujuan hidup dia tidak akan bisa membedakan antara yang baik dan buruk serta bermuara pada kondisi yang lalai. Serupa

[6] Imam Bonjol Jauhari, *Teori Sosial Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press, 2012), 60.

eksklusivisme sosial ialah bentuk kelalaian dalam hidup di mana kita buta akan sekeliling kita buta akan perbedaan, dan apa itu kasih sayang sesama manusia sehingga akan menjadikan kita manusia yang serba salah baik dalam ranah integral (sesama manusia) dan horizontal (kepada pencipta yang agung).[7]

Islam adalah agama yang menebar kasih sayang, kemudian perlu diketahui pula bahwa kasih sayang Islam merupakan rahmad yang mencakup segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, kamaslahatan dan kebahagiaan dalam hidup segala perilaku baik yang memiliki efek positif bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan juga bagi orang lain, itu termasuk kategori ini. Sikap perhatian dan empati terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan menghindarkan diri dari perilaku lalim terhadap orang lain adalah contoh-contoh sikap kasih sayang yang sangat dianjurkan dalam Islam. secara umum, Rasulullah SAW pernah bersabda; "*Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang itu disayangi oleh Allah Yang Mahakasih. Sayangilah penduduk bumi ini, maka kalian akan disayang oleh mereka dari langit*". Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda; "Tidaklah kalian masuk surga kecuali kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman (secara sempurna) kecuali kalian saling menyayangi (H.R. Muslim).

Dari hadis dan secuplik penjelasan di atas nampak jelas bahwa Islam melarang akan eksklusivisme sosial. Sebab eksklusivisme merupakan penyakit yang merusak persatuan dan kesatuan,[8] bahkan akhir-akhir ini pascareformasi eksklusivisme sosial juga sering digaungkan lewat media-media baik online maupun cetak. Onlie seperti FB, IG, telegram, berita-berita website, dan aneka media mainstream online lainnya. Media cetak meliputi; harian, mingguan, bulanan, majalah, *newsletter,* tabloid, dan lain-lain. Sungguh sangat disayangkan bahwa bangsa yang merdeka ini dapat rusak dan hancur karena eksklusivisme sosial.

[7] Ulil Abshar Abdalla, *Menjadi Manusia Rohani* (Bekasi: Alifbook & el-Bukhori Institute, 2019), 33.

[8] Sahiron Syamsuddin, *Al-Qur'an dan Pembinaan Karakter Umat* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Pustaka dan Baitul Hikmah Press, 2020), 21.

Apabila dikaji secara mendalam pada asalnya problem yang paling besar dalam masyarakat pada umumnya ada 2; 1. *State of nature,* 2. Dan individualitas bukan negara atau kekuasaan-kekuasaan yang terlembaga akan tetapi masyarakat yang warga yang pertama-tama adalah keluarga, lalu menjadi komunitas warga, meningkat menjadi masyarakat politik, dan berujung pada terbentuknya institusi formal negara. Masyarakat warga atau *political society* dibentuk dengan tujuan yang spesifik: menjamin hak dan milik pribadi dan melakukan penertiban sosial dengan mejatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan. Kemudian individualisme hal ini tak lepas di era-era milenial ini baik di kota maupun di desa, penyakit sosial ini sudah menjalar kemana-mana. Memang pada awalnya mereka tidak peduli akan lingkungan dan masyarakat sekitar mereka. Adakalanya pula penyakit ini muncul sebab mereka paling benar sendiri jadi mereka tidak memedulikan masukan dan respek lingkungan sekitar. Penting dan perlu untuk direnungkan sebab ini masalah yang global.[9]

Teori-teori sosiologis dapat menjelaskan beberapa aspek peran agama dalam masyarakat yang plural (beragam) yang relevan dalam kondisi-kondisi sosial khusus pula. Lebih dari itu, secara komparatif pluralisme agama dipahami dan diterapkan secara berbeda-beda dalam perjalanan negara-negara dan bangsa modern ini. Artinya bahwa peran agama dalam masyarakat begitu besar sehingga dalam mengikis ekslusivisme sosial juga penting sebab semakin sering mempelajari kajian dan penerapan yang berbeda dalam lingkup masyarakat. Agama memang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial bernegara, negara Pancasila sebagai *hybrid* budaya adalah jalan tengah (*middle path*) antara negara agama dan negara sekular, negara Pancasila lebih cocok dengan tradisi agama dan politik di Indonesia.

Rumusan sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 ayat 1 memberikan sifat yang khas pada negara Indonesia bukan negara sekular yang memisahkan agama, negara dan bukan negara agama yang berdasarkan pada atas agama tertentu. Dengan Pancasila Indonesia menganut model *generally religious policy,* di mana negara dibimbing

[9] Agus Sudibyo, Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Vol. 14, No. 1, 2010), 27.

agama secara umum dan substantifistik serta tidak ada institusional yang berkaitan dengan tradisi keagamaan tertentu. Dalam negara Pancasila agama dapat menyediakan basis moral dan spiritual dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sendiri menghendaki bahwa agama juga turut andil dalam berbagai ranah dapat dikatakan bahwa perilaku eksklusivisme sosial merupakan perilaku yang bertentangan dengan agama dan Pancasila.[10]

Saat ini, umat manusia memasuki era yang terus berubah dengan kecepatan yang menakjubkan. Inilah melenium baru yang disebut dengan era teknologi, era *chips*, era komputer, era kompetisi, era persaingan SDM (sumber daya Manusia), era menejemen, era perubahan paradigma kehidupan. Paradigma kehidupan sosial yang terus bergeser diperparah dengan masuknya positivistik yang menghegemoni sehingga menciptakan peradaban yang baru yang memberikan dampak *cultural shock* keterkejutan budaya. Perubahan masyaraka memiliki arti yang luas, baik dalam arti positif maupun negatif, salah satu adagium yang amat popler di kalangan ilmuwan sosial menyebutkan segala sesuatu akan mengalami perubahan. Perubahan tidak akan pernah berhenti Allah SWT telah menakdirkan bahwa sesuatu pasti akan berubah tanpa dibatasi ruang dan waktu akan tetapi manusialah yang menentukan arah perubahan itu mau di bawa kearah yang positif atau negatif.

Perubahan juga terjadi sebab manusia memiliki sifat yang tidak statis dalam sebuah kondisi. Ia cenderung merespon sejumlah kejadian yang ada di sekelilingnya, respon inilah yang membuat hidup manusia selalu dinamis dan pada akhirnya menciptakan sejumlah gagasan dan ide-ide baru dalam rangka memenuhi harapan serta kebutuhannya. Dengan kondisi teresebut, suasana bumi semakin hari semakin penuh dinamika. Eksklusivisme sosial juga terjadi akibat kondisi frustasi akan ketidakjelasan dari berbagai aspek kehidupan sehingga memaksa memunculkan respon dari permasalahan yang ada. Eksklusivisme sosial kontemporer secara historis muncul pada abad ke 21 perubahan ini didukung dengan kemajuan teknologi, dan lunturnya budaya

[10] Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Kompas, 2003), 57.

yang toleran. Penulis melihat bahwa disadari maupun tidak budaya eksklusivisme tercipta secara berevolusi (perlahan-lahan) dan tidak disadari tentunya lambat laun manusia banyak yang mengadopsinya. Akan tetapi sebaik-baik manusia ialah yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Serta dapat mengukur kemaslakhatannya baik bagi dirinya maupun umum.[11]

Kesimpulan

Eksklusivisme sosial muncul secara evolusi, dan tidak disadari akan tetapi dampaknya terjadi disegala aspek kehidupan. Islam dan Negara melarang akan eksklusivisme sosial sebab akan menimbulkan bahaya yang besar bahkan perpecahan bangsa yang tidak dapat dihindarkan. Perlunya menanamkan nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai benteng penyanggan umat dan bangsa, bila hal ini tidak segera dilakukan dapat dipastikan agama dan Pancasila hanya tinggal slogan yang jauh dari realisasi. Sebagai seorang makluk sosial dan menganut agama hendakla membuka diri dan menerima perbedaan akan perbedaan yang terjadi sebab perbedaan ialah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan manusia merupakan makhluk yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya sehingga harus *mawas diri* dan sadar akan kebersamaan sehingga dapat saling tolong menolong guna memberikan kemanfaatan bersama.

Pentingnya melakukan klarifikasi dan penyaringan akan budaya yang berasal dari luar. Sebab belum tentu budaya yang dari luar sesuai dengan agama dan nilai-nilai Pancasila, perubahan juga terjadi dengan didukungnya revolusi teknologi sehingga menciptakan disrupsi sosial baik dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Penting untuk dipelajari bahwa hal ini akan banyak memberikan perubahan di mana masyarakat yang awalnya tidak tahu dan kemudian mereka dipaksa untuk tahu dengan hadirnya perubahan-perubahan yang ada. Perubahan ialah *sunnatullah* ketetapan Allah SWT akan tetapi manusia memiliki kehendak untuk mengarahkan kemana perubahan tersebut baik ke arah yang baik atau buruk.

---

[11] Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 48.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla, Ulil Abshar. 2019. *Menjadi Manusia Rohani Meditasi-Meditasi Ibnu Atha'illah dalam Kitab al-Hikam*, Bekasi: Alifbook dan el-Bukhori Institute.

______. 2020. *Jika Tuhan Mahakuasa, Kenapa Manusia Menderita? Memahami Akidah Islam Bersama Al-Ghazali*, Yogyakarta: Buku Mojok.

Abdullah, Mohd Ubaidah bin. 2011. "Pemikiran Tun Abdullah Ahmad Badawi Tentang Islam Hadhari", Riau: *Skripsi UIN Suska*.

Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Al Fiqhiyah Isu-isu Fikih Kontemporer.* Yogyakarta: Teras.

Abdullah, Othman bin. 2002. "Islam And Democracy: Reflecting The Role Of Islam In Malaysia And Indonesia", California: *Tesis California. Naval Postgraduate School Monterey*.

Aizid, Rizem. 2015. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik Pertengahan, dan Modern.* Yogyakarta: Diva Press.

Ali, Muhammad. 2003. *Teologi Pluralis, Multikulturalis Menghargai Kemajemukan, menjalin Kebersamaan*, Jakarta: Kompas.

al-Mushlih, Khalid bin Abdullah *Syarkh al-Aqidah al-Wasithiyah,* terj Abdullah, Jakarta: Pustaka Imam Bonjol.

Al Qur'an. 2017. Surat Ali Imran 159 dan Asy-Syura 38. Bandung : Cordoba.

Alu Syaikh, 'Abdullah bin Muhammad. 2008. *Tafsir Ibnu Katisir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.

Amin, A Miftahul. 2017. Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia In Right,* Vol. 7, No. 1.

Anggraini, Ranti Tri, dan Fauzan Heru Santhoso. 2017. Hubungan antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja. *Jurnal Gadjah Mada Journal Pschology,* Vol. 3, No. 3.

Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa politik,* Jakarta: LP3ES.

Ardiansyah, Muhammad. 2020. *Catatan Pendidikan Refleksi Tentang Nilai-Nilai Adab dan Budaya Ilmu Dalam Islam* (Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa Depok.

Arif, Syaiful. 2016. Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila, *Jurnal Keamanan Nasional,* Vol. 11, No. 1.

Azca, Muhammad Najib, Hairus Salim, Moh Zaki Arobbi, Budi Asyhari, dan Ali Usman. 2019. *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Perdamaian dan Demokrasi,* Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.

Aziz, Abdul. 2013. *Pandangan Pemuka Agama Tentang Eksklusifisme Beragama Di Indonesia,* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.

Azra, Azyumardi. 2017. Islam Indonesia Inklusif VS Eksklusif : Dinamika Keberagaman Umat Muslim, *Makalah Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah:* Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.

______. 1996. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina.

Az-Zarnuji, Burhan. 1425/2004. *Ta'lim al-Mutaalim Thorikotu al-Ta'alam*, Sudan Khartoum: Dar Sudaniyah al-Kitab.

Baried, Siti Baroroh, dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi.* Yogyakarta: BPPF Seksi Filologi, Fakultas Sastra UGM.

Baso, Ahmad. 2006. *NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga.

Bashir, Mohammed Sharif. 2005. Islam Hadhari: Concept and Prospect, *Article*: January.

Basri, Muinudinillah. 2015. Hukum Demokrasi Dalam Islam. *Jurnal Suhuf*, Vol. 27, No. 1.

Buchori, Mochtar. 2009. *Evolusi Pendidikan di Indonesia Dari Kweekschool Sampai ke IKIP.* Yogyakarta: INSIST Press.

Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS.

Conant, James Bryant. 1958. *Germany and Freedom A Personal Appraisal,* Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Daud, Wan Mohd Nor Wan. 2013, *Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer dan peran Universitas Islam Dalam Konteks Dewesternisasi dan Dekolonisasi,* Bogor: Universitas Ibnu Khaldun Bogor & Center for advanced Studies on Islam, Science and Civilization-Universitas Teknologi Malaysia (CASIS-UTM).

Daulay, Hamdan. 2013. Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia (Dari wacana Syari'at Islam Hingga Konsep Islam Hadhari). Asy-Syir'ah, *Jurnal Ilmu Sari'ah dan Hukum*. Vol 47.No. 1.

Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren.* Jakarta: LP3ES.

Dja'far, Alamsyah M. 2018. (*In) Toleransi Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: PT Media Elex Komputindo.

Djoeffan, Sri Hidayati. 2014. Revitalisasi pendidikan Sebagai Paradigma Peningkatan Kualitas Bangsa, *Jurnal Mimbar,* Vol. XX, No. 2.

Enginer, Asghar Ali. 2009. *Islam dan Teologi Pembebasan* terj Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Esposito, Jhon.L. 1985. *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang,* Yogyakarta: PLP2M.

Fauzi, Ahmad, Abdul Hamid, dan Che Hamdan Che Mohd. Razali. 2015. *"The Changing Face of Political Islam in Malaysia in Era of Najib Razak, 2009-2013"*, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*. Vol. 30, No. 2.

Fuadi, Nurul. 2009. Konsep Etika Sosial Dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: *Disertasi UIN Sunan Kalijaga Ilmu Agama Islam*.

Ghufron, Fathorrahman. 2016. *Ekspresi Keberagaman di Era Milenium Kemanusiaan, Keragaman, dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Gunawan, Siswanto, Ali Hasan. 2016. *Islam Nusantara dan Kepesantrenan.* Yogyakarta: InterPena.

Hadiz, Vedi R. 2019. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah,* Jakarta: LP3ES.

Haidar, M Ali. 1994. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hakiki, Muhammad Kiki. 2016. Islam dan Demokrasi Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indinesia, *Jurnal Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya,* Vol. 1, No. 1.

Halim, Amanullah. 2015. *Buku Putih Kaum Jihadis Menangkal Fenomena Ekstremesme dan Fenomena Pengkafiran,* Tangerang: Lentera Hati

Hamid, Abdul, dan Ahmad Fauzi. 2010."Politically Engaged Muslims In Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009)", .*Asian Journal of Political Science*. Vol.18, No. 2.

Harkantiningsih, Naniek. 2014. Pengaruh Kolonial di Nusantara, *Jurnal Kalpatru, Majalah Arkeologi,* Vol. 23, No.1.

Hasan, Noorhaidi. 2008. *Laskar Jihad Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3ES dan KITLV- Jakarta.

Hashemi, Nader. 2009. *Islam, Secularism, and Liberal Democracy,* New York: Oxford University Press.

Hamka. 1982. *Tafsir Al Azhar Juz XXV-XXVI*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hariantati, Runi. 2003. Etika Politik Dalam Demokrasi. *Jurnal Demokrasi,* Vol. 2, No. 1.

Helmiati. 2014. *Sejarah Islam Asia Tenggara.*Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Syarif Kasim.

______. 2007.*Islam dalam Masyarakat dan Politik Malaysia* . Riau: Suska Press UIN Suska Riau.

Hosen, Nadirsyah. 2018. *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah Jilid 1*, Yogyakarta: Suka Press.

______. 2018. *Islam Yes, Khilafah No! Dinasti Abbasiyah, Tragedi, dan munculnya Khawarij Zaman Now Jilid II*, Yogyakarta: Suka Press.

Husaini, Adian. 2009. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009*, Jakarta: Gema Insani.

______. dan bambang Galih Setiawan. 2020. *Pemikiran & Perjuangan M. Natsir, & Hamka Dalam Pendidikan*, Jakarta: Gema Insani.

______. 2016. *10 Kuliah Agama Islam,* Yogyakarta: Pro-U Media.

______. 2005. *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal*, Jakarta: Gema Insani.

Hilmy, Masdar. 2016. *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah,* Malang: Intrans Publishing.

______. 2017. *Jalan Demokrasi Kita Etika, Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik*, Malang: Intrans Publishing.

Ibrahim, Farid Wajdi. 2018. *Khilafah Sorotan dan Dukungan Kajian dan Pandangan Ali Abdul Raziq,* Yogyakarta: Istana Agency.

Ismail, Faisal. 2019. *Islam Konstitusionalisme Dan Pluralisme.* Yogyakarta: IRCiSoD.

Ismail, Muhammad Fawwaz Hadi bin. 2010. Parlemen Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Relevansinya Dengan Doktrin Ketatanegaraan Islam. Jakarta: *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.

Jauhar, Najid. 2007. Demokrasi, HAM Sebuah Benturan Filosofis Dan Teologis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 11, No. 1.

Jauhari, Imam Bonjol. 2012. *Teori Sosial Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press.

______. 2014. *Sosiologi Untuk Perguruan Tinggi,* Jember: STAIN Press.

Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme dan Antikorupsi*, Jakarta: Kencana.

Kasanah, Nur. 2019. Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian nahdliyin (Studi Tentang Gerakan Koin NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen), Ponorogo: *Tesis Program Studi Ekonomi Syari'ah,* IAIN Ponorogo.

Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. 2018. *Demokrasi & Budaya Birokrasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.

______. 2018. *Identitas Politik Umat Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD.

Latief, Hilman. 2017. *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Latif, Nazaruddin. 2011. Dinamika Politik Muhammadiyah, *Jurnal Tajdida,* Vol. 9, No. 1.

Liow, Joseph Chinyong. 2009. *Piety and Politics Islamism in Contemporary Malaysia*, New York: Oxford University Press.

Lutfi, Khabibi Muhammad. 2016. Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal. *Jurnal Shahih,* Vol. 1, No. 1.

Madjid, Nurcholish. 2011. "Kosmopolitanisme Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban", dalam *Agama & Dialog Antar Peradaban,* ed. Nurcholish Madjid, dkk. Jakarta: PT Dian Rakyat.

______. 2010. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: PT Dian Rakyat.

Mahmudi, Idris. 2018."Kyai Dan Ancaman Hegemoni." *Buletin, At-tajdid*. 51:1-4.

Mali, Mateus. 2011. Revitalisasi Etika Sosial-Politik Dalam Hidup Berdemokrasi. Jurnal *Orientasi Baru,* Vol. 20, No. 1.

Malik, Moh Syauqi. 2020. "Pendidikan Ideal Abad 21 Solusi Problematika Pendidikan di Era Disrupsi", dalam Faiq Ilham Rosyadi, dkk, *Pendidikan Di Era Disrupsi*, Yogyakarta: Timur Barat.

Makin, Al. 2017. *Plurality Religiousity And Patriotism Crictical Insight Into Indonesia and Islam*, Yogyakarta: Suka Press, dan Globethics.net.

______. 2019. *Membela Yang Lemah, Demi Bangsa Dan Ilmu Keragaman,* Minoritas*, Khilafah, Kapitalisme Agama, dan Madzhab Yogya*, Yogyakarta: Suka Press.

______. 2017. *Keragaman dan Perbedaan Budaya dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia.* Yogyakarta: Suka Press.

Manulang, E Fernando M. 2010. Nicollo Machiavelli: Sang Belis Politik? Suatu Refleksi dan Kritik Filosofis terhadap Gagasan Politik Machiaveli Dalam *Il Principe*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Tahun ke- 40, No. 4.

Mansur, H.A.R. Sutan. 1982. *Jihad*, Jakarta: Panji Masyarakat.

Marina, Anna. 2012. Meningkatkan Kinerja Berbasis Nilai-nilai Ekonomi Pada Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan, *Jurnal Salam Studi Masyarakat Islam,* Vol. 15, No. 2.

Masrukhin, Muhammad Yunus. 2020. *Menjadi Muslim Moderat Teologi Asy'ariah di Era Kontemporer*, Banten: Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar.

Mawardi, Imam. 2011. Transinternalisasi Budaya Pendidikan Islam: Membangun Nilai Etika Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Hunafa: Studi Islamika,* Vol. 8, No. 1

Mide, Sabri. 2014. Ummatan Wasatan Dalam Al-Qur'an. Makassar: *Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin.*

Mubaraq, Zulfi. 2010. *Sosiologi Agama*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Munirah. 2015. Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita, *Jurnal Alaudina,* Vol. 2, No. 2.

Muttaqin, Fajruddin, dan Wahyu Iryana. 2015. *Sejarah Pergerakan Nasional. Bandung*: Humaniora.

Moedjanto, G. 1992. *Indonesia Abad Ke 20 Jilid 1 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati.* Yogyakarta: Kanisius.

MS, Abu Bakar. 2016. Argumen Al-Qur'an Tentang Eksklusivisme, Inklusivisme, dan Pluralisme. *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama,* Vol. 8, No. 1.

Mulia, Musdah. 2010. *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi.* Yogyakarta: Naufan Pustaka.

Muzani, Saiful. 1993. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.

Nashir, Haedar. 2017. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Nata, Abuddin. 2016. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Kencana

Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.

Novianti, Ira, Umi Chotimah, dan Emil Faisal. 2016. Pemerolehan Nilai-Nilai Tanggung Jawab Siswa Kelas XI Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Gelumbang), *Jurnal Bhineka Tunggal Ika,* Vol. 3, No.1.

Nursi, Said. 2016. *Risalah lkhlas & Ukhuwah,* Banten: Risalah Nur Press.

______. 2018. *Tuntunan Generasi Muda.* Banten, Risalah Nur Press.

Nusa, Rany Apriani. 2018. Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam Studi Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Yogyakarta: *Skripsi, Universitas Islam Indonesia.*

Pachoer, Rd. Datoek A. 2016. Sekularisasi dan Sekularisme Agama, *Jurnal Agama dan Lintas Budaya,* Vol. 1, No. 1.

Parmudi, Mochhammad. 2014. *Islam dan Demokrasi di Indonesia (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam,* Laporan Hasil Penelitian Individual. Semarang: UIN Wali Songo.

Penulis HTI, Tim. *Khilafah ajaran Islam, mengapa dikriminalkan?*, AL ISLAM HIZBUT TAHRIR INDONESIA Melanjutkan kehidupan Islam, (Edisi 856, 12 Mei 2017, 15 Sya'ban 1438 H).

Poesponegoro, Marwati Djoened, Notosusanto, Nugroho. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia V.* Jakarta: Balai Pustaka.

Qodir, Zuly. 2019. Islam Berkemajuan dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat, *Jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 13, No. 2.

Rahayu, Ratri. 2016. Peningkatan Karakter Tanggung Jawab Siswa SD Melalui Penilaian Produk Pembelajaran *Mind Mapping*, *Jurnal Konseling Gusjigang,* Vol. 2, No.1.

Rais, Amin. 1991. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan.

______. 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!.* Yogyakarta: PPSK Press.

______. 1997. *Demi Kepentingan Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ricklefs, M.C.. 2017. *Sejarah Indonesia Modern.*Yogyakarta: UGM Press.

Rifa'I, Muhammad. 2017. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern.* Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.

Safruddin, Ahmad. 2008. Demokrasi Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Khaled Abou El Fadl. Yogyakarta: *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga.

Safei, Agus Ahmad. 2017. *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid,* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Sahiron Syamsuddin. 2020. *Al-Qur'an Dan Pembinaan Karakter Umat,* Yogyakarta: Ladang Kata dan Baitul Himah.

Saidurrahman, dan Akmal Tarigan. 2019. *Rekonstruksi Peradaban Islam Prespektif Prof.K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.*, Jakarta: Kencana.

Samudra, Imam. 2004. *Aku Melawan Teroris.* Solo: Jazera.

Saputra, Sandi, Ririn Dewi Lestari, dkk. 2017. Analisis Karakter Remaja Gaul Pada Hedonisme *Vlog. Jurnal Mediaps,* Vol. 3, No. 1.

Septialana, Chairul Wahid. 2020. "Pendidikan Sikap Mengendalikan Teknologi Modern", dalam Faiq Ilham Rosyadi, dkk, *Pendidikan Di Era Disrupsi*, Yogyakarta: Timur Barat.

Sirry, Mun'im. 2018. *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal*, Yogyakarta: Suka Press.

Siradj, Said Aqil, dan Mamang Muhammad Haeruddin. 2015. *Berkah Islam Indonesia Jalan Dakwah Rahmatan Lil'alamin*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata negara ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Siswanto. 2017. Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1.

Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Subarkah, Milna Abdillah. 2017. Muhammadiyah Amal Usaha Di Bidang Pendidikan, *Jurnal Rausyan Fikr,* Vol. 13, No. 2.

Sudibyo, Agus. 2010. Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Vol. 14, No. 1.

Sudrajat, Ajat. 2017. *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat,* Malang: Intrans Publishing.

Suhadi. 2018. "Menu Bacaan Pendidikan Agama Islam Di SMA dan Perguruan Tinggi", dalam Noorhaidi Hasan, Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.

Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryadi, Rohmad. 2009. Tindakan Golput Aktivis Gerakan Islam di Kota Surakarta. Surakarta: *Skripsi,* Universitas Sebelas Maret.

Susanto, Heri. 2016. Kolonialisme dan Identitas Kebangsaan Negara-Negara Asia Tenggara, *Jurnal Sejarah dan Budaya,* Tahun Kesepuluh, No.2 Desember.

Syafe'I, Imam. 2017. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, *Jurnal Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 8, No. 1.

Syam, Nur. 2018. *Menjaga Harmoni Menuai Damai Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana.

______. 2018. *Demi, Agama, Nusa, dan Bangsa Memaknai Agama, Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan.* Jakarta: Kencana.

Syaefullah, Asep. 2007. *Merukunkan Umat Bergama Studi Pemikiran Tarmizi Taher tentang Studi Kerukunan Umat Beragama.* Jakarta: PT Grafindo Khazanah Ilmu.

Umar, Nasaruddin. 2019. *Geliat Islam Di Negeri Non-Muslim Sebuah Catatan Perjalanan*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet.

Widagdo, Yudi. 2015. Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno, *Jurnal Diversi,* Vol. 1, No. 1.

Yahya, Harun. 2003. *Nilai-Nilai Moral Al-Qur'an terj Ummu Azizah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Yakin, Ayang Utriza. 2016. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad,* Jakarta: Kencana.

Yuristiadi, Ghifari. 2015. Aktivisme Hoofdbestuur Muhammadiyah Bangunan PKO di Yogyakarta Sebagai Representasi Gerakan Pelayanan Sosial Masyarakat Sipil (1920-1931), *Jurnal Afkaruna,* Vol. 11, No. 2.

Zubaidi, Achmad Kaelan. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Website

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44055446 diakses pada 19 September 2018.

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180620144023106307495/mahath ir-sebut-najib-razak-dapat-dijerat-tuntutan-berlapis diakses pada 19 September 2018.

http://m.muhammadiyah.or.id/en/content-8-det-amal-usaha.html diakses pada 06 Januari 2020.

www.kptg.gov.my diakses pada 06 September 2018.

https://www.nu.or.id/post/read/06419/aksi-kemanusiaan-lpbi-nu-untuk-rohingya- di-aceh diakses pada 07 Januari 2020.

https://www.nu.or.id/post/read/111032/ketua-lpbnu-paparkan-kiprah-nu-dalam-aksi-kemanusiaan-di-munas-tokoh-antaragama diakses pada 07 Januari 2020.

https://www.nu.or.id/post/read/44005/kader-nu-dibekali-pendidikan-politik-dan wawasan-kebangsaan diakses pada 10 Januari 2020.

https://nucare.id//project/nu-peduli-banjir diakses pada 08 Januari 2020.

https://umexpert.um.edu.my diakses pada 08 September 2018.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Tordesillas diakses pada 27 Mei 2020.

Raudhatul, Safira. https://www.haibunda.com/moms-life/20181109193457-68-27956/pelajaran-untuk-ortu-dari-kasus-remaja-mabuk-air-rebusan- pembalut diakses pada 31 Mei 2020.

TENTANG PENULIS

Luqman Al Hakim adalah mahasiswa SPI IAIN Jember angkatan 2016. Ia lahir di Nimboran, 25 September 1998, menempuh pendidikan di MI Nurul Hidayah, melanjutkan ke MTs Negeri Nimboran, selepas MTs Negeri Nimboran ia menempuh sekolah di MAN Rejoso Peterongan kini menjadi MAN 2 Jombang sekaligus belajar agama di Ponpes Darul 'Ulum. Semasa SMA dia pernah menjadi reporter majalah Cakrawala MAN Rejoso 1 tahun, kemudian selama kuliah di IAIN Jember ia mengikuti penguatan kelas *research* 3 tahun, sehingga menjadikannya menyukai kegiatan tulis menulis